LAPORAN KHATULISTIWA **2016**

Kajian Fiskal Regional Gabungan

"Optimalisasi Kinerja Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Antarregional"

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN KHATULISTIWA **2016**

Kajian Fiskal Regional Gabungan

Optimalisasi Kinerja Fiskal Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Antarregional

KATA PENGANTAR
Direktur Jenderal Perbendaharaan

“ Laporan Khatulistiwa merupakan gabungan dari Kajian Fiskal Regional yang disusun oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mengulas mengenai dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan masyakarat.

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan di daerah patut menjadi perhatian dan perlu dituangkan dalam Kajian Fiskal Regional. Hal tersebut selaras dan didukung dengan keberadaan kantor unit vertikal Ditjen Perbendaharaan yang tersebar di wilayah Indonesia sehingga memberikan kemudahan untuk memotret perkembangan ekonomi daerah dan capaian kesejahteraan masyarakat dikaitkan dengan kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Kajian Fiskal Regional Tahun 2016 yang telah disusun oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu dikonsolidasikan kedalam sebuah Laporan Khatulistiwa Tahun 2016. Dengan demikian, tujuan penyusunan Laporan Khatulistiwa Tahun 2016 ini adalah untuk memberikan informasi tentang keterkaitan kebijakan fiskal dengan perekonomian regional dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tema yang diangkat, yaitu “Optimalisasi Kinerja Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Antarregional”. Laporan Khatulistiwa Tahun 2016 disusun berdasarkan kelompok regional yaitu regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusra, dan Maluku Papua, dengan pertimbangan bahwa masing-masing kelompok regional tersebut relatif memiliki karakteristik yang hampir sama ditinjau dari sisi ekonomi, sumber daya alam, dan geografis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas atas kebijakan fiskal pemerintah yang telah dilaksanakan turut mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan regional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 dan meningkatnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia.

.

Namun demikian, disadari bahwa dengan bentang luas wilayah Indonesia, kebijakan fiskal pemerintah perlu dilaksanakan lebih efektif khususnya pada regional Maluku Papua yang masih memiliki indikator kesejahteraan yang relatif rendah dibandingkan dengan regional yang lain. Pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan dalam rangka memberikan kemudahan akses layanan kesehatan dan pendidikan serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, asistensi terhadap pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara lebih intensif guna mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi pariwisata yang masih terpendam di regional Maluku Papua perlu dikembangkan dengan profesional melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM untuk menunjang pengembangan potensi pariwisata perlu dilakukan dengan intens.

Secara singkat, gambaran kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masing-masing regional diulas relatif komprehensif dengan menggunakan analisis deskriptif dalam Laporan Khatulistiwa Tahun 2016. Dengan demikian, Laporan Khatulistiwa Tahun 2016 diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian perkembangan ekonomi dan fiskal yang bersifat regional. Namun demikian, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Khatulistiwa Tahun 2016 masih terdapat kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan yang kami hadapi. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan Laporan Khatulistiwa ini.

Akhirnya, kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Khatulistiwa ini. Kami berharap Laporan Khatulistiwa ini dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian nasional dan regional serta khususnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, Juni 2017

Marwanto Harjowiryono
Direktur Jenderal Perbendaharaan

DAFTAR ISI

Kondisi Fiskal Nasional

Makroekonomi Nasional 12
Indikator Kesejahteraan 14
Ketenagakerjaan 16
Pelaksanaan APBN 17
Pelaksanaan APBD 28
Pendapatan Daerah 28
Belanja Daerah 28
Potensi Keunggulan Daerah 32
Perilaku Variabel Fiskal Regional 33

Analisis Penerimaan dan Pengeluaran APBN Antar Wilayah 2016

Penerimaan dan Pengeluaran Seluruh Provinsi 36
Surplus Defisit 48
Analisis Penerimaan dan Pengeluaran 50
Jumlah Penduduk 52
Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi 53

Analisis Ekonomi dan Fiskal Regional

Makroekonomi Regional Sumatera 58
Indikator Kesejahteraan 63
Pelaksanaan APBN 66
Badan Layanan Umum (BLU) 68
Pelaksanaan APBD 69
Sektor Unggulan Regional 72
Tantangan Fiskal Regional 74
Solusi Fiskal Regional 76

Makroekonomi Regional Jawa 78
Indikator Kesejahteraan 83
Pelaksanaan APBN 87
Badan Layanan Umum (BLU) 90
Pelaksanaan APBD 90
Sektor Unggulan Regional 92
Tantangan Fiskal Regional 95
Solusi Fiskal Regional 97

Makroekonomi Regional Kalimantan 98
Indikator Kesejahteraan 103
Pelaksanaan APBN 106
Analisis Tematik Aspek Tertentu 108
Badan Layanan Umum (BLU) 110
Pelaksanaan APBD 111

Sektor Unggulan Regional 112
Tantangan Fiskal Regional 115
Solusi Fiskal Regional 115

Makroekonomi Regional Sulawesi 118
Indikator Kesejahteraan 123
Pelaksanaan APBN 126
Badan Layanan Umum (BLU) 129
Pelaksanaan APBD 129
Sektor Unggulan Regional 131
Tantangan Fiskal Regional 133
Solusi Fiskal Regional 134

Makroekonomi Regional Bali Nusra 136
Indikator Kesejahteraan 141
Pelaksanaan APBN 144
Badan Layanan Umum (BLU) 146
Pelaksanaan APBD 147
Sektor Unggulan Regional 148
Tantangan Fiskal Regional 150
Solusi Fiskal Regional 151

Makroekonomi Regional Maluku Papua 154
Indikator Kesejahteraan 158
Pelaksanaan APBN 161
Badan Layanan Umum (BLU) 163
Pelaksanaan APBD 164
Sektor Unggulan Regional 165
Tantangan Fiskal Regional 167
Solusi Fiskal Regional 168

Analisis Kesehatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pendapatan Daerah 172
Belanja Daerah 176

Respon Fiskal Pemerintah
Regional Sumatera 184
Regional Jawa 185
Regional Kalimantan 186
Regional Sulawesi 187
Regional Bali Nusra 188
Regional Maluku Papua 189

Penutup
Kesimpulan 192
Saran 194

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian nasional pada tahun 2016 tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2015. Hal tersebut tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi yang semula 4,88% pada tahun 2015 menjadi 5,02% pada tahun 2016. Sementara itu, inflasi Indonesia pada tahun 2016 mencapai 3,02% lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 3,35% dan di bawah target dalam asumsi makro ekonomi APBNP TA 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7%.

Sejalan dengan meningkatnya perekonomian Indonesia, indikator kesejahteraan Indonesia tahun 2016 menunjukkan perbaikan seperti penurunan persentase penduduk miskin per September 2016 sebesar 3,86% dari 11,13% pada tahun 2015 menjadi 10,7% pada tahun 2016, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2016 dari 6,18% pada tahun 2016 menjadi 5,61% pada tahun 2015 meskipun masih melampaui target sebesar 5,2%-5,5%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan ke arah yang lebih baik pada tahun 2016 sebesar 70,18 dari target sebesar 70,1 atau meningkat sebesar 0,9% dibanding tahun sebelumnya. IPM Nasional ini masuk ke dalam level dengan kategori tinggi. Sedangkan rasio Gini yang menurun dari 0,41 pada tahun 2015 menjadi 0,40 pada tahun 2016 dan sesuai dengan target dalam APBNP TA 2016.

Dari hasil analisis spasial tergambarkan bahwa angka penerimaan perpajakan yang besar berasal dari provinsi yang memiliki kegiatan perdagangan dan industri jasa, dan kegiatan ekspor impor dengan skala masif dan menunjukkan kondisi surplus seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten. Sementara itu, provinsi dengan kondisi defisit umumnya masih terlalu mengandalkan hasil SDA dan bertumpu pada sektor hulu seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan. Provinsi dengan jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata, masih memiliki magnet untuk menarik alokasi anggaran belanja dalam jumlah besar dari Pemerintah Pusat. Ditinjau dari sisi pengeluaran negara, sebagian besar pengeluaran negara dialokasikan untuk kawasan Jawa, Bali, dan Sumatera yang memiliki jumlah penduduk yang banyak namun demikian pemerintah pusat tetap memberikan perhatian yang besar terhadap kawasan Indonesia timur meskipun jumlah penduduknya sedikit dan relatif jarang.

Dari hasil analisis kesehatan pengelolaan keuangan daerah diperoleh informasi bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi pada sebagian besar pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang mencatatkan 25 provinsi berada pada rasio hanya s.d. 20%. Pemerintah merealisasikan PAD minimal 80% dari targetnya, sehingga cukup efektif dalam rasio efektivitas PAD. Namun, dalam hal rasio pertumbuhan PAD masih terdapat 7 provinsi yang PAD tahun 2016 menurun dari tahun 2015, sehingga harapan agar pemerintah daerah makin mandiri masih sulit tercapai berdasarkan data-data PAD tersebut.

Dari sisi belanja daerah, dukungan percepatan pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari rasio belanja modal terhadap total belanja pada seluruh wilayah di Indonesia hanya berkisar 16% s.d. 35%. Sisi yang lain rasio belanja pegawai pada sebagian besar wilayah berada pada kisaran rasio 31% s.d. 50%. Penyerapan belanja daerah rata-rata berada di atas 86% dibanding pagu belanja per wilayah.

Program pengentasan kemiskinan harus lebih fokus di pedesaan, salah satunya melalui optimalisasi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan Dana Desa, untuk memastikan bahwa dana desa telah digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Program pengentasan kemiskinan harus dapat berperan dalam menurunkan rasio Gini dan memberdayakan masyarakat dengan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Data Indikator kesejahteraan pada regional Maluku Papua yang relatif rendah dibandingkan data nasional membutuhkan adanya kebijakan fiskal yang efektif dan sejalan antara kebijakan fiskal nasional dan regional. Potensi yang dimiliki kawasan timur Indonesia seperti keindahan alam harus didukung dengan kemudahan akses dan kesiapan SDM melalui pembangunan infrastruktur peningkatan kualitas SDM serta untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional.

Langkah konkret untuk sinkronisasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui tindak lanjut atas setiap kendala daerah dalam memajukan SDM maupun memajukan ekonomi daerah. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik dalam bidang perdagangan, jasa, dan industri akan memberikan nilai tambah sehingga dapat mendorong perekonomian dan akhirnya berdampak pada peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah.

Efektivitas pengelolaan APBD didorong dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, terutama bagi daerah yang selama ini kaya dengan SDA. Surplus dari penerimaan SDA dapat digunakan untuk mengembangkan sektor non SDA sebagai upaya memitigasi gejolak harga SDA dunia. Selanjutnya, untuk efektivitas belanja dan memacu optimalisasi pengelolaan APBD, Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan adanya ***reward*** dan ***punishment*** terhadap pengalokasian belanja pegawai daerah. Pemerintah Pusat perlu juga mempertimbangkan pengalokasian anggaran yang proporsional terhadap regional yang telah berkontribusi kepada penerimaan negara dalam jangka panjang.

BAB I

KONDISI FISKAL NASIONAL

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang diindikasikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 5,02%, lebih tinggi dibandingkan dengan PDB tahun 2015 yang mencapai 4,88% namun masih di bawah target yang ditetapkan dalam asumsi dasar ekonomi makro APBNP TA 2016 sebesar 5,3%. Sementara itu, inflasi Indonesia pada tahun 2016 sebesar 3,02% lebih rendah dari tahun 2015 yang mencapai 3,35% dan di bawah target dalam asumsi makro ekonomi APBNP TA 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7%. Sejalan dengan perekonomian Indonesia, indikator kesejahteraan Indonesia tahun 2016 menunjukkan perbaikan seperti rasio Gini yang menurun dari 0,41 pada tahun 2015 menjadi 0,40 pada tahun 2016 dan sesuai dengan target dalam APBNP TA 2016, persentase penduduk miskin per September 2016 menurun dari 11,13% pada tahun 2015 menjadi 10,7% pada tahun 2016, dan TPT per Agustus 2016 yang cenderung turun dari 6,18% pada tahun 2016 menjadi 5,61% pada tahun 2015 meskipun masih melampaui target pemerintah sebesar 5,2%-5,5%. Indeks Pembangunan manusia (IPM) menunjukkan ke arah yang lebih baik pada tahun 2016 sebesar 70,18 dari target sebesar 70,1. IPM Nasional ini masuk ke dalam level dengan kategori tinggi.

Anggaran belanja negara tahun 2016 sebesar Rp2.082,95 triliun atau meningkat sebesar 4,9% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.984,15 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2016 sebesar Rp1.306,7 triliun dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp1.319,55 triliun (turun 0,97%). Anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp776,25 triliun, yang terdiri dari anggaran transfer ke daerah sebesar Rp729,27 triliun dan anggaran dana desa sebesar Rp46,98 triliun.

Penyerapan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 88% sedangkan realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa mencapai 91,5%. Khusus pagu belanja modal tahun 2016 sebesar Rp206,57 triliun, turun sekitar 25% dibandingkan pagu belanja modal tahun 2015 yang sebesar Rp275,79 triliun dan teralisasi sebesar 80,57%.

Pada APBD seluruh Indonesia tahun 2016, secara agregrat target pendapatan daerah tumbuh sebesar 11,71% dari target pendapatan daerah tahun sebelumnya dengan realisasi mencapai 94,81%, turun dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun 2015 yang sebesar 95,15%. Pagu belanja daerah seluruh Indonesia tumbuh sebesar 7,95% dari belanja daerah tahun sebelumnya dengan realisasi mencapai 88,05%, naik dibandingkan realisasi tahun 2015 yang sebesar 86,82%. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja menunjukkan perbaikan namun rasio kemandirian keuangan pada tahun 2016 menunjukkan penurunan.

http://3.bp.blogspot.com

BAB I
Kondisi Fiskal Nasional

Makroekonomi Nasional

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02% lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 4,88%.

Di tengah peristiwa global, seperti Brexit (*Britania exit*) dan berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok, serta kondisi perekonomian global yang cenderung melambat di tahun 2016, perekonomian Indonesia justru menunjukkan kondisi perbaikan. Ekonomi Indonesia di tahun 2016 tumbuh mencapai 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,88%. Kondisi perbaikan perekonomian Indonesia tahun 2016 masih ditopang oleh permintaan domestik sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, yang tumbuh positif. Selain itu, walaupun masih tumbuh negatif namun kinerja ekspor dan impor pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Indonesia Per Kawasan

Sumber: BPS

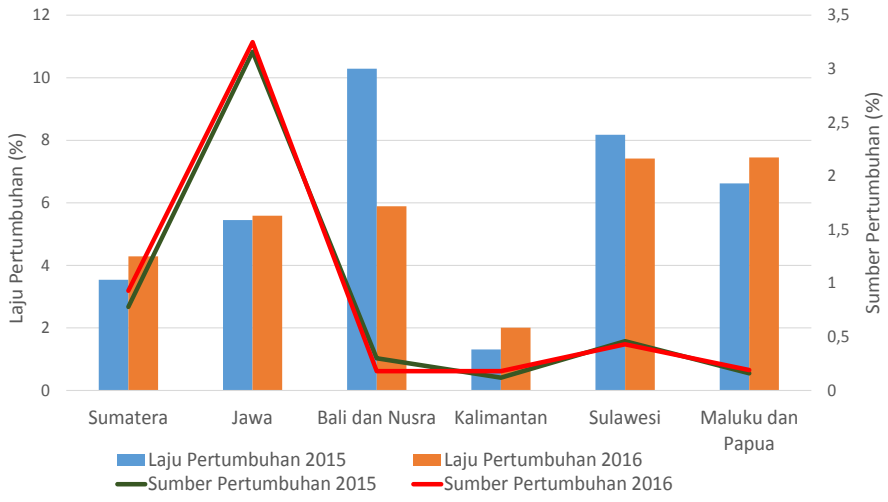

Regional Maluku dan Papua memiliki laju pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai 7,45% pada tahun 2016.Sementara regional Bali Nusra yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015, mengalami perlambatan signifikan pada tahun 2016. Selain regional Bali Nusra, regional Sulawesi turut mengalami perlambatan. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan, regional Jawa masih mendominasi dengan memberi kontribusi terbesar sumber pertumbuhan PDB Indonesia yaitu mencapai 3,25% atau meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 3,16%.

Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Indonesia Menurut Pengeluaran
Sumber: BPS

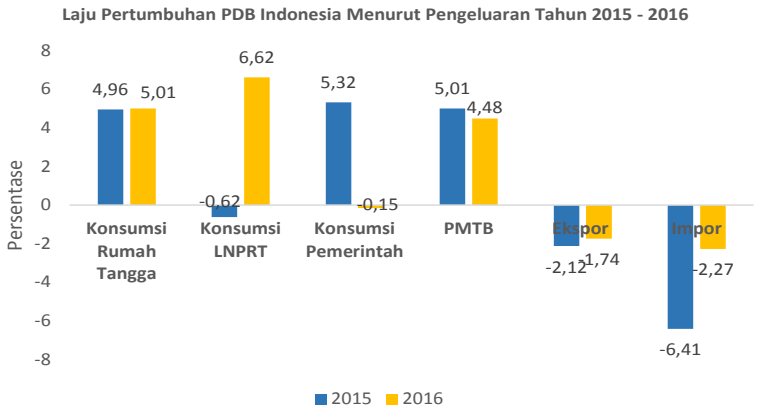

Pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor signifikan pergerakan PDB Indonesia yaitu sebesar 56,5%.

Dari sisi pengeluaran, pada tahun 2016 pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan negatif dan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, seiring kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah yang kurang produktif. Namun, belanja APBN tetap berkontribusi positif dan menjadi motor penggerak perekonomian, melalui komitmen terhadap program pembangunan infrastruktur baik oleh Kementerian Negara/Lembaga maupun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. Melihat strukturnya, distribusi PDB tahun 2016 relatif sama dengan tahun 2015, dimana Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tetap menjadi kontributor signifikan pergerakan PDB Indonesia yaitu sebesar 56,5%.

Di sisi penawaran, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi serta Informasi dan Komunikasi memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016, yaitu masing-masing mencapai 8,90% dan 8,87%. Sementara jika dilihat distribusinya, kontribusi terbesar masih dicatat oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 20,51%. Keterpurukan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masih berlanjut hingga tahun 2016, terimbas kebijakan mengenai *smelter* dalam UU Minerba.

Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha
Sumber: BPS

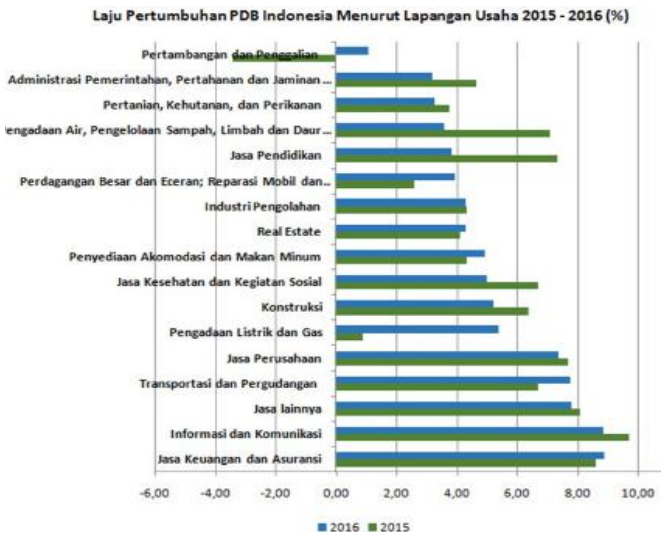

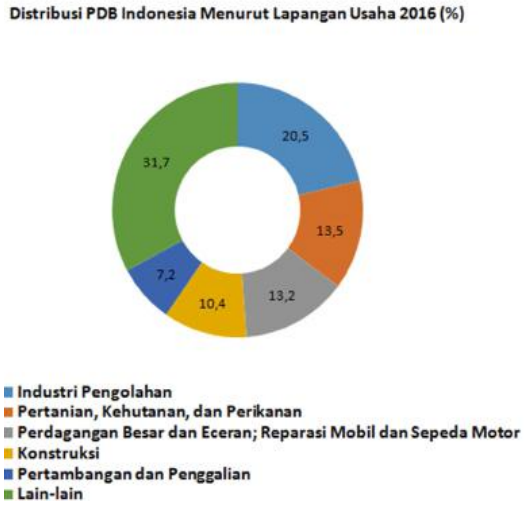

Inflasi

Tingkat inflasi pada 2016 umumnya lebih rendah dibanding inflasi rata-rata nasional

Inflasi di tahun 2016 tercatat mengalami penurunan, yaitu sebesar 3,02%, lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2015 yang sebesar 3,35%. Pencapaian inflasi tahun 2015 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2016 di bawah 4,7%.

Berbagai faktor telah mendorong tingkat inflasi yang lebih terkendali. Peningkatan produksi dan perbaikan distribusi serta upaya untuk meminimalkan berbagai distorsi harga bahan pangan menjadi langkah ampuh dalam mengelola inflasi yang lebih stabil. Selain itu, koordinasi antara Pemerintah dengan Bank Indonesia yang semakin kuat mendorong inflasi di bawah target

Tingkat Inflasi Per Provinsi Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

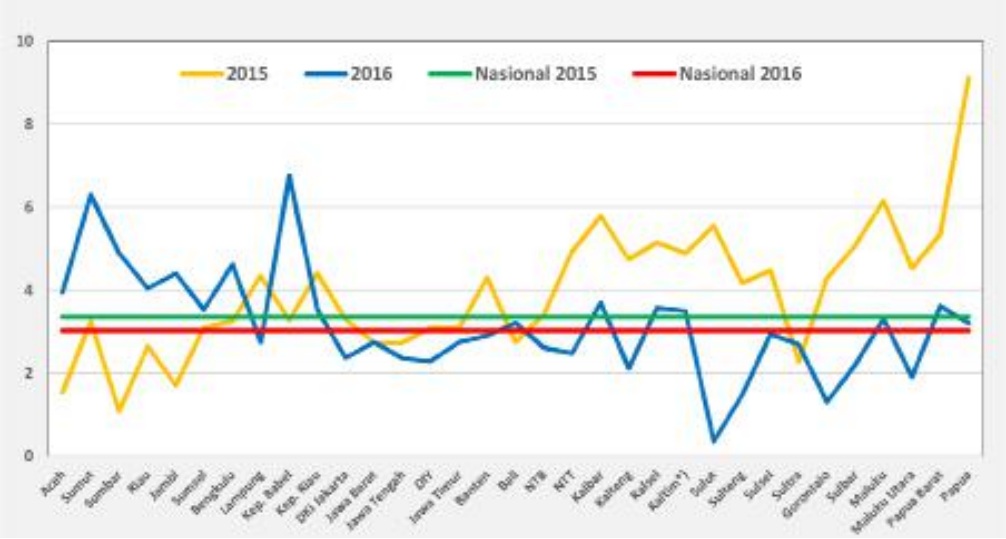

Indikator Kesejahteraan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM nasional pada tahun 2016 mulai masuk pada level tinggi, yaitu sebesar 70,18.

IPM nasional secara stabil terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dan bahkan IPM nasional tahun 2016 meningkat tipis menjadi 70,18 dari 69,55 pada tahun 2015. Sesuai skala dari BPS, IPM nasional termasuk sudah mulai beranjak ke angka 70, yaitu menginjak level tinggi di kisaran 70≤IPM. Capaian IPM tahun 2016 tersebut melampaui target IPM dalam asumsi makro APBNP 2016 yang ditetapkan sebesar 70,1. Kenaikan IPM ini seharusnya lebih meningkat lagi seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khsusus Non Fisik.

IPM Per Provinsi Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

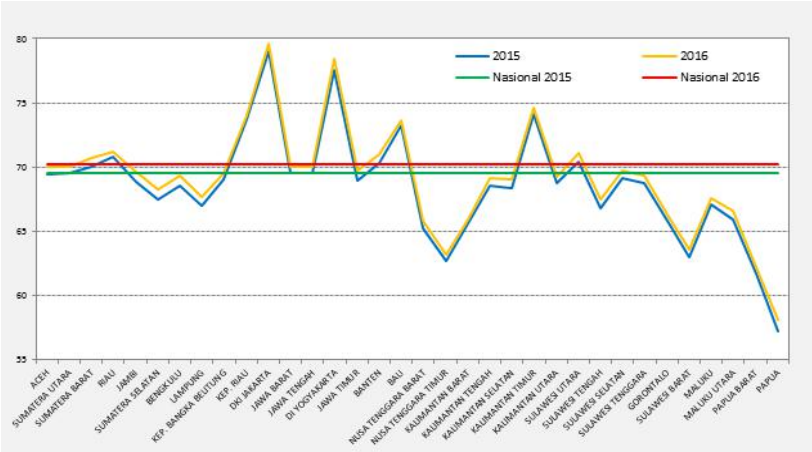

Capaian IPM Nasional tahun 2016 sejalan dengan capaian IPM seluruh provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Selama tujuh tahun berturut-turut dari rentang 2010 sampai dengan 2016, DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi di Indonesia dan diikuti Provinsi DI Yogyakarta sebesar 78,38. Pada tahun 2016, IPM DKI Jakarta mencatat angka sebesar 79,66 (Kelompok IPM Tinggi), naik dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 78,99 di tahun 2015. Meskipun mengalami kenaikan IPM, Papua masih tergolong sebagai provinsi dengan IPM terendah se-Indonesia dengan nilai sebesar 58,05. Secara regional, IPM pada regional Maluku Papua berada dibawah rata-rata IPM nasional.

Rasio Gini

Terjadi penurunan rasio Gini pada tahun 2016 dibanding tahun 2015.

Tidak berbeda jauh dengan tahun 2015, yang masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, bahkan sedikit menurun dimana rasio Gini pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 0,41 menjadi 0,40. Angka tersebut hampir menyentuh ketimpangan kesejahteraan dengan kategori sedang (di atas level 0,4). Rasio Gini 2016 tersebut sedikit melampaui target rasio Gini yang ditetapkan dalam asumsi makro APBN 2016 sebesar 0,39.

Rasio Gini Per Provinsi Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

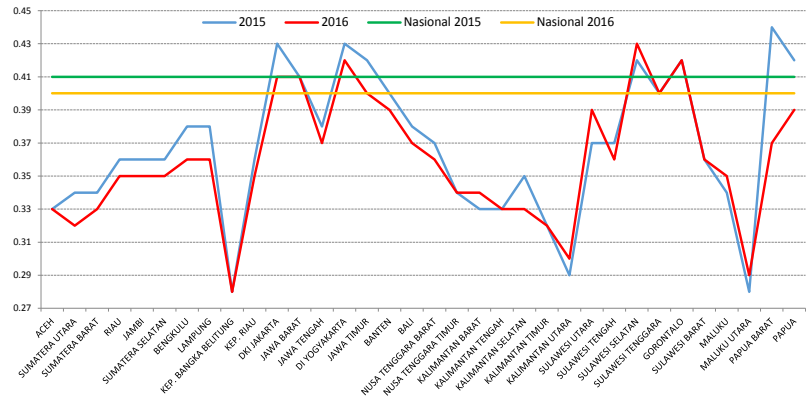

Perkembangan rasio Gini tahun 2016 pada semua provinsi bervariasi. Bila tahun sebelumnya rasio Gini tertinggi di Indonesia terjadi pada Provinsi Papua Barat maka untuk tahun 2016, Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai rasio Gini tertinggi sebesar 0,43. Sebaliknya Provinsi Maluku Utara memiliki rasio Gini terendah, yang sebelumnya dipegang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ketenagakerjaan

Terjadi penurunan TPT pada tahun 2016 (5,61%) dibanding tahun 2015 (6,18%)

Posisi per Agustus 2016, tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung turun yaitu sebesar 5,61% yang sebelumnya di tahun 2015 sebesar 6,18%. Realisasi TPT per Agustus 2016 berada di atas target asumsi makro APBN 2016 yang ditetapkan di rentang 5,2%-5,5%. Dengan semakin menjamurnya wirausahawan baru akibat semakin luasnya akses pinjaman bank untuk masyarakat kelas menengah ke bawah maka tingkat pengggangguran terbuka di Indonesia mengalami penurunan sampai dengan bulan Agustus 2016.

Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

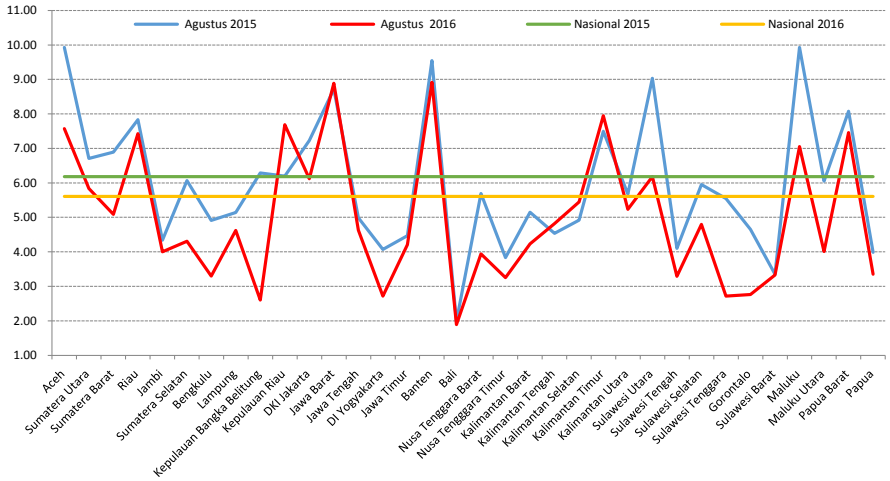

Hampir semua provinsi mengalami penurunan TPT, kecuali beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Banyaknya perusahaan tambang di regional Kalimantan yang mengalami gulung tikar akibat terbatasnya sumber daya batubara mengakibatkan perusahaan harus melakukan rasionalisasi pegawai.

Kemiskinan

Terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2016 (10,7%) dibanding tahun 2015 (11,13%)

Sejalan dengan program Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, perlahan namun pasti, tingkat kemiskinan Indonesia turun dari 11,13% (atau 28,51 juta jiwa) per September 2015 menjadi 10,7% (atau 27,76 juta jiwa) per September 2016. Realisasi tingkat kemiskinan tahun 2016 lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam APBN 2016 sebesar 9-10%. Turunnya jumlah penduduk miskin diantaranya disebabkan adanya penambahan alokasi anggaran subsidi untuk keluarga miskin serta subsidi

pinjaman bagi pengusaha berskala mikro, kecil, dan menengah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tingkat Kemiskinan Per Provinsi Tahun 2014 dan 2015
Sumber: BPS

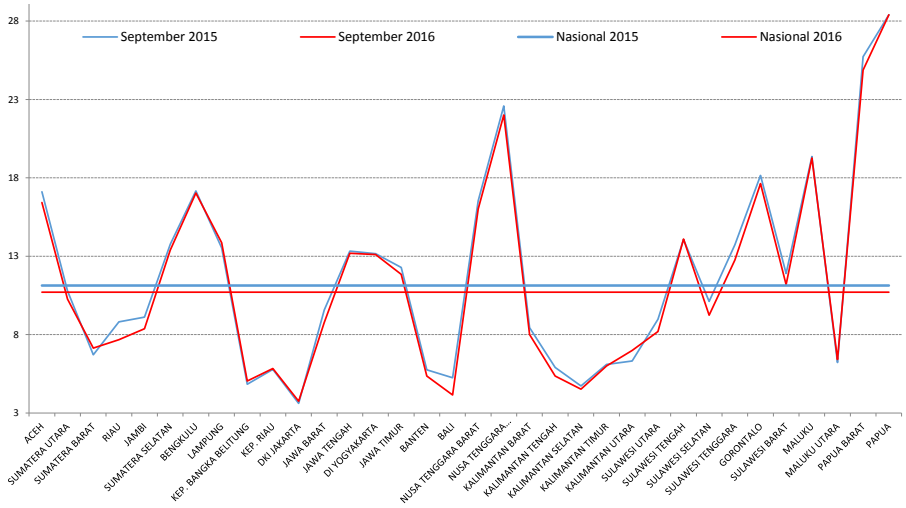

Hampir separuh jumlah provinsi di Indonesia memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional. Provinsi Papua masih merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 28,4%. Sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat kemiskinan terkecil, yaitu sebesar 3,75% naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,61%.

Pelaksanaan APBN

Program Tax Amnesty menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan di sektor perpajakan terutama untuk menjaga kesinampungan potensi perpajakan.

Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Pemerintahan Kabinet Kerja bersama-sama dengan DPR RI untuk merumuskan dan menyusun APBN secara utuh sehingga diharapkan anggaran tahun 2016 mencerminkan kebijakan dan program kerja di Kabinet Jokowi-JK. Pada tahun 2016 diluncurkan Program *Tax Amnesty* sebagai salah satu kebijakan Pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak yang sebelumnya belum melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan penghasilan serta harta kekayaannya selaku wajib pajak atau calon wajib pajak dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki serta membayar uang tebusan. Program pengampunan pajak ini bertujuan juga untuk menata kembali *database* wajib pajak sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk melihat potensi penerimaan pajak di masa yang akan datang.

Dari sisi belanja, alokasi anggaran untuk belanja modal semakin diperbesar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang mengoneksikan daerah di Indonesia untuk mempersempit jurang kesenjangan antar regional. Selain itu, anggaran yang bersifat *mandatory* seperti pendidikan dan kesehatan diupayakan untuk dipertahankan pemenuhan alokasi anggarannya di atas 20% dan 5% dari APBN. Selain itu, alokasi Dana desa juga ditingkatkan hingga 6% dari dan di luar anggaran transfer ke daerah sesuai *Road Map* Dana Desa 2015-2019.

Postur APBN-P Tahun 2015 dan 2016 (dalam Triliun Rp)
Sumber: LKPP Tahun 2016 (*Unaudited*)

Uraian	TA 2016 (*Unadited*)			TA 2015 (*Audited*) Realisasi
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	
A Pendapatan Negara dan Hibah	1.786,23	1.508,02	87,06%	1.508,02
I. Penerimaan Perpajakan	1.539,17	1.284,97	83,48%	1.240,42
1 Pajak Dalam Negeri	1.503,29	1.249,50	83,12%	1.205,48
2 Pajak Perdagangan Internasional	35,87	35,47	98,88%	34,94
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	245,08	261,92	106,87%	255,63
1 Penerimaan Sumber Daya Alam	90,52	65,69	72,56%	100,97
2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	34,16	37,13	108,69%	37,64
3 PNBP Lainnya	84,12	117,17	139,28%	81,70
4 Pendapatan BLU	36,27	41,93	115,59%	35,32
III. Penerimaan Hibah	1,98	8,24	416,96%	11,97
B Belanja Negara	2.082,95	1.860,33	89,31%	1.806,52
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.306,70	1.150,08	88,01%	1.183,30
1 Belanja Pegawai	342,45	305,14	89,11%	281,14
2 Belanja Barang	304,24	259,37	85,25%	233,28
3 Belanja Modal	206,57	166,43	80,57%	215,43
4 Pembayaran Bunga Utang	191,22	182,76	95,58%	156,01
5 Subsidi	177,75	174,23	98,02%	185,97
6 Belanja Hibah	8,54	6,51	76,27%	4,26
7 Belanja Bantuan Sosial	53,40	49,61	92,89%	97,15
8 Belanja Lain-Lain	22,53	6,03	26,75%	10,05
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa	776,25	710,26	91,50%	623,14
Transfer ke Daerah	729,27	663,58	90,99%	602,37
1 Dana Perimbangan	705,46	639,77	90,69%	583,05
Dana Transfer Umum	494,44	475,90	96,25%	430,94
a. Dana Bagi Hasil	109,08	90,53	83,00%	78,05
b. Dana Alokasi Umum	385,36	385,36	100,00%	352,89
Dana Transfer Khusus	211,02	163,87	77,66%	152,10
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	89,81	75,21	83,74%	-
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	121,21	88,66	73,15%	-
2 Dana Insentif Daerah	5,00	5,00	100,00%	1,66
3 Dana Keistimewaan DIY	0,55	0,55	100,00%	0,55
4 Dana Otonomi Khusus	18,26	18,26	100,00%	17,12
Dana Desa	46,98	46,68	99,36%	20,77
Suspen Belanja				
C Surplus/Defisit Anggaran	(296,72)	(305,21)	102,86%	(298,49)
D Pembiayaan (I+II)	296,72	331,02	111,56%	323,11
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)	299,25	344,94	115,27%	307,86
II. Pembiayaan Luar Negeri (Netto)	(2,53)	(13,92)	550,77%	15,25
E SILPA/SIKPA (D-C)		25,81		24,61

Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal pemerintah dijaga melalui target defisit APBN di bawah 3% dari PDB.

APBN 2016 dilaksanakan ditengah perkembangan perekonomian global yang mengalami perlambatan. Kondisi perekonomian global, penurunan harga komoditas, dan penguatan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap proyeksi realisasi APBN tahun 2016 sehingga pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan APBNP. Ditengah berbagai permasalahan yang terjadi, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan. Selain itu, Pemerintah juga tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Defisit APBN juga dijaga dibawah 3% dari PDB dengan berbagai langkah pengehematan dan *refocusing* belanja.

Melalui APBN Perubahan pemerintah mengeluarkan kebijakan penerimaan berupa *tax amnesty/voluntary disclosure* dan penguatan *tax base*. Untuk belanja dilakukan penghematan dan pemotongan belanja yang kurang produktif, rasionaliasi anggaran pada Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus serta kebijakan perubahan besaran fixed subsidi. Pemerintah juga tetap fokus membangun infrastruktur melalui peningkatan pengeluaran pembiayaan yang mendukung program pembangunan infrastruktur.

Dengan berbagai langkah penyesuaian APBN tahun 2016 terbukti dapat berjalan efektif dan efisien serta menciptakan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Pendapatan Negara

Pencapaian target penerimaan perpajakan harus diikuti dengan extra effort sehingga dapat memperkecil kesenjangan antara potensi dan realisasinya.

Pada APBN 2016 pemerintah menentukan target penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan serta langkah administratif perpajakan yang komprehensif. Penerimaan pajak juga didukung dengan *extra effort* dalam upaya memperkecil kesenjangan antara potensi penerimaan perpajakan dengan realisasinya. Target Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2016 sebesar Rp1.786,2 triliun, sedikit meningkat dari APBNP 2015 sebesar Rp1.761,4 triliun atau tumbuh sebesar 1,4%. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari meningkatnya penerimaan perpajakan sebesar Rp49,9 triliun dari APBNP 2015 atau tumbuh 3,4%. Penerimaan Pajak naik Rp60,9 triliun atau tumbuh sebesar 4,7% dari APBNP 2015, terutama karena dipengaruhi oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi dan *extra effort* dibidang perpajakan tahun 2016. Target kepabeanan dan cukai turun Rp11,0 triliun atau sebesar 5,7% dari APBNP 2015, terutama disebabkan turunnya tarif bea keluar CPO beserta turunannya sebagai dampak dari kebijakan pembentukan Badan Penghimpun Dana Perkebunan.

Pemerintah juga berupaya mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari PNBP. Optimalisasi PNBP terutama untuk PNBP dari K/L dalam rangka mengurangi ketergantungan PNBP dari sektor komoditas yang dipengaruhi faktor eksternal (ICP, kurs, dan harga komoditas). Masih lemahnya ICP dan harga komoditas menyebabkan

Realisasi PNBP tahun 2016 mencapai 106,87%, namun satu sisi target PNBP tahun 2016 sebesar Rp245,1 triliun , turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 269,1 triliun.

pendapatan yang bersumber dari SDA mengalami penurunan dari target APBNP 2015. Target penerimaan negara yang berasal dari PNBP pada tahun 2016 sebesar Rp245,1 triliun atau menurun sebesar 8,9% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp269,1 triliun. Untuk mencapai target PNBP tersebut pemerintah mengupayakan optimalisasi penerimaan migas melalui pengendalian *cost recovery* dan merealisasikan produksi sumur minyak baru. Selain itu, penyesuaian tarif PNBP dan extensifikasi juga dilakukan. Peningkatan pengawasan atas PNBP, perbaikan sistem dan regulasi, serta administrasi pelaporan juga diharapkan mampu membantu tercapainya target.

Realisasi pendapatan negara TA 2016 adalah sebesar Rp1.555,1 triliun atau 87,06% dari target APBNP. Realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.284,9 triliun atau 83,48% dari target APBNP 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun. Capaian tahun 2016 lebih tinggi Rp44,5 triliun atau 3,49% dibandingkan penerimaan perpajakan tahun 2015. Penerimaan perpajakan tahun 2016 tidak mencapai target terutama disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tahun 2016 lebih rendah dibandingkan asumsi APBN-P 2016. Belum pulihnya harga komoditas juga turut berpengaruh. Pendapatan pajak dalam negeri mengalami kenaikan diantaranya terutama pada PPh Non Migas yang meningkat sebesar Rp76,6triliun dibandingkan tahun 2015. Peningkatan PPh Non Migas tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan *tax amnesty*. Selain itu, perkembangan suku bunga simpanan dan obligasi, penyelesaian proyek yang meningkat serta penilaian kembali aset turut juga mendorong penerimaan PPh Final.

Capaian Tax Amnesty s.d. 31 Desember 2016
(dalam miliar rupiah), Sumber :Direktorat Jenderal Pajak

Jenis WP	Tebusan A	Deklarasi DN B	Repatriasi C	Deklarasi LN D	Total Harta E=(B+C+D)
Badan	12.786,90	542.881,10	20.975,80	31.304,00	595.160,90
OP	90.522,40	2.600.255,00	119.538,90	981.322,80	3.701.116,70
Total	103.309,30	3.143.136,10	140.514,70	1.012.626,80	4.296.277,60

Realisasi PNBP TA 2016 adalah sebesar Rp261,9 triliun atau mencapai 106,87% dari target APBNP 2016 sebesar Rp245,1 triliun. Realisasi PNBP tahun 2016 lebih tinggi 6,3% atau naik sebesar 2,46% dibandingkan dengan realisasi 2015 sebesar Rp255,6 triliun. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2016 adalah sebesar Rp65.689 miliar, atau mencapai 72,56% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBNP TA 2016 yang sebesar Rp90.524 miliar. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2016 lebih kecil Rp35.282 miliar atau turun 34,94% dibandingkan dengan realisasi TA 2015.

Penurunan realisasi penerimaan SDA tersebut dipengaruhi antara lain masih rendahnya harga minyak mentah, batubara, dan komoditas pertambangan. Pendapatan SDA gas bumi tahun 2016 dipengaruhi rendahnya ICP tahun 2016 dibandingkan tahun 2015,

dimana ICP juga berpengaruh secara signifikan terhadap sebagian harga gas yang menggunakan formula yang dikaitkan dengan harga minyak.

Belanja Negara

Belanja subsidi diupayakan semakin tepat sasaran untuk dialihkan ke belanja yang lebih produktif dan mendorong perekonomian sehingga pemerintah akan fokus pada program prioritas sesuai nawacita.

Kebijakan Belanja pada APBN 2016 tetap difokuskan untuk melanjutkan berbagai program prioritas nasional sesuai nawacita antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan, pengembangan pariwisata, membangun kedaulatan energi, mengurangi kesenjangan dan memperkuat pertahanan. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah melanjutkan kebijakan peningkatan efektivitas dan efisiensi pada belanja operasional dan belanja non-operasional. Belanja untuk subsidi juga diupayakan untuk semakin tepat sasaran dan dikurangi untuk dialihkan ke belanja yang lebih produktif dan mendorong perekonomian.

Pemerintah juga tetap memastikan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu juga dilaksanakan melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan cakupan penerima bantuan tunai bersyarat menjadi 6 juta KSM, dan perluasan PBIJKN menjadi 92,4 Juta jiwa. Untuk transfer ke daerah, pemerintah pusat berupaya untuk menyelaraskan kebijakan desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP) di K/L ke Dana Alokasi Khusus (DAK).

Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016, pemerintah melakukan langkah penghematan dalam rangka pelaksanaan APBNP 2016 melalui mekanisme *self-blocking*. Pada Inpres tersebut tertuang penghematan dengan total sebesar Rp64,7 triliun dimana penghematan terbesar pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp7,93 triliun. Kementerian/Lembaga juga diminta untuk dapat membebankan *self-blocking* pada anggaran non-prioritas sehingga berbagai program yang mendukung prioritas nasional tetap terjaga. Kementerian/Lembaga menindaklanjuti instruksi penghematan anggaran dan pemotongan anggaran dengan melakukan pemotongan pada belanja barang seperti perjalanan dinas, rapat di luar kantor dan seminar. Selain itu belanja barang atau modal yang belum dikontrakkan dan dimungkinkan untuk dilaksanakan tahun 2016 juga dilakukan penghematan.

Untuk belanja barang/modal yang sudah dikontrakkan dan dapat diselesaikan ditahun 2016 juga dilakukan penghematan dengan cara pembayarannya dilakukan pada tahun 2017. Untuk kegiatan yang sudah dikontrakkan tahun 2016, dapat dilakukan pelaksanaan kontraknya pada tahun 2017 demikian juga dengan pembayarannya dibebankan ke tahun 2017. Berbagai kebijakan yang terkait dengan belanja pemerintah diatas tidak hanya berhasil untuk menghemat belanja 2017 sesuai target tetapi bisa mendapatkan lebih karena terdapat penghematan tambahan yang bersumber dari batalnya kegiatan yang terkait dengan kontrak tersebut.

Kebijakan penghematan belanja yang dilakukan pemerintah selama tahun 2016 berhasil mengendalikan belanja kementerian/lembaga. Penyerapan belanja Kementerian/Lembaga tahun 2016 sebesar 89,31% sedikit lebih rendah jika dibandingkan penyerapan belanja tahun 2015 yang sebesar 89,67%. Namun secara nominal belanja di APBNP 2016 tersebut naik sebesar Rp53,8 triliun lebih atau 2,98% dari realisasi APBNP 2015 yang sebesar Rp1.806,5 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2016 sebesar Rp1.150,08 triliun sedikit mengalami penurunan sebesar 2,81% dibandingkan dengan realisasi belanja pemerintah pusat pada APBNP 2015 sebesar Rp1.183,3 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada belanja Belanja Bantuan Sosial (48,94%), Belanja Lain-lain (40,04%), dan Belanja Modal (22,75%). Sedangkan realisasi belanja yang mengalami kenaikan tajam adalah belanja Hibah yang meningkat 52,78% dari realisasi belanja pada tahun 2015 yang sebesar Rp4,26 triliun. Beberapa kendala dalam pelaksanaan belanja antara lain kegagalan proses lelang, keterlambatan penunjukan pejabat pengelola keuangan, perubahan dokumen anggaran (DIPA).

Tertundanya beberapa proyek yang didanai SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) menjadi perhatian karena beban dananya menjadi tinggi bagi negara karena bersumber dari pembiayaan yang manfaatnya belum dapat dirasakan dalam waktu dekat.

Pada beberapa proyek yang dibiayai dari SBSN juga mengalami keterlambatan proses pelelangan sehingga banyak yang harus diselesaikan melewati anggara 2016. Keterlambatan tersebut terjadi pada Kementerian yang proyeknya dibiayai dari penerbitan SBSN seperti pada Kementerian Agama untuk pembangunan asrama haji, pembangunan rel kereta api pada Kementerian Perhubungan dan pembangunan jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum. Keterlambatan pelaksanaan proyek yang didanai dari SBSN perlu untuk menjadi perhatian karena beban dananya menjadi tinggi bagi negara karena bersumber dari pembiayaan sementara manfaat yang diharapkan belum dapat dirasakan.

Realisasi belanja pegawai untuk tahun 2016 sebesar Rp305,14 triliun atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 8,54%. Kenaikan belanja pegawai tersebut dikarenakan adanya pembayaran gaji ke 14 untuk pertama kalinya bagi PNS yang dilakukan dalam rangka membantu PNS pada hari raya agama. Selain itu, untuk beberapa Kementerian/Lembaga mengalami kenaikan tunjangan kinerja seperti Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Dalam Negeri serta yang sebelum tidak menerima tunjangan kinerja seperti Menko Maritim. Selain itu terdapat perubahan kebijakan dalam pembayaran gaji ke 13 dimana Dokter PTT sebanyak 45.000 orang, Dokter Nusantara Sehat dan tenaga ahli DPR yang sebelumnya tidak dibayarkan menjadi dibayarkan. Peningkatan belanja pegawai tersebut sudah sejalan dengan program pemerintah pada tahun 2016 yaitu mempertahankan pendapatan riil aparatur pemerintah untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.

Realisasi belanja barang tahun 2016 sebesar Rp259,37 triliun naik secara persentase sebesar 11,18% jika dibandingkan realisasi belanja barang tahun 2015. Namun tidak demikian halnya dengan belanja modal. Realisasi belanja modal pada APBNP 2016 turun sebesar 22,75% atau secara nominal turun Rp49 triliun terhadap realisasi

Self-blocking berhasil mengendalikan defisit anggaran, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran seperti tertundanya beberapa kegiatan dan perlunya penelitian lebih lanjut atas pemotongan atas anggaran yang bukan prioritas.

belanja modal pada APBNP 2015 yang senilai Rp215,43 triliun. Pengendalian belanja Kementerian/Lembaga pada tahun 2016 juga berhasil mengendalikan tingkat defisit APBN sebesar 2,46% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan defisit pada APBNP 2015 yang mencapai 2,56% terhadap PDB. pencapaian defisit tersebut masih dalam level yang aman, dibawah target defisit APBN yan bisa ditoleransi dalam UU Keuangan Negara sebesar, yaitu 3%. Meskipun pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga berhasil dalam mengendalikan defisit dan mendorong efisiensi, di sisi lain hal tersebut juga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran seperti tertundanya pelaksanaan kegiatan karena *self-blocking* pada Kementerian/Lembaga biasanya diikuti dengan revisi DIPA. Kepatuhan Kementerian/Lembaga dalam melakukan *self-blocking* pada anggaran yang bukan prioritas juga masih perlu untuk diteliti.

Untuk belanja transfer ke daerah, pada APBN 2016 pemerintah memberikan anggaran yang jumlahnya semakin mendekati anggaran belanja untuk Kementerian/Lembaga. Pemerintah juga berupaya untuk memastikan bahwa kualitas penganggaran dan penyaluran Dana Bagi Hasil guna meningkatkan kepastian jumlah dan ketepatan waktu penyaluran. Reformulasi dan penguatan Dana Alokasi Khusus juga dilaksanakan untuk mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional. Reformulasi tersebut berupa reformulasi alokasi Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Reformulasi pemberian Dana Insentif Daerah yang diarahkan sebagai bentuk penghargaan bagi daerah yang kinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah.

Komposisi Dana Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa 2017

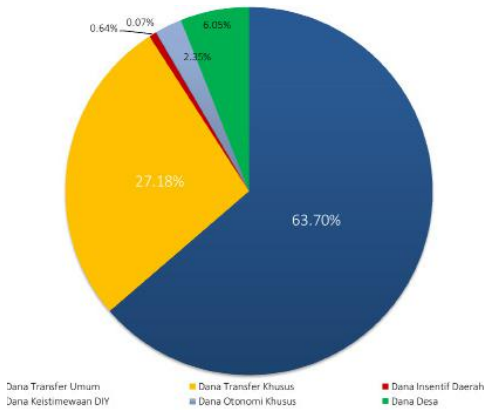

Alokasi Belanja transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2016 sebesar Rp 776,25 triliun atau berkontribusi 37,27% dari struktur APBNP 2016. Dari komposisi dana transfer ke daerah dan dana desa, DAU masih memiliki kontribusi terbesar dengan proporsi 63,07% kemudian selanjutnya DAK sebesar 27,18%, Dana Desa sebesar 6,05% dan berturut-turut Dana Otsus (2,35%), DID (0,64%), dan Dana Keistimewaan DIY (0,07%).

Pada tahun 2016 pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016 yang berisi tentang

keputusan melakukan penundaan penyaluran sebagian transfer ke daerah. Daerah yang terkena penundaan tersebut penentuannya didasarkan pada perkiraan kapasitan fiskal, kebutuhan belanja dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016 yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan sedang. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa daerah fokus untuk segera menggunakan kas yang diterima dari pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai kegiatan prioritas. Penundaan DAU tersebut juga sebagai respon pemerintah dalam mengelola kas yaitu dengan menyesuaikan belanja terhadap penerimaan negara. DAU yang sebagian penyalurannya ditunda tersebut pada akhirnya telah disalurkan kembali pada tahun anggaran 2016.

Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah satker Pemerintah Pusat yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2016 bertambah menjadi 182 satker dari 158 satker pada tahun 2015.

Jumlah satker Pemerintah Pusat yang menerapkan pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) meningkat dari 158 satker pada akhir 2015 menjadi 182 satker pada akhir 2016 atau meningkat sebesar 15,19%. Secara prinsip, dengan menerapkan status pengelolaan menjadi BLU maka satker diharapkan mampu meningkatkan layanannya kepada masyarakat dengan diberikannya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Peningkatan satker BLU sebagian besar terjadi pada satker BLU rumpun pendidikan dari 66 satker menjadi 16 satker atau meningkat 24,24%, disusul kemudian satker BLU rumpun kesehatan yaitu dari 67 satker menjadi 74 satker atau naik 10,45%, dan satker BLU rumpun pengelola dana dari 7 satker menjadi 9 satker atau naik 28,57%. Sedangkan tidak ada penambahan satker BLU baru khusus satker dengan rumpun kawasan. Namun sebaliknya terjadi pengurangan jumlah satker BLU rumpun pengelola barang/jasa lainnya dari 14 satker menjadi 13 satker.

Dari 182 satker BLU yang ada, dua puluh persen berlokasi di wilayah DKI Jakarta atau sebanyak 38 satker. Berturut-turut kemudian Jawa Timur (26), Jawa Barat (22) dan Jawa Tengah (17). Faktor kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia masih menjadi kendala bagi calon satker BLU di daerah lain, terutama di luar Pulau Jawa, yang berniat untuk beralih dari satker PNBP menjadi satker BLU. Padahal dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), satker-satker tersebut mampu untuk meng-collect penerimaan yang besar sebagai imbal jasa atas pelayanan yang diberikan.

Perbandingan Jumlah Satker BLU
Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2014 s.d. 2016
Sumber: Direktorat PPK BLU (diolah)

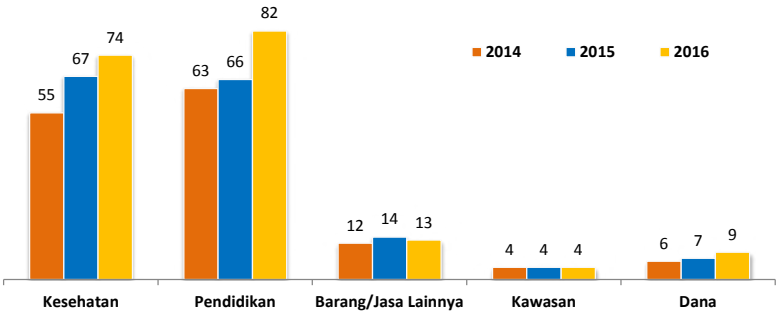

Subsidiary Loan Agreement (SLA)

Secara total penarikan dana, terjadi penurunan nilai penerusan pinjaman sebesar 14,13% terhadap nilai penarikan dana tahun lalu yang sebesar Rp6,27 triliun. Kontribusi utama penurunan nilai penarikan pinjaman dipengaruhi oleh turunnya penarikan pinjaman oleh BUMD sebesar 25,35% dari penarikan pinjaman oleh BUMD tahun yang lalu. Dari aspek regional, debitur BUMD di wilayah DKI Jakarta memberikan kontribusi terbesar terhadap total penurunan penarikan pinjaman, yaitu sebesar 84,42%. Hal ini disebabkan besarnya mutasi kurang penerusan pinjaman yang antara lain adanya pelunasan pinjaman dan penghapusan piutang negara pada Pemerintah Daerah.

Sebaliknya, total pinjaman yang ditarik oleh debitur pemda selama tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 20,73% dari Rp1,527 triliun di tahun 2015 menjadi Rp1,843 triliun. Kontribusi utama naiknya penarikan pinjaman oleh debitur Pemda disumbang dari debitur di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menjadi menarik karena di sisi yang lain, penarikan pinjaman oleh debitur BUMD di wilayah DKI Jakarta mengalami penurunan.

Nilai total tunggakan juga menurun drastis sebesar 78,82% dari Rp4,42 triliun menjadi Rp936 miliar. Turunnya total tunggakan pinjaman berpengaruh terhadap nilai outstanding pokok pinjaman yang juga mengalami penurunan sebesar 36,78% dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,4 triliun. Debitur BUMD merupakan debitur yang paling tinggi penurunan tunggakan pokoknya dibanding debitur pemda sehingga outstanding pinjaman pokoknya juga mengalami penurunan. Berbeda halnya dengan debitur pemda yang mengalami kenaikan outstanding pinjaman pokoknya.

Ada dua kemungkinan penyebab menurunnya total tunggakan pinjaman daerah selama tahun 2016. Yang pertama banyak debitur yang mempercepat penyelesaian tunggakan pokok berikut bunganya, yang kedua, terdapat restrukturisasi pinjaman yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat ke debitur pemda dan BUMD. Restrukturisasi pinjaman terdiri dari penghapusan tunggakan pokok dan penjadualan ulang pembayaran angsuran pokok berikut bunganya.

Rekapitulasi SLA kepada Pemerintah Daerah dan BUMD
Sumber: Direktorat SMI (diolah)

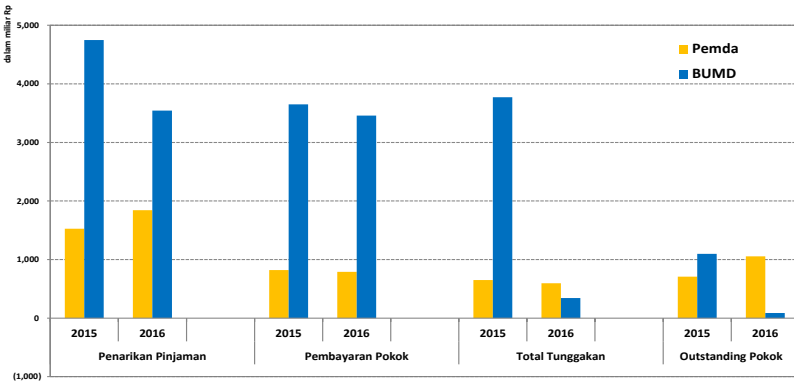

Apabila ditelusuri lebih lanjut, pemda yang paling besar penarikan pinjamannya adalah Pemerintah DKI Jakarta yang sampai dengan akhir tahun 2016 menarik pinjaman sebesar Rp625,46 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp120,5 miliar sudah dibayarkan dalam bentuk pokok pinjaman. Sedangkan untuk debitur BUMD, PDAM Kota Surabaya telah menarik pinjaman sekitar Rp479 miliar dan hampir 95% nya telah dilunasi dalam bentuk pokok pinjaman sehingga outstanding pokok pinjaman yang belum jatuh tempo tinggal sekitar kurang lebih Rp24 miliar.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sampai dengan akhir Desember 2016, dana KUR yang telah tersalurkan sebesar Rp89.623,07 miliar atau naik tiga kali lipat dari Rp21.992,83 miliar pada tahun sebelumnya. Nilai outstanding sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai Rp65.584,88 miliar atau tiga kali lipatnya dari akhir tahun lalu yang senilai Rp16.293,42 miliar. Lebih dari 50 persen atau tepatnya 54,46% disalurkan kepada masyarakat di pulau Jawa dan proporsi nilai keseluruhan outstanding sebesar 53,93%. Sebaliknya, masyarakat pada regional Maluku Papua masih belum memanfaatkan secara maksimal dana KUR. Hal tersebut diindikasikan dengan kecilnya jumlah penyaluran KUR selama tahun 2016 yang senilai 2,27%, menurun dari penyaluran KUR tahun lalu yang sebesar 2,53%.

Profil KUR Berdasarkan Regional Tahun 2016
Sumber: Direktorat SMI (diolah)

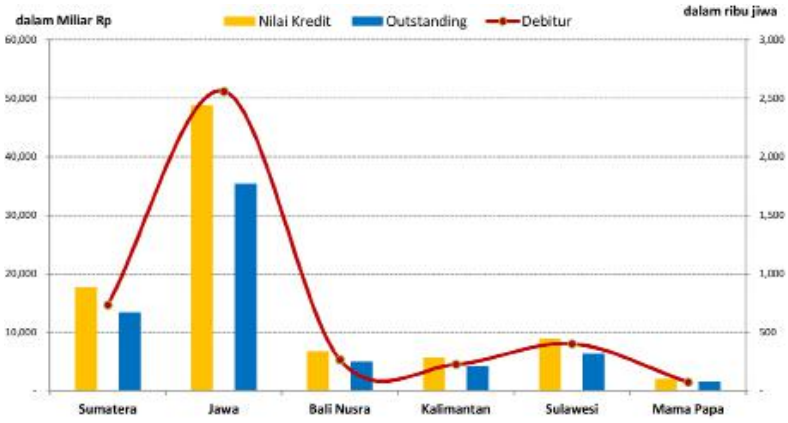

Sampai dengan akhir Desember 2016, dari 27 bank atau lembaga keuangan yang menyalurkan KUR, Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih merupakan bank yang paling diminati masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pinjaman dengan skema subsidi bunga ini. BRI menyalurkan kredit pinjaman KUR sebesar Rp67,23 triliun atau lebih dari 75% dari total kredit yang disalurkan secara nasional. Bahkan apabila dilihat dari sisi jumlah debitur, maka debitur BRI lah yang mengambil porsi terbesar jumlah debitur se-Indonesia yang memanfaatkan KUR yaitu 4,25 juta jiwa atau sebesar 91,68% dari jumlah debitur seluruh Indonesia.

Profil KUR Berdasarkan Lima Bank Penyalur Terbesar Tahun 2016
Sumber: Direktorat SMI (diolah)

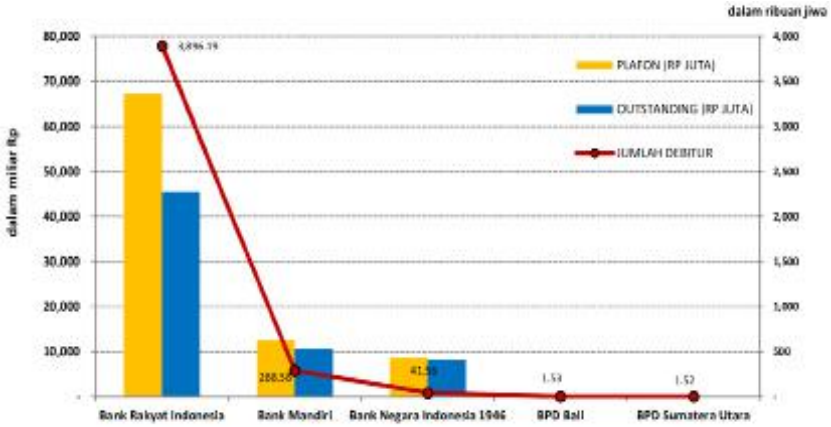

Penyaluran KUR ditujukan pada sektor riil sehingga diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terdapat 11 sektor ekonomi yang dapat memanfaatkan dana KUR, diantaranya *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, perikanan, pertanian, perburuan dan kehutanan, industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran.

Komposisi Penyaluran KUR Berdasarkan Delapan Sektor Usaha Utama Penerima KUR Tahun 2016
Sumber: Direktorat SMI (diolah)

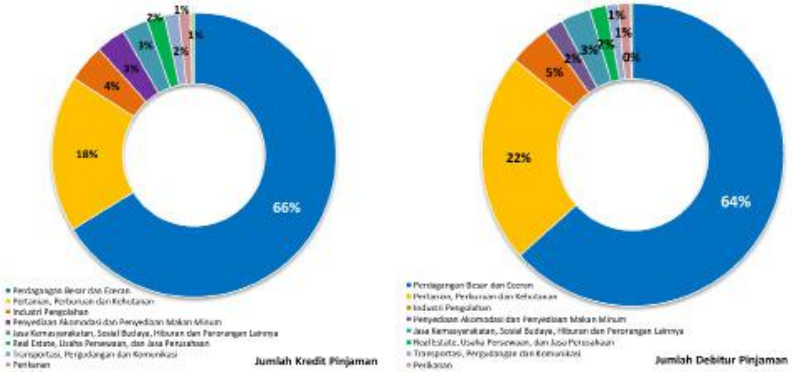

Menurut sektor usaha bahwa kelompok pedagang besar dan eceran sangat mendominasi komposisi penyaluran KUR di Indonesia. Hal tersebut diindikasikan dengan dominannya sektor perdagangan besar dan eceran dalam memanfaatkan dana KUR dengan proporsi dari keseluruhan nilai kredit sebesar 66% dan proporsi dari keseluruhan jumlah debitur sebesar 64%. Selanjutnya, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan diikuti dengan sektor industri pengolahan menempati urutan masing-masing kedua dan ketiga dengan masing-masing proporsi dari keseluruhan dari keseluruhan jumlah debitur sebesar 22% dan 5%.

Untuk periode berikutnya, sangat diharapkan kontribusi sektor lain yang bersifat produktif dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah, misalnya sector pertanian dan perikanan, berperan aktif dalam memanfaatkan pinjaman KUR karena nilai penyaluran KUR di sektor tersebut masih kalah jumlahnya dengan sektor perdagangan dan eceran.

Pelaksanaan APBD

Penyusunan APBD seluruh pemerintah provinsi/kota/kabupaten harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi/kota/kabupaten dengan Pemerintah Pusat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015-2016
(dalam triliun rupiah)
Sumber: KFR Kanwil DJPBN Tahun 2016

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	934,26	888,94	95,15	1.043,64	989,49	94,81
PAD	221,81	211,40	95,31	230,26	226,54	98,38
Pendapatan Transfer	593,98	552,31	92,99	718,66	691,20	96,18
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	118,47	125,23	105,70	94,72	71,75	75,75
Belanja	1.023,26	888,37	86,82	1.104,65	972,68	88,05
Belanja Pegawai	368,53	327,49	88,87	391,09	352,16	90,05
Belanja Modal	240,76	198,51	82,45	257,52	217,33	84,39
Belanja lain	413,98	362,37	87,53	456,04	403,19	88,41
Surplus/Defisit	(89,00)	0,57	-0,64	(61,01)	16,81	-27,55

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki dasar hukum dalam penerimaannya. Terkait hal tersebut, jika dicermati kinerja capaian pendapatan daerah secara keseluruhan dalam APBD tahun 2016 lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian dunia selama tahun 2016 masih berpengaruh terhadap capaian kinerja pendapatan daerah meskipun pada akhir tahun 2016 geliat perekonomian dunia cenderung stabil. Beberapa daerah yang sangat menggantungkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan sedikit banyak terkena imbas dari gejolak perekonomian dunia yang bergerak dinamis.

Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi serapan belanja daerah pada tahun 2016 menunjukkan lebih tinggi dibanding tahun 2015. Dalam rangka memberikan stimulus yang berasal dari APBD, proporsi serapan belanja modal idealnya harus lebih tinggi dari belanja pegawai dan belanja barang. Namun kondisi tersebut tidak tercermin dari realisasi perkembangan APBD tahun 2016. Berbagai faktor telah teridentifikasi terkait rendahnya serapan belanja daerah, diantaranya terlambatnya pengesahan APBD pada sebagian

pemerintah daerah, proses pengadaan barang/jasa yang lama, dan pola pergantian pejabat yang seringkali dilakukan oleh pimpinan. Mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya keras baik dari kementerian teknis selaku pembina pemerintah daerah maupun pemerintah daerah sendiri untuk bersikap disiplin atas pengelolaan keuangan daerah.

Perbandingan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Surplus/Defisit APBD Berdasarkan Regional TA 2015 -2016 (dalam miliar Rp)

Sumber: KFR Kanwil DJPBN Tahun 2016

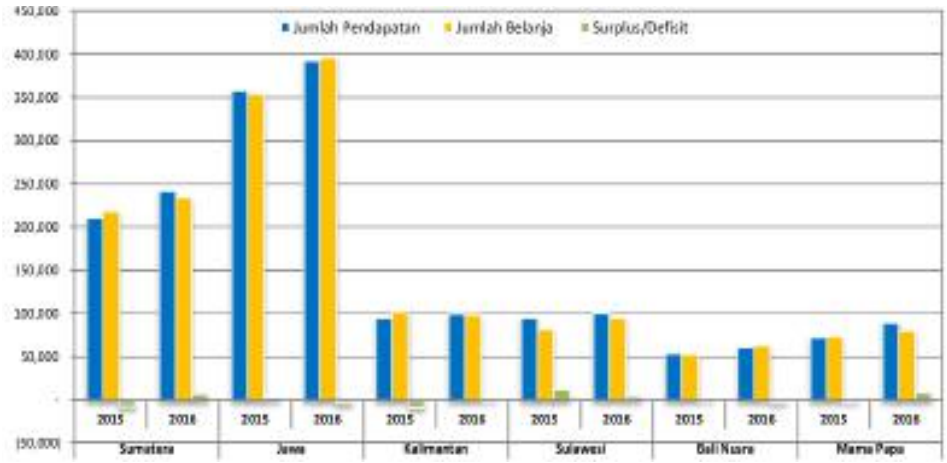

Ditinjau dari realisasi APBD per regional, secara umum pendapatan daerah pada semua kawasan pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga dengan realisasi belanja. Hampir semua kawasan mengalami pertumbuhan positif realisasi belanja daerah, kecuali untuk kawasan Kalimantan yang mengalami negasi pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan per kawasan, baik realisasi pendapatan daerah maupun belanja daerah masing-masing mencapai 12,03% dan 9,96%. Realisasi pertumbuhan pendapatan daerah tertinggi berada di kawasan Maluku dan Papua, yaitu sebesar 23,94% dan terendah berada di kawasan Kalimantan, yaitu sebesar 4,71%. Namun untuk realisasi pertumbuhan belanja daerah tertinggi berada di kawasan Bali Nusra, yaitu sebesar 19,09% dan terendah berada di kawasan Kalimantan dengan besaran minus 4,13%.

Secara agregrat, hanya pemerintah daerah di kawasan Jawa dan Bali Nusra yang mengalami defisit anggaran, masing-masing sebesar Rp3,6 triliun dan Rp2,2 triliun. Sedangkan kawasan lain selain Jawa dan Bali Nusra mengalami surplus anggaran, yaitu Sumatera (Rp7,8 triliun), Kalimantan (Rp966 miliar), Sulawesi (Rp4,8 triliun), dan Maluku Papua (Rp9 triliun).

Rasio Belanja Pegawai

Besarnya rasio belanja pegawai dapat mencerminkan prioritas belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diharapkan porsi belanja pegawai menurun. Melalui pembandingan antara belanja pegawai terhadap total belanja maka akan diperoleh rasio belanja pegawai.

Pada tahun 2016, menunjukkan bahwa rasio belanja pegawai terhadap realisasi belanja secara keseluruhan pada regional

Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Bali Nusra mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan indikasi adanya perbaikan dalam prioritas belanja pada regional tersebut. Diharapkan dengan penurunan rasio belanja pegawai maka terdapat perubahan prioritas belanja menuju belanja modal yang berorientasi kepada pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, kawasan Kalimantan dan Maluku Papua mengalami kenaikan rasio realisasi belanja pegawai terhadap total realisasi belanja secara keseluruhan

Perbandingan Rasio Belanja Pegawai Berdasarkan Regional Tahun Anggaran 2015 -2016
Sumber: DJPK dan DJPB

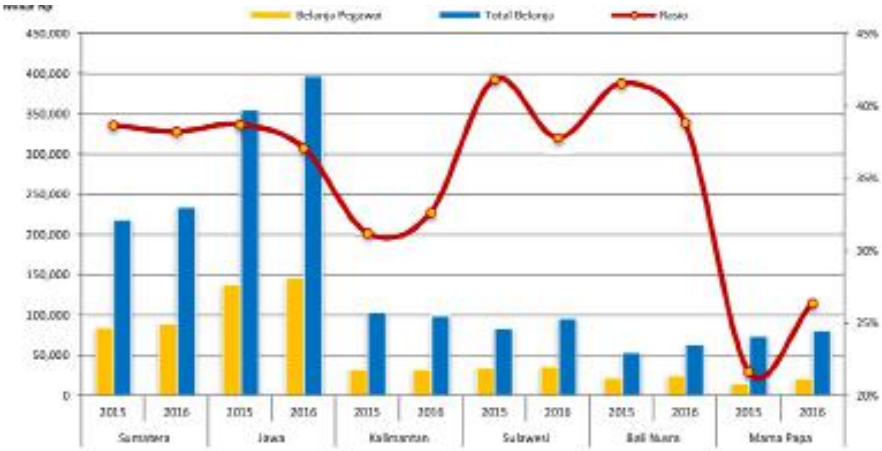

Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat diukur dengan membandingkan antara PAD dengan keseluruhan jumlah pendapatan daerah. Semakin besar kemandirian keuangan daerah, maka daerah semakin memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhannya. Idealnya, alokasi anggaran ini digunakan untuk peningkatan pelayanan publik, misalnya untuk infrastruktur yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan Rasio Kemandirian Berdasarkan Regional TA 2015 -2016
Sumber: DJPK dan DJPB

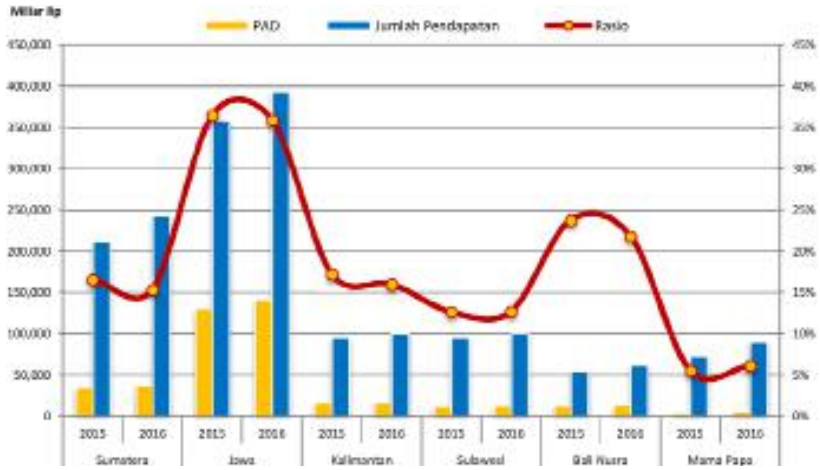

Regional Jawa memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan regional lainnya dalam rentang waktu 2015-2016 di kisaran 35%. Hal ini mengindikasikan regional Jawa lebih memiliki kemampuan mengalokasikan belanja infrastruktur dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi regionalnya. Demikian pula, dengan regional Bali Nusra yang didukung dengan sektor pariwisata yang terdapat pada Provinsi Bali dan sektor pertambangan yang terdapat pada Provinsi Nsua Tenggaran Barat, memiliki kemandirian keuangan daerah yang relatif tinggi dengan rasio berkisar 23%.

Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal merupakan gambaran keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kapasitas fiskal digunakan sebagai dasar pertimbangan pengajuan usulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan; dan / atau hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Peta Kapasitas Fiskal Tahun 2016
Sumber: PMK Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

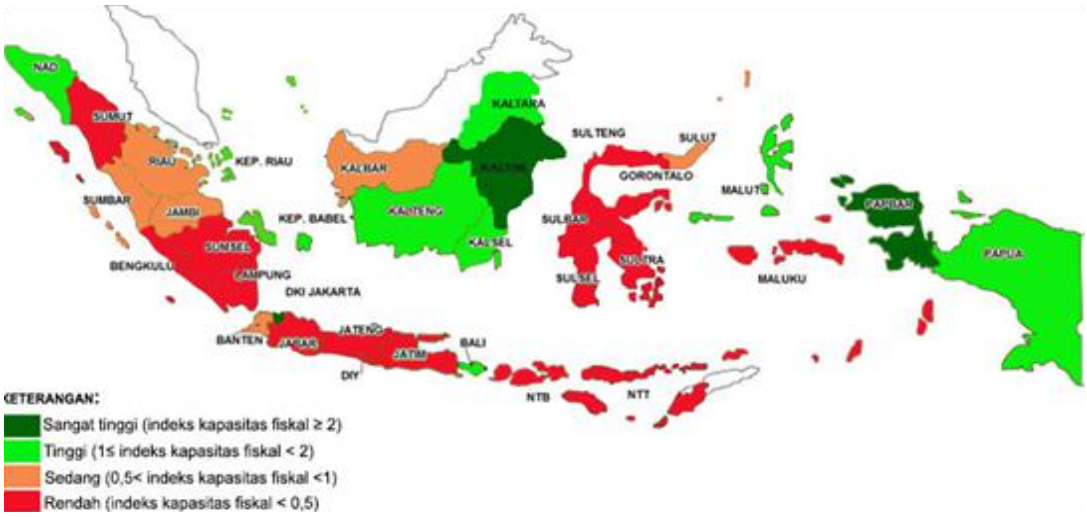

Mayoritas provinsi di Indonesia memiliki kapasitas fiskal kategori rendah, yaitu mencapai 47% atau 16 provinsi dari 34 provinsi. Hanya 9% atau 3 provinsi dengan kapasitas fiskal kategori tinggi yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Dari sisi regional, Kalimantan menjadi satu-satunya wilayah yang seluruh provinsinya memiliki kapasitas fiskal relatif baik (tanpa satupun provinsi dengan kategori kapasitas fiskal rendah). Sebaliknya, Sulawesi menjadi wilayah yang mayoritas provinsinya memiliki kapasitas fiskal kategori rendah dimana dari 6 provinsi di regional Sulawesi terdapat 5 provinsi dengan kategori rendah.

Jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal tahun sebelumnya, kategori indeks kapasitas fiskal tahun 2016 sebagian besar tidak berubah kecuali untuk 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Papua. Kapasitas fiskal tahun 2016 pada Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Papua lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Potensi Keunggulan Daerah

Secara umum potensi keunggulan daerah di Indonesia didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yaitu sebagian besar Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Demikian juga Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat juga memiliki potensi keunggulan yang sama pada sektor ini. Sementara itu, sektor industri pengolahan mendominasi di Jawa yang dikenal dengan daerah-daerah industrinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan di Kalimantan Timur sektor ini menjadi potensi unggulan dengan dimulainya Refinery Development Master Plan (RDMP) berupa peningkatan kapasitas produksi kilang minyak di Balikpapan pada tahun 2016. DKI Jakarta masih menjadi pusat perekonomian dan penggerak perekonomian nasional, Hal ini bisa terjadi mengingat DKI Jakarta terkondisikan menjadi pintu masuk utama perdagangan nasional maupun internasional

Kalimantan Selatan sumber tambangnya cukup besar sebenarnya menyimpan potensi unggulan lain yaitu sektor pertanian. Untuk Sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi primadona bagi Papua dan Sumatera Selatan dalam memperoleh pendapatan asli daerahnya. Sedangkan Bali masih mengunggulkan sektor pariwisata dengan potensi keindahan alam yang dimiliki dan juga kekayaan budayanya yang menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik dan manca negara, Bangka Belitung juga punya potensi besar disektor pariwisata terutama sejak ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. Pulau Suawesi menjadi satu-satunya kawasan yang paling menggunggulkan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan dibandingkan sektor-sektor yang lain.

Peta Potensi Keunggulan DaerahTahun 2016
Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

Perilaku Variabel Fiskal Regional

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2016 yang tumbuh positif berimbas di sektor pendapatan seluruh regional, dimana seluruh 6 wilayah Indonesia mencatat kenaikan pendapatan daerah. Sementara itu, kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat terutama terhadap belanja non produktif seperti belanja perjalanan dinas tampaknya belum menunjukkan dampak signifikan pada tingkat regional. Hal ini terlihat bahwa secara keseluruhan total belanja pada masing-masing regional tetap meningkat, kecuali untuk regional Kalimantan yang mencatat penurunan belanja.

Pergerakan PAD tahun 2016 mengalami kenaikan di seluruh regional kecuali pada Kalimantan. Belum membaiknya sektor pertambangan dan penggalian sebagai penyumbang terbesar PAD wilayah Kalimantan berimbas pada menurunnya realisasi PAD tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan transfer tahun 2016 untuk seluruh regional mengalami kenaikan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa secara umum sumber pendapatan utama kawasan di Indonesia masih berasal dari dana perimbangan.

Perilaku Variabel Fiskal Regional
Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

Uraian	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali Nusra	Maluku Papua
Pendapatan	↑	↑	↑	↑	↑	↑
PAD	↑	↑	↓	↑	↑	↑
Dana Perimbangan	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Belanja	↑	↑	↓	↑	↑	↑
Belanja Pegawai	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Belanja Modal	↑	↑	↓	↑	↑	↑
Surplus/Defisit	↑	↓	↑	↓	↓	↑

Pergerakan belanja pegawai untuk seluruh regional menunjukkan terjadinya kenaikan dan seluruh regional masih didominasi oleh belanja pegawai sebagai pemberi kontribusi realisasi belanja daerah tahun 2016. Di sisi lain, terdapat 1 regional yang mengalami penurunan belanja modal yaitu wilayah Kalimantan di saat kelima regional lainnya mengalami kenaikan. Mayoritas belanja modal masih didominasi untuk membiayai belanja pekerjaan umum, belanja pemerintah umum, belanja pendidikan dan kesehatan.

Terkait surplus/defisit tahun 2016, 3 regional mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Sumatera, Kalimantan dan Maluku Papua, sedangkan 3 regional lainnya mengalami penurunan yaitu Jawa, Sulawesi dan Bali Nusra. Terdapat 2 regional mengalami defisit anggaran daerah, yaitu Jawa dan Bali Nusra. Sedangkan, untuk 4 regional lainnya yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Papua berada dalam posisi surplus, walaupun khusus Sulawesi mengalami penurunan nilai surplus anggaran
.

BAB II

ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN APBN ANTAR WILAYAH 2016

Analisis ini untuk menggambarkan seberapa besar *cash inflow* dan *cash outflow* yang dihadapi oleh daerah pada tahun 2016 dan mengukur subsidi silang yang diberikan oleh daerah dengan kondisi surplus kepada pemerintah pusat yang sebagian diantaranya diterima oleh daerah yang mengalami kondisi defisit. Hasil analisis penerimaan dan pengeluaran APBN antar wilayah, menunjukkan angka penerimaan perpajakan yang besar berasal provinsi-provinsi yang memiliki kegiatan perdagangan dan industri jasa, dan kegiatan ekspor impor dengan skala masif seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten, menjadi provinsi yang surplus dan memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara. Kontribusi penerimaan terbesar dari DKI Jakarta berasal dari penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp466,38 Triliun dan penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp298,55 Triliun. Penerimaan pajak yang tinggi dari DKI Jakarta didukung kondisi bahwa DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan bisnis di Indonesia sehingga berpengaruh pada tingginya penerimaan dari sektor pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Selain itu, aktivitas ekonomi DKI Jakarta ditopang pula dari kawasan industri yang berada di sekeliling DKI Jakarta, yaitu daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Provinsi dengan kondisi defisit umumnya masih terlalu mengandalkan hasil SDA dan bertumpu pada sektor hulu dalam meningkatkan penerimaannya. Pada saat terjadi gejolak penurunan bahan tambang atau komoditas tertentu maka akan berpengaruh terhadap kontribusi provinsi terhadap penerimaan negara, sebagaimana terjadi pada daerah-daerah seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan. Selain itu, aspek pertumbuhan ekonomi sebagian besar daerah yang lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan galian kurang memberikan kontribusi yang menarik terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor pajak.

Ditinjau dari sisi pengeluaran negara, sebagian besar pengeluaran negara dialokasikan untuk kawasan Jawa, Bali, dan Sumatera. Kondisi tersebut menunjukkan provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata, masih memiliki magnet untuk menarik alokasi anggaran belanja dalam jumlah besar dari Pemerintah Pusat. Namun dari sisi hubungannya dengan jumlah penduduk dan letak geografis, belanja pemerintah masih menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan Indonesia timur meskipun jumlah penduduknya sedikit dan relatif jarang.

www.contributorweekly.com

BAB II
Analisis Penerimaan dan Pengeluaran APBN Antar Wilayah 2016

Penerimaan dan Pengeluaran Seluruh Provinsi

Penerimaan

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak, PNBP, dan lainnya. Melalui perhitungan penerimaan negara akan diperoleh informasi kontribusi masing-masing daerah terhadap total penerimaan negara.

Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Penerimaan Perpajakan juga termasuk pajak perdagangan internasional terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Berdasarkan hasil pengelolaan data besaran kontribusi daerah kepada pemerintah pusat, digambarkan sebagai berikut:

Besaran Kontribusi Daerah kepada Pemerintah Pusat Dari Penerimaan Perpajakan Tahun 2016
Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

Keberadaan pusat bisnis pada sebagian daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat berpengaruh pada tingginya penerimaan dari sektor perpajakan

Daerah dengan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar kepada Pemerintah Pusat, yaitu DKI Jakarta (61,57%), Jawa Timur (11,24%), dan Jawa Barat (6,72%). DKI Jakarta memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar kepada Pemerintah Pusat senilai Rp799,83 Triliun dengan penyumbang terbesar dari penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp466,38 Triliun dan penerimaan pajak pertambahan sebesar Rp298,55 Triliun. Penerimaan pajak yang tinggi dari DKI Jakarta didukung kondisi bahwa DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan bisnis di Indonesia. Keberadaan

pusat bisnis di DKI Jakarta berpengaruh pada tingginya penerimaan dari sektor pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dimulai sejak Juli 2016 sangat berpengaruh pula terhadap penerimaan pajak penghasilan di DKI Jakarta. Selain itu, aktivitas ekonomi DKI Jakarta ditopang pula dari kawasan industri yang berada di sekeliling DKI Jakarta, yaitu daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Sementara itu, Jawa Timur berada pada posisi kedua penyumbang penerimaan perpajakan terbesar kepada Pemerintah Pusat senilai Rp146,05 Triliun yang sebagian besar berasal dari penerimaan cukai sebesar Rp64,15 Triliun, penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp41,77 Triliun dan penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp35,10 Triliun. Perekonomian Jawa Timur didukung adanya industri rokok yang telah lama berkembang di Jawa Timur. Industri rokok tersebut menjadi bagian penting dalam peningkatan kontribusi penerimaan negara dari Jawa Timur khususnya penerimaaan cukai. Sementara itu, berbagai kawasan industri Jawa Timur tumbuh dengan cepat pada beberapa dekade terakhir dengan adanya kawasan industri strategis yang dikembangkan oleh PT Pelindo III pada beberapa tempat di Jawa Timur. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kontribusi penerimaan negara dari Jawa Timur dari sektor perpajakan baik dari pajak penghasilan maupun dari pajak pertambahan nilai.

Lima Provinsi dengan Penerimaan Pajak Tertinggi Tahun 2016 (dalam Triliun Rp)

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

No	Provinsi	PPh	PPN	PBB	Cukai	Pajak Lainnya	Bea Masuk dan Keluar	Jumlah
1	DKI Jakarta	466,38	298,55	15,01	0,31	4,55	15,03	799,83
2	Jawa Timur	41,77	35,10	0,08	64,15	0,52	4,50	146,10
3	Jawa Barat	38,82	27,73	0,07	18,84	0,65	1,16	87,27
4	Jawa Tengah	24,23	14,71	0,02	27,37	0,38	1,87	68,59
5	Banten	18,30	15,09	0,01	1,55	0,22	5,23	40,39

Kontribusi penerimaan perpajakan kepada pemerintah pusat pada tahun 2016 masih sangat rendah pada sebagian besar provinsi dengan angka realisasi di bawah Rp10 Triliun

Jawa Barat memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar ketiga senilai Rp87,27 Triliun yang berasal dari kontribusi penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp38,82 Triliun, penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp27,73 Triliun, dan penerimaan cukai sebesar Rp18,84 Triliun. Kondisi Jawa Barat yang relatif dekat dengan DKI Jakarta memberikan keuntungan terhadap masuknya investasi. Salah satunya adalah kemudahan akses transportasi bagi pengiriman hasil produk perusahaan dari kawasan industri dan adanya dukungan nyata dari Pemda bagi investor untuk berinvestasi di daerah Jawa Barat. Kondisi demikian, semakin meningkatkan jumlah kawasan industri di Jawa Barat sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Secara umum, kontribusi penerimaan pajak per provinsi kepada pemerintah pusat pada tahun 2016 masih sangat rendah pada sebagian besar provinsi. Hal tersebut tercermin dari jumlah provinsi dengan realisasi penerimaan pajak dibawah Rp10 Triliun sebanyak

25 provinsi, dan hanya terdapat dua provinsi dengan realisasi penerimaan pajak diatas Rp100 Triliun, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP terdiri dari pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba BUMN/kekayaan negara dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Kontribusi tertinggi PNBP nasional tahun 2016 berasal dari DKI Jakarta, disusul Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

DKI Jakarta memberikan kontribusi terbesar untuk PNBP nasional sebesar Rp112,32 Triliun. Nilai tersebut berasal dari kontribusi PNBP Bagian laba BUMN/Kekayaan NegaraDipisahkan/Lainnya sebesar Rp90,95 Triliun, diikuti dari pendapatan BLU sebesar Rp21,36Triliun, dan PNBP terkecil dari Pendapatan PNBP SDA sebesar Rp3,89 Miliar.

Besaran Kontribusi Daerah kepada Pemerintah Pusat Dari Penerimaaan Negara Bukan Pajak Tahun 2016

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

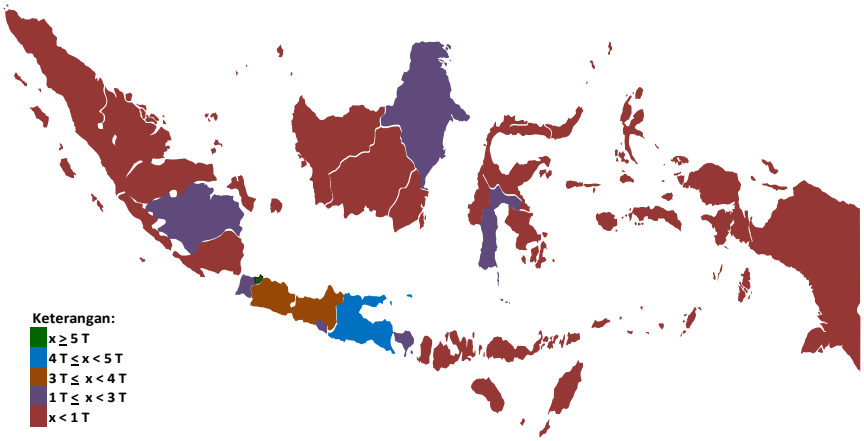

Total realisasi PNBP senilai Rp203,72 Triliun juga masih terkonsentrasi pada wilayah Jawa utamanya DKI Jakarta, namun untuk PNBP angka tertinggi kedua terdapat di wilayah Kalimantan dengan PNBP yang besar dari SDA.

Lima Provinsi dengan Penerimaan Pajak Tertinggi Tahun 2016 (dalam Triliun Rp)

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

**) penyesuaian nilai dolar ke rupiah harga tengah BI per 31 Desember 2016)*

No	Provinsi	SDA*)	BAG. LABA BUMN/KN DIPISAHKAN	PNBP LAINNYA	JUMLAH
1	DKI Jakarta	3,89	90.954,33	21.364,72	112.322,94
2	Kaltim	9.292,97	902,31	183,81	10.379,10
3	Jawa Timur	0,94	2.056,70	2.469,05	4.526,69
4	Kalsel	3.032,35	724,89	22,52	3.779,76
5	Jawa Tengah	0,44	1.186,30	2.540,11	3.726,85

Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan kaya akan hasil tambang minyak dan mineral sehingga mencatatkan angka PNBP SDA yang paling besar di antara seluruh provinsi di Indonesia, yaitu

Realisasi PNBP masih terkonsentrasi pada wilayah Jawa utamanya DKI Jakarta, namun untuk PNBP dari SDA realisasi tertinggi di Provinsi Kaltim

Kalimantan Timur Rp9,29 Triliun dan Kalimantan Selatan Rp3,03 Triliun. Besarnya dominasi PNBP SDA atas kontribusi penerimaan pada sebagian provinsi membuktikan tingginya ketergantungan provinsi-provinsi tersebut atas sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara, dengan penerimaan yang besar ini seharusnya pemerintah mengupayakan sumber penerimaan yang lain juga ikut naik secara signifikan dengan didukung oleh besarnya penerimaan dari SDA

Memperhatikan realisasi penerimaan negara (*cash inflow*) berdasarkan kawasan/regional, menunjukkan bahwa perekonomian masih berpusat pada kawasan Jawa dan Bali. Sementara itu, semakin ke kawasan timur maka kontribusi kawasan terhadap penerimaan negara semakin kecil. Kontribusi daerah kepada penerimaan negara jika disajikan berdasarkan kawasan/regional adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Menurut Kawasan/Regional Tahun 2016 (Dalam Miliar Rp)

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

No	Kawasan/Regional	Pajak	PNBP
1	Sumatera	76.915,81	7.426,34
2	Jawa Bali	1.155.086,56	127.653,98
3	Kalimantan	33.144,59	15.415,85
4	Sulawesi	18.030,68	3.771,99
5	NTB & NTT	5.764,46	1.830,46
6	Maluku, Malut, Papua Barat & Papua	12.880,09	2.479,88
	Jumlah	**1.301.822,20**	**158.578,51**

Pengeluaran

Pengeluaran pemerintah merupakan belanja pemerintah ke daerah yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Belanja Pemerintah Pusat

Kewenangan pelaksanaan anggaran dari dana APBN dilaksanakan oleh Satker Pemerintah Pusat dan Satker Pemerintah Daerah. Sesuai dengan kewenangan pelaksanaan anggaran dari dana APBN, Satker Pemerintah Pusat melaksanakan kewenangan Kantor Pusat (KP) dan Kewenangan Kantor Daerah (KD). Sementara itu, kewenangan pelaksanaan anggaran dari dana APBN yang dilaksanakan oleh Satker Pemerintah Daerah meliputi kewenangan Dana Dekonsentrasi (DK), kewenangan Tugas Pembantuan (TP), dan kewenangan Urusan Bersama (UB).

Kewenangan KP/KD

Kewenangan KP yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada Satker lingkup kantor pusat K/L, termasuk di dalamnya Satker Badan Layanan Umum (BLU) pada kantor pusat, dan Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT). Sementara itu, kewenangan KD yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada Kantor /Instansi Vertikal K/L di

daerah termasuk di dalamnya untuk Satker BLU di daerah. Secara total pengeluaran pemerintah pusat ke daerah digambarkan sebagai berikut:

Pengeluaran Pemerintah Pusat Untuk Daerah Melalui DIPA Kantor Pusat dan Kantor Daerah Tahun 2016

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

Total realisasi belanja pemerintah pusat melalui kewenangan KP/KD yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga adalah sebesar Rp725,54 Triliun. Realisasi belanja paling tinggi terjadi pada provinsi di pulau Jawa, yaitu dengan urutan tertinggi pada DKI Jakarta sebesar Rp427,86 Triliun, Jawa Barat sebesar Rp34,87 Triliun, Jawa Timur sebesar Rp33,96 Triliun, dan Jawa Tengah sebesar Rp28,13 Triliun.

Lima Provinsi dengan Belanja Kewenangan KP/KD Tertinggi Tahun 2016 (dalam Miliar Rp)

Sumber:KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

No	Provinsi	Kantor Pusat	Kantor Daerah	Jumlah
1	DKI Jakarta	411.589,36	16.279,37	427.868,73
2	Jawa Barat	14.311,19	20.566,24	34.877,44
3	Jawa Timur	12.178,34	21.790,67	33.969,01
4	Jawa Tengah	9.434,10	18.698,83	28.132,93
5	Sulawesi Selatan	5.811,13	9.722,03	15.533,16

Beberapa provinsi di luar Jawa yang mencatatkan angka belanja KP/KD cukup tinggi seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua karena jumlah satker vertikal yang banyak di Provinsi-provinsi tersebut

Realisasi belanja pemerintah pusat pada DKI Jakarta sangat tinggi karena semua kantor pusat kementerian negara/lembaga berlokasi di DKI Jakarta. DIPA dengan kewenangan Kantor Pusat (KP) pada Kementerian negara/lembaga yang memiliki pagu besar seperti Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Keuangan, dialokasikan di DKI Jakarta.

Beberapa provinsi di luar Jawa yang mencatatkan angka belanja KP/KD cukup tinggi yaitu Sumatera Utara sebesar Rp15,41 Triliun, Sulawesi Selatan sebesar Rp15,53 Triliun, dan Papua sebesar Rp11,42 Triliun. Ketiga provinsi tersebut mendapatkan belanja pemerintah pusat cukup besar karena sebagian satker dengan unit vertikal berada di provinsi tersebut.

Realisasi belanja pemerintah pusat untuk kewenangan KP/KD yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga pada seluruh provinsi mencatatkan angka rata-rata diatas Rp3 Triliun kecuali pada tiga provinsi yaitu Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung (berada dibawah Rp2 Triliun). Ketiga provinsi terendah yang merealisasikan belanja KP/KD merupakan provinsi-provinsi baru hasil pemekaran sehingga sebagian kementerian negara/lembaga belum memiliki banyak kantor vertikal di provinsi-provinsi tersebut untuk menyalurkan dana kewenangan KP/KD. Tiga provinsi yang mencatatkan realisasi dana KP/KD diatas Rp30 Triliun yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Hal tersebut sejalan dengan kondisi provinsi yang selama ini menjadi pusat pemerintahan atau menjadi provinsi yang memiliki banyak kantor vertikal dari kementerian negara/lembaga.

Kewenangan DK/TP/UB

Kewenangan DK yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Dekonsentrasi yang diberikan kepada SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. Kewenangan TP yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi tugas pembantuan. Kewenangan UB yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Urusan Bersama yang diberikan kepada SKPD Provinsi/ Kabupaten /Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan usulan Kepala Daerah.

Lima Provinsi Dengan Realisasi Belanja Dana DK/TP/UB Terbesar Tahun 2016

Sumber:KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

No	Provinsi	Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama	Jumlah
1	Jawa Timur	507,91	1.266,12	21,37	1.795,41
2	Sulawesi Selatan	336,56	1.210,01	-	1.546,57
3	Jawa Tengah	452,46	1.000,31	-	1.452,77
4	Sumatera Selatan	251,06	1.147,62	52,93	1.451,61
5	Jawa Barat	397,31	947,68	34,38	1.379,36

Penyaluran belanja pemerintah pusat melalui dana DK/TP/ UB pada provinsi/kabupaten/ kota melalui DIPA kementerian negara/lembaga terealisasi antara Rp98 Miliar sampai dengan Rp1,79 Triliun untuk setiap provinsi.

Realisasi belanja pemerintah pusat untuk kewenangan DK/TP/UB paling tinggi terealisasi di Jawa Timur sebesar Rp1,79 Triliun, diikuti Sulawesi Selatan sebesar Rp1,54 Triliun, serta Jawa Tengah dan Sumatera Selatan sebesar Rp 1,45 Triliun. Realisasi DIPA DK/TP/UB untuk Pemda pada kawasan Kalimantan dengan nilai realisasi yang cukup tinggi, yaitu Kalimantan Barat sebesar Rp1,05 Triliun. Dana TP sebagian besar untuk kegiatan yang bersifat fisik dan menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah. Kewenangan dekonsentrasi yang digunakan untuk kegiatan bersifat non fisik berupa keluaran yang tidak menambah aset, diberikan relatif merata pada seluruh provinsi di Indonesia yaitu berkisar ratusan miliar rupiah.

Pengeluaran Pemerintah Pusat Untuk Daerah Melalui DIPA Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama Tahun 2016

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

Nilai penyaluran belanja pemerintah pusat menurut kewenangan DK/TP/UB yang mencapai Rp24,22 Triliun lebih rendah dibandingkan kewenangan KP/KD sebesar Rp725,54 Triliun. Namun demikian, angka realisasi atas kewenangan DK/TP/UB yang disalurkan kepada pemerintah daerah tersebut seharusnya dapat menjadi pendukung dana transfer ke daerah bagi provinsi/kabupaten/kota.

Penyaluran belanja pemerintah pusat melalui dana DK/TP/UB yang dilaksanakan oleh SKPD di provinsi/kabupaten/kota melalui DIPA kementerian negara/lembaga terealisasi antara Rp98 Miliar sampai dengan Rp1,79 Triliun untuk setiap provinsi.

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Daerah menerima penyaluran DAU setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi. Untuk bulan Januari, daerah menerima pada hari kerja pertama dan untuk bulan berikutnya menerima 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama. Pada bulan Januari daerah akan menerima dua kali dana DAU yaitu untuk bulan Januari dan untuk bulan Februari.

Lima Provinsi Penerima DAU Tertinggi Tahun 2016

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

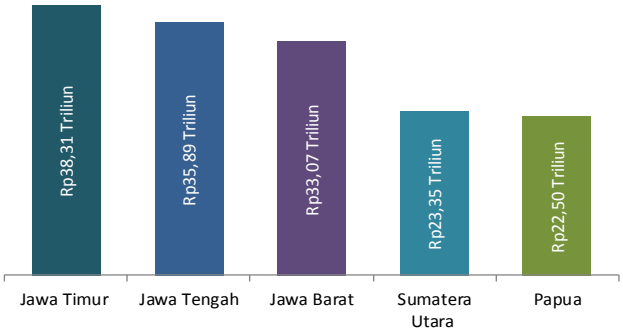

DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang tidak menerima DAU karena kemandirian fiskal yang sudah sangat tinggi.

DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang tidak menerima DAU karena kemandirian fiskal yang sudah sangat tinggi. Dari total realisasi DAU sebesar Rp385,36 Triliun, tiga provinsi di Pulau Jawa menjadi penerima terbesar penerima DAU yaitu JawaTimur sebesar Rp38,31 Triliun, diikuti Jawa Tengah sebesar Rp35,88 Triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp33,06 Triliun. Daerah yang paling sedikit menerima DAU adalah Kalimantan Utara sebesar Rp3,34 Triliun, Kepulauan Riau sebesar Rp3,83 Triliun, dan Gorontalo sebesar Rp3,95 Triliun.

Pengeluaran Pemerintah Pusat Untuk Daerah
Melalui DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DAU) Tahun 2016

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

Penentuan daerah untuk perhitungan DAU adalah berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Provinsi atau daerah yang menerima DAU besar memiliki celah fiskal yang besar yaitu kebutuhan fiskal daerah jauh lebih besar dibandingkan kapasitas fiskal daerah, dan jumlah gaji PNS daerah terkait sangat besar untuk dijadikan dasar perhitungan alokasi dasar DAU.

Pemerintah pada tahun 2016 melakukan pengendalian pelaksanaan APBN terhadap penyaluran DAU untuk 169 daerah sebesar Rp19,42 Triliun. Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran DAU tersebut didasarkan pada kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas masing-masing daerah pada akhir tahun 2016.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik dan non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah menerima penyaluran DAK Fisik secara triwulanan per bidang sedangkan penyaluran DAK Non Fisik disesuaikan dengan jenisnya.

Lima Provinsi Penerima DAK Tertinggi Tahun 2016

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

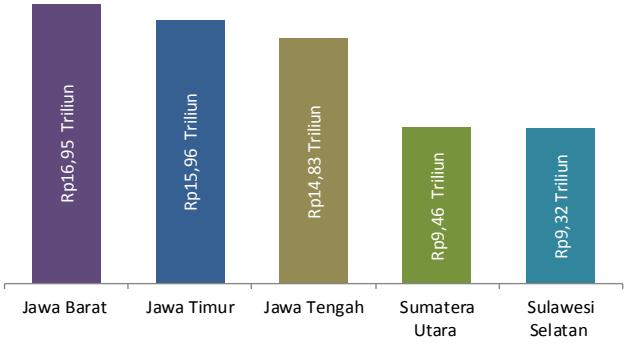

Diperlukan penyesuaian prioritas pembangunan fisik dan non fisik pemerintah daerah dengan prioritas nasional sehingga suatu daerah akan mendapatkan DAK yang lebih besar

Daerah yang memperoleh DAK terbesar, yaitu Jawa Barat sebesar Rp16,95 Triliun, Jawa Timur sebesar Rp15,95 Triliun, dan Jawa Tengah sebesar Rp14,83 Triliun. Meskipun penerima DAK terendah bukan daerah di kawasan timur Indonesia, namun ketiga penerima DAK terbesar adalah provinsi di daerah Jawa yang sudah dikenal lebih maju dibandingkan daerah-daerah lainnya, sehingga nampak kalau DAK masih lebih banyak terealisasi di Pulau Jawa. Terkait dengan hal tersebut, memang diperlukan penyesuaian prioritas pembangunan fisik dan non fisik pemerintah daerah dengan prioritas nasional sehingga suatu daerah akan mendapatkan DAK yang lebih besar.

Pengeluaran Pemerintah Pusat Untuk Daerah Melalui DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DAK) Tahun 2016

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

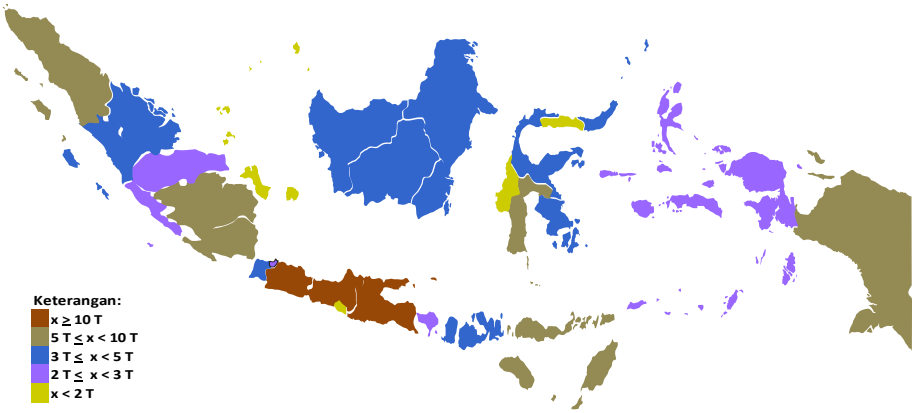

Penyaluran DAK pada seluruh provinsi tersebar merata berdasarkan kesesuaian kegiatan fisik dan non fisik di daerah dengan skala prioritas nasional. Terdapat enam provinsi yang menerima DAK di bawah Rp2 Triliun yaitu: DI Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya

Alam (SDA). DBH Pajak terdiri dari PBB, PPh Pasal 21 dan PPh Pajak Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). DBH SDA merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.

Lima Provinsi Penerima DBH Tertinggi Tahun 2016

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

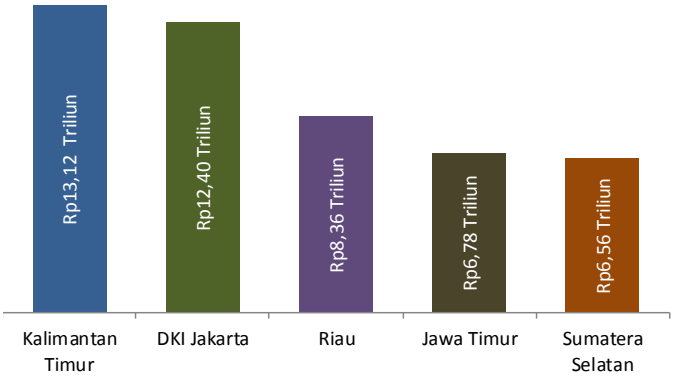

Provinsi penerima DBH terbesar terkenal dengan hasil tambangnya berupa minyak dan gas alam, sedangkan DKI Jakarta merupakan provinsi yang memilki penerimaan pajak dan PNBP terbesar di Indonesia

Dana bagi Hasil merupakan persentase tertentu yang diberikan pusat kepada daerah berdasarkan realisasi penerimaan tertentu dalam rangka desentralisasi, maka provinsi penerima DBH terbesar adalah Kalimantan Timur sebesar Rp13,12 Triliun, DKI Jakarta sebesar Rp12,40 Triliun, dan Riau sebesar Rp8,35 Triliun. Dua provinsi penerima DBH terbesar adalah provinsi-provinsi yang terkenal dengan hasil tambangnya berupa minyak dan gas alam, sedangkan DKI Jakarta secara umum merupakan provinsi yang memilki penerimaan pajak dan PNBP terbesar di Indonesia.

Bukan sesuatu yang mengherankan apabila Kalimantan Timur masih menjadi provinsi yang merealisasikan DBH terbesar pada tahun 2016, meskipun DBH tahun 2016 untuk Kalimantan Timur terpaksa harus dipotong oleh pemerintah pusat sebesar Rp1,57 Triliun. Kalimantan Timur dikaruniai dengan berbagai macam jenis komoditas pertambangan yang meliputi minyak bumi, Gas dan batubara. Cadangan (Cadangan terbukti dan potensial) minyak sekitar 1,3 Miliar barel atau 13% dari cadangan minyak nasional yang besarnya 9,7 dan memiliki cadangan gas total sebesar 47,8 TCF (*Trilion Cubic Feet*) atau setara dengan 8 miliar barel minyak, atau hampir setara dengan cadangan minyak nasional. DKI Jakarta menerima DBH dari sektor perpajakan karena selama ini Jakarta telah menjadi pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat jasa di Indonesia, sehingga Jakarta mencatatkan diri sebagai provinsi terbesar kedua penerima DBH setelah Kalimantan Timur.

Dana Desa (DD)

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan

pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah Pusat Untuk Daerah

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

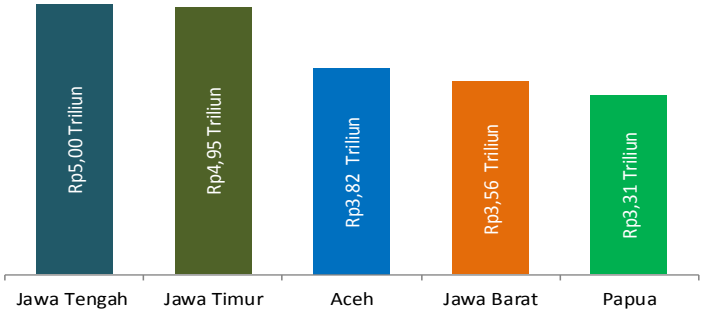

Sebagian besar provinsi menerima dana desa antara Rp500 Miliar sampai dengan Rp1,5 Triliun, sedangkan yang lain hanya menerima dana desa di bawah Rp500 Miliar

Berdasarkan perhitungan dengan alokasi dasar maka setiap desa memperoleh Rp565,64 juta per desa dan ditambah dengan perhitungan dengan alokasi formula, maka porsi terbesar transfer Dana Desa melalui DIPA tahun 2016 diberikan kepada Jawa Tengah sebesar Rp5,0 Triliun (7.809 desa), kemudian Jawa Timur sebesar Rp4,9 Triliun (7.724 desa), dan selanjutnya Aceh sebesar Rp3,8 Triliun (6.474 desa). Untuk Provinsi DKI Jakarta tidak memperoleh Dana Desa.

Alokasi Dana Desa pada TA 2016 terserap sebesar Rp46,67 Triliun yang tersebar pada 74.754 desa. Sebagian besar provinsi (17 provinsi) menerima dana desa antara Rp500 Miliar sampai dengan Rp1,5 Triliun, sedangkan beberapa provinsi hanya menerima dana desa di bawah Rp500 Miliar (8 provinsi).

Transfer Lainnya

Pemerintah Pusat melakukan transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, transfer dana penyesuaian meliputi tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

Lima Provinsi Penerima Transfer Lainnya Tertinggi Tahun 2016

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

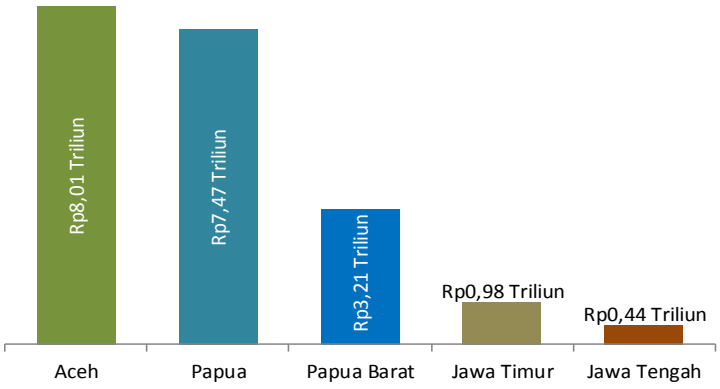

Pengeluaran Pemerintah Pusat untuk daerah melalui DIPA transfer ke daerah berupa dana lainnya yang mencakup Dana Otonomi Khusus yang disampaikan kepada Provinsi Aceh sebesar Rp7,7 Triliun, Provinsi Papua sebesar Rp7,3 Triliun, dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp3,1 Triliun. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus terdiri atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat.

Alokasi Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan pemerintah setara dengan 2% (dua persen) dari pagu DAU nasional.

Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh masing-masing setara dengan 2% (dua persen) dari pagu DAU nasional. Dana Otonomi Khusus merupakan dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh digunakan untuk membiayai pembangunan terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Pemerintah Pusat menyampaikan Dana Insentif Daerah kepada seluruh Provinsi kecuali Provinsi DKI Jakarta. Penerima Dana Insentif Daerah terbesar pada tahun 2016 yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar Rp982,89 Miliar. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat pada urutan kedua dan ketiga sebagai penerima DID terbesar masing-masing sebesar Rp443,07 Miliar dan Rp418,13 Miliar.

Pada bagian sebelumnya, telah diulas mengenai pengeluaran pemerintah pusat kepada daerah yang disajikan berdasarkan provinsi. Selanjutnya, apabila pengeluaran pemerintah pusat kepada daerah disajikan berdasarkan kawasan/regional didapatkan data sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Pusat Menurut Kawasan/Regional Tahun 2016 (Dalam Miliar Rp)

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

No	Kawasan/Regional	Belanja Pemerintah Pusat	Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa
1	Sumatera	77.309,71	193.486,54
2	Jawa Bali	553.397,40	233.956,36
3	Kalimantan	29.750,24	79.411,33
4	Sulawesi	42.556,99	85.683,96
5	NTB & NTT	14.317,83	35.446,91
6	Maluku, Malut, Papua Barat & Papua	28.768,96	82.440,80
	Jumlah	**746.101,12**	**710.425,91**

Surplus Defisit

Selisih antara kontribusi penerimaan negara pada suatu daerah terhadap penerimaan nasional dengan pengeluaran pemerintah pusat pada daerah tersebut akan menghasilan surplus/defisit. Kondisi surplus mengindikasikan bahwa daerah tersebut memberikan subsidi silang kepada daerah lain di Indonesia. Sementara itu, kondisi defisit mengindikasikan bahwa daerah tersebut menerima subsidi silang dari daerah lain di Indonesia. Kondisi surplus/defisit ini akan menunjukkan kemandirian fiskal dari daerah tersebut.

Surplus/Defisit Provinsi dan Kawasan Tahun 2016

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

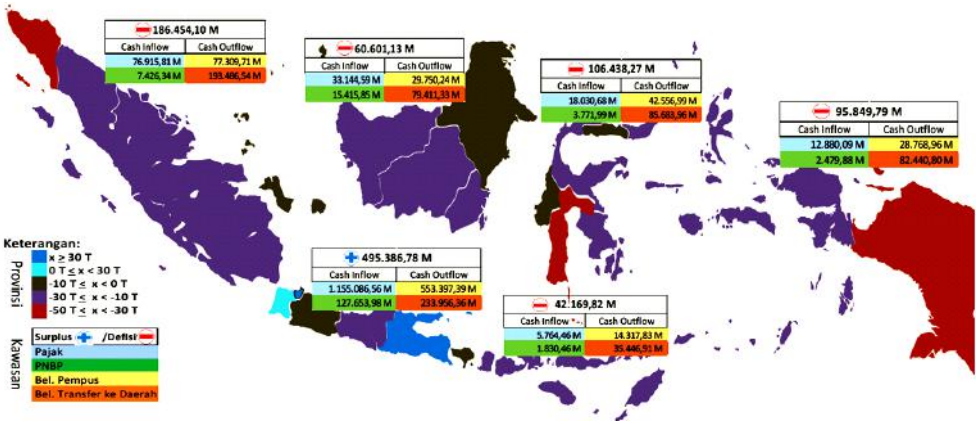

Kawasan Jawa dan Bali menjadi satu-satunya kawasan yang mencatatkan angka surplus apabila dibandingkan nilai total penerimaan pemerintah pusat dengan total belanja pusat pada setiap kawasan

Kawasan Jawa dan Bali menjadi satu-satunya kawasan yang mencatatkan angka surplus apabila dibandingkan antara nilai total penerimaan pemerintah pusat melalui pajak dan PNBP dengan belanja pusat melalui belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah dan Dana Desa. Angka penerimaan tersebut paling banyak berasal dari provinsi DKI Jakarta yaitu Rp799,83 Triliun dari sektor pajak dan Rp112,32 Triliun dari sektor PNBP. Aktivitas perekonomian yang cukup tinggi dan lokasi berkantor kementerian negara/lembaga dan BUMN pada ibukota Indonesia, mendorong peningkatan penerimaan yang cukup pesat di DKI Jakarta. Selain itu, kawasan Jawa juga ditopang oleh kegiatan perekonomian Jawa Timur dan Banten sebagai provinsi penggerak sektor bisnis dan riil yang secara langsung berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Sementara itu, dari sisi defisit bahwa kawasan Sumatera menjadi penyumbang selisih defisit paling besar, diikuti kawasan Sulawesi, dan kawasan Maluku dan Papua. Provinsi yang sebagian besar mengandalkan SDA sangat terpengaruh atas penurunan harga minyak dunia dan komoditas sehingga berdampak pada penurunan penerimaan dan menunjukkan defisit. Dengan demikian, informasi ini berarti bahwa kontribusi penerimaan negara dari kawasan Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur lebih kecil daripada pengeluaran pemerintah pusat pada kawasan tersebut, dan kawasan ini menerima subsidi silang dari kawasan Jawa dan Bali.

Angka Surplus/Defisit Provinsi Tahun 2016 (Dalam Miliar Rp)

Sumber: KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

No	Provinsi	Surplus/Defisit	No	Provinsi	Surplus/Defisit
1	Aceh	**(39.803,88)**	18	Kalimantan Tengah	(17.262,06)
2	Sumatera Utara	(27.425,33)	19	Kalimantan Selatan	(13.917,24)
3	Sumatera Barat	(22.606,47)	20	Kalimantan Timur *)	(9.170,35)
4	Riau	(12.700,78)	21	Sulawesi Utara	(16.437,24)
5	Kepulauan Riau	(5.693,90)	22	Sulawesi Tengah	(18.125,34)
6	Jambi	(14.326,54)	23	Sulawesi Selatan	**(35.619,16)**
7	Sumatera Selatan	(24.720,54)	24	Sulawesi Tenggara	(18.762,46)
8	Lampung	(20.586,85)	25	Sulawesi Barat	(8.660,57)
9	Bengkulu	(11.790,36)	26	Gorontalo	(8.833,49)
10	Kepulauan Bangka Belitung	(6.799,45)	27	Bali	(8.152,41)
11	Banten	19.517,66	28	Nusa Tenggara Barat	(16.706,62)
12	DKI Jakarta	471.137,22	29	Nusa Tenggara Timur	(25.463,19)
13	Jawa Barat	(5.648,78)	30	Maluku	(16.405,83)
14	Jawa Tengah	(16.309,04)	31	Maluku Utara	(12.193,77)
15	Di Yogyakarta	(10.334,03)	32	Papua	(45.805,96)
16	Jawa Timur	47.886,74	33	Papua Barat	(21.444,24)
17	Kalimantan Barat	(20.251,48)			

**) Termasuk Kalimantan Utara*

Dari selisih antara kontribusi daerah kepada Pemerintah Pusat (cash inflow) dan pengeluaran Pemerintah Pusat untuk Daerah (*cash outflow*) dapat diketahui surplus/defisit pendanaan daerah. Pada tahun 2016 hanya terdapat tiga Provinsi yang mengalami surplus pendanaan, yaitu DKI Jakarta sebesar Rp471.137,22 Triliun, Jawa Timur sebesar Rp47.886,74 Triliun, dan Banten sebesar Rp19.517,66 Triliun.

Informasi ini berarti bahwa penerimaan negara pada DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten lebih besar daripada pengeluaran pemerintah pusat pada ketiga provinsi tersebut, dan surplus dari ketiga provinsi tersebut memberikan subsidi silang kepada wilayah lain di Indonesia.

Daerah yang mengalami defisit terbesar pada tahun 2016 yaitu Papua sebesar Rp45.805,96 Triliun, kemudian pada urutan kedua dan ketiga yaitu Aceh dan Sulawesi Selatan masing-masing sebesar Rp39.803,88 Triliun dan Rp35.619,16 Triliun. Informasi ini berarti bahwa penerimaan negara pada selain Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten menerima subsidi silang yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat dari ketiga wilayah ini.

Proporsi belanja negara yang diterima oleh hampir seluruh kawasan memberikan informasi penting mengenai arah pengembangan pembangunan didasarkan atas berbagai hal meliputi konsentrasi jumlah penduduk, konsentrasi arus barang/jasa, dan konsentrasi aktivitas ekonomi. Arus pergerakan barang/jasa yang dihasilkan dari kawasan Jawa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan yang lain. Kondisi tersebut memiliki magnet untuk menarik alokasi

anggaran belanja yang relatif lebih besar dari Pemerintah Pusat.

Kawasan Jawa Bali dan Sumatera mendominasi pengeluaran belanja negara dengan berbagai daya tarik meliputi bidang pariwisata, perdagangan, dan kegiatan industri. Tingginya belanja negara dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan pembangunan di Kawasan Jawa Bali dan Sumatera. Sementara, kawasan diluar Jawa Bali dan Sumatera yang menerima lebih sedikit cenderung akan lebih tertinggal dibanding kawasan tersebut.

Analisis Penerimaan dan Pengeluaran

Aktivitas Ekonomi

Aktivitas ekonomi yang tinggi pada sebagian besar provinsi di kawasan Jawa memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan penerimaan perpajakan

Aktivitas ekonomi yang tinggi pada sebagian besar provinsi di kawasan Jawa memberikan dampak secara langsung terhadap peningkatan penerimaan perpajakan. Aktivitas ekonomi tersebut mendorong berbagai potensi ekonomi di DKI Jakarta dan Jawa Timur. DKI Jakarta sebagai ibukota negara menjadi provinsi yang menarik bagi sebagian para pemilik modal besar dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi.

DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan bisnis. Aktivitas perekonomian di DKI Jakarta ditopang oleh industri di kawasan Jabodetabek dan kegiatan ekspor impor dari pelabuhan Tanjung Priok. Begitu pula dengan banyaknya bisnis BUMN, perusahaan besar dalam negeri dan perusahaan dengan modal asing yang berpusat di DKI Jakarta. Hal ini ditunjukkan pula dari jumlah wajib pajak badan dari perusahaan terbesar dan orang pribadi yang kaya tercatat di DKI Jakarta. Kondisi tersebut mendorong peningkatan pula atas kontribusi wilayah DKI Jakarta terhadap peningkatan penerimaan negara khususnya penerimaan pajak. Selain itu, semakin berkembangkannya sektor barang kebutuhan industri berdampak pada peningkatan PPN.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah penerimaan negara dari sisi PNBP dari DKI Jakarta relatif sangat besar jika dibanding dengan daerah lain. Kinerja tersebut disebabkan oleh sebagian besar instansi pemerintah yang mengelola PNBP berlokasi di DKI Jakarta. Dengan demikian, semakin menambah kontribusi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat khususnya PNBP. Sebagian PNBP dari DKI Jakarta berasal dari pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN/ BUMD memberikan sumbangan terbesar Rp35,52 Triliun, diikuti pendapatan jasa Rp26,10 Triliun dan pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp20,16 Triliun.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran negara yang ditujukan ke Provinsi DKI Jakarta, bahwa DKI Jakarta tidak menerima DAU dan dana desa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kondisi provinsi yang sudah mandiri dalam keuangan daerahnya. DAU yang didefinisikan sebagai dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat dalam rangka pemerataan kemampuan daerah sehingga dengan definisi tersebut maka patut disebut sebagai DKI Jakarta yang tidak memerlukan dana alokasi

umum. Surplus keuangan daerah DKI Jakarta yang diindikasikan dengan tingginya pendapatan asli daerah perlu menjadi pembelajaran bagi provinsi lain di Indonesia.

Sementara itu, Jawa Timur terkenal dengan berbagai daerah strategis dalam perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Jawa Timur memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan cukai nasional, yaitu sebesar 56,47%. Penerimaan cukai dari Jawa Timur tersebut disumbang sebagian besar dari cukai rokok. Beberapa pabrik rokok berdiri di Jawa Timur, tetapi sampai dengan saat ini hanya PT Gudang Garam yang merupakan pabrik terbesar di wilayah Jawa Timur. Keberadaan PT Gudang Garam di Jawa Timur telah membuka lapangan usaha bagi masyarakat sekitar khususnya pertanian dengan menanam tembakau sebagai bahan dasar pembuatan rokok dan di sektor lapangan pekerjaan sebagai pekerja di pengolahan rokok. Dalam rangka pengamanan target pencapaian penerimaan cukai rokok, berbagai pihak telah berkoordinasi dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok tanpa cukai harus diberantas karena merugikan negara.

Selain itu, sesuai dengan data proyeksi dari BPS bahwa secara demografi, jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2015 berada di kisaran 38,85 juta jiwa atau berada di posisi 2 besar provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia setelah Jawa Barat dengan jumlah penduduk tahun 2015 berada di kisaran 46,71 juta jiwa. Dengan kondisi demikian, maka mendorong semakin besarnya penduduk Jawa Timur yang menjadi wajib pajak pribadi. Kondisi tersebut tentunya akan membawa peningkatan penerimaan pajak penghasilan baik dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Selanjutnya, kondisi tersebut secara langsung akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai atas berbagai kebutuhan yang dibeli oleh sektor industri, rumah tangga, atau pribadi. Jumlah penduduk yang banyak juga berkontribusi bagi perekonomian dari sisi konsumsi sebagai pasar yang besar.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki PAD yang relatif besar. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada perhitungan kemandirian keuangan daerah sehingga Jawa Timur memperoleh DAU dari Pemerintah Pusat relatif besar. Dari perhitungan secara keseluruhan maka Jawa Timur dapat dikelompokkan sebagai provinsi yang surplus keuangan daerahnya.

Sementara itu, Banten yang baru terkenal dengan destinasi wisata patut dicatat sebagai provinsi yang awalnya kurang diperhitungkan sebagai provinsi surplus dari kontribusi wilayahnya. Di Banten terdapat banyak industri dan pabrik. Banten tumbuh menjadi daerah yang menarik untuk daerah investasi dengan berbagai alasan. Alasan pertama, karena sumber daya di Banten relatif lebih murah dibanding dengan daerah lain di pulau Jawa. Selain itu, Banten dekat daerah DKI Jakarta khususnya pelabuhan yang dapat dijadikan pintu keluar untuk ekspor hasil industri dari Banten. Komponen kemudahan transportasi untuk mempermudah proses pengiriman barang tersebut menjadi salah satu pertimbangan khusus bagi para

investor. Kemudahan akses hasil industri tersebut akan menambah daya tarik bagi investor untuk terus berinvestasi di Banten. Dengan demikian, dari sisi penerimaan negara akan meningkatkan penerimaan negara khususnya dari penerimaan perpajakan dan penerimaan pajak pertambahan nilai. Dua jenis penerimaan pajak tersebut akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah yang saat terus diupayakan kontribusinya bagi negara.

Proporsi Belanja

Belanja pemerintah dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah, total belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk seluruh wilayah Indonesia adalah sebesar Rp1,456,52 Triliun. Proporsi belanja pemerintah pusat tahun 2016 paling tinggi di pulau Jawa (54,06%) diikuti Pulau Sumatera (18,59) sedangkan pulau Kalimantan (7,49%) dan Nusa Tenggara (3,42%) menjadi kawasan dengan proporsi yang paling sedikit mendapatkan realisasi belanja pemerintah pusat. Besaran belanja pemerintah pada suatu daerah dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

Jumlah Penduduk

Semakin tinggi kepadatan penduduk suatu kawasan maka proporsi belanja pemerintah akan semakin besar di kawasan tersebut.

Indonesia memiliki keragaman daerah dengan penyebaran yang sangat luas. Pulau Jawa dengan penduduk sangat padat yang apabila seluruh pulau di Indonesia berpenduduk sepadat Pulau Jawa , maka Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia (sekitar 2 Miliar), tapi di sisi lain ada Pulau Irian yang berpenduduk sangat jarang. Berdasarkan data BPS, proyeksi penduduk Indonesia menurut provinsi dan kawasan pada tahun 2015 berjumlah 255,46 juta jiwa dengan penyebaran di Sumatera 55,27 juta jiwa, Jawa 145,14 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 14,11 juta jiwa, Kalimantan 15,34 juta jiwa, Sulawesi 18,72 juta jiwa, Maluku 2,84 juta jiwa, dan Papua 4,02 juta jiwa.
Perbandingan antara proporsi pengalokasian anggaran belanja pemerintah dengan jumlah penduduk suatu kawasan masih sangat berhubungan erat dengan melihat hubungan keduanya yang pada umumnya searah sebagaimana tabel di bawah ini:

Perbandingan Proporsi Jumlah Penduduk Kawasan dengan Proporsi Belanja Pemerintah Tahun 2016

Sumber: BPS dan KFR Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2016, diolah

No	Kawasan/Regional	Proporsi Jumlah Penduduk	Proporsi Belanja Pemerintah
1	Sumatera	21,64%	18,59%
2	Jawa dan Bali	58,44%	54,06%
3	Kalimantan	6,01%	7,49%
4	Sulawesi	7,33%	8,80%
5	NTB & NTT	3,90%	3,42%
6	Maluku, Malut, Papua Barat & Papua	2,69%	7,64%
	Jumlah	**100,00%**	**100,00%**

Kebutuhan suatu daerah/wilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan wilayah, keadaan geografis, dan penduduk miskin. Pengalokasian belanja pemerintah akan disesuaikan dengan jumlah dan kepadatan penduduknya. Kawasan Jawa dan Bali dengan proporsi jumlah penduduk paling besar

(58,44%) mendapatkan proporsi belanja pemerintah juga paling besar (54,06%), demikian pulau dengan kawasan Sumatera (proporsi jumlah penduduk 21,64% searah dengan proporsi belanja pemerintah (18,59%), kawasan Sulawesi (proporsi jumlah penduduk 7,33% searah dengan proporsi belanja pemerintah (8,80%), dan kawasan Kalimantan (proporsi jumlah penduduk 6,01% searah dengan proporsi belanja pemerintah 7,49%).

Untuk kawasan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua tidak persis searah antara perbandingan proporsi jumlah penduduk dengan proporsi belanja pemerintah. Hal ini dipengaruhi, pertama oleh luas wilayah Maluku dan Papua yang jauh lebih besar daripada wilayah Nusa Tenggara. Kedua, kawasan Maluku dan Papua yang berada di posisi paling timur Indonesia yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia. ketiga, daerah di Papua juga mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Ketiga hal ini yang membuat kebijakan pengalokasian pemerintah tidak harus searah dengan jumlah penduduk suatu kawasan.

Data menunjukkan bahwa pemerintah punya perhatian terhadap wilayah timur Indonesia dengan memberikan porsi belanja negara yang cukup besar (7,64%) meskipun setoran penerimaan ke pusat sangat kecil sekitar 0,94% dari total penerimaan negara (Perbandingan Realisasi Penerimaan Menurut Kawasan/Regional Tahun 2016) dan jumlah penduduk kawasan timur yang sangat sedikit dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah. Kawasan timur seperti Irian Jaya juga mendapatkan perhatian khusus dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan bandara.

Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi

Pengalokasian belanja pemerintah di Indonesia juga terpengaruh dengan sektor-sektor yang menjadi penggerak utama roda keuangan kawasan.

Keanekaragaman sumber perekonomian masyarakat dan perbedaan geografis wilayah mencerminkan adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi yang signifikan. Sementara beberapa kawasan Indonesia memiliki masyarakat dengan pendapatan yang tinggi, sebagian di wilayah lain masih menunjukkan masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah. DKI Jakarta dan sebagian besar daerah di Pulau Jawa dan Bali menjadi pusat bisnis, industri, jasa, dan perdagangan, sementara itu wilayah lain di Indonesia masih kesulitan menjual hasil alam dan produknya. Dengan demikian, kawasan tersebut sangat bergantung dengan wilayah lain untuk melakukan perdagangan dan proses industrialisasi produk.

Masih kurangnya penekanan pemerintah pada sektor infrastruktur untuk mendukung kawasan Indonesia bagian timur, mengakibatkan hasil bumi/tambang, pariwisata, dan sumber daya lain yang dimiliki wilayah timur tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu pada kawasan timur jarang ditemukan industri pengolahan atas sumber daya alam atau hasil bumi yang memberikan nilai tambah.

Sebagian besar kawasan di Indonesia seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor

pertambangan dan penggalian sebagai sektor utama penyumbang angka produk domestik regional bruto, sedangkan sektor-sektor yang lebih dominan menjadi penggerak ekonomi negara maju seperti sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan sektor konstruksi belum dapat berkembang dengan baik di kawasan-kawasan tersebut. Berbeda dengan Jawa dan Sumatera, sektor utama yang menjadi tumpuan adalah sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor tersebut menjadi magnet yang kuat bagi para pebisnis dan para pencari kerja untuk melakukan aktifitas bisnis dan kerja di kawasan tersebut.

Pengalokasian belanja pemerintah di Indonesia juga terpengaruh dengan sektor-sektor yang menjadi penggerak utama roda keuangan kawasan Jawa dan Sumatera, dimana kawasan yang banyak menyandarkan perekonomiannya dari sektor-sektor tersebut akan mendapatkan alokasi anggaran yang besar, terutama DKI Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan, jasa, dan bisnis, sangat banyak belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui kantor pusat masing-masing kementerian dan lembaga yang berkedudukan di Jakarta.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL REGIONAL

www.magic4walls.com

BAB III
Analisis Ekonomi dan Fiskal Regional

Regional Sumatera

Perekonomian regional Sumatera tahun 2016 tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2015, yaitu sebesar 4,29%, yang antara lain disebabkan oleh mulai membaiknya sektor pertambangan dan sektor pertanian serta berkembangnya industri pengolahan dan konstruksi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan tingkat inflasi tahun 2016 yang cukup terkendali dengan rata-rata angka inflasi provinsi berada di bawah angka inflasi nasional sebesar 3,35%. Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016, terjadi peningkatan persentase penduduk miskin dan rasio Gini pada sebagian besar provinsi dalam regional Sumatera. Sebaliknya, kinerja positif dari indikator kesejahteraan terlihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka pada sebagian besar provinsi dalam regional Sumatera dan peningkatan IPM pada semua provinsi pada tahun 2016 dibanding 2015.

Anggaran belanja negara tahun 2016 yang dialokasikan pada regional Sumatera sebesar Rp295,19 triliun atau meningkat sekitar 6,8% dibanding tahun 2015. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp85,71 triliun (turun 14,04%) dengan realisasi sebesar 87,52% dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 209,57 triliun (meningkat 18,6%) dengan realisasi sebesar 91,69%. Anggaran belanja modal pada tahun 2016 mengalami penurunan 31% dibanding 2015 dengan nilai anggaran sebesar Rp23,68 triliun dan realisasi sebesar 81%. Dari sisi APBD, target PAD dan pagu belanja pemerintah daerah dalam regional Sumatera pada tahun 2016 meningkat masing-masing sebesar 4,6% dan 11,7% dibanding 2015, dan dengan tingkat realisasi masing-masing sebesar 89,51% dan 86,96%. Sementara itu, rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2016 sebesar 15,89% atau menurun tipis sebesar 0,2% dibanding tahun 2015. Kemudian rasio belanja pegawai terhadap keseluruhan belanja yang menunjukkan indikator semakin meningkat, yaitu dari 31,84% pada tahun 2015 menjadi 38,23% pada tahun 2016

Makroekonomi Regional Sumatera

Pertumbuhan Ekonomi

Terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi di regional Sumatera dari 3,53% pada 2015 menjadi 4,29% pada 2016

Perekonomian di regional Sumatera pada tahun 2016 tumbuh positif yaitu sebesar 4,29%. Angka ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tingkat nasional yang mencapai 5,02%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi Sumatera tahun 2016 menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2015 perekonomian hanya tumbuh sebesar 3,53%. Jika dilihat lebih jauh per provinsi maka akan terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi menunjukkan angka yang variatif. Di tahun 2016, Provinsi Bengkulu *leading* dengan angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,30%. Sedangkan Provinsi Riau mengalami pertumbuhan

ekonomi terendah di Sumatera yaitu 2,23%. Loncatan pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Aceh dimana tahun sebelumnya tumbuh -0,73% kemudian meningkat tajam di tahun 2016 menjadi 3,31%. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi paling dalam dimana tahun 2015 mencapai 6,01% kemudian di tahun 2016 menjadi 5,03%.

Komposisi PDRB dari sisi permintaan di Sumatera tidak jauh berbeda dengan komposisi secara nasional, yakni didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB).

Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

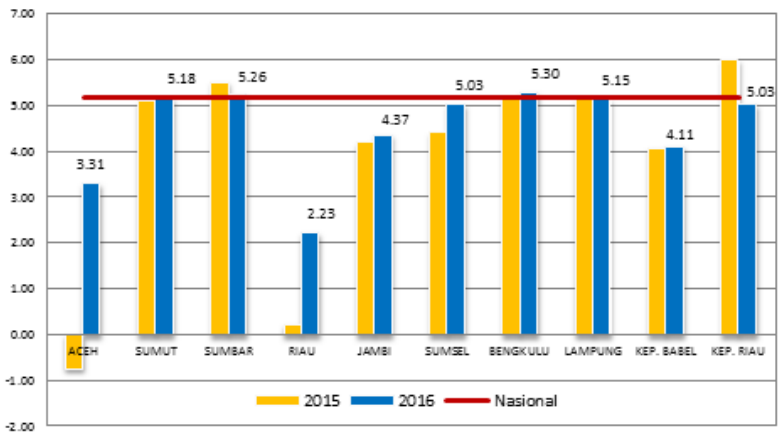

Komposisi PDRB dari sisi permintaan di Sumatera tidak jauh berbeda dengan komposisi secara nasional, yakni didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi (PMTB).

Dari sisi Permintaan, perekonomian Sumatera masih menunjukkan karakteristik daerah berkembang dimana Konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi dimana di tahun 2016 komposisinya mencapai lebih dari setengah total PDRB yaitu sebesar 50,4%. Namun demikian, bagian besar lainnya dari perekonomian Sumatera dari sisi Permintaan di tahun 2016 yaitu 32,7% PDRB berasal dari Pembentukan Modal Tetap Bruto dan 10% berasal dari Net Ekspor Barang dan Jasa. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Sumatera mulai mengarah kepada sektor produktif yang terlihat dari porsi konsumsi untuk barang modal dan ekspor yang sudah mulai cukup tinggi. Komposisi ini tidak jauh berbeda dengan komposisi permintaan secara nasional pada tahun yang sama.

Komposisi PDRB ADHB dari Sisi Permintaan, Regional Sumatera Tahun 2016

Sumber: BPS

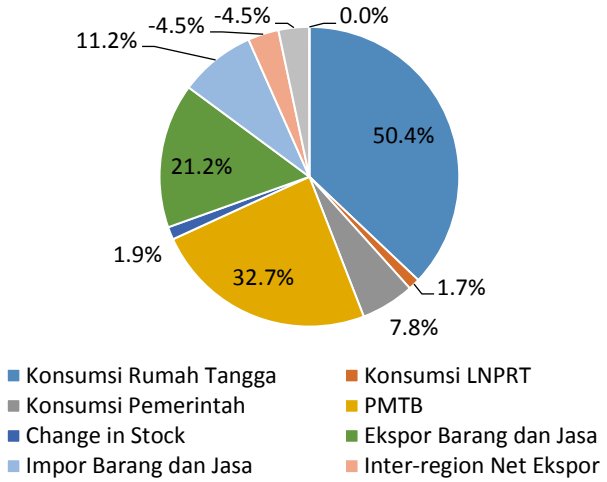

Semua laju pertumbuhan PDRB sisi permintaan pada regional Sumatera ada pada angka satu digit kecuali change in stock

Berdasarkan pertumbuhannya, Konsumsi Rumah Rangga pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,04%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 4,94%. Semakin meningkatnya pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga ini dapat menjadi indikasi umum bahwa daya beli masyarakat di Sumatera yang semakin meningkat di tahun 2016. Di saat yang sama, konsumsi dalam rangka Pembentukan Modal Tetap Bruto yang merupakan konsumsi untuk barang modal meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2015 sebesar 3,21% menjadi 5,33% di tahun 2016.

Namun demikian, Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan sebesar minus 1,37 persen yang antara lain bersumber dari penghematan anggaran dan *self-blocking* yang dilakukan pemerintah. Kemudian Ekspor Barang dan Jasa yang dihasilkan juga mengalami penurunan sampai dengan minus 10,87% yang antara lain disebabkan harga berbagai komoditas unggulan yang dihasilkan di Sumatera seperti Karet dan Batubara yang masih rendah di pasaran internasional.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan, Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	4,94%	5,04%
Konsumsi LNPRT	4,02%	5,44%
Konsumsi Pemerintah	4,71%	-1,37%
PMTB	3,21%	5,33%
Change in Stock	-31,55%	-14,63%
Ekspor Barang dan Jasa	-1,57%	-10,87%
Impor Barang dan Jasa	-4,07%	-4,90%
Inter-region Net Ekspor	-2,69%	-41,37%

PDRB Sumatera didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan, serta konstruksi.

Dari sisi Penawaran, perekonomian sumatera di dominasi oleh lima sektor dengan sektor yang paling tinggi komposisinya terhadap PDRB tahun 2016 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 22,1%. Kemudian sektor kedua adalah Industri Pengolahan yang mencapai 19,9% dan disusul oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,3%. Sektor lainnya yang juga cukup besar komposisinya terhadap PDRB Sumatera pada tahun 2016 adalah konstruksi dan perdagangan. Komposisi PDRB Sumatera dari sisi penawaran tersebut mengindikasikan arah perkembangan perekonomian Sumatera yang bergerak kearah sektor sekunder dan tersier. Sektor primer yang berbasis SDA seperti Pertanian dan Pertambangan tidak lagi menjadi sektor dominan seiring dengan mulai berkembangnya sektor Industri Pengolahan yang komposisinya terhadap PDRB hampir menyamai Sektor Pertanian. Demkian juga dengan sektor Konstruksi dan Perdagangan yang komposisinya dalam PDRB juga cukup besar dan signifikan. Program hilirisasi dan gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Sumatera seperti pembangunan jalur kereta api *double track*, jalan tol, *light rail transit* serta berkembangnya jasa perhotelan merupakan pendorong perekonomian yang efeknya dirasakan baik secara langsung pada sektor bersangkutan maupun efek turunannya terhadap sektor-sektor lainnya.

Komposisi PDRB ADHB dari Sisi Penawaran, Regional Sumatera Tahun 2016

Sumber: BPS

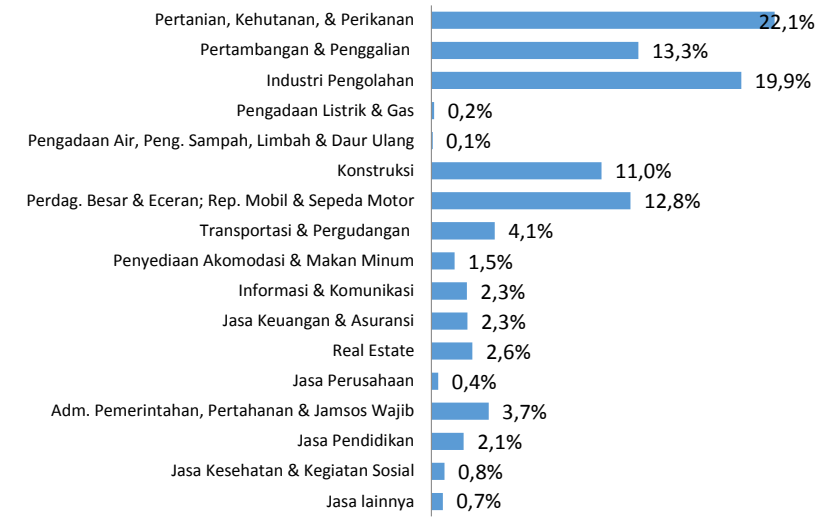

Menurut pertumbuhannya, beberapa sektor di PDRB sisi Penawaran di regional Sumatera mengalami pertumbuhan dan beberapa sektor lainnya mengalami kontraksi. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah salah satu sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,85%, dimana di tahun 2015 hanya mampu tumbuh 3,54%. Pertambangan dan Penggalian masih tumbuh negatif yaitu minus 0,59% namun sudah lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang tumbuh negatif mencapai minus 2,33%.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai dari produk-produk pertanian dan pertambangan di regional Sumatera dikarenakan mulai membaiknya harga komoditas di pasaran internasional walaupun belum kembali ke titik tertingginya. Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan signifikan yaitu 10,01%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 5,03%. Hal ini sejalan dengan masifnya program penyaluran listrik ke berbagai wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau listrik serta pengadaan gas kota yang menjadi program pemerintah daerah di regional Sumatera. Berbagai proyek infrastruktur di regional Sumatera juga mengerek pertumbuhan sektor konstruksi di tahun 2016 sampai ke 6,01%. Sektor sekunder dan tersier seperti industri pengolahan, perdagangan, penyediaan aKomodasi dan makan minum juga terus tumbuh berkembang lebih tinggi di tahun 2016. Namun demikian terdapat beberapa sektor yang pertumbuhannya di tahun 2016 mengalami kontraksi, salah satunya adalah transportasi dan pergudangan yang mengalami koreksi dari sebelumnya 7,00% menjadi 5,89%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Penawaran, Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,54%	3,85%
Pertambangan dan Penggalian	-2,33%	-0,59%
Industri Pengolahan	3,78%	4,24%
Pengadaan Listrik dan Gas	5,03%	10,01%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,85%	4,43%
Konstruksi	4,27%	6,42%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,18%	6,01%
Transportasi dan Pergudangan	7,00%	5,89%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,76%	6,97%
Informasi dan Komunikasi	7,85%	7,79%
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,31%	6,39%
Real Estate	5,88%	6,06%
Jasa Perusahaan	5,81%	5,82%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,00%	3,71%
Jasa Pendidikan	7,12%	5,70%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,26%	5,73%
Jasa lainnya	7,58%	6,45%

Inflasi

Tingkat inflasi regional Sumatera pada tahun 2016 umumnya lebih rendah dibanding inflasi rata-rata nasional

Tingkat inflasi per provinsi di Sumatera pada tahun 2016 umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 3,02% namun masih dalam range 4% plus minus satu. Hanya terdapat dua provinsi yang tingkat inflasinya melewati target 4 persen plus minus 1 yaitu Provinsi Sumatera Utara 6,30% dan Provinsi Bangka Belitung 6,75%. Tingginya tingkat inflasi tersebut disebabkan antara lain tingginya curah hujan akibat fenomena La Nina di tahun 2016 sehingga menyebabkan terjadinya gagal panen beberapa produk pertanian sehingga terjadi kelangkaan. Sedangkan provinsi-provinsi lainnya mempunyai range inflasi di dalam target yang ditetapkan. Inflasi yang lebih rendah dari rata-rata inflasi nasional hanya terjadi di Provinsi Lampung. Penurunan tingkat inflasi di Provinsi Lampung dikarenakan pasokan beberapa komoditas bahan pangan strategis seperti sayuran yang terus terjaga di wilayah Provinsi Lampung.

Tingkat Inflasi Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016 (%)
Sumber: BPS

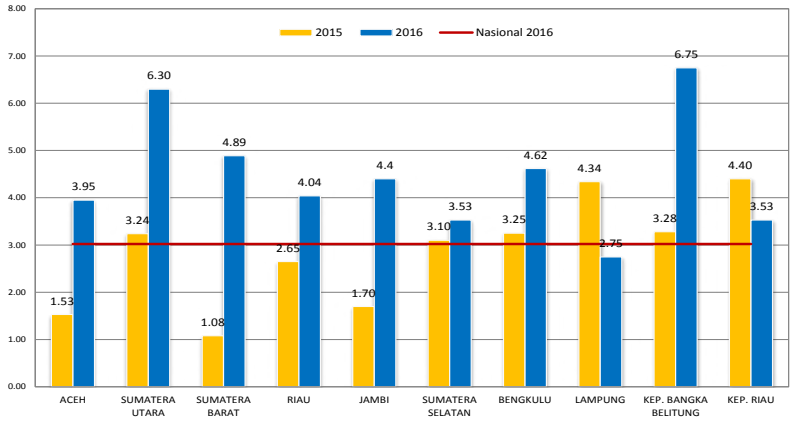

Indikator Kesejahteraan

Indeks Pembangunan Manusia

IPM tertinggi tahun 2016 diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 73,99 dan IPM terendah terjadi di Provinsi Lampung dengan nilai sebesar 67,65

IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur perkembangan kualitas manusia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi dimana untuk di regional Sumatera pada periode tahun 2010-2016 angkanya menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Pada tahun 2016 IPM secara nasional adalah sebesar 70,18 sedangkan pada tingkat provinsi di regional Sumatera menunjukkan angka yang bervariasi. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai IPM tertinggi pada tahun 2016 yaitu 73,99 sedangkan Provinsi Lampung mempunyai IPM yang terendah yaitu 67,65 Perbedaan pencapaian IPM tertinggi dengan IPM terendah pada tahun 2016 sekitar 6,34 poin. Dibandingkan dengan perbedaan pencapaian IPM tahun 2010 yang sebesar 7,42 poin (IPM tertinggi 71,13 untuk Provinsi Kepulauan Riau dan terendah 63,71 untuk Provinsi Lampung), maka perbedaan pencapaian IPM tahun 2016 relatif lebih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa disparitas pembangunan manusia di tingkat provinsi pada regional Sumatera menunjukkan perkembangan yang terus menurun.

IPM Regional Sumatera Tahun 2010 s.d. 2016
Sumber: BPS

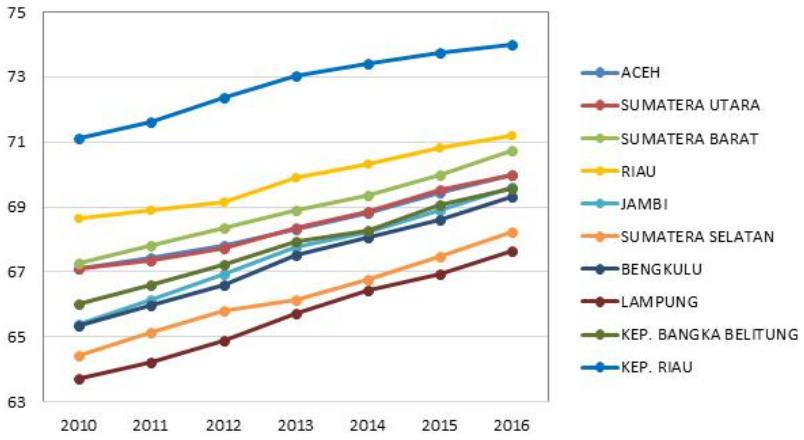

Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat. Di regional Sumatera, pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan perkembangan angka Rasio Gini yang cukup variatif. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi yang tingkat ketimpangan pendapatannya paling rendah dengan angka rasio Gini pada tahun 2016 sebesar 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Bangka Belitung lebih merata dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Provinsi-provinsi lainnya mempunyai range rasio Gini antara 0,3 sampai dengan 0,4 pada periode tahun 2010 sampai dengan 2016. Di tahun 2016, Raso Gini cenderung menurun yang mengindikasikan bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat di sebagian besar provinsi di regional Sumatera.

Rasio Gini Regional Sumatera Tahun 2010 s.d. 2016
Sumber: BPS

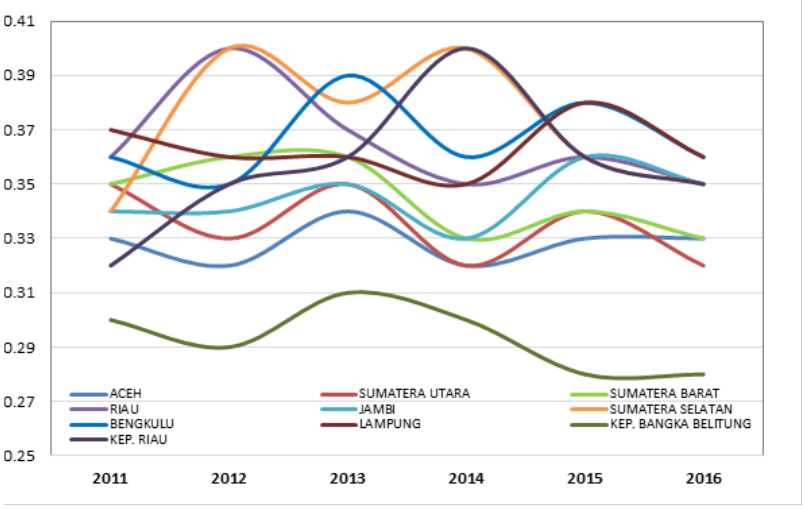

Ketenagakerjaan

Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional pada tahun 2014 dan 2015 yang masing-masing sebesar 6,18% dan 5,61%, TPT provinsi-provinsi di regional Sumatera pada tahun 2016 cenderung masih lebih rendah kecuali di Provinsi Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau. Di ketiga provinsi tersebut TPT melebihi angka nasional dikarenakan masih banyaknya angkatan kerja yang belum dapat terserap di pasar tenaga kerja lokal. Pada tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau terjadi peningkatan TPT dibandingkan tahun 2015 sementara di Provinsi Aceh terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan Provinsi Riau tidak menunjukkan ada perubahan yang signifikan. Provinsi-provinsi lainnya pada tahun 2016 mempunyai TPT yang lebih rendah daripada nasional bahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan penurunan TPT yang cukup signifikan. Hal ini antara lain dikarenakan banyaknya akses bagi para tenaga kerja di wilayah tersebut untuk memasuki lapangan kerja di bidang yang terkait pariwisata yang semakin dikembangkan di wilayah tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016 (dalam %)
Sumber: BPS

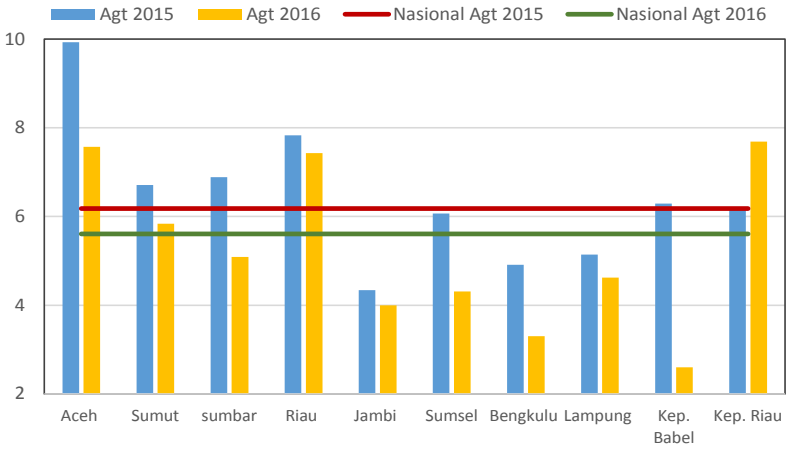

Kemiskinan

Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional pada tahun 2014 dan 2015 yang masing-masing sebesar 11,13% dan 10,70%, persentase penduduk miskin di Sumatera pada tahun 2016 bervariatif. Terdapat empat provinsi yang persentase penduduk miskinnya diatas nasional yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumsel, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung. Sedangkan enam provinsi lainnya memiliki persentase penduduk miskin yang lebih rendah daripada nasional. Selain Provinsi Aceh, penduduk miskin terkonsentrasi di Sumatera Selatan yang basis perekonomiannya pada sektor pertambangan dan pertanian yang memang sedang mengalami kelesuan. Provinsi Aceh dan Provinsi Bengkulu adalah dua provinsi yang persentase penduduk miskinnya paling tinggi yaitu sekitar 17%. Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau adalah provinsi dengan basis perekonomian pada sektor pariwisata yang mulai berkembang dan perdagangan memiliki persentase penduduk

miskinnya paling rendah yaitu masing-masing 5,04% dan 5,84%. Selain itu, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau adalah provinsi yang persentase kemiskinannya cukup rendah dan menurun dibandingkan dengan tahun 2015 sebagaimana grafik di bawah ini.

Persentase Penduduk Miskin Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

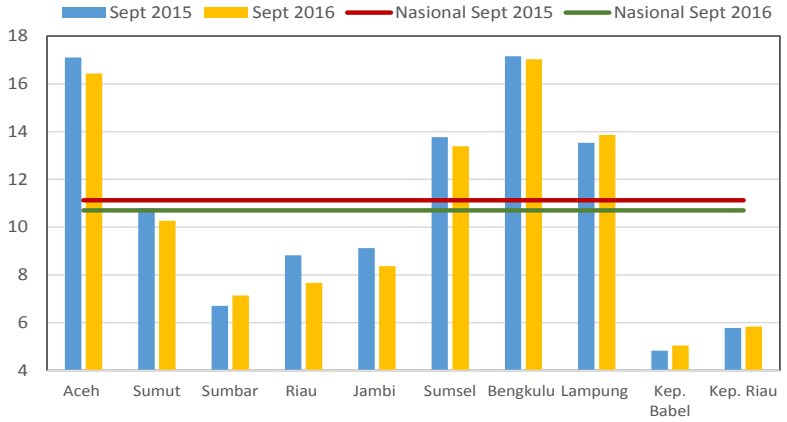

Pelaksanaan APBN

Target pendapatan regional Sumatera tahun 2016 adalah sebesar Rp60,42 triliun sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp87,79 triliun dimana pendapatan tersebut utamanya berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp80,39 triliun atau 91,5% dari total realisasi pendapatan. Target penerimaan perpajakan tahun 2016 di regional Sumatera ditetapkan lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu Rp82,8 triliun di tahun 2015 menjadi Rp53,65 triliun di tahun 2016. Namun demikian, realisasi penerimaan tahun 2016 jauh melampaui target tersebut. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 mencapai 150% dari target.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan capaian di tahun 2015, dimana peneriman perpajakan mengalami *shortfall* sebesar 14% dari target yang ditetapkan. Pencapaian realisasi yang melebihi target di regional Sumatera sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pencapaian penerimaan perpajakan secara nasional, dimana pemerintah hanya mampu merealisasikan 81% dari total target penerimaan perpajakan nasional tahun 2016.

Realisasi APBN Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber : DJPBN dan DJPK (diolah)

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	82.889,60	71.422,70	86,17	53.605,48	75.821,48	141,44
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.798,02	6.133,62	105,79	6.753,23	8.556,35	126,70
Pendapatan Hibah	3,48	493,57	14.183,05	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara	88.691,10	78.049,88	88,00	60.427,25	87.790,40	145,28
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	99.711,76	90.107,11	90,37	85.708,71	75.011,35	87,52
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	176.577,97	169.380,54	95,92	209.486,17	192.077,03	91,69
Jumlah Belanja Negara	276.289,72	259.487,65	93,92	295.194,89	267.088,39	90,48

Penerimaan perpajakan terbesar berada pada pusat perekonomian terbesar di regional Sumatera yaitu di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp27,08 triliun kemudian disusul Provinsi Riau sebesar Rp13,12 triliun. Dari sektor non pajak, sebagian besar pendapatan di regional Sumatera berasal dari sektor migas dan perkebunan. Pendapatan PNBP terbesar berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar Rp1,37 triliun, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Utara mampu mengumpulkan Rp1,27 triliun dan Rp1,12 triliun.

Dari sisi pengeluaran, kinerja realisasi Belanja Negara pada tahun 2016 di regional Sumatera mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumya. Total realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar 90,48%, turun 3,44% dibandingan tahun 2015. Penurunan total realisasi di tahun 2016 disebabkan oleh revisi pemotongan anggaran dan *self blocking* pada Belanja Pemerintah Pusat.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN di olah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	30.162	29.860	99,00%	29.653	28.867	97,35%
Belanja Barang	29.998	25.971	86,57%	32.012	26.622	83,16%
Belanja Modal	34.679	29.699	85,64%	23.684	19.183	81,00%
Belanja Bansos	4.802	4.519	94,12%	281	270	96,19%
Belanja Lain-Lain	70	59	83,41%	79	69	87,04%
Jumlah	99.712	90.107	90,37%	85.709	75.011	87,52%

Pagu Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp32,9 triliun atau 18,64% dibandingkan tahun 2015. Alokasi terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum yang mencapai 49,38% dari total alokasi anggaran tersebut. Alokasi terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah total sebesar Rp23,35 triliun sedangkan alokasi terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar Rp3,83 triliun.

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN dan DJPK, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	30.513	24.535	80,4%	29.525	23.292	78,89%
Dana Alokasi Umum	93.253	93.253	100,0%	103.451	103.451	100,00%
Dana Alokasi Khusus Fisik	14.927	14.151	94,8%	24.054	20.444	84,99%
Dana Otsus,Keistimewaan DIY,DID	7.058	7.058	100,0%	8.900	8.900	100,00%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	24.569	24.126	98,2%	29.463	22.016	74,72%
Dana Desa	6.257	6.257	100,0%	14.093	13.973	99,15%
Jumlah	176.578	169.381	95,9%	209.486	192.077	91,69%

Kenaikan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Khusus Fisik dimana pada tahun 2015 sebesar Rp14,93 triliun menjadi Rp24 triliun di tahun 2016 atau meningkat sebesar Rp9,13 triliun. Sementara Dana Desa yang mulai dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp6,25 triliun, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 125% di tahun 2016 menjadi Rp14,1 triliun. Secara umum realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai 91,7%, namun pada beberapa jenis Transfer ke Daerah tingkat realisasinya berada di bawah 90%, yaitu DBH 78,89%, DAK Fisik 85% dan DAK Non fisik 74,72%. Rendahnya realisasi DBH tersebut mengindikasikan adanya penurunan realisasi penerimaan di regional Sumatera.

Badan Layanan Umum (BLU)

Satker Badan Layanan Umum (BLU) di regional Sumatera berjumlah 35 satker. Satker BLU terbanyak berada di Provinsi Sumatera Selatan (8 Satker BLU) sedangkan di Provinsi Bangka Belitung tidak terdapat Satker BLU. Berdasarkan jenis pelayanannya, terdapat 20 satker layanan pendidikan, 12 satker layanan kesehatan, 2 satker layanan perdagangan, dan 1 satker layanan perindustrian.

Jumlah Satker BLU Menurut Layanan Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016
Sumber: DJPBN

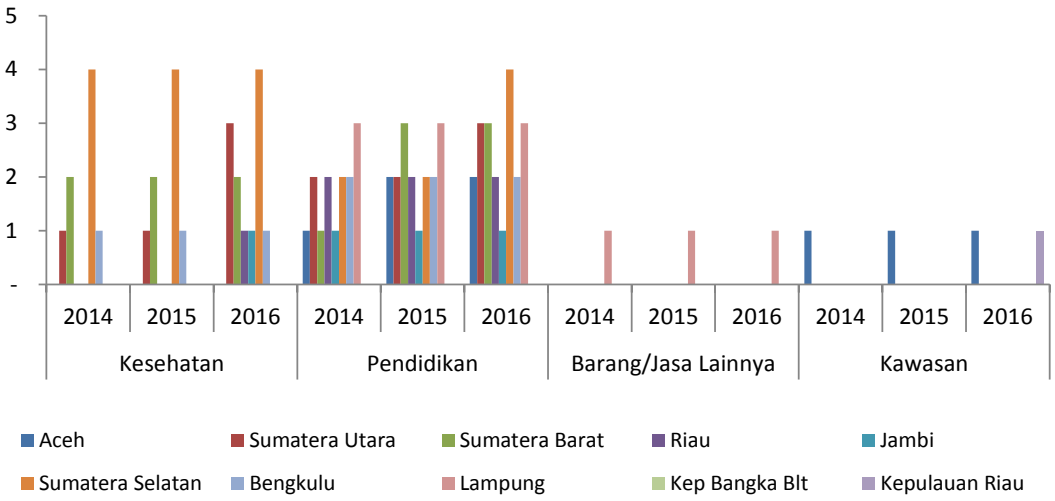

Jumlah total aset BLU pada regional Sumatera pada tahun 2016 adalah sebesar Rp39,73 triliun sedangkan pada tahun 2015 jumlah asetnya sebesar Rp39,93 triliun. Penurunan aset diantaranya terjadi pada satker BLU di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih disebabkan adanya perubahan kode Bagian Anggaran yang menaungi Universitas Riau yang semula BA 023 menjadi BA 042. Perubahan tersebut berakibat pada laporan keuangan satker dimana sampai dengan akhir tahun 2016 masih dalam proses penyelesaian.

Aset Satker BLU
Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016
Sumber: DJPBN

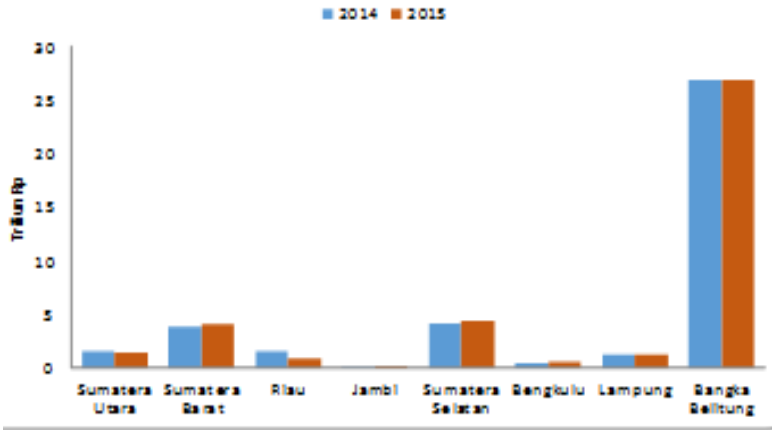

Terdapat peningkatan pagu dan realisasi belanja satker-satker BLU di regional Sumatera pada tahun 2016. Kenaikan pagu sebesar Rp207,83 miliar pada tahun 2016 dan realisasi belanja meningkat menjadi 91,58% dibanding tahun 2015 sebesar 88,90%. Yang perlu menjadi catatan adalah masih besarnya komposisi sumber dana Rupiah Murni pada satker-satker BLU. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih kurangnya kemandirian satker-satker BLU. Walaupun pembentukan BLU tidak ditujukan sebagai upaya untuk mencari laba namun meningkatnya kualitas pelayanan dapat berdampak pada meningkatnya pendapatan satker BLU. Dengan demikian, kemandirian satker-satker BLU akan semakin meningkat (porsi rupiah murni akan semakin berkurang) dan selanjutnya kemandirian tersebut akan berdampak kembali pada peningkatan kualitas pelayanan.

Realisasi Belanja Satker BLU Regional Sumatera Menurut Sumber Dana Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN diolah

Sumber Dana	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
RM	3.486,40	3.192,41	91,57	3.716,82	3.298,31	88,74
BLU	3.792,51	3.278,40	86,44	3.769,93	3.558,25	94,39
Jumlah	7.278,92	6.470,81	88,90	7.486,75	6.856,56	91,58

Pelaksanaan APBD

Jika dibandingkan antara target pendapatan daerah dengan pagu belanja daerah pada APBD pemerintah daerah regional Sumatera menunjukkan bahwa belanja lebih besar daripada pendapatan. Hal tersebut menyebabkan defisit APBD yang harus ditutup dengan pembiayaan. Kebijakan defisit tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut imbas dari realisasi pendapatan yang belum mencukupi untuk menutup defisit yang terjadi pada pemerintah daerah regional Sumatera.

Secara persentase, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah pada tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan tahun

2015 namun secara nominal terjadi peningkatan. Di tahun 2015 realisasi pendapatan adalah Rp211,5 triliun (93,23%) kemudian di tahun 2016 menjadi Rp242,8 triliun (92,6%). Pada sisi pendapatan, kemampuan daerah dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara nominal maupun secara persentase terhadap target mengalami peningkatan yang cukup berarti dari Rp35,06 triliun tahun 2015 menjadi Rp37,33 triliun pada tahun 2016. Hal ini merupakan indikasi kemandirian fiskal daerah yang semakin baik. Pendapatan transfer yang merupakan komponen utama pendapatan daerah masih tetap tinggi dan nilainya semakin meningkat sejalan dengan komitmen pemerintah dalam desentralisasi fiskal. Dari sisi belanja, persentase realisasi terhadap pagu cenderung menurun namun dari segi nominalnya mengalami peningkatan dengan porsi belanja paling rendah adalah Belanja Modal.

Realisasi APBD Regional Sumatera Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN, diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	39.892,45	35.065,87	87,90%	41.710,90	37.337,13	89,51%
Pendapatan Transfer	160.795,66	148.560,86	92,39%	203.567,70	189.285,19	92,98%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	26.143,50	27.845,95	106,51%	17.085,96	16.198,26	94,80%
Jumlah Pendapatan	226.831,60	211.472,68	93,23%	262.364,56	242.820,57	92,55%
Belanja						
Belanja Pegawai	95.321,95	84.707,36	88,86%	100.114,63	89.854,06	89,75%
Belanja Modal	55.768,67	47.225,34	84,68%	62.741,86	52.547,26	83,75%
Belanja Lain	90.958,13	87.170,20	95,84%	107.409,23	92.613,63	86,23%
Jumlah Belanja	242.048,74	219.102,90	90,52%	270.265,73	235.014,95	86,96%
Surplus/Defisit	(15.217,14)	(7.630,21)	50,14%	(7.901,16)	7.805,63	-98,79%

Pendapatan Daerah

Komponen Pendapatan Daerah pada tahun 2016 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD secara persentase maupun nominalnya pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Peningkatan tersebut khususnya ada di Provinsi Sumatera Barat dan Bangka Belitung. Realisasi pendapatan transfer juga meningkat baik nominal maupun persentasenya.
Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2016 juga mengalami penurunan dari tahun 2015 yang mencapai 106,51% menjadi 94,80%. Sebagaimana halnya tahun 2015, pada tahun 2016 kontribusi Dana Perimbangan atau transfer Pemerintah Pusat masih mendominasi pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan masih terdapat ketergantungan pemerintah daerah di regional Sumatera terhadap transfer Pemerintah Pusat. Indikator ini menunjukan masih kurangnya kemandirian keuangan daerah sehingga pemerintah daerah di regional Sumatera perlu lebih meningkatkan kontribusi PAD dalam pendapatan daerah.

Belanja Daerah

Dari total Rp270,3 triliun alokasi belanja pada APBD di regional Sumatera pada tahun 2016, lebih dari sepertiganya dialokasikan untuk Belanja Pegawai, hanya sekitar 23% yang dialokasikan untuk Belanja Modal dan sisanya dialokasikan untuk Belanja Lain-Lain. Secara lebih detail, beberapa provinsi di regional Sumatera mempunyai rasio belanja pegawai terhadap total belanja yang diatas rata-rata Sumatera sehingga porsi untuk belanja produktif seperti Belanja Modal menjadi kecil. Realisasi anggaran di regional Sumatera pada tahun 2016 secara total lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yaitu dari sebelumnya 90,52% menjadi 86,96%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyerapan anggaran masih belum optimal karena ketidakakuratan perencanaan maupun kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. .

Berdasarkan rasio-rasio sektoral, dapat diketahui prioritas masing-masing pemerintah daerah. Alokasi anggaran pemerintah yang terbesar TA 2015 dan TA 2016 masih merupakan alokasi dana untuk *mandatory spending* seperti sektor pendidikan minimal 20% dari total pagu. Sementara itu, di dalam sektor pelayanan publik dan birokrasi terdapat belanja gaji pegawai yang juga termasuk dalam belanja wajib pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keleluasaan pemerintah daerah di Sumatera untuk mengalokasikan anggarannya dalam rangka mendorong pembangunan relatif kecil. Satu hal yang positif dari sebagian pemerintah daerah di Sumatera adalah menempatkan belanja infrastruktur sebagai prioritas setelah mandatory spending terpenuhi. Dengan demikian, pemerintah daerah di Sumatera menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai katalisator dalam pembangunan perekonomian secara menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada TA 2016 yang memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk penguatan infrastruktur dalam mendorong stimulus perekonomian sesuai dengan Program Nawa Cita.

Surplus/Defisit

Total APBD di regional Sumatera pada tahun 2016 pada awalnya diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp7,9 triliun namun ternyata realisasinya menghasilkan surplus sebesar Rp7,8 triliun. Surplus tersebut diakibatkan oleh realisasi belanja APBD yang tidak optimal sedangkan di sisi lain realisasi pendapatan dapat tercapai dengan persentase terhadap target yang cukup tinggi yaitu 92,55%. Secara lebih detail, surplus APBD tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Selatan dan Provins Bengkulu. Namun demikian, beberapa Provinsi mengalami defisit pada APBD-nya yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Aceh. Surplus APBD tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan, namun dalam kondisi dimana belanja negara maupun daerah yang bersifat ekspansif maka anggaran defisit dapat lebih mendorong laju pertumbuhan ekonomi tentunya dengan risiko fiskal yang terukur.

Sektor Unggulan Regional

Regional Sumatera dikenal memiliki sektor unggulan dan potensi ekonomi dari kekayaan alam yang melimpah berupa lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan hutan yang sangat luas serta potensi minyak dan gas bumi. Pengelolaan sektor unggulan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan prinsip ekonomi yang akhirnya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor terbesar penopang perekonomian di regional Sumatera dengan berbagai komoditas unggulan yang dihasilkan antara lain karet, kelapa sawit, kopi, padi, kedelai, jagung, dan kakao. Daerah-daerah penghasil tanaman pangan seperti padi, kedelai, dan jagung antara lain di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Sedangkan daerah-daerah penghasil produk pertanian perkebunan seperti kopi, kelapa sawit, dan karet adalah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Riau. Produk kopi terutama dihasilkan di Provinsi Sumatera Selatan dan Aceh. Sumatera Selatan adalah produsen kopi terbesar di regional Sumatera.

Sub-sektor pertanian seperti perikanan dan peternakan juga cukup berkembang dan memberikan andil terhadap perekonomian di regional Sumatera. Sektor peternakan di regional Sumatera adalah peternakan sapi dan kambing yang tersebar di beberapa provinsi. Selain itu, sektor pertanian yang cukup potensial di regional Sumatera adalah perikanan berupa perikanan darat, tambak, dan perikanan laut yang sampai sekarang belum dimanfaatkan secara optimal antara lain di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat.
Isu utama terkait dengan sektor pertanian di regional Sumatera adalah konektivitas antar daerah yang belum merata dan memadai sehingga menyebabkan biaya tinggi dalam pemasaran produk-produk pertanian yang dihasilkan. Infrastruktur jalan dan jembatan belum menjangkau seluruh daerah di Sumatera khususnya ke daerah-daerah pertanian di kabupaten-kabupaten di Sumatera menyebabkan adanya disparitas harga yang tinggi di tingkat petani dengan di tingkat konsumen. Hal lainnya yang juga perlu menjadi perhatian adalah hilirisasi produk-produk pertanian sehingga dapat dihasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dibandingkan jika dijual atau diekspor dalam bentuk bahan mentah terlebih lagi dengan harga komoditas di pasar internasional yang masih rendah.

Jika konektivitas dapat diperbaiki dan hilirisasi produk-produk pertanian dapat dikembangkan maka tingkat kesejahteraan petani juga akan meningkat. Pada saat ini, kesejahteraan petani di beberapa provinsi di Sumatera seperti Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Aceh masih rendah dengan indikatornya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Secara keseluruhan NTP sepanjang tahun 2016 masih di bawah 100 yang berarti bahwa kesejahteraan petani mengalami penurunan dan tingkat daya saing produk pertanian di regional Sumatera cenderung

menurun. Hal ini antara lain disebabkan oleh kendala konektivitas dan hilirisasi produk pertanian yang masih belum berjalan optimal.

Sektor Pariwisata

Regional Sumatera mempunyai obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi penopang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.
Salah satu obyek wisata yang saat ini sedang dikembangkan dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional adalah Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini sedang mengembangkan konsep pariwisata *sport tourism* dengan mengoptimalkan *event* Asian Games 2018 dimana Provinsi Sumatera Selatan akan bertindak sebagai salah satu tuan rumah. Provinsi-provinsi lainnya juga sedang berupaya terus mengembangkan sektor pariwisata dengan menawarkan Keindahan-keindahan alam dan budaya yang tak kalah menarik antara lain hutan alam Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Aceh, Taman Nasional Way Kambas di Provinsi Lampung, keindahan pantai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Sumatera Barat.

Indikator perkembangan sektor pariwisata dapat dilihat dari peningkatan kedatangan wisatawan dan peningkatan hunian hotel. Perkembangan tingkat hunian kamar hotel di regional Sumatera secara rata-rata mengalami peningkatan sepanjang tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Hal ini sejalan dengan kebijakan beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung yang mendorong pengembangan sektor pariwisata dalam bentuk pengembangan potensi pariwisata baru, intensifikasi promosi, serta penyelengaraan beberapa *event*/kegiatan berskala nasional maupun internasional sehingga mendongkrak tingkat hunian kamar hotel yang berasal dari wisatawan terutama domestik.

Tantangan saat ini dalam mengembangkan sektor pariwisata di regional Sumatera adalah membentuk masyarakat yang sadar wisata. Hal ini penting dilakukan agar wisatawan yang datang dapat lebih nyaman, aman, dan betah dalam menikmati perjalanan wisata yang mereka lakukan sehingga menarik lebih banyak wisatawan lainnya untuk datang ke regional Sumatera. Perilaku masyarakat yang kontraproduktif terhadap perkembangan pariwisata misalnya tidak tertib antri, membuang sampah sembarangan, dan suka merusak fasilitas umum atau membuat keributan dapat membuat *image* buruk terhadap daerah yang bersangkutan sehingga menghambat berkembangnya sektor pariwisata. Oleh karena itu, walaupun tidak mudah, masyarakat harus mulai dididik untuk ikut bertanggung jawab menjaga pariwisata dengan menjaga perilakunya sehingga mendukung berkembangnya industri pariwisata.

Sektor Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan dan energi merupakan salah satu unggulan di regional Sumatera sebagai penghasil pendapatan atau penggerak roda perekonomian. Sektor pertambangan di Provinsi Aceh

terdiri dari batubara, emas, dan batu alam khusus penambangan emas lebih banyak dieksploitasi oleh masyarakat perorangan dan memungkinkan untuk dialihkan untuk dikelola dengan manajemen yang modern. Pada tahun 2016 sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan angka PDRB sebesar Rp8,09 triliun atau mengalami penurunan sebesar minus 13,27% dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini salah satunya disebabkan dari ditutupnya kegiatan operasi PT Arun Lhokseumawe pada akhir tahun 2015 akibat telah habisnya gas bumi yang telah menjadi sumber kekayaaan Aceh selama bertahun-tahun.

Di Provinsi Sumatera Selatan, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB pada tahun 2016 mencapai 19,89%. Sektor ini merupakan salah satu penyumbang tertinggi PDRB di Provinsi Sumatera Selatan dengan nominal *output* sebesar Rp70,71 triliun atas dasar harga berlaku. Kontribusi tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya baik secara persentase maupun nominal yang mencapai 21,84% dengan nominal sebesar Rp72,71 triliun pada tahun 2015. Hasil-hasil pertambangan yang dihasilkan dari Provinsi Sumatera Selatan yaitu batubara, gas, dan minyak bumi. Demikian pula di Provinsi Riau, sektor pertambangan dan energi memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB. Hasil produksi pertambangan di Provinsi Riau pada tahun 2016 berupa minyak bumi dan batu bara.

Di Provinsi Sumatera Utara, selain keanekaragaman hayati yang besar, sektor pertambangan juga ikut menyumbang potensi ekonomi regional. Bahan tambang yang ada di Provinsi Sumatera Utara di antaranya batubara, emas, belerang, alumunium, kaolin, batu gamping, marmer, dan timbal. Untuk pengelolaan alumunium diserahkan kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang sepenuhnya telah menjadi milik Indonesia sejak 1 November 2013. Proses pengolahan alumunium di Inalum ini akan mampu menurunkan ekspor bahan mentah, mengurangi impor alumunium, menghemat devisa, dan berkontribusi terhadap penerimaan negara yang lebih besar karena memiliki nilai tambah.

Tantangan Fiskal Regional

Optimalisasi pendapatan

Tantangan untuk dapat membiayai belanja negara/daerah baik atas beban APBN maupun APBD adalah mengoptimalisasikan pendapatan negara ataupun pendapatan daerah sehingga dapat mencukupi keperluan belanja negara/daerah tersebut. Saat ini sumber pendapatan utama pemerintah daerah di regional Sumatera berasal dari dana transfer yang kebijakannya diatur oleh Pemerintah Pusat. Porsi pendapatan transfer masih sangat besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan adanya potensi peningkatan PAD yang masih belum tergali. Ke depannya pemerintah daerah harus terus berusaha mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan

yang ada selain dari dana transfer yaitu melalui peningkatan PAD. Sumber-sumber PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah harus terus digali dengan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta memperbaiki tata kelola penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat menghasilkan PAD yang optimal.

Selain optimalisasi PAD, tantangan lainnya terkait dengan optimalisasi pendapatan adalah peningkatan penerimaan perpajakan. Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor di regional Sumatera saat ini belum diikuti dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan secara memadai pada sektor yang bersangkutan. *Tax ratio* sektoral di berbagai provinsi seperti Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, dan Aceh menunjukkan bahwa sektor-sektor utama perekonomian misalnya pertambangan, pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi masih belum memberikan penerimaan perpajakan yang proporsional terhadap nilai tambah dari sektor-sektor tersebut. Hal ini merupakan suatu tantangan untuk menggali penerimaan perpajakan dari sektor-sektor tersebut mengingat potensinya yang sangat besar untuk mengoptimalisasikan penerimaan perpajakan sehingga dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar kepada pemerintah.

Peningkatan kualitas belanja APBD

Regional Sumatera pada saat ini menghadapi situasi dimana harga-harga komoditas unggulan yang dihasilkan misalnya minyak bumi, batubara, karet, kelapa sawit, dan kopi sedang mengalami tekanan di pasar global. Hal ini berimbas pada pertumbuhan pada sektor-sektor terkait seperti pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi cenderung stagnan atau bahkan menurun. Kondisi ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun kualitas pembangunan manusia. Hal ini mulai terlihat antara lain di beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Bengkulu yang mengalami penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) sehingga menjadi lebih rendah daripada rata-rata nasional. Demikian pula persentase penduduk miskin yang cenderung tinggi melebihi tingkat nasional serta Indeks Pembangunan Manusia di beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung yang cenderung rendah. Kondisi lainnya yang dihadapi adalah konektivitas antar wilayah yang saat ini masih belum memadai dan program hilirisasi yang masih harus terus dikembangkan.

Menghadapi kondisi tersebut, tantangan yang timbul adalah mewujudkan respon fiskal pemerintah yang tepat dalam bentuk belanja pemerintah baik APBN maupun APBD yang berkualitas sehingga dapat menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Fenomena global yang berimbas sampai pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia di regional Sumatera tersebut tentunya harus direspon dengan proporsi dan alokasi belanja APBD yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saat ini, porsi belanja pada APBD masih lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja

produktif. Kemudian pada tahap pelaksanaan anggaran, tingkat realisasi anggaran APBD masih belum optimal sehingga anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat banyak yang tidak terserap sehingga output yang ditargetkan menjadi tidak tercapai.

Solusi Fiskal Regional

Solusi yang dapat diberikan atas tantangan fiskal regional tersebut di atas dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, APBN, APBD, dan sektor unggulan di regional Sumatera diantaranya sebagai berikut:

Pertama, untuk mengoptimalisasikan pendapatan baik berupa PAD maupun pusat maka perlu dilakukan pemetaan atas potensi-potensi penerimaan yang dapat dioptimalisasikan tersebut. Dari sisi PAD, pemetaan perlu dilakukan terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang masih belum tergali secara optimal misalnya pemetaan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan yang beroperasi di suatu wilayah provinsi namun pembayaran pajaknya masih terdaftar di wilayah provinsi lainnya sehingga dapat dilakukan penertiban. Demikian juga dengan sumber PAD yang lain seperti dari retribusi parkir yang tata kelolanya masih memerlukan banyak pembenahan. Pemetaan terhadap potensi-potensi kebocoran dalam penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga perlu dilakukan sehingga kebocorannya dapat diminimalisasikan. Dari sisi penerimaan pajak pusat, perlu dilakukan pemetaan terhadap potensi-potensi penerimaan dari sektor-sektor besar penopang perekonomian di regional Sumatera misalnya dari sektor pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan sehingga target intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan dapat difokuskan pada sektor-sektor yang mempunyai potensi besar dalam peningkatan penerimaan perpajakan.

Kedua, agar belanja negara yang dikeluarkan dapat secara efektif membantu menanggulangi berbagai permasalahan dan mendukung tumbuh kembangnya daerah maka perlu dilakukan perbaikan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasinya. Perlu dilakukan upaya rekomposisi belanja daerah dari yang saat ini lebih banyak untuk biaya operasional menjadi lebih difokuskan untuk belanja produktif seperti belanja modal. Isu konektivitas antar wilayah di Sumatera perlu direspon dalam perencanaan APBD yang mendukung program peningkatan konektivitas yang sedang menjadi fokus pembangunan pemerintah pusat di regional Sumatera. Selain itu pemerintah daerah juga perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran melalui penganggaran berbasis kinerja *output* dan *outcome* yang jelas secara menyeluruh dan memangkas anggaran-anggaran yang tidak mempunyai dampak publik. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah mulai dari pembuat aturan keuangannya, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pertanggungjawaban dan monitoringnya sehingga semua kegiatan dapat direviu untuk kesinambungannya.

Ketiga, untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah dari sisi pelaksanaan anggaran khususnya APBD maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya-upaya agar realisasi anggaran dapat berjalan optimal dan proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Anggaran yang telah disusun di awal tahun harus dapat direalisasikan dengan salah satu wujudnya adalah tingkat serapan anggaran yang maksimal dan capaian *output* yang tinggi sebagaimana yang ditargetkan sehingga perlu dilakukan penyusunan rencana penarikan dana APBD sesuai dengan perkiraan *progress* kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, fungsi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran harus ditingkatkan sehingga *progress* dan kualitas pelaksanaan anggaran dapat senantiasa terpantau. Dengan fungsi monitoring dan evaluasi yang berjalan efektif maka setiap ada kelemahan dalam pelaksanaan anggaran dapat segera dideteksi untuk dilakukan evaluasi baik dalam periode berkenaan maupun sebagai *feedback* untuk penganggaran tahun berikutnya.

Keempat, masih dalam rangka perbaikan kualitas belanja pemerintah maka dalam penyusunan kebijakan fiskal harus mempertimbangkan aspek keunggulan kompetitif (*competitive advantages*). Dalam hal ini maka setiap daerah perlu juga mempelajari kebijakan fiskal yang dibuat di daerah-daerah lainnya yang mempunyai keunggulan PAD, baik yang mempunyai karakteristik yang sama maupun yang sama sekali berbeda dengan daerahnya. Kemudian diperlukan pemetaan terhadap sumber daya yang dimililki daerah tersebut seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lain. Berdasarkan hasil studi banding dan pemetaan tersebut, daerah tersebut dapat mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang memiliki potensi ekonomi di daerahnya (dengan tidak mengabaikan kearifan lokal). Sektor tersebut akan dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pemerintah serta memperbaiki ruang fiskal.

Regional Jawa

Pertumbuhan ekonomi regional Jawa pada tahun 2016 sebesar 5,59% dari tahun sebelumnya menunjukkan angka di atas angka pertumbuhan secara nasional (5,02%). Aktivitas ekonomi ini masih banyak didominasi oleh konsumsi rumah tangga (60,05%), baru kemudian diikuti oleh PMTB (29,48%). Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015, terjadi peningkatan sebesar 0,14% di tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan perekonomian di Pulau Jawa setelah pada tahun 2015 mengalami perlambatan 0,12% dari tahun 2014. Penguatan perekonomian regional Jawa didukung dengan tingkat inflasi regional Jawa tahun 2016 yang tercatat di bawah tingkat inflasi nasional dan pada umumnya menurun kecuali tingkat inflasi pada Provinsi Jawa Barat yang naik sebesar 0,02%. Sejalan dengan kondisi perekonomian tahun 2016, IPM semua provinsi dalam regional Jawa meningkat dibanding tahun 2015 dan berada di atas IPM nasional. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin dan TPT relatif menurun dibanding tahun sebelumnya kecuali TPT pada Provinsi Jawa Barat. Perkembangan rasio Gini regional Jawa cenderung menurun kecuali Provinsi DIY yang stagnan dan berada di atas rasio Gini nasional.

Pada tahun 2016, anggaran belanja negara yang dikucurkan untuk regional Jawa sebesar Rp1.301,46 triliun naik sebesar 4,54% dibanding tahun 2015. Anggaran belanja negara tersebut terdiri dari peningkatan pagu belanja pemerintah pusat sebesar 2,01% dengan nilai pagu Rp1.064,23 triliun dan realisasi sebesar 88,57% sedangkan pagu transfer ke daerah dan dana desa naik 17,64% dengan nilai pagu Rp237,23 triliun dan realisasi sebesar 94,05%. Anggaran belanja modal pada tahun 2016 sebesar Rp142,88 triliun atau menurun 3,39% dibanding 2015 dengan realisasi 74,92%. Dari sisi APBD, target PAD dan pagu belanja pemerintah daerah dalam regional Jawa pada tahun 2016 meningkat masing-masing sebesar 6,43% dan 5,93% dibanding 2015, dan dengan tingkat realisasi masing-masing sebesar 100,73% dan 89,23%. Sementara itu, rasio kemandirian keuangan daerah justru menurun dari sebesar 92,3% di tahun 2015 menjadi 65,3% di 2016

Makroekonomi Regional Jawa

Pertumbuhan Ekonomi

Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada regional Jawa dari 5,45% pada 2015 menjadi 5,59% pada 2016

Laju pertumbuhan ekonomi regional Jawa tahun 2016 menunjukkan angka sebesar 5,59% dan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 5,45%. Memperhatikan rata-rata nasional, laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi di Jawa masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 5,02% . Hal ini menunjukkan bahwa regional Jawa masih mendominasi perekonomian Indonesia meski persentasenya terus menunjukkan tren penurunan. Hal ini diperkuat dengan besarnya porsi PDRB regional Jawa terhadap total PDRB Indonesia dengan persentase sebesar 58,38%.

Seperti halnya tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tertinggi masih terjadi di Provinsi DKI Jakarta (5,85%) meski melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (5,89%). Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Provinsi DI Yogyakarta dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,05%. Akan tetapi angka tersebut meningkat 0,1% jika dibandingkan dengan tahun 2015.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa 2015 dan 2016

Sumber: BPS

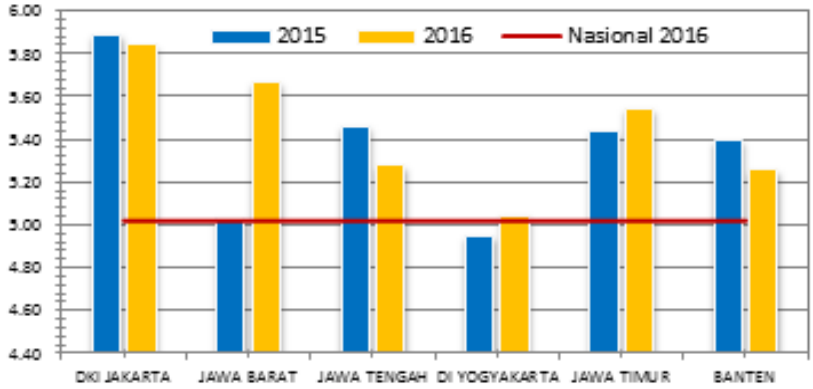

Salah satu variabel yang mendukung tingginya pertumbuhan di regional Jawa adalah pada tingginya konsumsi rumah tangga.

Komponen konsumsi rumah tangga paling tinggi berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi berdasar pengeluaran. Masih tingginya porsi konsumsi rumah tangga memberikan sinyal bahwa daya beli masyarakat di regional Jawa masih cukup tinggi.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 per provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 0,63% dari 5,04% di tahun 2015 menjadi 5,67%. Besarnya peningkatan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh positifnya tingkat pertumbuhan di semua komponen pengeluaran. Selain itu, konsumsi rumah tangga juga meningkat lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di tahun 2016 meningkat sebesar 5,6% dan menyumbang pertumbuhan sebesar 3,52% terhadap laju pertumbuhan tahun 2016 (Kanwil DJPB Jawa Barat, 2017).
Sedangkan Provinsi Jawa Tengah justru mengalami perlambatan sebesar 0,19%. Laju pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2015 sebesar 5,47% sementara di tahun 2016 sebesar 5,28%. Perlambatan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 lebih disebabkan oleh menurunnya konsumsi pemerintah yang berkontribusi menimbulkan kontraksi sebesar 1,71%. Sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga masih tetap menunjang pertumbuhan ekonomi, yang mana pengeluaran tersebut memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebesar 2,76% (Kanwil DJPB Jawa Tengah, 2017).

Komposisi PDRB ADHB dari Sisi Permintaan, Regional Jawa Tahun 2016
Sumber: BPS

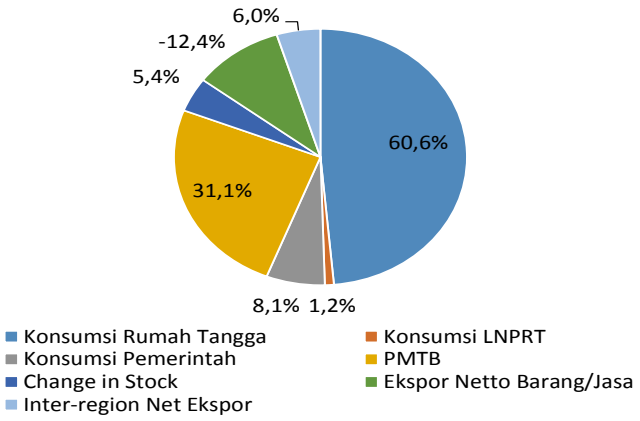

Komposisi PDRB dari sisi permintaan di Jawa tidak jauh berbeda dengan komposisi secara nasional, didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.

Jika melihat komposisi PDRB dari sisi permintaan di Jawa relatif tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan komposisi secara nasional, yakni didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi (pembentukan modal tetap bruto). Komposisi ini cenderung sama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kedua jenis pengeluaran tersebut menyumbangkan 89,53% dari komposisi PDRB regional Jawa. Berbeda dengan kedua komponen PDRB tersebut, kinerja ekspor barang/jasa dari regional Jawa yang sebenarnya mengalami kenaikan sebesar 1,58% akan tetapi tidak mampu penyumbang positif karena nilai impor barang/jasa yang masih jauh lebih besar. Pada akhirnya kinerja ekspor-impor menjadi penyumbang minus sebesar 9,41% dari komposisi PDRB.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan, Regional Jawa Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	4,65%	5,12%
Konsumsi LNPRT	-3,57%	8,08%
Konsumsi Pemerintah	7,17%	1,10%
PMTB	3,90%	3,81%
Change in Stock	-9,01%	-1,21%
Ekspor Barang dan Jasa	-19,18%	-9,01%
Impor Barang dan Jasa	-12,19%	3,64%
Inter-region Net Ekspor	-198,82%	129,16%

PDRB Jawa didominasi oleh tiga sektor besar, yaitu Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran

Dari sisi penawaran atau lapangan usaha, PDRB regional Jawa masih tetap didominasi oleh tiga sektor besar, yaitu Industri Pengolahan (28,86%); Konstruksi (10,4%), dan Perdagangan Besar dan Eceran (15,7%). Ketiga sektor tersebut masih menjadi andalan perekonomian Jawa dengan porsi sebesar 54,87% dalam pembentukan PDRB regional Jawa pada tahun 2016. Sumbangan ketiga sektor tersebut yang cukup besar terhadap PDRB regional Jawa masih cukup wajar mengingat Jawa sampai dengan saat ini merupakan pusat kawasan industri pengolahan dan perdagangan. Sedangkan sektor konstruksi pada umumnya disumbang dari berbagai realisasi pembangunan infrastruktur seperti *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rail Transit* (LRT), proyek pengurai kemacetan seperti Jalur Lingkar Semanggi, jalan tol trans dan non trans Jawa, serta peningkatan kapasitas beberapa bandara dan pelabuhan juga memberikan peran sektor konstruksi dalam peningkatan pembentukan PDRB regional Jawa tahun 2016

Komposisi PDRB ADHB dari Sisi Penawaran, Regional Jawa Tahun 2016

Sumber: BPS

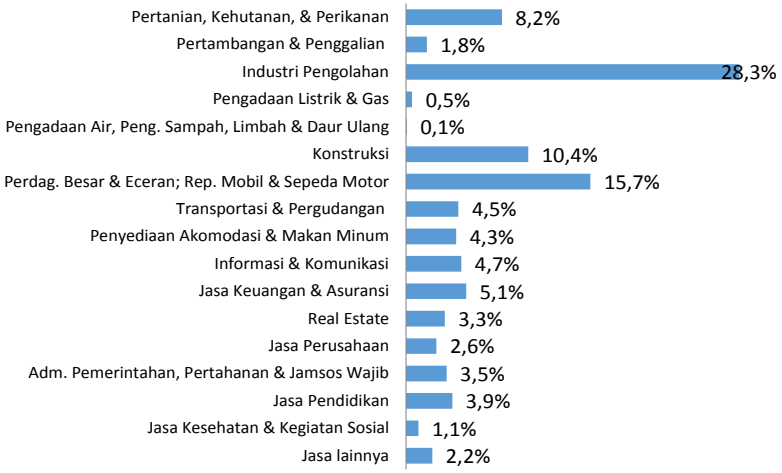

Usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih meningkat meski terjadi perlambatan

Akan tetapi jika dilihat per Provinsi, sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan termasuk tiga terbesar di beberapa Provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pada keempat Provinsi tersebut masih banyak terdapat lahan pertanian dan usaha perikanan yang produktif. Sedangkan khusus Provinsi Banten, sektor

transportasi dan pergudangan termasuk dalam tiga besar mengingat posisi Banten sebagai jalur transportasi utama ke Sumatera.

Sedangkan laju pertumbuhan tertinggi di regional Jawa tercatat pada bidang usaha pertambangan dan penggalian. Bidang ini meningkat 10,5% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Tinggi laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian disumbang oleh Provinsi Jawa Timur dari peningkatan *lifting* minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Timur terutama pada triwulan III 2016 sebesar 17,23% (BPS Jawa Timur, November 2016). Sedangkan dua sektor dengan peningkatan laju tertinggi berikutnya di tahun 2016 adalah sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa keuangan dan asuransi. Pada sektor informasi dan komunikasi, peningkatan laju pertumbuhan didorong oleh semakin tingginya penggunaan layanan telekomunikasi seluler dan internet terutama sejak semakin gencarnya penetrasi layanan 4G. Sedangkan pada sektor jasa keuangan dan asuransi terutama didorong dari semakin banyaknya penggunaan transaksi perbankan secara nontunai dan peningkatan jumlah pengguna jasa asuransi.

.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Penawaran, Regional Jawa Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,32%	3,31%
Pertambangan dan Penggalian	5,02%	10,50%
Industri Pengolahan	4,76%	4,29%
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,30%	0,59%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,49%	4,61%
Konstruksi	4,92%	4,06%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,06%	4,96%
Transportasi dan Pergudangan	7,90%	8,22%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,73%	7,29%
Informasi dan Komunikasi	9,79%	10,05%
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,48%	8,97%
Real Estate	5,39%	5,52%
Jasa Perusahaan	7,60%	8,13%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,66%	3,66%
Jasa Pendidikan	7,33%	6,83%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,10%	7,80%
Jasa lainnya	7,08%	7,81%

Inflasi

Seiring dengan penurunan angka inflasi nasional tahun 2016 menjadi 3,02%, tingkat inflasi per provinsi di regional Jawa umumnya turun lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional

Angka inflasi di setiap Provinsi di regional Jawa pada tahun 2016 semua berada pada tingkat di bawah angka inflasi nasional yang mencapai 3,02%. Jika dilihat per Provinsi, hal ini yang sama juga umumnya terjadi di seluruh Provinsi di Jawa kecuali untuk Provinsi Jawa Barat yang mengalami sedikit kenaikan dari 2,73% menjadi

2,75%. Perekonomian dunia yang belum stabil, sedikit banyak mempengaruhi perekonomian Indonesia. Meskipun mulai menguat, akan tetapi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih sehingga berdampak pada tingkat harga yang tidak mengalami banyak kenaikan.

Tingkat Inflasi Regional Jawa Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

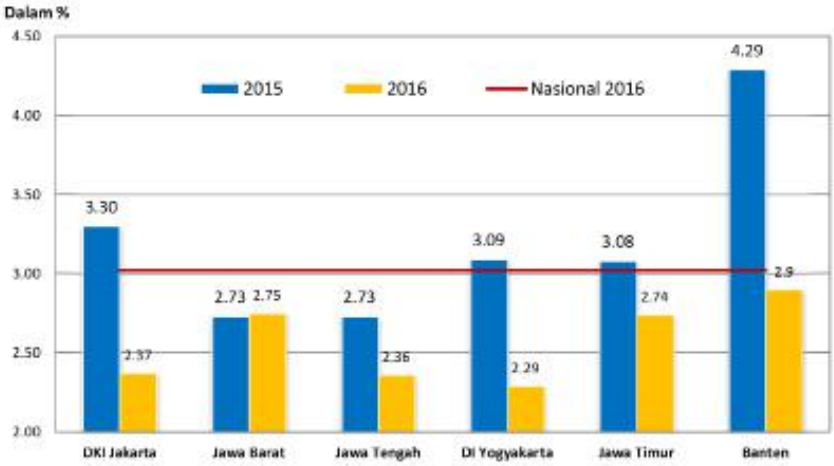

Indeks Pembangunan Manusia

IPM tertinggi tahun 2016 diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 79,6 dan IPM terendah dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai 69,74

Berdasarkan data IPM yang diperoleh dari BPS bahwa pembangunan sumber daya manusia di regional Jawa selama periode tahun 2010 s.d. 2016 terus mengalami peningkatan yang berarti. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas manusia di regional Jawa terus membaik yang dapat dilihat berbagai aspek yaitu dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Berdasarkan skala dari BPS, angka IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu kategori sangat tinggi (IPM ≥ 80), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70) dan kategori rendah (IPM < 60). Jika dilihat secara nasional, angka capaian IPM pada tahun 2016 adalah sebesar 70,18. Akan tetapi pada tingkat Provinsi di regional Jawa, angka capaian IPM cukup bervariasi mulai dari indeks terendah 69,74 yang dicapai oleh Provinsi Jawa Timur sampai dengan indeks tertinggi 79,6 yang dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta.

Hal serupa juga terjadi di tahun 2015, yang mana IPM tertinggi diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 78,99 dan IPM terendah dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai 68,95. Besarnya *gap* pencapaian IPM tertinggi dengan IPM terendah pada tahun 2016 adalah sekitar 9,86, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 10,04 poin. Semakin kecilnya perbedaan pencapaian tersebut terus terjadi sejak tahun 2010, yang mencapai 10,92 poin (IPM tertinggi 76,31 untuk Provinsi DKI Jakarta dan terendah 66,06 untuk Provinsi Jawa Timur). Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pembangunan manusia antara satu provinsi dengan provinsi lainnya pada regional Jawa relatif terus menurun.
.

IPM Regional Jawa Tahun 2010 s.d. 2016
Sumber: BPS

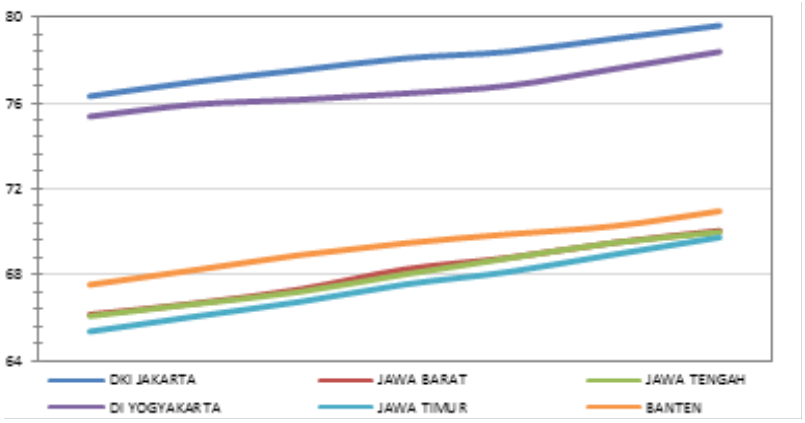

Rasio Gini

Rasio Gini di regional Jawa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi, Rasio Gini terendah adalah Provinsi Jawa Tengah sedangkan yang tertinggi terjadi di Provinsi DI Yogyakarta.

Berdasarkan data bahwa rasio Gini di setiap Provinsi di Jawa terus berfluktuasi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, provinsi dengan rasio Gini terendah adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,37, sedangkan provinsi dengan rasio gini terendah berikutnya adalah Provinsi Banten yang memiliki rasio gini sebesar 0,39. Sedangkan rasio Gini tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan rasio Gini sebesar 0,42 dan disusul oleh Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan rasio Gini sebesar 0,41. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, rasio Gini tahun 2016 pada seluruh provinsi di Jawa mengalami penurunan sebesar 0,1-0,2 kecuali Provinsi DI Yogyakarta yang tidak mengalami perubahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2016, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di sebagian besar provinsi di regional Jawa relatif semakin kecil meskipun distribusi pendapatan masih belum merata.

Akan tetapi perlu dicermati kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi di Provinsi DI Yogyakarta mengingat rasio Gini yang tertinggi di regional Jawa. Terlebih jika dilihat secara nasional, rasio Gini Provinsi DI Yogyakarta berada pada peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Selatan (rasio Gini Sulawesi Selatan 0,43). Hal tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat beberapa tahun belakangan ini, Provinsi DI Yogyakarta marak mendapat investasi dari luar daerah, seperti untuk pembelian lahan/tanah, pembangunan hotel/kondotel dan pembangunan beberapa mal/pusat perbelanjaan namun hampir tidak berpengaruh pada perekonomian masyarakat luas. Hal tersebut tentunya dapat berpotensi menimbulkan pergesekan atau konflik sosial karena perbedaan tingkat kesejahteraan. Perlu peningkatan peran Pemerintah terutama Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta untuk memperkecil jurang pendapatan.

Rasio Gini Regional Jawa Tahun 2011 s.d. 2016
Sumber: BPS

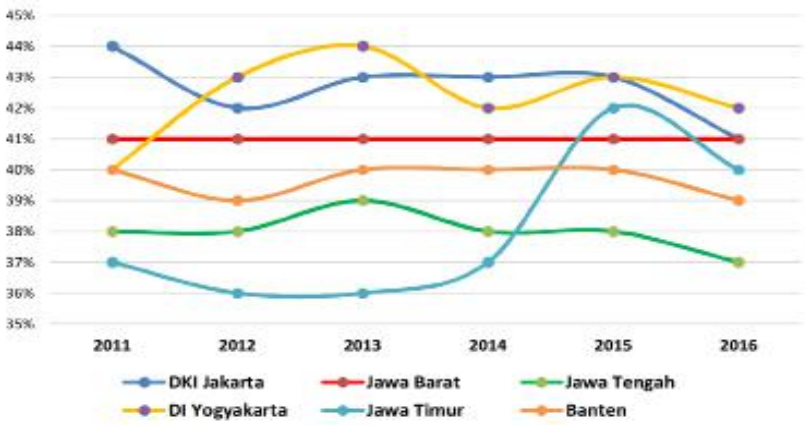

Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran di regional Jawa umumnya mengalami tren penurunan, kecuali Jawa Barat

Pada tahun 2016, angka persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di regional Jawa berada di Provinsi Banten sebesar 8,92% dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 2,72%. Sedangkan pada tahun sebelumnya, angka TPT di Provinsi Banten sebesar 9,55% dan di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 4,07%. Angka TPT di sebagian besar Provinsi di regional Jawa mengalami penurunan kecuali untuk Provinsi Jawa Barat yang sedikit meningkat dari 8,72% di tahun 2015 menjadi 8,89% di tahun 2016. Penurunan tersebut juga terjadi pada tingkat nasional.

Berdasarkan data BPS, angka TPT secara nasional tahun 2016 sebesar 5,61% juga menurun jika dibandingkan dengan angka TPT tahun 2015 sebesar 6,18%. Adanya kenaikan angka TPT di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,17% tampaknya berbanding terbalik dengan peningkatan PDRB Jawa Barat yang tertinggi di regional Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi yang berkontribusi terbesar dalam peningkatan PDRB di Jawa Barat kurang berkontribusi terhadap lapangan kerja mengingat kedua sektor tersebut umumnya hanya menyerap tenaga kerja dengan skill khusus yang relatif sedikit.

Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Jawa Tahun 2015 dan 2016
(dalam %)
Sumber: BPS

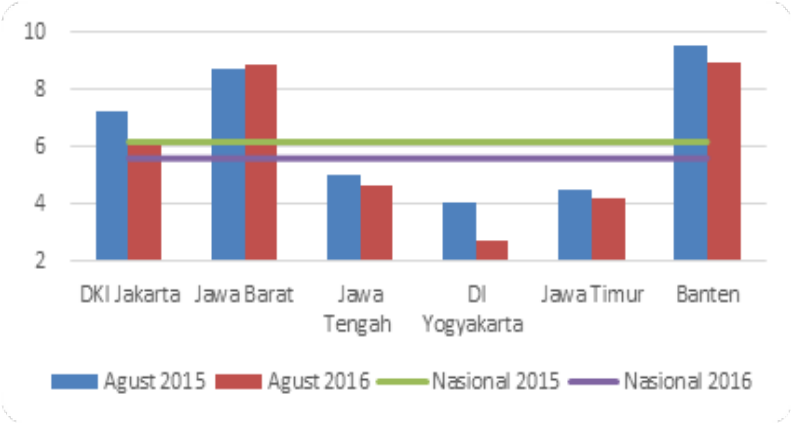

Turunnya tingkat pengangguran di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur tahun 2016 dibanding tahun 2015 diindikasikan karena peningkatan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor formal dibanding sektor informal. Hal ini berarti bahwa penyerapan tenaga kerja makin meningkat dan angka pengangguran akan semakin menurun. Sementara itu, Banten memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di regional Jawa meskipun jumlah angkatan kerja di provinsi tersebut kecil. Hal ini dimungkinkan karena provinsi tersebut termasuk provinsi yang baru terbentuk, sehingga masih membutuhkan waktu untuk berkembang.

Kemiskinan

Tahun 2016 masih terdapat gap yang tinggi dalam tingkat kemiskinan pada regional Jawa, tingkat kemiskinan terendah di DKI Jakarta dan tertinggi di Jawa Tengah.

Di tahun 2016 masih terdapat gap yang tinggi dalam tingkat kemiskinan pada regional Jawa. Tingkat kemiskinan terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,75%. Selain DKI Jakarta, terdapat 2 Provinsi lain dengan tingkat kemiskinan di bawah angka kemiskinan nasional yaitu Provinsi Banten sebesar 5,36% dan Provinsi Jawa Barat 8,77%. Selain ketiga Provinsi tersebut, tingkat kemiskinan di provinsi lainnya masih relatif tinggi yaitu: Provinsi Jawa Tengah (13,19%), DI Yogyakarta (13,10%) dan Jawa Timur (11,85%). Tingginya tingkat kemiskinan di ketiga provinsi ini antara lain karena sebagian besar penduduk miskin adalah warga pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya karena pembangunan di ketiga Provinsi tersebut masih kurang optimal untuk penyediaan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang memadai bagi penduduk pedesaan agar dapat meningkatkan kesempatan warga pedesaan untuk berperan aktif dan turut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Persentase Penduduk Miskin Regional Jawa Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

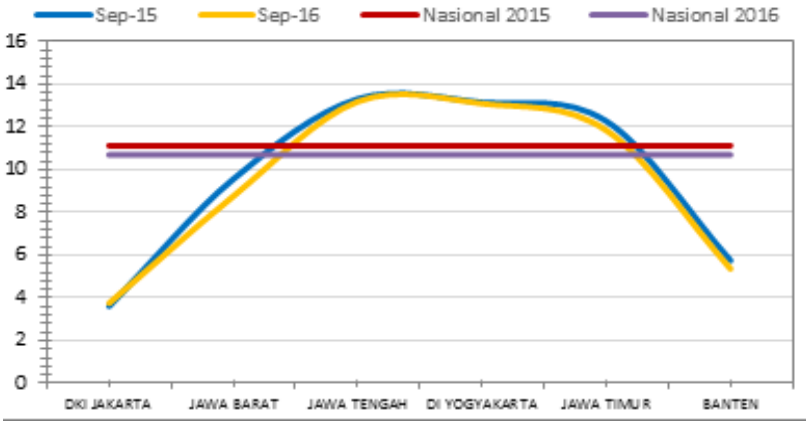

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa tingkat pengangguran terbuka yang rendah di Yogyakarta, ternyata tidak diikuti dengan berkurangnya penduduk miskin. Hal ini umumnya diakibatkan oleh lapangan kerja yang terisi di DI Yogyakarta merupakan pekerjaan sektor non formal yang penghasilannya masih di bawah angka upah minimum regional atau besaran penghasilan pada sektor non formal tersebut belum bisa terdata dengan baik.

Pelaksanaan APBN

Kondisi ekonomi global di tahun 2016 yang perlahan mulai membaik dan diikuti dengan peningkatan laju perekonomian Indonesia memberikan dampak yang cukup positif terhadap APBN terutama di regional Jawa. Hal tersebut sedikit banyak memberikan angin segar mengingat *shortfall* penerimaan pajak yang mencapai lebih dari Rp200 triliun rupiah.

Pendapatan Negara

Realisasi pendapatan negara regional Jawa tahun 2016 sebesar Rp1.3794,85 triliun utamanya berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp1.128,64 triliun atau 81,79% dari total realisasi pendapatan. Penerimaan perpajakan tersebut sebenarnya lebih tinggi dari realisasi penerimaan tahun 2015 sebesar Rp1.083,26 triliun, akan tetapi terdapat salah satu sumber penerimaan di sektor pajak yang bukan bersifat rutin yaitu pendapatan pajak dari program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang secara nasional mencapai Rp107 triliun. Jika dibandingkan dengan pendapatan pajak secara nasional yang mencapai Rp1.284,97 triliun, pendapatan pajak di regional Jawa mencapai 87,83% dari pendapatan pajak nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menyetorkan pajak berdomisili di regional Jawa.

Selain pendapatan dari sektor pajak, pendapatan di regional Jawa juga berasal dari PNBP sebesar Rp242,3 triliun dan pendapatan hibah sebesar Rp8,9 triliun.

Realisasi APBN Regional Jawa Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN, data diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	213.542,96	1.083.265,46	507,28	414.797,59	1.128.637,40	272,09
Penerimaan Negara Bukan Pajak	110.161,35	147.989,74	134,34	102.514,76	242.309,77	236,37
Pendapatan Hibah	301,13	247,96	82,34	2.031,79	8.903,15	438,19
Jumlah Pendapatan Negara	324.005,44	1.231.503,16	380,09	519.344,14	1.379.850,32	265,69
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	1.043.242,05	932.985,50	89,43	1.064.232,41	942.593,28	88,57
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	201.664,18	198.170,10	98,27	237.233,46	223.107,54	94,05
Jumlah Belanja Negara	1.043.242,05	1.131.155,60	90,86	1.064.232,41	1.165.700,82	89.57

Belanja Negara

Persentase realisasi Belanja Negara pada Tahun 2016 di regional Jawa relatif turun dibandingkan Tahun 2015 meski secara nominal meningkat

Pada sisi belanja, angka realisasi Belanja Negara pada Tahun 2016 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2015 yaitu sebesar 4,54%. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan persentase penyerapan anggaran, total realisasi Belanja Negara di Tahun 2016 menurun dari 90,86% di Tahun 2015 menjadi 89,57%. Adapun

realisasi belanja negara ini berasal dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp942,59 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp223,11 triliun.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Regional Jawa 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Kode	Fungsi	2015	2016
01	Pelayanan Umum	742.499,00	594.546,04
02	Pertahanan	71.512,21	79.329,96
03	Ketertiban dan Keamanan	22.537,00	48.489,26
04	Ekonomi	40.961,04	51.596,28
05	Lingkungan Hidup	4.574,19	4.492,87
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	11.424,41	11.462,77
07	Kesehatan	6.562,32	35.726,66
08	Pariwisata dan Budaya	1.332,77	4.524,66
09	Agama	1.924,46	2.672,68
10	Pendidikan	86.901,68	89.629,58
11	Perlindungan Sosial	12.475,13	11.982,49
Jumlah		**932.985,50**	**942.593,28**

Sebagian besar anggaran Belanja Pemerintah Pusat di regional Jawa dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum, pendidikan, pertahanan, dan ekonomi

Pada periode tahun anggaran 2015 dan 2016, sebagian besar anggaran Belanja Pemerintah Pusat di regional Jawa dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, dan fungsi ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan prioritas Pemerintah secara nasional melalui program Nawa Cita yaitu upaya untuk meningkatkan pelayanan umum, pembangunan infrastruktur (fungsi ekonomi), dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Akan tetapi terdapat peningkatan secara signifikan untuk anggaran belanja fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, serta fungsi ketertiban dan keamanan masing-masing sebesar 136,62%, 44,01%, dan 37,22%. Akan tetapi, meskipun mengalami peningkatan pagu di tahun 2016, namun jika dilihat dari komposisi, jumlah alokasi ketiga fungsi tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan fungsi pelayanan umum, ekonomi, pertahanan, dan pendidikan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Regional Jawa Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)

Sumber: DJPBN, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	225.262,38	210.020,06	93,23	244.227,11	229.708,91	94,06
Belanja Barang	200.207,14	164.698,09	82,26	232.829,80	187.518,39	80,54
Belanja Modal	147.891,45	117.376,68	79,37	142.877,09	107.043,79	74,92
Belanja pembayaran Kewajiban Utang	156.022,20	156.009,75	99,99	189.218,29	182,761.64	96,59
Belanja Subsidi	214.530,82	185.971,11	86,69	190.064,74	174.226,87	91,67
Belanja Hibah	4.109,70	4.261,66	103,70	8.897,37	6.511,17	73,18
Belanja Bantuan Sosial	88.507,01	85.816,57	96,96	50.252,31	48.938,59	97,39
Belanja Lain-lain	6.711,36	8.831,59	131,59	5.865,71	5.883,91	100,31
Jumlah	1.043.242,05	932.985,50	89,43	1.064.232,41	942.593,28	88,57

Alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp29,05 triliun atau 13,96% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Alokasi terbesar dari Belanja Transfer Daerah tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum yang mencapai 50,81% dari total alokasi anggaran tersebut.

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Regional Jawa Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN dan DJPK, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	27.688,18	18.734,86	67,66	25.174,59	29.088,22	115,55
Dana Alokasi Umum	113.048,63	113.048,63	100,00	120.548,92	120.548,92	100,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	11.092,65	10.402,30	93,78	16.548,45	13.238,78	80,00
Dana Otsus,Keistimewaan DIY,DID	547,45	437,96	80,00	2.643,99	2.574,03	97,35
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	49.287,27	49.033,14	99,48	57.698,58	43.061,41	74,63
Dana Desa	6.513,21	6.513,21	100,00	14.618,94	14.596,18	99,84
Jumlah	208.177,39	198.170,10	95,19	237.233,46	223.107,54	94,05

Realisasi anggaran tahun 2016 untuk masing-masing jenis Transfer ke Daerah mencapai di atas 90% kecuali DAK Fisik dan Non Fisik.

Kenaikan terbesar secara nominal terjadi pada Dana Bagi Hasil di mana pada tahun 2015 sebesar Rp18,73 triliun menjadi Rp29,08 triliun di tahun 2016 atau meningkat sebesar Rp10,35 triliun. Sedangkan jika dilihat berdasarkan persentase kenaikan, realisasi Dana Keistimewaan Yogyakarta meningkat sebesar 488% atau hampir lima kali lipat jika dibandingkan realisasi di Tahun 2015.

Terkait dengan Dana Desa, Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, pemerintah wajib mengalokasikan Dana Desa sebagai salah satu komponen belanja Transfer ke Daerah dalam APBN. Tujuan dialokasikannya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Tahun 2016 pagu dana desa untuk regional Jawa dialokasikan sebesar Rp14,618 triliun dan terserap 99,84%. Adapun penyebab tidak terserapnya seluruh alokasi Dana Desa adalah karena adanya alokasi yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Kota Batu akibat tidak disampaikannya persyaratan penyaluran. Realisasi anggaran tahun 2016 untuk masing-masing jenis Transfer ke Daerah mencapai di atas 90% termasuk untuk Dana Bagi Hasil yang pada periode tahun 2015 hanya mencapai 67,66%. Tingginya realisasi Dana Bagi Hasil tersebut mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan yang akan dibagikan kembali ke daerah di lingkup regional Jawa cukup tinggi dan hampir mencapai target yang ditetapkan dalam APBN-P 2016.

Badan Layanan Umum (BLU)

Pada tahun 2016, jumlah Satker BLU di regional Jawa mencapai 111 satker meningkat sebesar 11% dari tahun 2015 yang berjumlah 100 satker. Seluruh satker BLU umumnya marupakan BLU layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari data BLU berdasarkan jenis layanan yang diberikan, yaitu BLU layanan kesehatan sejumlah 44 satker (bertambah 1 satker dari tahun 2015), BLU pendidikan 34 satker (bertambah 10 satker dari tahun 2015), BLU barang dan jasa lainnya 12 satker (berkurang 1 satker dari tahun 2015), BLU Kawasan 2 satker (berkurang 1 satker dari tahun 2015), dan BLU pengelola dana 9 satker (bertambah 2 satker dari tahun 2015). Jika dilihat berdasarkan lokasi, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi Provinsi dengan jumlah satker BLU terbanyak yaitu sebanyak 38 satker dan disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan 26 satker.

Jumlah Satker BLU Menurut Layanan Regional Jawa Tahun 2014 s.d. 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN

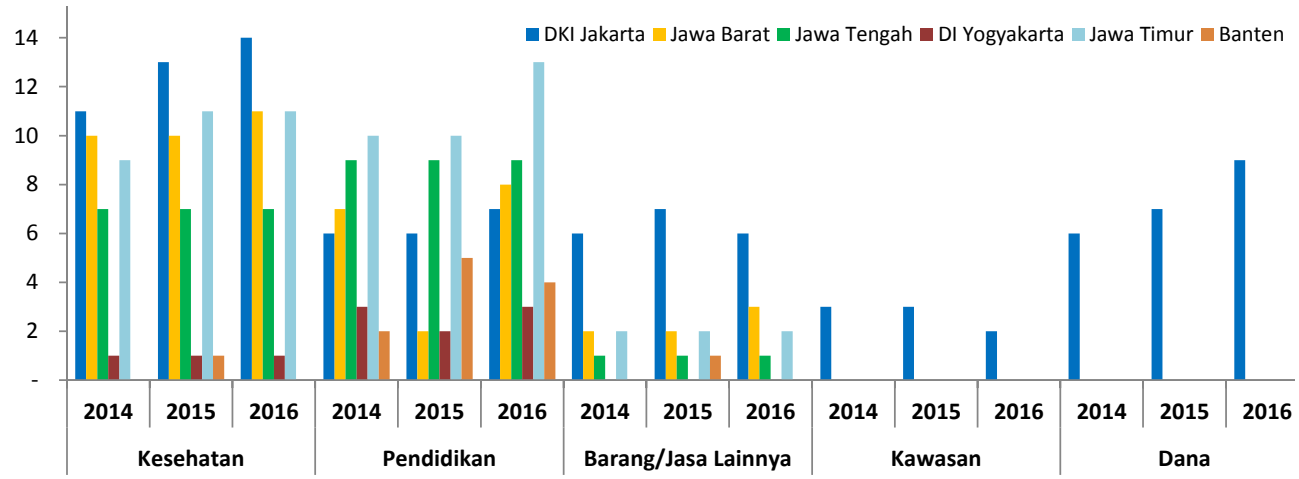

Pelaksanaan APBD

Secara keseluruhan di regional Jawa, realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target dengan persentase mencapai 98,01%. Jumlah realisasi pendapatan ini meningkat sebesar 9,62% jika dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2015. Sedangkan realisasi belanja daerah pada APBD seluruh pemerintah daerah di regional Jawa menunjukkan peningkatan dari sisi nominal sebesar Rp50,86 triliun. Peningkatan belanja tersebut, ternyata tidak seluruhnya dapat dibiayai dari pendapatan daerah karena terdapat defisit sebesar 3,6 triliun. Realisasi belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi dari pendapatan menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi nasional tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan kegiatan ekonomi di regional Jawa.

Realisasi APBD Regional Jawa Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	131.853,12	130.861,63	99,25%	140.333,53	141.362,00	100,73%
Pendapatan Transfer	176.393,86	164.323,26	93,16%	222.240,12	216.482,27	97,41%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	65.286,44	63.746,87	97,64%	38.867,39	35.606,12	91,61%
Jumlah Pendapatan	373.533,42	358.931,76	96,09%	401.441,04	393.450,39	98,01%
Belanja						
Belanja Pegawai	155.291,81	137.438,79	88,50%	160.426,85	147.326,06	91,83%
Belanja Modal	90.454,48	67.641,15	74,78%	94.070,71	75.386,86	80,14%
Belanja Lain	174.343,50	149.997,84	86,04%	190.494,22	174.337,91	91,52%
Jumlah Belanja	420.089,79	355.077,78	84,52%	444.991,78	397.050,83	89,23%
Surplus/Defisit	(46.556,37)	3.853,98	-8,28%	(43.550,74)	(3.600,44)	8,27%

Rasio kemandirian keuangan daerah regional Jawa sebesar dari 92,3% turun menjadi 65,3% di tahun 2016

Realisasi pendapatan APBD regional Jawa pada tahun 2016 sebesar Rp393,45 triliun, naik 9,62% dari tahun 2015 sebesar Rp358,93 triliun. Kenaikan realisasi pendapatan ini dikontribusikan salah satunya dari realisasi PAD yang melampaui target dengan capaian 100,73% serta realisasi transfer dari Pemerintah Pusat yang secara umum lebih dari 90% untuk semua jenis transfer daerah. Sedangkan realisasi penerimaan dari Lain-lain pendapatan yang sah di tahun 2016 justru mengalami penurunan dari realisasi di tahun 2015. Berdasarkan perbandingan komponen pendapatan terhadap total pendapatan, persentase PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah di Tahun 2016 tidak lagi dominan seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai 44,98%.

Sedangkan sisanya sebesar 55,02% merupakan pendapatan transfer. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya alokasi DAK Fisik dan Dana Desa. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pendapatan transfer (Dana Perimbangan) relatif lebih kecil jika dibandingkan pendapatan dari PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah dibandingkan dengan PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Hal ini dapat menunjukkan kemandirian pemerintah daerah di regional Jawa menjadi menurun di tahun 2016.

Dari sisi kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer. Pada tahun 2014 rasio kemandirian keuangan daerah regional Jawa sebesar 82,3% dan tahun 2015 naik menjadi 92,3% Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah regional Jawa pada tahun 2015 semakin baik. Akan tetapi di tahun 2016, terjadi penurunan menjadi 65,3%.

Belanja Daerah

Realisasi belanja modal mengalami peningkatan yang dibandingkan tahun 2016

Ditinjau dari sisi belanja, alokasi belanja lain di tahun 2016 masih mendominasi dari alokasi belanja secara keseluruhan. Hal ini juga terjadi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015. Sementara itu, realisasi belanja modal mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah di regional Jawa untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dalam mendukung pembangunan perekonomian secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2016 yang memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk memperkuat infrastruktur sebagai stimulus perekonomian. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa tingkat realisasi belanja modal masih di kisaran 80%. Hal ini mengindikasikan adanya sejumlah proyek pembangunan fisik yang tidak selesai atau justru tidak terlaksana.

Sektor Unggulan Regional

Regional Jawa sampai dengan saat ini masih menjadi pusat kegiatan perekonomian di Indonesia

Sampai dengan saat ini, regional Jawa masih menjadi pusat perekonomian di Indonesia meskipun perekonomian di berbagai wilayah Indonesia lain terutama Sumatera dan kawasan Timur Indonesia sudah mulai menunjukkan geliatnya. Terlebih dengan telah mapannya sejumlah sarana dan prasarana infrastruktur serta banyaknya industri yang berlokasi di regional Jawa terutama di kawasan Jabodetabek. Kedua hal tersebut menjadi daya tarik dalam mengembangkan usaha bagi para pelaku ekonomi. Secara umum terdapat empat sektor unggulan di regional Jawa yang paling dominan yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor konstruksi, dan sektor pariwisata.

Sektor Industri Pengolahan

Jawa Barat sampai dengan saat ini masih menjadi jantung industri secara nasional

Perekonomian di seluruh Provinsi di regional Jawa ditopang oleh sektor industri pengolahan terutama di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Secara keseluruhan, sektor tersebut memberikan andil sebesar 28,86% terhadap PDRB regional Jawa. Oleh karena itu, wajar jika industri pengolahan merupakan sektor unggulan yang utama di regional Jawa.

Jika dilihat per Provinsi, Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang menyumbang peran terbesar terhadap industri secara nasional terutama industri pengolahan. Di Jawa Barat sendiri, industri pengolahan menyokong PDRB sebesar 42,49%. Dengan kontribusi sebesar itu, industri pengolahan di Jawa Barat memberikan andil sebesar 2,07% terhadap pertumbuhan PDRB di tahun 2016.

Perekonomian Provinsi Banten juga disokong oleh industri pengolahan. Di Banten, industri tersebut berkontribusi terhadap PDRB sebesar 32,61%. Hal ini menjadikan industri sebagai salah satu ciri khas Banten. Terdapat sejumlah industri besar yang berlokasi di Banten seperti Krakatau Steel.

Kinerja sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta, industri pengolahan masih berkontribusi secara cukup signifikan dengan andil sebesar 13,55% meskipun tidak sebesar kontribusi di Jawa Barat. Kinerja sektor industri pengolahan tahun 2016 naik sebesar 3,64%, lebih kecil daripada pertumbuhan di tahun 2015 (5,05%). Industri pengolahan yang beroperasi di DKI Jakarta terbanyak adalah industri pakaian jadi sebanyak 251 perusahaan; diikuti oleh industri makanan sebanyak 166 perusahaan; industri karet, barang dari karet dan plastik sebanyak 130 perusahaan; Industri percetakan dan reproduksi media rekaman sebanyak 99 perusahaan; serta industri barang logam bukan mesin dan peralatannya sebanyak 88 perusahaan.

Ekspor non migas Jawa Timur masih didominasi hasil industri pengolahan

Sementara itu, sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur, selama tahun 2016 hanya tumbuh sebesar 4,51%. Meskipun turun dari tahun sebelumnya (5,30% di tahun 2015), akan tetapi tidak menggoyahkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Jawa Timur yang masih cukup signifikan yaitu 28,92%. Signifikansi industri pengolahan di Jawa Timur juga dapat diindikasikan dari ekspor non migas selama 2016 yang masih ditopang oleh industri pengolahan dengan persentase 86,75%. Dan secara nasional, kontribusi industri pengolahan Jawa Timur masih mencapai 20,57% dari total industri nasional. Jika dilihat per sektor industri pengolahan, kontribusi industri pengolahan Jawa Timur terhadap industri nasional masih dikuasai oleh sektor makanan dan minuman dengan andil 30,13% terhadap industri dalam skala nasional. Selanjutnya diikuti sektor pengolahan tembakau yang juga masih mendominasi terhadap sektor industri secara nasional dengan sumbangan mencapai 37,26%. Sektor lain yang juga tinggi sumbangannya adalah industri pengolahan kayu yang mencapai 24%. Selain itu, industri kimia dan farmasi dengan sumbangan 8,40%. Disusul sektor industri pengolahan dengan sumbangan 5,31% dan terakhir, sektor industri kertas dengan sumbangan mencapai 5%.

Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta juga termasuk provinsi dengan sektor industri pengolahan sebagai penopang utama PDRB. Selain sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah juga mampu untuk menurunkan angka kemiskinan melalui sektor ini. Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB Jawa Tengah mencapai 34,88%, jauh lebih besar daripada kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,69%) dan sektor Perdagangan (14,27%). Sedangkan pada Provinsi DI Yogyakarta, sektor industri pengolahan menyumbang andil sebesar Rp14,55 triliun atau 13,21% dari total PDRB DI Yogyakarta. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp13,03 triliun. Laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan tumbuh pesat sebesar 5,07%, jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan 2015 yang sebesar 1,75%.

Sektor Konstruksi

DKI Jakarta memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian dalam sektor konstruksi di regional Jawa

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor unggulan lain yang cukup penting di Jawa terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Secara keseluruhan, sektor konstruksi menyumbang sebesar 10,11% terhadap total PDRB. Jika menggunakan indeks

harga konstan Tahun 2010, kontribusi sektor tersebut adalah sebesar Rp560,33 miliar.

Jika ditelusuri per Provinsi, sektor kontruksi yang paling dominan di Jawa berada di DKI Jakarta. Menurut data BPS dalam Direktori Perusahaan Konstruksi DKI Jakarta 2016, di DKI Jakarta terdapat 9.607 perusahaan konstruksi. Nilai konstruksi yang diselesaikan (hasil survei perusahaan konstruksi) mencapai Rp128.970.713 juta untuk tahun 2013 dan Rp145.386.916 untuk tahun 2014, yang berarti tumbuh sebesar 12,73%, sebagaimana ditampilkan pada Jakarta dalam Angka 2016. Sementara itu jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat akibat kelahiran maupun urbanisasi ke DKI Jakarta meningkatkan pula permintaan akan kebutuhan tempat tinggal. Mengingat adanya keterbatasan lahan, maka peluang dari sektor ini diambil dengan cara pembangunan rumah susun, baik itu dalam bentuk rusunawa, rusunami, maupun apartemen. Selain itu, kebutuhan rumah tinggal juga dapat disokong dari daerah penyangga DKI Jakarta, yaitu di Bekasi, Bogor, Depok maupun Tangerang.

Sektor konstruksi Jawa Barat difokuskan pada infrastruktur strategis

Sektor kontruksi lain yang sedang menjadi prioritas pembangunan di DKI Jakarta adalah itu juga proyek angkutan massal (Mass Rapid Transit dan Light Rail Transit), pembangunan jalan tol akses pelabuhan, tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II, perluasan pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), pembangunan ruas tol yang menghubungkan ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang, serta jalur kereta dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta. Proyek-proyek konstruksi tersebut merupakan pendorong kinerja pada sektor konstruksi.

Jawa Barat terus berbenah meningkatkan potensi pariwisata

Sementara itu, Provinsi Jawa Barat juga memiliki potensi yang besar terhadap pengembangan sektor konstruksi. Beragam pembangunan yang sedang digenjot pada tahun 2016 turut berkontribusi terhadap pertumbuhan sektro tersebut. Proyek yang digarap di tahun 2016 di antaranya tahap lanjut pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, pembangunan 12 ruas jalan tol strategis untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah, dan pembangunan transportasi massal di perkotaan. Program lainnya adalah pembangunan pelabuhan laut di Pantai Utara, penggenangan Waduk Jatigede, pembangunan pembangkit listrik Upper Cisokan, serta pembangunan koridor Jawa Barat Selatan dan Utara.

Provinsi DI Yogyakarta juga memiliki potensi untuk mengembangkan sektor konstruksi. Meski geliat pembangunan masih didominasi di kota Yogyakarta dan daerah pinggiran kota, akan tetapi potensi pengembangan wilayah DI Yogyakarta semakin terbuka lebar. Hal ini dapat dipastikan setelah adanya rencana pembangunan Bandara di Kulon Progo. sejumlah rencana telah disusun untuk membangun infrastruktur pendukung seperti jalan tol dan jalur kereta terutama untuk mendukung kawasan wisata Candi Borobudur.

Sektor Pariwisata

Sektor berikutnya yang berpotensi sebagai sektor unggulan di Jawa adalah sektor pariwisata. Meskipun kontribusi terhadap PDRB belum

sebesar sektor lain, tetapi peran pariwisata terhadap PDRB terutama terkait penyediaan akomodasi terus berkembang. Hal ini dibuktikan dari tingkat pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,73% di tahun 2015 dan meningkat menjadi 7,29% di tahun 2016.

Seperti diketahui, di Pulau Jawa terdapat banyak destinasi wisata yang menarik. Ada beragam daya tarik wisata di Jawa meliputi wisata pantai, pegunungan, hutan, seni budaya, heritage, kuliner dan wisata belanja yang potensial dan tersebar di berbagai wilayah Kabupaten/kota. Destinasi utama yang sudah dikenal luas antara lain Kebun Raya Bogor, Candi Borobudur, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Bromo. Obyek wisata tersebut telah cukup terkenal hingga manca negara. Selain itu, masih banyak destinasi lain dengan kualitas yang mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional sehingga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan dijadikan daerah tujuan wisata andalan. Beberapa kawasan wisata yang tengah dikembangkan antara lain Dataran Tinggi Dieng dan Karimunjawa. Kedua kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) bersama dengan Candi Borobudur.

Perkembangan pariwisata di Jawa, tak lepas dari banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Di wilayah Jawa Barat, pergerakan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan mencapai 41.875.067 wisatawan yang terdiri dari 2.679.379 wisman dan 39.195.688 wisnus, dibandingkan tahun 2015 meningkat 0,06% dan menyumbang 0,154% terhadap kunjungan wisatawan nasional yang ditarget sebesar 272.000.000 wisatawan pada tahun 2016.

Tantangan Fiskal Regional

Jawa sebagai regional dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia tentunya tidak lepas dari beragam tantangan termasuk tantangan fiskal. Tantangan fiskal yang dihadapi regional Jawa tersebut antara lain sebagai berikut:

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Salah satu isu yang muncul di tahun 2016 adalah banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia baik secara legal maupun ilegal. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, sampai dengan akhir 2016, terdapat 74.183 tenaga kerja asing yang telah mendapat izin. Akan tetapi berdasarkan sejumlah kegiatan pengawasan dan penindakan, terdapat sekitar 800 tenaga kerja ilegal yang dipulangkan sepanjang tahun 2016. Dari jumlah tersebut, banyak di antaranya yang merupakan tenaga kerja yang berasal dari Tiongkok. Hal ini tentunya dapat merugikan tenaga kerja lokal yang seharusnya dapat memperoleh lapangan pekerjaan.

Di satu sisi, terdapat kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing secara terbuka

dengan tenaga kerja asing. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat aparat pengawas untuk melakukan monitoring terhadap tenaga kerja asing, terlebih saat ini semakin banyak investasi asing yang masuk ke Indonesia terutama dari Tiongkok.

Infrastruktur yang masih perlu dibenahi

Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Hal ini sangat diperlukan sebagai salah satu motor penggerak pembangunan. Beragam rencana pembangunan akan sia-sia jika tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pertumbuhan kendaraan bermotor, industri, dan jasa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan moda transportasi yang memadai. Program percepatan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat yang baru dimulai pada tahun 2015 yang lalu, belum memberikan hasil yang optimal.

Dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat terlibat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur baik melalui dukungan pendanaan maupun kebijakan. Salah satu tantangan pembangunan infrastruktur adalah penyediaan dan pembebasan lahan. Di sinilah Pemerintah Daerah dapat berperan untuk menyediakan lokasi yang tepat sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dapat berperan dalam menjembatani masyarakat pemilik lahan dengan Pemerintah Pusat atau investor yang akan membeli lahan.

Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD maupun dari dana desentralisasi Pemerintah Pusat terbilang kecil. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pemerintah daerah dalam menggali potensi perpajakan daerah serta penerimaan daerah lainnya yang sah, demikian halnya dengan alokasi dana transfer. Penyaluran DBH masing-masing kabupaten/kota dan provinsi berbeda-beda sesuai dengan kontribusi rill daerah penghasil. Formula yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam penghitungan DBH Pajak dan SDA sudah baku, semakin besar kontribusi hasil yang disumbangkan daerah maka semakin besar pula DBH yang diterima.

Untuk regional Jawa, hanya Provinsi DKI Jakarta yang dapat dikatakan mampu secara mandiri membiayai APBD dengan pendapatannya sendiri. Dari seluruh Provinsi di regional Jawa, hanya DKI Jakarta yang tidak mendapatkan Dana Alokasi Umum. Hal ini tentunya menjadi tantang untuk Provinsi lain agar dapat berinovasi guna meningkatkan PAD-nya.

Sektor Pertanian

Sebagai lumbung pangan nasional, beberapa Provinsi di regional Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta berkontribusi dalam menyumbang PDRB regional Jawa. Akan

tetapi, peran sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) tampaknya semakin menurun. Hal ini ditunjukkan dari penurunan pertumbuhan sektor pertanian dari 3,32% di tahun 2015 menjadi 3,31% di tahun 2016. Hal ini dapat berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan sektor tersebut adalah semakin tergerusnya lahan pertanian dan beralih fungsi menjadi lahan yang lain seperti untuk industri dan pemukiman penduduk. Jika terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin jika produktivitas tanaman pangan akan semakin menurun dan mengancam kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.

Solusi Fiskal Regional

Berdasarkan tantangan fiskal regional yang dihadapi regional Jawa tersebut, solusi yang dapat diberikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian, APBN, APBD, dan sektor unggulan yang ada di regional Jawa, antara lain sebagai berikut:

Pertama, peningkatan sumber daya manusia, dalam rangka menghadapi persaingan global, pemerintah daerah dan institusi pendidikan perlu meningkatkan kerja sama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan peningkatan skill serta pengetahuan yang mumpuni di berbagai bidang. Hal ini diperlukan agar SDM nasional mampu bersaing dengan SDM profesional asing. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan akan dapat dihasilkan SDM yang terampil dan terdidik yang siap bekerja.

Kedua, peningkatan pembangunan infrastruktur, pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan moda transportasi perlu lebih ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka percepatan akses pergerakan barang dan manusia. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan partisipasinya terutama dalam hal pendanaan serta upaya kerja sama dengan menggandeng pihak swasta agar peningkatan pembangunan infrastruktur dapat lebih cepat terlaksana. Pemerintah dapat berperan dalam mendukung partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi di sektor publik antara lain melalui pemberian keudahan dalam perizinan, insentif usaha melalui keringanan biaya atau retribusi usaha, dan serta peran serta dalam pembebasan lahan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan upaya pembatasan alih fungsi lahan produktif pertanian sehingga dapat menjaga stabilitas ketahanan pangan.

Ketiga, peningkatan pendapatan daerah, sebagai upaya agar dapat mencukupi kebutuhan dalam melaksanakan program-program pemerintah, pemerintah daerah perlu menggali potensi pendapatan daerah yang belum maksimal seperti dari revitalisasi BUMD dan optimalisasi aset daerah yang belum dimanfaatkan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan potensi penerimaan dana transfer khususnya Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) dan DBH sumberdaya alam (SDA) sebagai daerah penghasil.

Regional Kalimantan

Pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan pada tahun 2016 tumbuh 2,01%, lebih cepat dibanding tahun 2015 yang mencapai 1,37% namun masih lebih rendah dari nasional (5,16%). Aktivitas ekonomi ini banyak didukung konsumsi rumah tangga (31,0%), PMTB (31,2%), dan Ekspor Barang dan Jasa (32,1%). Dilihat dari sisi penawaran, komposisi PDRB Regional Kalimantan didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian (29,0%), Sektor Pertanian,Perhutanan, dan Perikanan (13,3%), Industri pengolahan (17,7%). Angka inflasi tahun 2016 di regional Kalimantan secara umum masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional kecuali untuk Kalimantan Tengah. Secara umum, rasio gini provinsi lingkup regional Kalimantan berada di bawah rasio Gini nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Kalimantan masih lebih baik dibanding distribusi pendapatan tingkat nasional.

Kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah pusat di regional Kalimantan masih rendah, karena realisasi pendapatan negara masih jauh dari angka target pendapatan, sedangkan realisasi belanja negara relatif lebih bagus. Target pendapatan 2016 sebesar Rp50,01 triliun hanya tercapai 72,86% atau sebesar Rp36,4 triliun. Tidak tercapainya target pendapatan negara tersebut disebabkan karena tidak tercapainya penerimaan sektor perpajakan dari target sebesar Rp46,85 triliun hanya tercapai sebesar Rp33,2 triliun, atau 70,87% walaupun realisasi pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 102,36% dari target sebesar Rp3,1 triliun.

Kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemerintah pusat tahun 2015 dan 2016 menurut jenis belanja menunjukkan bahwa belanja pegawai menjadi jenis belanja yang penyerapannya tertinggi. Realisasi belanja barang dan belanja modal masih berada pada angka di bawah 85% dari pagu yang ditetapkan.

Dari sisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selama dua tahun terakhir rata-rata sumber pembiayaan kegiatan operasional dan pembangunan infrastruktur kabupaten/kota di Kalimantan sebagian besar masih ditopang oleh dana perimbangan/ dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hampir 79% sumber pendapatan daerah bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Makroekonomi Regional Kalimantan

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi regional Kalimantan tumbuh sebesar 2,01% di tahun 2016, laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding tahun lalu yang tumbuh 1,37%

Ekonomi regional Kalimantan tumbuh sebesar 2,01% di tahun 2016, laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 1,37%. Namun dengan tingkat pertumbuhan tersebut masih menempatkan regional Kalimantan pada posisi terakhir di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan untuk posisi tertinggi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 berada pada regional Maluku dan Papua.

Perbandingan Proporsi Jumlah Penduduk Kawasan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan 2015 dan 2016
Sumber: BPS

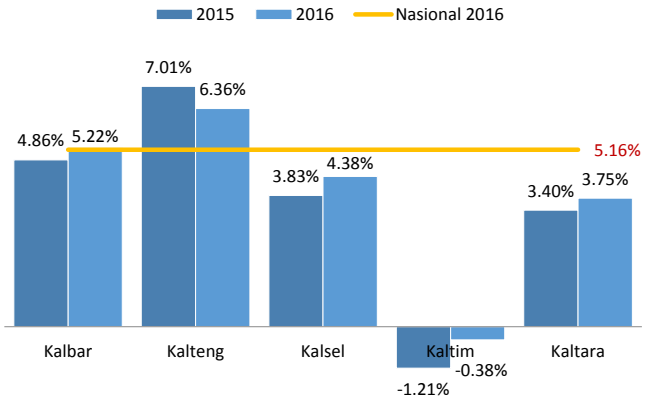

Sepanjang tahun 2016 Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu tumbuh 6,36%

Pada tahun 2016 hampir semua provinsi di Kalimantan mengalami laju pertumbuhan PDRB positif kecuali Provinsi Kalimantan Timur yang masih mengalami kontraksi di tahun 2016. Selain Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat laju pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Kalimantan lebih rendah dari tingkat nasional yang mencapai angka 5,16%.

Tahun 2016 Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu tumbuh 6,36%, diikuti Kalimantan Barat (5,22%) dan Kalimantan Selatan (4,38%).

Sedangkan laju pertumbuhan perekonomian paling rendah terjadi di Kalimantan Timur masih yang masih mengalami kontraksi yaitu sebesar-0,38%. Kontraksi laju pertumbuhan pada Kalimantan Timur disebabkan sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi 43,34% terhadap PDRB masih mengalami penurunan sebesar -1,76%. Kondisi tersebut tentunya masih menahan laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Sisi lain, terdapat anomali yaitu disaat provinsi-provinsi lain di regional Kalimantan laju pertumbuhan ekonomi membaik dibanding tahun 2015, pada Provinsi Kalimantan Tengah justru mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2015 (7,01%). Pelemahan tersebut karena sektor pertanian yang menjadi faktor penggerak utama perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah masih mengalami tekanan harga atas komoditas kelapa sawit dan karet terutama di pasar ekspor. Hal ini juga ditandai dengan nilai tukar petani di bawah 100. Akibatnya kontribusi pertanian terhadap PDRB Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan 2015 dan 2016

Sumber: BPS

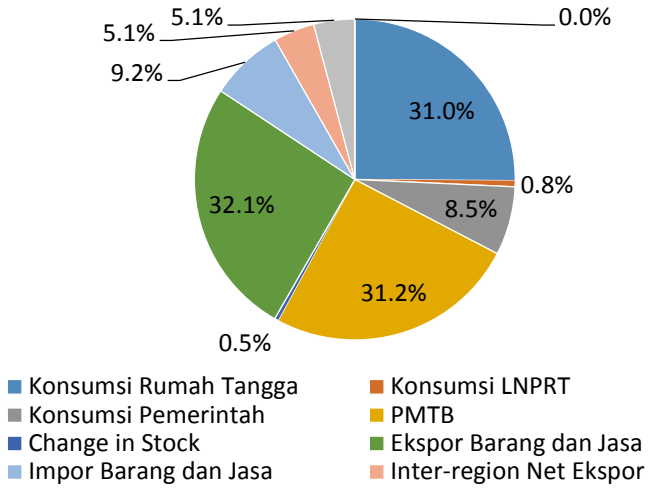

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan, Regional Kalimantan Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	3,27%	3,09%
Konsumsi LNPRT	5,47%	4,25%
Konsumsi Pemerintah	-4,99%	-47,00%
PMTB	2,19%	-1,82%
Change in Stock	-22,28%	-54,78%
Ekspor Barang dan Jasa	-11,86%	-6,76%
Impor Barang dan Jasa	-3,67%	-14,76%
Inter-region Net Ekspor	-198,82%	129,16%

Komposisi PDRB dari sisi permintaan regional Kalimantan yang didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga, PMTB (pembentukan modal tetap bruto) dan ekspor barang/jasa membentuk komposisi

hingga 94,3% dari ketiga sektor permintaan tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dari ekspor barang dan jasa naik dibandingkan tahun sebelumnya menjadi-6,76%, pada tahun 2016 sektor ekspor Barang dan Jasa menyumbang komposisi terbesar yaitu sebesar 32,1% dari keseluruhan PDRB dari sisi permintaan regional Kalimantan.

Komposisi PDRB ADHB dari Sisi Penawaran, Regional Kalimantan Tahun 2016

Sumber: BPS

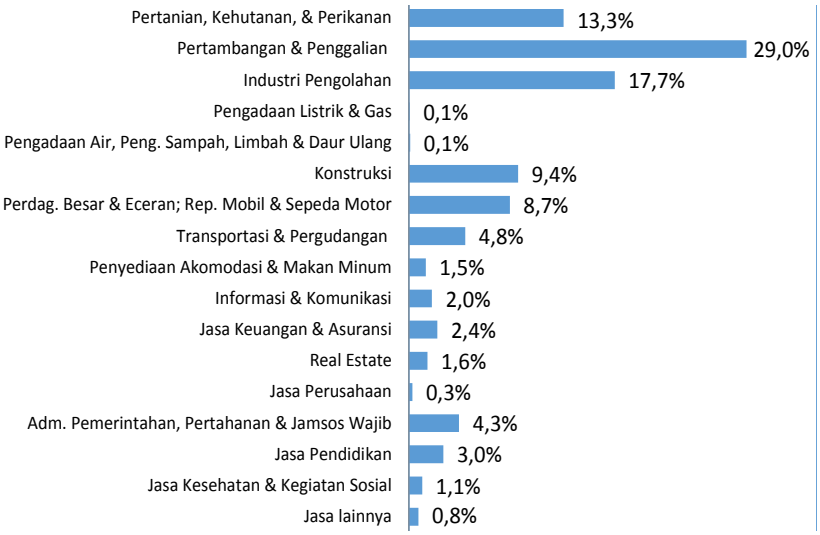

Dilihat dari sisi penawaran komposisi PDRB Regional Kalimantan didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian (29,0%), Sektor Pertanian,Perhutanan, dan Perikanan (13,3%), Industri pengolahan (17,7%). Namun dapat dilihat bahwa komponen penyumbang laju PDRB terendah di regional Kalimantan adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor yang paling mendukung laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 adalah pada sektor pengadaan listrik dan gas (10,32%).

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Penawaran, Regional Kalimantan Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,89%	3,08%
Pertambangan dan Penggalian	1,32%	-2,20%
Industri Pengolahan	6,85%	5,62%
Pengadaan Listrik dan Gas	31,75%	10,32%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,50%	6,43%
Konstruksi	13,49%	0,84%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,06%	4,67%
Transportasi dan Pergudangan	16,89%	5,89%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,23%	5,41%
Informasi dan Komunikasi	17,84%	8,54%
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,91%	5,83%

Uraian	2015	2016
Real Estate	9,13%	2,62%
Jasa Perusahaan	9,17%	1,21%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,64%	2,26%
Jasa Pendidikan	14,60%	6,17%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,74%	7,33%
Jasa lainnya	12,34%	7,75%

Inflasi

Inflasi di berbagai daerah di Kalimantan pada tahun 2016 secara umum sejalan dengan laju inflasi nasional

Penurunan angka Inflasi secara nasional tahun 2016 dibanding tahun 2015 juga terjadi di berbagai daerah di regional Kalimantan. Titik terendah Inflasi tahun 2016 terjadi di Kalimantan Tengah (2,11%) sementara titik inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Utara (4,31%). Angka inflasi tahun 2016 di regional Kalimantan secara umum masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional kecuali untuk Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2016 tingkat inflasi pada Kalimantan tengah terendah dibandingkan Provinsi lain di regional Kalimantan, hal ini seiring dengan terkoreksinya laju pertumbuhan PDRB pada Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 7,01% menjadi 6,36% pada tahun 2016, selain itu juga mengindikasikan keberhasilan Pemda Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengendalikan gejolak harga dengan upaya yang sistematis diantaranya dengan mengoptimalkan peran forum Tim Pengendali Investasi Daerah (TPID) Kalimantan Tengah untuk memonitor dan mengantisipasi pergerakan harga barang di daerah sekaligus mencari solusi mengatasi inflasi yang tidak terkendali.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan, Regional Kalimantan Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

*)Data inflasi Provinsi Kaltara tahun 2015 masih tergabung dengan Provinsi Kaltim.

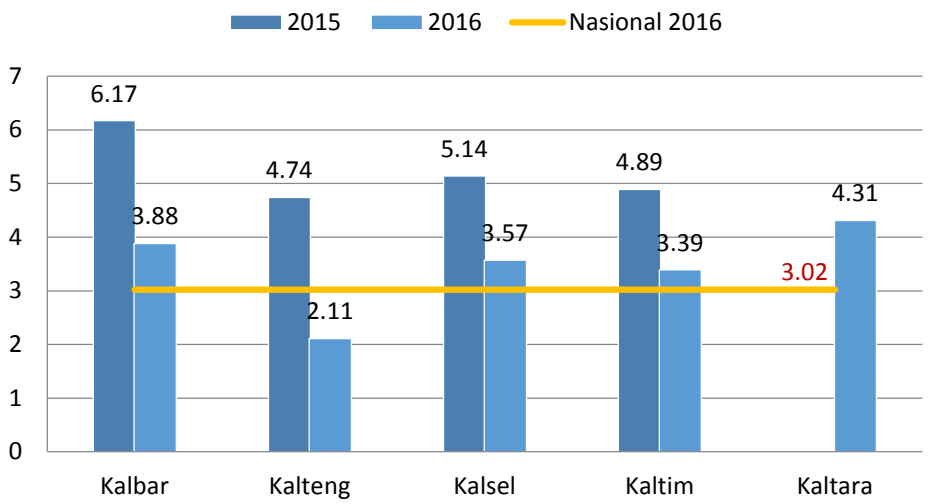

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan sejak tahun 2014 mengalami tren peningkatan yang stabil

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan sejak tahun 2014 mengalami tren peningkatan yang stabil. Selain Provinsi Kalimantan Timur, Indeks Pembangunan Manusia provinsi-provinsi di Kalimantan tahun 2016 masih lebih rendah dari indeks nasional. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tingkat IPM tertinggi sebesar (74,59) disusul Provinsi termuda Kalimantan Utara (69,2) dan terendah adalah Provinsi Kalimantan Barat (65,88). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat disebabkan oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan kerja yang masih tertinggal. Mengacu pada kriteria World Bank, Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kategori menengah bawah, sedangkan empat provinsi lainnya sudah masuk dalam kategori menengah atas.

IPM Regional Kalimantan Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

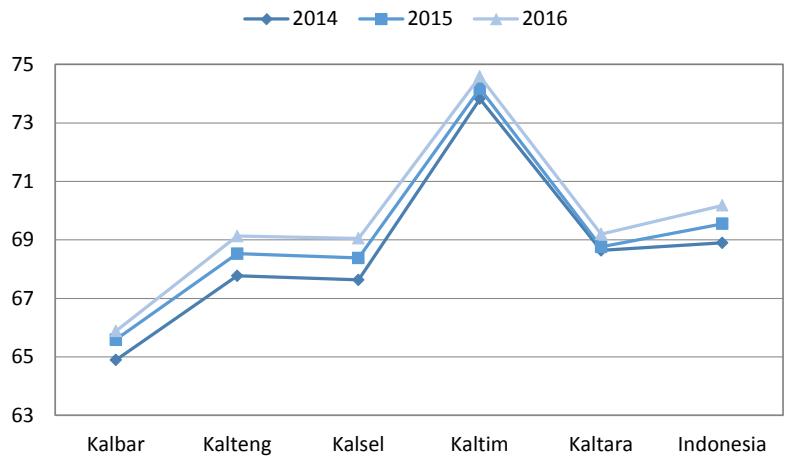

Rasio Gini

Secara umum, gini ratio provinsi dalam regional Kalimantan berada dibawah gini ratio nasional

Secara umum, rasio Gini provinsi lingkup regional Kalimantan berada di bawah rasio Gini nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Kalimantan masih lebih baik dibanding distribusi pendapatan tingkat nasional. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan lima provinsi di Kalimantan pada tahun 2016 cenderung stabil dibanding tahun sebelumnya dengan rasio Gini rata-rata dibawah 0,35 sedangkan rasio gini nasional berada di level 0,40.

Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan rasio Gini yang signifikan sejak 5 tahun terakhir yang menandakan ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi tersebut semakin menyempit. Menjadi perhatian pemerintah, bahwa rasio Gini menurun signifikan karena adanya kenaikan pendapatan masyarakat ekonomi lapisan bawah. Melihat naiknya rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan maka turunnya deviasi rasio Gini juga bisa berarti menurunnya *wealth* secara keseluruhan pada setiap lapisan masyarakat.

Rasio Gini Regional Kalimantan Tahun 2014 s.d. 2016
Sumber: BPS

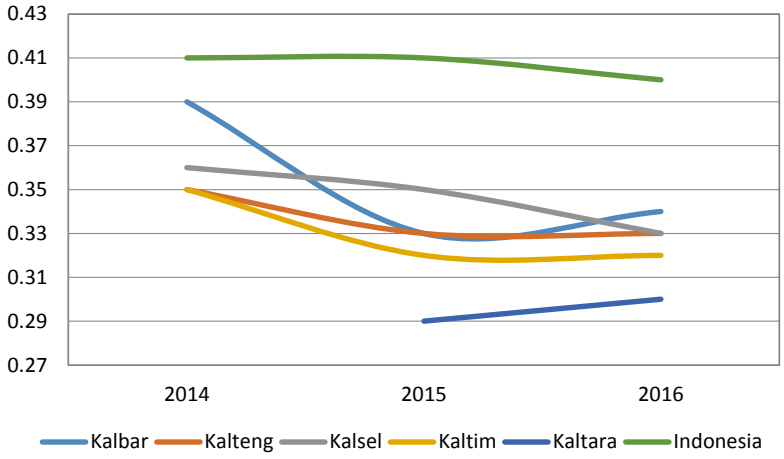

Ketenagakerjaan

Rata-rata tingkat pengangguran terbuka regional Kalimantan kecuali Kalimantan Timur masih lebih rendah daripada rata-rata Nasional

Pada tahun 2016 persentase tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada regional Kalimantan berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 7,95% dan terendah di Kalimantan Barat sebesar 4,23%. Sebagai perbandingan, tingkat pengangguran terbuka secara nasional tahun 2016 berada di level 5,61%. Data juga memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara masih berada dibawah angka nasional.

Pada tahun 2016, tingkat pengangguran di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara relatif menurun dibanding tahun sebelumnya, sedangkan untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan mengalami tren kenaikan. Naiknya tingkat pengangguran ditenggarai karena adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi oleh kesempatan kerja yang tersedia.

Selain itu, terjadi peningkatan jumlah pengangguran dikalangan lulusan setingkat sekolah menengah atas akibat ketidaksesuaian spesialisasi keahlian yang dimiliki dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sedangkan turunnya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat antara lain dipengaruhi seiring dengan pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat 2016 yang membaik, yang berimbas pada peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 43% (15 ribu orang) serta sektor industri sebesar 43% (38 ribu orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Regional Kalimantan Tahun 2015 dan 2016
(dalam %)
Sumber: BPS

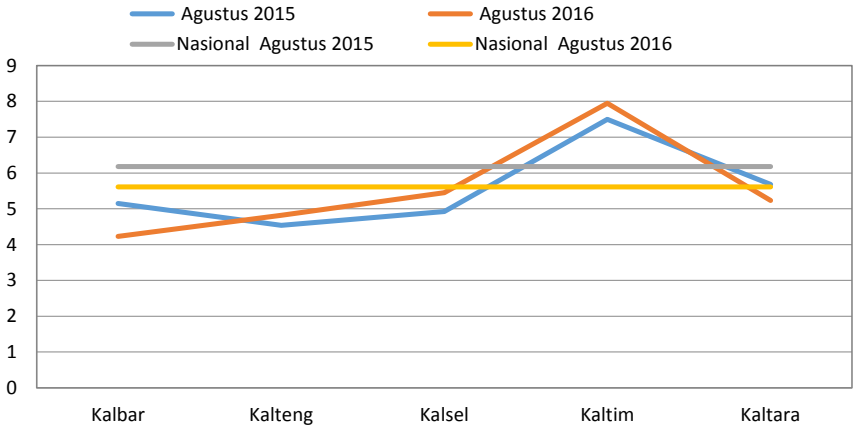

Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kalimantan secara persentase berada dikisaran 4,52% hingga 8%, angka ini masih dibawah angka kemiskinan nasional 10,7%

Sama halnya dengan kondisi nasional, selain Kalimantan Utara seluruh provinsi regional Kalimantan mengalami penurunan persentase jumlah penduduk miskin. Kalimantan Utara naik dari tahun 2015 sebesar 6,32% menjadi 6,99% di tahun 2016. Secara keseluruhan grafik menunjukkan kalau tingkat kemiskinan di Kalimantan secara persentase berada dikisaran 4,52% hingga 8%, angka ini berada dibawah dari angka kemiskinan nasional 10,7%. Tingkat kemiskinan terendah berada di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,52% .

Selaras dengan tingkat indeks pembangunan manusia yang rendah, Kalimantan Barat menyumbang angka kemiskinan tertinggi di regional Kalimantan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan Kalimantan Barat berkurang sebanyak 12.170 orang, sedangkan penduduk miskin di pekotaan meningkat sebanyak 3.020 orang, hal ini menunjukan kemampuan perekonomian masyarakat pedesaan mulai membaik.

Persentase Penduduk Miskin Regional Kalimantan Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

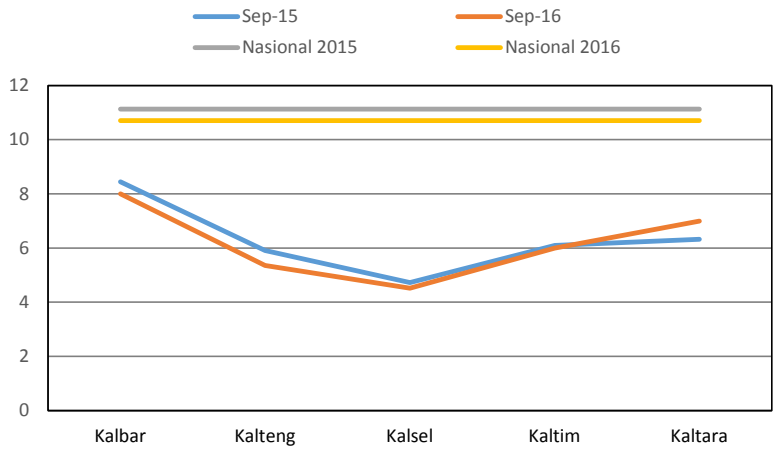

Pelaksanaan APBN

Kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah pusat di regional Kalimantan masih belum optimal, ditandai dengan belum tercapainya target pendapatan dan kualiitas penggunaan anggaran belanja

Kegiatan pemerintah pusat di regional Kalimantan dilaksanakan oleh satuan kerja dan/atau instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan jenis kewenangannya masing-masing dan sesuai alokasi dana ataupun target kinerja (output) yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Secara umum, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan 2016 seluruh satuan kerja/instansi vertikal di regional Kalimantan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Realisasi APBN Regional Kalimantan Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN, data diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	47.355,39	34.520,89	72,90	46.851,91	33.204,07	70,87
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.933,99	2.543,76	131,53	3.159,67	3.234,12	102,36
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara	49.289,38	37.064,65	75,20	50.011,58	36.438,19	72,86
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	39.680,68	35.545,65	89,58	33.808,31	29.887,71	88,40
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	73.711,50	71.645,95	97,12	82.398,98	78.830,53	95,67
Jumlah Belanja Negara	113.452,17	107.191,60	94,48	116.207,29	108.718,24	93,56

Pendapatan Negara

Kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah pusat di regional Kalimantan masih rendah, karena realisasi pendapatan negara masih jauh dari angka target pendapatan, sedangkan realisasi belanja negara pemerintah pusat relatif lebih bagus. Target pendapatan 2016 sebesar Rp50,01 triliun hanya tercapai 72,86% atau sekitar Rp36,4 triliun. Tidak tercapainya target pendapatan negara tersebut disebabkan karena tidak tercapainya penerimaan sektor perpajakan dari target sebesar Rp46,85 triliun hanya tercapai sebesar Rp.33,2 triliun, atau 70,87% , sedangkan realisasi pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 102,36% dari target sekitar Rp3,2 triliun.

Belanja Negara

Pada sisi belanja negara, capaian realisasi penyerapan anggaran keseluruhan Belanja Negara sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp108,7 triliun atau sebesar 93,56% dari pagu DIPA yang sudah dialokasikan sebesar Rp116,2 triliun, penyerapan belanja negara pada regional Kalimantan berada di atas capaian realisasi total belanja negara pada tingkat nasional yaitu 89,31%. Tingginya realisasi belanja negara pada regional Kalimantan dipengaruhi oleh tingginya capaian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yaitu sebesar 95,67% diatas capain realisasi nasional (93,19%).

Kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemerintah pusat tahun 2015 dan 2016 menurut jenis belanja menunjukkan bahwa belanja pegawai menjadi jenis belanja yang penyerapannya tertinggi. Realisasi belanja barang dan belanja modal masih berada pada angka di bawah 85% dari pagu yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi kondisi yang umum terjadi pada realisasi belanja pemerintah, kondisi yang menggambarkan rendahnya kualitas pelaksanaan anggaran dari pemerintah, terutama perencanaan kegiatan dan program yang terkait dengan belanja barang, dan belanja modal. Realisasi terendah sebesar 83,14% terjadi pada jenis belanja barang.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Regional Kalimantan Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	10.242,22	10.009,14	97,72	10.974,74	10.698,56	97,48
Belanja Barang	11.550,73	9.557,32	82,74	12.051,96	10.020,40	83,14
Belanja Modal	16.402,67	14.639,14	89,25	10.691,14	9.083,45	84,96
Belanja Bansos	1.485,05	1.340,06	90,24	90,47	85,30	94,28
Belanja Lain-Lain	-	(0,01)	-			
Jumlah	39.680,68	35.545,65	89,58	33.808,31	29.887,71	88,40

Total pagu dana transfer pemerintah pusat regional kalimantan pada tahun 2016 naik dari Rp73,771 triliun menjadi Rp82.399 triliun, penambahan pagu terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum semula Rp32,4 triliun menjadi Rp.37,0 triliun. Namun demikian dilihat dari sisi persentase total realisasinya justru mengalami penurunan yaitu dari 97,12% dari pagu pada tahun 2015 menjadi 95,67% pada tahun 2016. Realisasi yang cukup sigifikan mengalami penurunan adalah DAK Fisik dari 91,48% menjadi 86,57%, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari 98,71% menjadi 72,84%. Namun demikian capaian realisasi belanja transfer regional Kalimantan tahun 2016 masih di atas capaian realisasi belanja transfer secara nasional (93,19%).

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Regional Kalimantan Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN dan DJPK, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	26.981,36	25.427,65	94,24	22.320,24	22.462,98	100,64
Dana Alokasi Umum	32.432,66	32.432,66	100,00	37.035,92	37.035,92	100,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	5.675,88	5.192,35	91,48	10.167,88	8.802,67	86,57
Dana Otsus,Keistimewaan DIY,DID	-	-	-	239,82	239,82	100
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6.869,64	6.781,33	98,71	8.532,05	6.215,17	72,84
Dana Desa	1.811,95	1.811,95	100,00	4.103,08	4.073,98	99,29
Jumlah	73.771	71.646	97,12	82.399	78.831	95,67

Analisis Tematik Aspek Tertentu

Transportasi Udara (Kalimantan Barat)

Pesawat udara bagi masyarakat Kalimantan Barat merupakan salah satu moda transportasi favorit, hal ini seiring dengan peningkatan perekonomian dan taraf hidup masyarakat maka transportasi udara adalah alternatif yang terbaik di mana relatif lebih cepat dan efisien mengingat wilayah yang sangat luas serta kondisi alam yang beragam sehingga terbatasnya sarana transportasi darat maupun air. Transportasi udara bisa berjalan dengan baik jika ditunjang oleh keberadaan Bandar udara yang aman, nyaman serta mendukung keselamatan penerbangan. Jumlah penumpang angkutan udara menurut data BPS di Kalimantan Barat setiap tahun cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 tercatat 1.293.891 orang dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan 6,90% yaitu mencapai 1.383.106 orang bahkan pada tahun 2016 melonjak menjadi 1.606.398 atau naik 16,14%. Pada saat ini di wilayah Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) bandara komersial dan akan bertambah 1 (satu) bandara yang menunggu peresmian untuk dioperasikan, bandara-bandara tersebut adalah Bandara Supadio di Kota Pontianak, Bandara Susilo di Kabupaten Sintang, Bandara nanga Pinoh di Melawi, Bandara Pangsuma di Putussibau, Bandara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang, dan Bandara Tebelian di Kabupaten Sintang.

Pemerintah sangat memperhatikan perkembangan sarana transportasi khususnya transportasi udara sebagai perwujudan program pemerintah Nawacita yang berkonsep membangun Indonesia dari pinggiran, dengan tujuan untuk memastikan lalu-lintas orang, barang dan jasa, kegiatan ekonomi serta modal yang dapat menopang pertumbuhan sosial-ekonomi. Pemerintah melalui dana APBN telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit untuk operasional serta pengembangan bandara di wilayah Kalimantan Barat, bahkan untuk kondisi tertentu yaitu di wilayah Kabupaten Sintang dan Melawi terdapat 3 (tiga) bandara yang sangat berdekatan (radius 100 km).

Program pemerintah untuk peningkatan transportasi udara di Kalimantan Barat menjadi isu penting untuk direalisasikan. Setidaknya terdapat 6 (enam) rencana pengembangan bandara di wilayah Kalimantan Barat, yaitu:

1. Kota Singkawang sebagai kota tujuan utama pariwisata di Kalimantan Barat perlu didukung oleh keberadaan bandara sehingga para wisatawan dapat langsung terbang menuju Kota Singkawang. Rencana pembangunan ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional yang mencantumkan pembangunan bandara baru di Kota Singkawang. Rencana pembangunan akan dimulai pada tahun 2017, sementara pada tahun 2014 sudah dialokasikan sebesar Rp20 miliar dalam rangka menyiapkan awal pembangunan landasan pacu..
2. Kota Ketapang yang dihadapkan pada dua pilihan diantara melakukan pengembangan atau relokasi bandara, namun untuk

jangka panjang tetap diperlukan untuk relokasi bandara baru dikarenakan posisi bandara saat ini terletak di daerah padat permukiman.

3. Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi dan pusat perekonomian memerlukan pengembangan bandara untuk tetap menjaga keselamatan dikarenakan untuk saat ini terminal penumpang sudah tidak mampu memenuhi kapasitas 700.000 per tahun. Pengembangan bandara Supadio berupa pembangunan terminal dengan total biaya Rp.550 miliar direncanakan dapat diselesaikan pada Tahun 2017.
4. Pengembangan bandara juga dilakukan di Bandara Pangsuma Putussibau berupa perluasan Apron serta pembangunan terminal baru untuk meningkatkan daya tampung penumpang.
5. Sementara itu di wilayah perbatasan, yaitu Bandara Liku milik TNI AU di Kabupaten Sambas saat ini sedang dilakukan pembangunan apron dan landasan yang direncanakan sepanjang 1.500 x 23 meter, dimana nantinya akan dijadikan pangkalan udara tipe C.
6. Lanud Singkawang II atau Bandara Sanggau Ledo juga akan digunakan bersama selain sebagai pangkalan TNI AU Singkawang II juga akan digunakan untuk kegiatan penerbangan perintis di Kabupaten Bengkayang.

Pembangunan Wilayah Perbatasan

Salah satu provinsi di regional Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Barat memiliki keunikan yaitu berbatasan darat secara langsung dengan Negara Malaysia. Tentunya apabila hal ini dikelola dan dimanfaatkan secara serius bukan tidak mungkin akan menjadi potensi pertumbuhan kegiatan perekonomian. Beberapa potensi tersebut antara lain:

1. Pembangunan infrastruktur perbatasan telah dialokasikan dana yang cukup besar dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp416,16 miliar (meningkat 18,54% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp351,06 miliar). Alokasi dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu Entikong Kabupaten Sanggau dengan luas lahan mencapai 8 hektar serta luas bangunan 19.493 m2 serta infrastruktur jalan paralel perbatasan. Untuk wilayah Kalimantan Barat jalan paralel perbatasan direncanakan total sepanjang 856 km yang terbagi menjadi 12 (dua belas) koridor yang dimulai dari ujung barat yang berbatasan dengan laut china selatan yaitu koridor Temajuk-Aruk (90 km) hingga daerah yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu koridor Nanga era-Batas Kalimantan Timur (158 km) dan direncanakan pada akhir tahun 2018 sudah tembus secara keseluruhan.
2. Kalimantan barat memiliki 5 (lima) buah border perbatasan, kegiatan lalu lintas baik barang maupun manusia setiap hari banyak terjadi terutama pada Pos Lintas batas Aruk, Entikong, dan badau. Hal ini tentunya akan menciptakan peluang transaksi dagang yang menggerakkan kegiatan ekonomi. Nilai devisa ekspor Kalimantan barat yang melewati PLBN Terpadu Entikong Kabupaten Sanggau hingga bulan November 2016 mencapai Rp137, 542 miliar dengan volume 5.094,7 ton. Di masa

mendatang peluang untuk melakukan ekspor ke Malaysia harus lebih ditingkatkan sehingga neraca perdagangan menguntungkan Negara kita.

3. Potensi lahan pertanian di perbatasan akan dimanfatkan secara maksimal sehingga bisa menjadi lumbung padi. Beberapa usaha yang telah dilakukan diantaranya dengan melakukan tanam padi menggunakan teknik Hazton seluas 70 hektar. Selanjutnya adalah cetak sawah baru seluas 50.000 hektar dan ekspor beras ke Malaysia dengan tahap awal akan dilakukan secara bertahap dengan target 15 ribu ton per tahun. Sebenarnya secara praktek Kalimantan Barat sudah melakukan ekspor beras ke Malaysia dalam jumlah yang tidak sedikit, namun ekspor tersebut belum tercatat secara baik dikarenakan masih dilakukan secara tradisional. Potensi pertanian lainnya yang akan dikembangkan di daerah perbatasan adalah tanaman jagung.
4. Mayoritas etnis yang menempati wilayah perbatasan adalah etnis dayak khususnya di pedalaman, sehingga mereka memiliki banyak kesamaan dan keterikatan budaya dengan penduduk perbatasan Negara tetangga dikarenakan etnis yang serumpun. Selama ini masyarakat perbatasan menggunakan dua mata uang dan cenderung menggunakan Ringgit Malaysia. Untuk itu diperlukan kesungguhan pembangunan perbatasan sehingga mereka bisa lebih mencintai dan bangga menjadi warga NKRI dengan tetap menggunakan mata uang rupiah, barang-barang dalam negeri, serta budaya Indonesia.

Badan Layanan Umum (BLU)

Satker BLU di Kalimantan tahun 2016 bertambah satu Satker yaitu RS.Bhayangkara Balikpapan

Jumlah satker BLU di Kalimantan pada tahun 2016 sebanyak enam satker yang terbagi dalam dua jenis layanan yaitu: 4 satker untuk layanan kesehatan yaitu Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, Palangkaraya, Pontianak, dan Balikpapan serta 2 satker untuk layanan pendidikan yaitu Universitas Mulawarman di Samarinda dan Politeknik Kesehatan di Pontianak.

Pelaksanaan APBD

Hampir 79% sumber pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan.

Dari sisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selama dua tahun terakhir rata-rata sumber pembiayaan kegiatan operasional dan pembangunan infrastruktur kabupaten/kota di Kalimantan sebagian besar masih ditopang oleh dana perimbangan/ dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hampir 79% sumber pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan. Hal ini mengindikasikan masih terdapat ketergantungan pemerintah daerah di Kalimantan terhadap transfer Pemerintah Pusat. Indikator ini menunjukan masih kurangnya kemandirian keuangan daerah sehingga pemerintah daerah di Kalimantan perlu meningkatkan kontribusi PAD dalam pendapatan daerah. Namun perlu menjadi perhatian bahwa pada Tahun Anggaran 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah justru mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015.

Ditinjau dari sisi belanja, di kurun waktu 2 tahun terakhir Belanja lain masih mendominasi dari alokasi belanja secara keseluruhan. Yaitu sebesar 38,3% pada tahun 2015 dan 41,3% pada tahun 2016. Sementara itu, alokasi anggaran Belanja Modal pada tahun 2016 justru mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2015.

Kinerja realisasi belanja daerah (APBD) tahun 2016 pada regional Kalimantan sebesar 88,46% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 85,32% dari total pagu belanja APBD.

Realisasi APBD regional Kalimantan pada tahun 2015 menunjukan defisit sedangkan untuk tahun 2016 mengalami surplus. Hal ini menunjukan kemampuan pemerintah pada tahun 2016 dalam menghimpun pendapatan untuk menutup belanja daerah.

Realisasi APBD Regional Kalimantan Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	17.459,06	16.462,01	94,29	16.806,88	16.035,83	95,41
Pendapatan Transfer	80.138,24	69.769,49	87,06	80.910,59	78.885,82	97,50
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	6.394,82	9.443,16	147,67	5.148,37	5.254,67	102,06
Jumlah Pendapatan	103.992,11	95.674,66	92,00	102.865,84	100.176,32	97,39
Belanja						
Belanja Pegawai	37.643,68	32.313,01	85,84	35.816,69	32.369,97	90,38
Belanja Modal	37.215,50	30.762,79	82,66	30.061,93	26.314,14	87,53
Belanja Lain	46.421,44	40.405,99	87,04	46.279,56	40.526,08	87,57
Jumlah Belanja	121.280,61	103.481,78	85,32	112.158,17	99.210,19	88,46
Surplus/Defisit	(17.288,51)	(7.807,12)	45,16	(9.292,33)	966,13	-10,40

Sektor Unggulan Regional

Infrastruktur

Sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pertanian merupakan sektor unggulan utama regional Kalimantan

Ketersediaan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian berupa infrastruktur di Kalimantan dapat dikatakan relatif lebih maju dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Luar Pulau Jawa di Indonesia. Sebagai gambaran di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang merupakan provinsi termuda, infrastruktur jalan yang sudah dibangun sampai saat ini terdiri dari jalan nasional 1.641 km dengan kondisi mantap 93,27%, jalan provinsi 1.592 km dalam kondisi mantap 51,01% dan jalan pendukung yang dibangun untuk menciptakan konektivitas antar kecamatan bahkan sampai ke pedesaan. Pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan memiliki potensi besar untuk memperbaiki perekonomian.

Infrastruktur yang bagus akan memberikan kemudahan dan kecepatan akses antara sentra produksi dengan sentra perdagangan.

Selain itu keunggulan lain di sektor infrastruktur adalah dengan pembangunan rel kereta yang sudah dilakukan *groundbreaking* oleh Presiden pada tanggal 19 November 2015 di kawasan pelabuhan Buluminung Kab. Penajam Paser Utara. Rel kereta sepanjang 223 km akan menghubungkan Kab. Kutai Barat dengan Balikpapan ini dibangun bekerja sama dengan Russian Railways selaku investor.

Sampai dengan akhir 2016 progres yang berhasil dicapai adalah penyelesaian tahap pembebasan lahan. Selain itu sejak 2013 sudah dimulai dibangun Kawasan Ekonomi Khusus Maloy, Batuta dan Trans Kalimantan (KEK-MBTK) pusat industri dan pelabuhan. Pembangunan pusat industri dan pelabuhan Maloy di Kutai Timur, pembangunan kawasan industri dan terminal peti kemas di Kariangau Balikpapan.

Pertanian

Perkembangan sektor pertanian di Kalimantan menunjukkan trend peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini merupakan gejala positif seiring dengan keterbatasan pertumbuhan sektor ertambangan dan penggalian.

Di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kontribusi sektor pertanian pada tahun 2013 berada pada kisaran 5,65% dan terus meningkat hingga pada tahun 2016 mencapai 8,06%.

Sektor pertanian sebagai unggulan Kalimantan Barat dengan penerapan Teknologi Hazton dalam tanaman padi yang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Barat oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Teknologi ini merupakan teknologi yang sangat sederhana, mudah diaplikasikan dan tidak merubah teknik budidaya padi di tingkat petani di mana selama ini yang semula hanya menggunakan bibit padi 2-3 batang per lubang tanam, dengan Teknologi Hazton menjadi 20-30 batang per lubang tanamnya. Keunggulan teknologi ini adalah produktivitas lebih tinggi, mudah dalam penanaman, sedikit bahkan tidak ada penyulaman dan penyiangan, lebih cepat panen, gabah lebih bernas dan rendahnya bulir hampa/gabuk, relatif tahan terhadap serangan hama dan daya adaptasi tinggi di lapangan relatif tinggi serta lebih efisien dalam penggunaan pupuk anorganik. Teknik Hazton mampu meningkatkan produktivitas tanaman hingga 2 kali lipat dari semula. Pencetakan sawah baru seluas 16.905 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan barat akan diwujudkan melalui kerja sama dengan TNI dalam rangka mewujudkan program swasembada pangan tahun 2017.

Sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional bersama-sama dengan Provinsi Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Beberapa kabupaten yang dianugerahi hamparan hijau persawahan antara lain Balangan, Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, dan Tapin. Sebagai sektor tradisional yang

memberikan lapangan pekerjaan terbesar di Kalimantan Selatan, sektor pertanian berpotensi menggeser sektor pertambangan dan penggalian sebagai komponen terbesar penyumbang PDRB Kalimantan Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, total luas lahan persawahan se Kalimantan Selatan sampai dengan September 2016 adalah 516.880 hektar.

Perkebunan

Selain pertanian, sektor perkebunan di Kalimantan diharapkan dapat menjadi sektor andalan sebagai penopang keterbatasan sektor pertambangan dan penggalian yang tidak terbarukan. Potensi sektor perkebunan tersebut berupa produksi sawit dan karet. Pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara perkebunan sawit berkembang dengan sangat cepat ditandai dengan kenaikan luas areal dari semula 944,8 ribu hektar pada tahun 2013 naik 25,2% menjadi 1,18 juta hektar pada tahun 2016. Pada periode yang sama produksi tandan buah segar sawit meningkat 108,6% dari semula 6,9 juta ton menjadi 14,4 juta ton.

Perkebunan karet di provinsi Kalimantan Barat merupakan yang terbesar kedua di Indonesia dengan luas areal mencapai 1.221.420 hektar dengan status lahan Perkebunan Besar seluas 906.486 hektar dan Perkebunan Rakyat seluas 314.938 hektar. Pada tahun 2016 produksi karet mentah di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 260.179 ton atau seharga Rp4,01 triliun.

Kelapa sawit juga merupakan sektor andalan provinsi Kalimantan Selatan walaupun pada tahun 2016 masih belum beranjak dari kelesuan yang disebabkan oleh rendahnya harga jual tandan buah segar sementara pembiayaan untuk pengusahaan dan perawatan perkebunan kelapa sawit cukup mahal, misalnya biaya pemupukan dan biaya tenaga kerja.

Perikanan

Pengembangan sektor perikanan sangat potensial karena di kawasan Buluminung Kalimantan Timur akan dibangun *cold storage* raksasa senilai US$ 17 juta atau sekitar Rp221 miliar dan sampai saat ini sudah mendapat kepastian investor dari Rusia.

Pertambangan dan Penggalian

Tidak dipungkiri bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dominan di wilayah Kalimantan. Wilayah Kalimantan memiliki potensi berbagai bahan galian dan mineral, seperti minyak bumi, intan, platina, batu bara, emas, bijih besi, batu gamping, mangan, nikel dan kromit. Sektor pertambangan selalu menjadi sektor unggulan walaupun menghadapi tantangan bahwa kenyataan selama beberapa tahun terakhir produk mineral dan tambang tersebut mengalami penurunan ekspor baik nilai maupun volumenya.

Di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, meskipun harga komoditas tambang khususnya minyak dan batu bara terus merosot, sektor ini masih menjadi andalan, terbukti sektor batubara menunjukkan peningkatan produksi di Triwulan III TA 2016 karena meningkatnya permintaan ekspor seiring dengan kebijakan pengurangan jam kerja pertambangan di China serta adanya kebutuhan energi di musim dingin.

Salah satu bahan tambang yang menjadi primadona provinsi Kalimantan Barat adalah bauksit dengan potensi terbesar di Indonesia yaitu sebesar 4,3 miliar ton dengan rincian 3,2 miliar ton cadangan hipotek dan 1,1 miliar ton cadangan terukur tersebar luas di Kabupaten Pontianak, Bengkayang, Sanggau, Landak, Ketapang dan Kayong Utara. Kalimantan Barat sebagai gudang bauksit berusaha untuk menarik investor dalam mengolah biji bauksit dengan membangun *smelter* aluminium.

Pariwisata

Keberagaman etnis di Kalimantan Barat melahirkan beragam budaya dengan berbagai perayaan berskala besar yang menarik bagi wisatawan, hal ini telah disadari oleh pemerintah daerah sehingga mendukung peluang bagi perkembangan pariwisata disamping wisata alam, sejarah, maupun kuliner. Etnis Tionghoa melakukan suatu rangkaian perayaan tahun baru melalui Perayaan Imlek dan Cap Go Meh, Etnis Dayak mempunyai tradisi Gawai Dayak, Etnis Melayu dengan tradisi Islam dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri mempunyai tradisi Festival Perang Meriam Karbit di tepian sungan Kapuas. Penyelenggaraan berbagai kegiatan pariwisata tersebut berpengaruh terhadap jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kalimantan Barat, dimana pada tahun 2016 sebanyak 32.269 orang/wisatawan dengan tingkat hunian kamar hotel sebesar 42,01 %.

Tantangan Fiskal Regional

Kemandirian fiskal yang rendah dan kualiatas alokasi belanja menjadi tantangan fiskal regional utama di Kalimantan

Kemandirian fiskal masing-masing daerah masih cukup rendah dalam arti rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup rendah, sebagai contoh provinsi Kalimantan Barat rasio PAD nya hanya sebesar 13 persen. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan akan membuat pemerintah daerah kurang mempunyai inovasi dalam menghimpun pundi-pundi pendapatan daerahnya. Apabila pemerintah pusat memberlakukan kebijakan untuk menunda atau bahkan memotong dana transfer yang disebabkan realissi penerimaan negara tidak tercapai, maka akan mengakibatkan pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan akan berkurang dan selanjutnya akan membawa dampak terhadap berbagai program pemerintah yang tertunda atau terbengkalai.

Penurunan kapasitas fiskal provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menurun sebagai akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) atas penerimaan dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi andalan Kaltimtara. Meskipun penurunan DBH tersebut merupakan

konsekuensi logis dari penurunan volume produksi dan harga jual komoditas SDA, namun sebagian besar daerah belum siap dengan semakin terbatasnya kapasitas fiskal daerah tersebut.

Komposisi belanja daerah masih kurang ideal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi terbesar belanja daerah terdapat pada jenis Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Sebagai contoh Belanja Modal di provinsi Kalimantan Barat hanya mencapai 24 % dari total belanja daerah. Dana yang tersimpan di kas daerah masih cukup tinggi sehingga menimbulkan potensi idle cash.

Selain isu kerusakan lingkungan, ekstraksi SDA melalui pertambangan dan penggalian menyebabkan perkembangan sektor lain menjadi terabaikan. Lahan yang potensial untuk pertanian, perkebunan, dan kehutanan tidak mendapatkan perhatian optimal. Konsentrasi SDM untuk menggarap sektor pertambangan dan penggalian menjadikan relatif tidak tersisa untuk menggarap sektor potensial lainnya. Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. Hal ini terdapat pada provinsi Kalimantan Selatan. Bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya usaha perdagangan dan perindustrian menyebabkan bertambahnya kantong-kantong permukiman dan perindustrian baru di lahan kosong.

Solusi Fiskal Regional

Diversifikasi sektor non pertambangan diperlukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal regional Kalimantan

Berkenaan dengan beberapa tantangan fiskal regional wilayah Kalimantan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, Menstimulasi pertumbuhan melalui langkah diversifikasi sektor dan komoditas andalan pertumbuhan ekonomi. Mengurangi dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi menjadi keharusan agar tercipta pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan tidak rentan mengalami guncangan. Kebijakan konkrit yang direkomendasikan adalah serangkaian kebijakan untuk membatasi usaha pertambangan dan memberikan dukungan penuh pengembangan sektor industri pengolahan dan pertanian.

Kedua, Meningkatkan kualitas anggaran sebagai respon atas semakin terbatasnya kapasitas fiskal ditengah upaya pembangunan yang membutuhkan pembiayaan besar. Upaya struktural dan sistematis yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan serta merealisasikan potensi pendapatan menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. Dan selanjutnya kualitas belanja juga harus ditingkatkan dengan langkah pemilihan prioritas belanja yang menjamin proyek/ kegiatan yang dibiayai merupakan hal-hal yang terpenting dan akan berdampak optimal. Pengendalian belanja menjadi penting agar belanja yang dikeluarkan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berdampak besar pada perbaikan kondisi perekonomian.

Ketiga, Pemanfaatan skema pembiayaan non konvensional diluar APBN/APBD juga direkomendasikan untuk dilaksanakan. Peluang untuk membiayai prioritas pembangunan terbuka melalui pola

kemitraan dengan pihak swasta (*public private partnership*) sehingga tidak selalu harus bergantung pada anggaran pemerintah semata.

Keempat, Penggalian berbagai pajak daerah dan retribusi tanpa mengganggu atau membatasi kegiatan ekonomi, diantaranya adalah kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

Kelima, Potensi *idle cash* agar diminimalisir dengan mengoptimalkan pengelolaan kas daerah melalui perencanaan kegiatan dan realisasi belanja yang lebih akurat.

Keenam, Diperlukan pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan, sehingga masyarakat pemilik lahan tidak perlu khawatir terhadap intervensi dari pihak lain yang mencoba mengambil alih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh hal ini sudah terdapat pada provinsi Kalimantan Selatan dan selanjutnya bisa menjadi acuan provinsi lainnya untuk membuat pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian tersebut.

Ketujuh, Stimulus fiskal pemerintah selalu diperlukan untuk meningkatkan volume produksi pertanian, utamanya padi sebagai bahan pangan utama penduduk Indonesia. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah melalui dua skema bantuan pembiayaan ketahanan pangan, yaitu Skema Subsidi Bunga Kredit (Kredit Program Ketahanan Pangan dan energi) dan Skema Penjaminan (Kredit Usaha Rakyat).

Halaman ini sengaja dikosongkan

Regional Sulawesi

Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi pada tahun 2016 sebesar 7,42% di mana masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,16%). Aktivitas ekonomi ini sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga (51,9%) dan PMTB (37,6%). Namun demikian, dibanding tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi tahun 2016 melambat sebesar 0,77%. Perlambatan perekonomian regional Sulawesi tersebut terjadi pada tingkat inflasi regional Sulawesi tahun 2016 yang turun cukup signifikan di bawah tingkat inflasi pada tahun 2015 kecuali tingkat inflasi pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Selaras dengan kondisi perekonomian tahun 2016, IPM seluruh provinsi regional Sulawesi meningkat dibanding tahun 2015 walaupun hanya Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki IPM di atas IPM nasional. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin dan TPT relatif menurun dibanding tahun sebelumnya kecuali persentase penduduk miskin pada Sulawesi Tengah. Perkembangan rasio Gini regional Sulawesi bervariatif dan cenderung stagnan dibanding tahun 2015 kecuali Sulawesi Tengah yang menurun sebesar 0,01.

Kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2016 di Sulawesi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Realisasi pendapatan negara masih jauh dari angka target pendapatan yaitu hanya mencapai 55,49%. Rendahnya realisasi pendapatan tersebut disebabkan oleh rendahnya pencapaian penerimaan pajak yang hanya sebesar 54,47% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp35,144 triliun. Kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemerintah pusat tahun 2016 menurut jenis belanja menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja bantuan sosial memiliki tingkat penyerapan tertinggi yaitu masing-masing sebesar 97,66% dan 95,13%. Adapun realisasi belanja barang dan belanja modal masih berada pada angka di bawah 90% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi pendapatan APBD regional Sulawesi pada tahun 2016 sebesar Rp100,883 triliun, naik 5,69% dari tahun sebelumnya sebesar Rp95,451 triliun. Kenaikan realisasi pendapatan terbesar dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan transfer yang mencapai 21,98% dari pendapatan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat realisasi belanja daerah (APBD) pada regional Sulawesi sebesar 87,25% dari total pagu Rp110,100 triliun. Walapun secara nominal realisasi tersebut meningkat sebesar Rp13,2 triliun, tingkat penyerapan tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat realisasi belanja pemerintah daerah (APBD) tahun 2015 yang sebesar 89,43%.

Makroekonomi Regional Sulawesi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi tahun 2016 mencapai 7,42%. Angka tersebut menunjukkan perlambatan sebesar 0,77% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,19%. Pada tahun 2016, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 0,05%-0,30%. Adapun Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat

mengalami perlambatan petumbuhan ekonomi yang beragam. Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,54% sebagai akibat dari perlambatan ekonomi global.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sulawesi Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

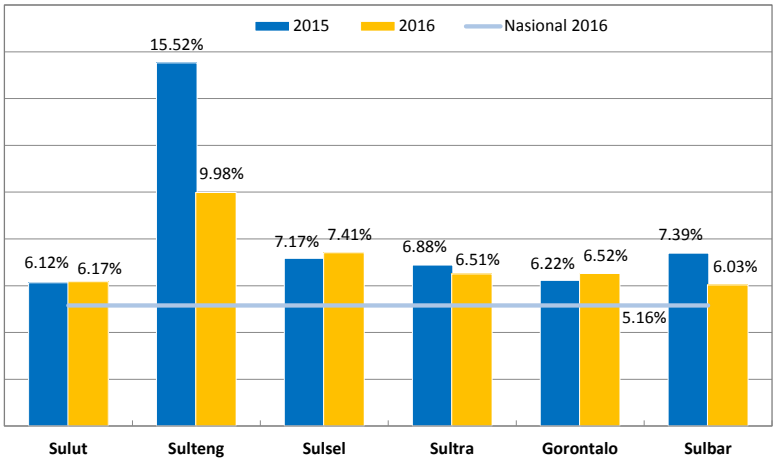

Permintaan untuk konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi pada tahun 2016 yaitu sebesar 51,9% yang mana laju pertumbuhannya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dengan adanya permintaan yang besar

dari rumah tangga tersebut, disisi lain, permintaan investasi (PMBT) menjadi 37,6% dan ekspor netto sebesar 4,2%. Komposisi ini tidak jauh berbeda dengan komposisi permintaan secara nasional.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sulawesi 2015 dan 2016
Sumber: BPS

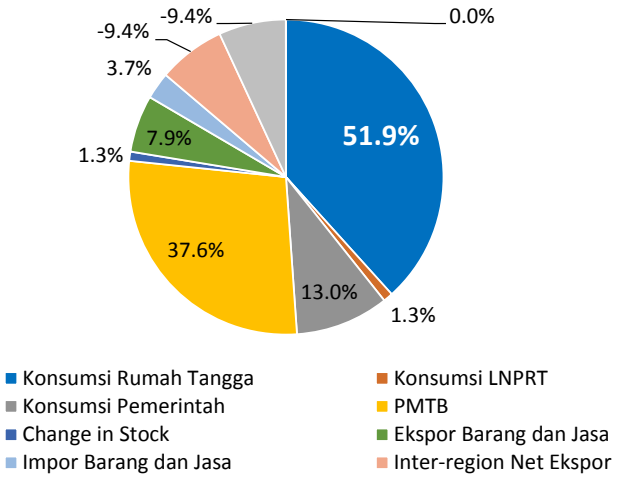

Dibandingkan tahun 2015, hanya konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan ekspor netto barang/jasa yang mengalami percepatan laju pertumbuhan pada tahun 2016. Percepatan pertumbuhan tertinggi pada ekspor netto barang/jasa yaitu sebesar 9,29%. Komoditas ekspor yang berkontribusi besar pertumbuhan tersebut diantaranya adalah nikel di Provinsi Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, konsumsi pemerintah mengalami penurunan akibat kebijakan penghematan pada belanja, yang dilakukan dengan pemotongan atau pemblokiran anggaran. Meskipun demikian, melalui komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan pada periode berikutnya di regional Sulawesi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan, Regional Sulawesi Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	5,25%	5,79%
Konsumsi LNPRT	1,56%	4,04%
Konsumsi Pemerintah	7,99%	1,26%
PMTB	8,69%	6,98%
Change in Stock	388,98%	-8,04%
Ekspor Barang dan Jasa	3,34%	12,63%
Impor Barang dan Jasa	11,31%	1,78%
Inter-region Net Ekspor	1,54%	-7,38%

Berdasarkan komposisi PDRB regional Sulawesi dari lapangan usaha pada tahun 2016, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (25,6%), sektor konstruksi (12,3%), dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor (12,0%) menjadi sektor-sektor yang memberikan kontribusi paling besar pada pertumbuhan

ekonomi regional Sulawesi. Tidak berbeda dengan tahun 2015, usaha pengadaan listrik dan gas masih merupakan sektor yang paling rendah kontribusinya pada tahun 2016 ini yaitu hanya sebesar 0,1%.

Komposisi PDRB ADHB dari Sisi Penawaran, Regional Sulawesi Tahun 2016

Sumber: BPS

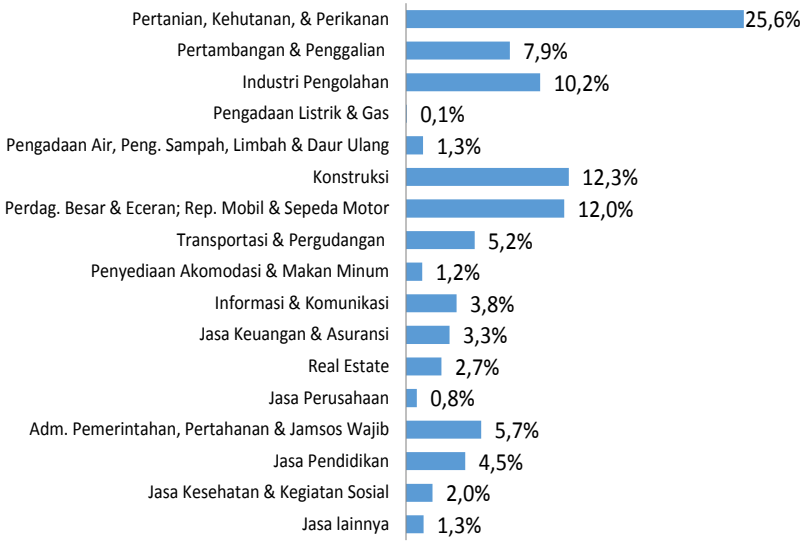

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi tahun 2016 menyebar pada seluruh lapangan usaha. Penyebaran ini didukung oleh adanya potensi usaha yang berbeda-beda di tiap provinsi di Sulawesi. Di Sulawesi lapangan usaha dengan percepatan laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami peningkatan sebesar 8,28%. Pada tahun yang sama, lapangan usaha yang paling mengalami perlambatan laju pertumbuhan adalah sektor konstruksi yang semula memiliki laju pertumbuhan sebesar 11,33% pada tahun 2015 menjadi 4,84% pada tahun 2016.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Penawaran, Regional Sulawesi Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,66%	5,46%
Pertambangan dan Penggalian	12,01%	7,75%
Industri Pengolahan	13,29%	10,02%
Pengadaan Listrik dan Gas	3,55%	11,83%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,65%	4,59%
Konstruksi	11,33%	4,84%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,20%	7,67%
Transportasi dan Pergudangan	7,37%	7,32%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,05%	9,03%
Informasi dan Komunikasi	8,33%	8,28%

Uraian	2015	2016
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,83%	14,73%
Real Estate	7,09%	5,77%
Jasa Perusahaan	6,11%	6,96%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,70%	3,02%
Jasa Pendidikan	7,22%	6,61%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,40%	7,75%
Jasa lainnya	8,11%	7,88%

Inflasi

Tahun 2016 pada regional Sulawesi, inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 2,94%, sedangkan inflasi terendah dialami oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,35%. Seluruh provinsi pada regional Sulawesi memiliki tingkat inflasi lebih rendah dari inflasi nasional (3,02%). Secara umum, pada tahun 2016 seluruh provinsi di Sulawesi mengalami penurunan inflasi dibandingkan tahun 2015 kecuali Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengalami kenaikan sebesar 0,43%. Hal tersebut selaras dengan penurunan inflasi secara nasional.

Penurunan tingkat inflasi tertinggi dicapai oleh Sulawesi Utara dengan penurunan inflasi sebesar 5,21% . Menurunnya tekanan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh: (1) melandainya inflasi *volatile foods*, seiring pasokan yang relatif terjaga; dan (2) melandainya inflasi *administered prices* seiring dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga komoditas energi sebagai respon terhadap perkembangan rendahnya harga minyak dunia. Faktor pendukung lainnya adalah proporsi belanja pemerintah yang terbagi cukup merata sepanjang tahun sehingga penumpukan belanja pemerintah di akhir tahun dapat dikurangi.

Tingkat Inflasi Regional Sulawesi Tahun 2015 dan 2016 (dalam %)
Sumber: BPS

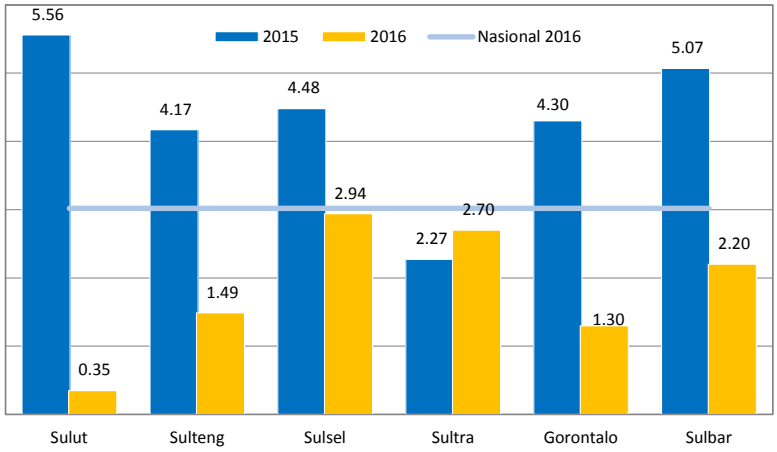

Indikator Kesejahteraan

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan sejak tahun 2014 mengalami tren peningkatan yang stabil

Pembangunan manusia di regional Sulawesi selama periode 2014-2016 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan kualitas manusia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi di regional Sulawesi semakin membaik.

Pada kurun 2014-2016 hanya Provinsi Sulawesi Utara yang secara konsisten mempunyai IPM lebih tinggi dari IPM nasional. Kenaikan IPM tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 tertinggi dicapai oleh Sulawesi Tengah sebesar 0,71 poin. Adapun Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi paling muda yang memiliki IPM terendah di regional ini mengalami kenaikan IPM sebesar 0,64 poin. Sedangkan Sulawesi Utara yang memiliki IPM tertinggi mengalami peningkatan sebesar 0,66 poin. Perbedaan pencapaian IPM tertinggi dengan IPM terendah pada tahun 2016 sekitar 7,45 poin. Dibandingkan dengan perbedaan pencapaian IPM tahun 2014 yang sebesar 7,72 poin (IPM tertinggi 69,96 untuk Provinsi Sulawesi Utara dan terendah 62,24 untuk Provinsi Sulawesi Barat), maka perbedaan pencapaian IPM tahun 2016 relatif lebih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa disparitas pembangunan manusia di tingkat provinsi pada regional Sulawesi relatif menurun.

IPM Regional Sulawesi Tahun 2014 s.d. 2016
Sumber: BPS

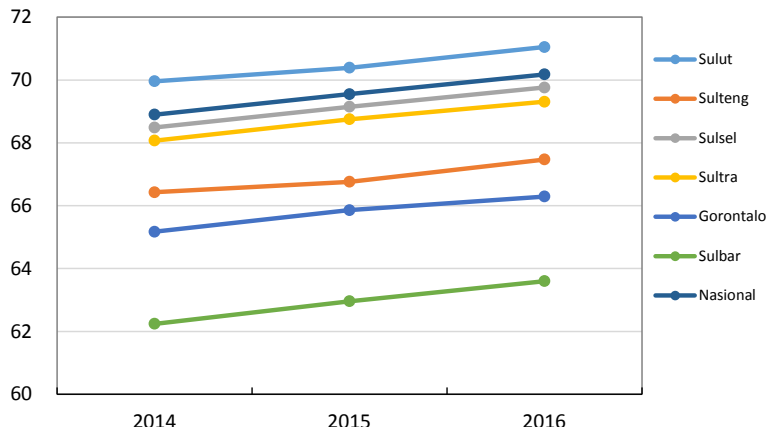

Rasio Gini

Rasio Gini di regional Sulawesi dari kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2016 berfluktuasi. Pada tahun 2016 Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo memiliki rasio Gini di atas rasio gini nasional (0,40). Dibandingkan tahun 2015, hanya Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami penurunan angka gini rasio yaitu yang semula sebesar 0,37 menjadi 0,36. Penurunan gini rasio tersebut seiring dengan semakin meningkatnya IPM di Sulawesi Tengah pada tahun 2016 sebesar 0,71 poin dibandingkan tahun 2015. Hal tersebut

mengindikasikan bahwa upaya pembangunan manusia berjalan secara merata di tiap daerah pada Provinsi Sulawesi Tengah. Di sisi lain, meskipun terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, angka gini rasio pada kedua provinsi tersebut mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar 0,02 dan 0,01. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan namun distribusi pendapatannya tidak diterima oleh masyarakat secara merata.

Rasio Gini Regional Sulawesi Tahun 2014 s.d. 2016
Sumber: BPS

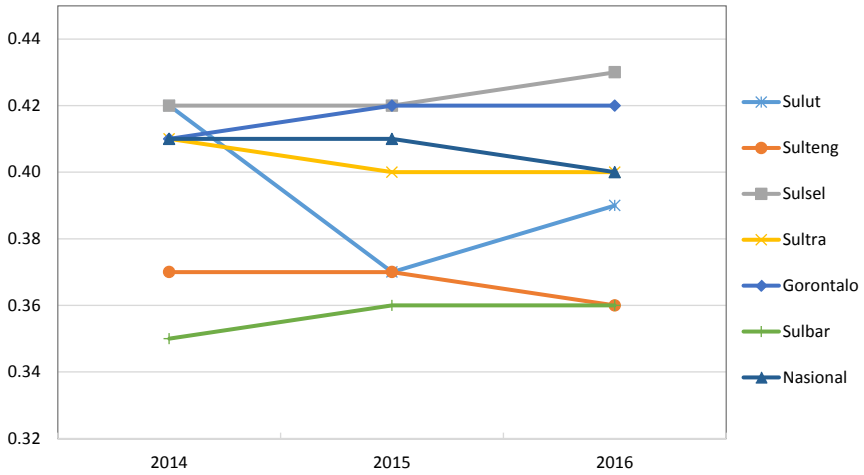

Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2016 pada regional Sulawesi pada umumnya lebih rendah daripada TPT nasional (5,61%) kecuali TPT pada Provinsi Sulawesi Utara (6,18%). Adapun provinsi yang mencatatkan angka TPT paling rendah adalah Sulawesi Tenggara (2,72%). Dibandingkan tahun 2015, angka TPT tahun 2016 pada seluruh provinsi regional Sulawesi mengalami penurunan yang beragam yaitu berkisar antara 0,02%-2,85%. Penurunan angka TPT tersebut seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan perekonomian di regional Sulawesi memiliki *multiplier effect* dalam membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi jumlah pengangguran terbuka.

Pada tahun 2016, Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi di regional Sulawesi yang mengalami penurunan angka TPT tertinggi yaitu sebesar 2,85% dibanding tahun 2015. Penurunan tersebut sejalan dengan pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang tumbuh dari 2,55% tahun 2015 menjadi 3,67% pada tahun 2016. Beberapa faktor ditengarai mendorong peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian antara lain: (1) membaiknya cuaca dibanding tahun 2015 (gejala El Nino) yang umumnya berdampak pada produksi pertanian; (2) panen raya cengkih; (3) naiknya harga komoditas kelapa; dan (4) semakin meningkatnya bantuan pemerintah ke petani.

Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Sulawesi Tahun 2015 dan 2016
(dalam %)
Sumber: BPS

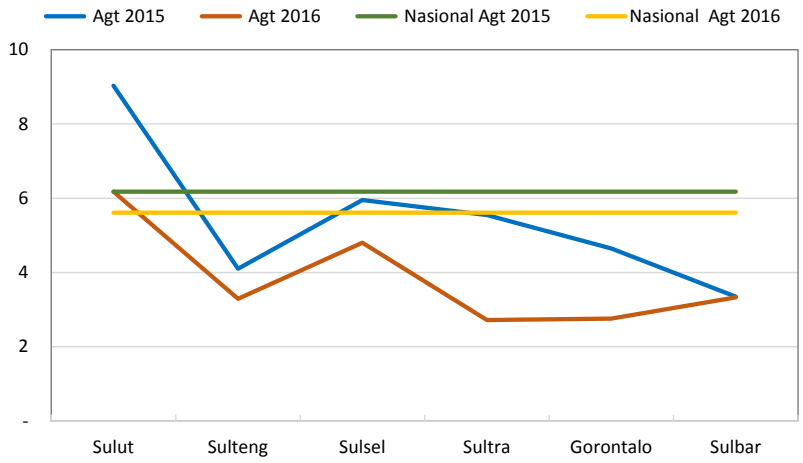

Kemiskinan

Seluruh provinsi regional Sulawesi pada tahun 2016 memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional (10,70%) kecuali Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang masing-masing sebesar 8,20% dan 9,24%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di lingkup regional Sulawesi. Beberapa faktor yang ditengarai berperan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara diantaranya yaitu: (1) tingkat inflasi yang terkendali, (2) terjaganya sumber pendapatan masyarakat khususnya dari pertanian, antara lain kenaikan upah buruh tani dan kenaikan harga komoditas kelapa dan panen raya cengkih, (3) keberhasilan program Pemerintah Daerah "ODSK" Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dibandingkan tahun 2015, persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk pada regional Sulawesi di tahun 2016 pada umumnya mengalami penurunan. Artinya pada periode tersebut, proporsi jumlah penduduk miskin dibanding jumlah penduduk secara keseluruhan dalam satu provinsi semakin menurun. Hampir seluruh provinsi di regional Sulawesi mengalami penurunan persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan persentase jumlah penduduk miskin terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,97%. Penurunan tersebut selaras dengan semakin menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin terbukanya lapangan pekerjaan akan semakin mengurangi jumlah penduduk miskin pada suatu daerah.

Adapun kenaikan persentase penduduk miskin hanya terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan kenaikan persentase sebesar 0,02% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan persentase penduduk miskin ini seiring dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi

di Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebesar 5,54%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi instrumen yang cukup berpengaruh untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Persentase Penduduk Miskin Regional Sulawesi Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

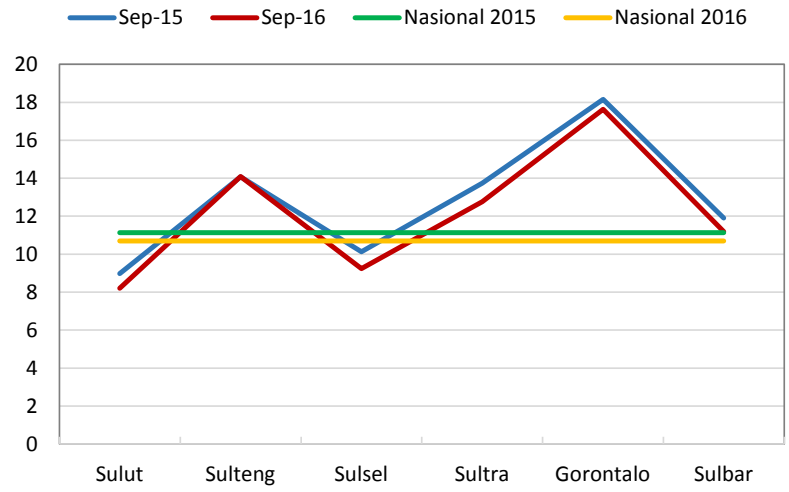

Pelaksanaan APBN

Kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2016 di Sulawesi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015. Target penerimaan perpajakan tahun 2016 sebesar Rp35,144 triliun, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp21,206 triliun. Dari target tahun 2016 tersebut realisasi penerimaan hanya tercapai 54,47%, sehingga realisasi penerimaan perpajakan turun 28,96% dari target masing-masing tahun yang bersangkutan, sedangkan realisasi PNBP mengalami kenaikan 9,15% dari masing-masing target tahun yang bersangkutan. Pada sisi belanja pemerintah pusat, pagu turun menjadi Rp42,285 triliun dari tahun sebelumnya Rp60,063 triliun. Meskipun terjadi penurunan pagu, tingkat realisasi anggaran mengalami penurunan menjadi 89,83% dari pagu tahun 2016.

Realisasi APBN Regional Sulawesi Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN, data diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	21.206,68	17.692,36	83,43	35.144,09	19.141,88	54,47
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.121,42	3.123,40	100,06	3.793,00	4.142,21	109,21
Pendapatan Hibah	2,50	-	-	2,45	-	-
Jumlah Pendapatan Negara	24.330,60	20.815,76	85,55	38.658,43	21.450,92	55,49
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	60.063,26	54.619,50	90,94	42.285,92	37.984,61	89,83
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	74.713,58	73.795,82	98,77	92.383,06	85.409,77	92,45
Jumlah Belanja Negara	134.776,84	128.415,32	95,28	134.668,98	123.394,38	91,63

Melihat dari sisi fiskal, capaian realisasi PNBP TA 2016 yang secara nominal telah melebihi realisasi TA 2015 yaitu sebesar Rp3,463 triliun tidak cukup membantu ruang gerak fiskal pemerintah pusat karena pemanfaatan PNBP tersebut hanya dapat digunakan dengan mengikuti ketentuan khusus dan tidak dapat digunakan sebagaimana penerimaan perpajakan.

Persentase realisasi belanja negara secara akumulatif juga mengalami penurunan sebesar 3,65% dari 95,28% menjadi 91,63%. Meskipun dana transfer dan dana desa TA 2016 secara nominal memiliki realisasi lebih tinggi daripada TA 2015, namun persentase realisasinya mengalami penurunan sebesar 6,32%. Adapun belanja pemerintah pusat, baik pagu maupun realisasinya semakin menurun pada TA 2016 seiring dengan semakin besarnya alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin menguatnya implementasi desentralisasi fiskal pada regional Sulawesi.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Regional Sulawesi 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Kode	Fungsi	2015	2016
01	Pelayanan Umum	12.474,68	10.021,59
02	Pertahanan	2.726,70	2.745,84
03	Ketertiban dan Keamanan	3.264,61	2.993,00
04	Ekonomi	19.467,01	9.922,24
05	Lingkungan Hidup	963,28	744,12
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	2.932,14	1.703,53
07	Kesehatan	2.252,33	579,99
08	Pariwisata dan Budaya	63,02	52,87
09	Agama	666,55	689,86
10	Pendidikan	9.560,65	7.904,65
11	Perlindungan Sosial	248,83	138,40

Realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi pada regional Sulawesi tahun 2015 dan 2016 masih didominasi pengeluaran dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan umum, ekonomi dan pendidikan. Tingginya realisasi anggaran pada ketiga fungsi tersebut memang tidak lepas dari program pemerintah yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan daya dukung infrastruktur dan amanat konstitusi untuk peningkatan anggaran bagi pendidikan. Besarnya alokasi fungsi Pelayanan Umum dikarenakan belanja pegawai (gaji) dibebankan pada fungsi tersebut, sedangkan fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan memperoleh proporsi anggaran yang relatif besar selaras dengan *Millenium Development Goal* yang target utamanya adalah memberantas kemiskinan dan penyediaan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

Fungsi pariwisata dan budaya dan fungsi perlindungan sosial merupakan fungsi dengan realisasi anggaran terkecil yaitu sebesar Rp52,87 miliar untuk fungsi pariwisata dan budaya, serta Rp138,40

miliar untuk fungsi perlindungan sosial. Melihat masih rendahnya tingkat realisasi anggaran pada fungsi pariwisata dan budaya, memperlihatkan bahwa pemerintah pusat belum menjadikan sektor pariwisata dan budaya menjadi salah satu *lead sector* pada regional Sulawesi. Bentuk dukungan pemerintah tidak secara langsung pada fungsi pariwisata tersebut, namun pemerintah mendukung melalui program penyediaan infrastruktur untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka memajukan kepariwisataan kawasan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Regional Sulawesi Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	13.785,01	13.526,71	98,13	13.138,22	12.830,82	97,66
Belanja Barang	17.192,64	15.495,53	90,13	15.986,62	13.593,46	85,03
Belanja Modal	25.683,41	22.481,54	87,53	13.045,30	11.450,20	87,77
Belanja Bantuan Sosial	3.402,20	3.115,72	91,58	115,77	110,13	95,13
Jumlah	60.063,26	54.619,50	90,94	42.285,92	37.984,61	89,83

Proporsi alokasi belanja pemerintah pusat di regional Sulawesi 2016 menurut jenis belanja yaitu 31,1% untuk belanja pegawai, 37,8% untuk belanja barang, 30,9% untuk belanja 0,3% untuk belanja bantuan sosial. Komposisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar belanja masih berfokus pada kegiatan bersifat rutin dan non operasional, antara lain untuk belanja gaji dan belanja operasional, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

Tingkat realisasi belanja pegawai dan belanja barang pada tahun 2016 mengalami penurunan yang masing-masing sebesar 0,47% dan 5,1% dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, alokasi belanja modal mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 49% dari alokasi belanja tahun lalu. Realisasi belanja modal tersebut secara persentase meningkat yaitu sebesar 0,24% dari realisasi tahun 2015.

Pagu Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp17,42 triliun atau 23,24% dibandingkan tahun 2015. Alokasi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum yang mencapai 56,65% dari total alokasi anggaran tersebut. Dana Alokasi Umum tersebut pada umumnya digunakan Pemerintah Daerah untuk pembayaran belanja pegawai.

Realisasi anggaran tahun 2016 untuk masing-masing jenis Transfer ke Daerah mencapai angka di atas 80% kecuali untuk Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang masing-masing memiliki tingkat penyerapan sebesar 78,25% dan 74,5%. Rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil tersebut mengindikasikan adanya ketidaktercapaian target penerimaan yang akan dibagikan kembali ke daerah di lingkup regional Sulawesi.

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Regional Sulawesi Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN dan DJPK, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	2.969,25	2.419,61	81,49	3.756,04	2.938,95	78,25
Dana Alokasi Umum	47.543,68	47.543,68	100,00	52.331,22	52.331,22	100,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	11.788,51	11.358,75	96,35	18.417,67	15.293,37	83,04
Dana Otsus,Keistimewaan DIY,DID	-	-	-	689,76	689,76	100,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	10.282,58	10.097,52	98,20	11.832,53	8.815,03	74,50
Dana Desa	2.376,26	2.376,26	100,00	5.355,84	5.341,44	99,73
Jumlah	74.960,28	73.795,82	98,45	92.383,06	85.409,77	92,45

Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah satker BLU di Sulawesi pada tahun 2016 sebanyak 18 satker yang terbagi dalam dua jenis layanan yaitu: 9 satker untuk layanan kesehatan dan 9 satker untuk layanan pendidikan. BLU dengan layanan kesehatan diantaranya adalah Balai Kesehatan Mata Masyarakat Sulawesi Selatan, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Sulawesi Selatan, dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Adapun BLU dengan layanan pendidikan diantaranya adalah Universitas Hasanuddin dan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

Jumlah Satker BLU Menurut Layanan Regional Sulawesi Tahun 2014 s.d. 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN

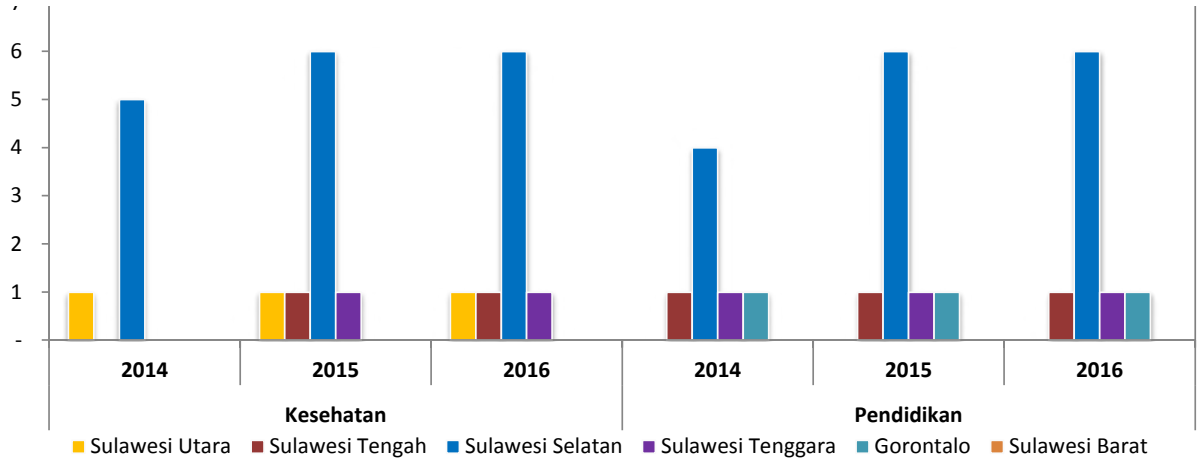

Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan APBD regional Sulawesi pada tahun 2016 sebesar Rp100,883 triliun, naik 5,69% dari tahun sebelumnya sebesar Rp95,451 triliun. Kenaikan realisasi pendapatan terbesar dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan transfer yang mencapai 21,98% dari pendapatan tahun sebelumnya. Apabila dilihat per komponen pendapatan, realisasi pendapatan pada TA 2016 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang mencapai 82,53% dari total pendapatan, sedangkan PAD hanya mencapai 12,68%

dan lain-lain pendapatan yang sah (L2PYS) sebesar 4,79% dari total pendapatan. Tingginya perbandingan antara pendapatan transfer terhadap total pendapatan yang mencapai 82,53% mengindikasikan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi dan tidak mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan rasio sebesar 71,50%. Dari sisi kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer. Pada tahun 2015 rasio kemandirian keuangan daerah regional Sulawesi sebesar 12,62% dan tahun 2016 naik menjadi 12,68%. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah regional Sulawesi pada tahun 2016 masih tergolong rendah.

Realisasi APBD Regional Sulawesi Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	15.801,46	12.049,90	76,26%	13.877,29	12.792,77	92,18%
Pendapatan Transfer	70.069,98	68.252,11	97,41%	85.763,76	83.256,90	97,08%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	13.896,72	15.149,73	109,02%	7.001,01	4.833,37	69,04%
Jumlah Pendapatan	99.768,16	95.451,73	95,67%	106.642,05	100.883,04	94,60%
Belanja						
Belanja Pegawai	37.808,26	34.648,61	91,64%	41.807,07	36.311,19	86,85%
Belanja Modal	22.116,03	20.968,05	94,81%	28.789,84	25.337,47	88,01%
Belanja Lain	32.736,22	27.249,47	83,24%	39.503,48	34.417,62	87,13%
Jumlah Belanja	92.660,50	82.866,13	89,43%	110.100,39	96.066,28	87,25%
Surplus/Defisit	7.107,65	12.585,61	177,07%	(3.458,34)	4.816,77	-139,28%

Belanja Daerah

Untuk realisasi belanja APBD regional Sulawesi mencapai Rp96,066 triliun, meningkat 15,93% dari tahun sebelumnya sebesar Rp82,866 triliun. Realisasi belanja pegawai meningkat 4,80% dari tahun sebelumnya yang semula sebesar Rp34,648 triliun menjadi Rp36,311 triliun, hal ini terjadi dimungkinkan karena terdapat hak pegawai pada tahun 2015 yang baru dibayarkan pada tahun 2016, sehingga memperlihatkan realisasi belanja pegawai yang naik.

Tingkat realisasi belanja daerah (APBD) pada regional Sulawesi sebesar 87,25% dari total pagu Rp110,100 triliun masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat realisasi belanja pemerintah daerah (APBD) tahun 2015 sebesar 89,43%, walapun secara nominal realisasi tersebut sudah mengalami kenaikan sebesar Rp13,2 triliun.

APBD regional Sulawesi tahun 2015 dan 2016 masih mengalami surplus yaitu: Rp12,585 triliun pada tahun 2015 dan Rp4,816 triliun pada tahun 2016. Angka surplus ini bisa berarti para pemerintah daerah di Sulawesi mendapatkan ruang gerak fiskal yang cukup luas untuk membiayai program dan kegiatannya. Namun demikian, hal ini

dapat juga mengindikasikan bahwa terdapat program/kegiatan yang direncanakan tetapi tidak dapat terlaksana pada tahun 2016.

Rasio realisasi setiap jenis belanja terhadap total belanja pada tahun 2015 dan 2016 tidak banyak berubah, yaitu sekitar 37%-42% untuk belanja pegawai, 25%-27% untuk belanja Modal, dan 32%-36% untuk belanja lain. Dengan cukup tingginya peningkatan belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur di Sulawesi, diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di regional Sulawesi.

Sektor Unggulan Regional

Perekonomian di regional Sulawesi terus berkembang. Pertumbuhan ekonomi juga bergerak positif. Perekonomian regional Sulawesi masih ditopang oleh sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Untuk itu, sektor-sektor tersebut harus terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, beberapa sektor lain seperti sektor pertambangan dan sektor pariwisata juga mulai mendapat perhatian. Pada sektor pertambangan, peningkatan nilai tambah hasil pertambangan dan tata kelola mulai diperbaiki. Sedangkan sektor pariwisata juga sudah mulai menggeliat dimana beberapa obyek wisata telah menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan internasional.

Pertanian

Berdasarkan komposisi PDRB regional Sulawesi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memiliki kontribusi terbesar (25,6%) terhadap total PDRB. Pada tahun 2016, kontribusi dari sektor tersebut yaitu sebesar Rp137,38 miliar (ADHK). Lebih khusus, Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan pada seluruh provinsi di regional Sulawesi karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah agraris. Demikian pula, sebagian besar masyarakatnya masih bertumpu pada sektor pertanian. Sebagai contoh, 20 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki unggulan di sektor pertanian. Produksi pertanian dari tahun ke tahun juga terus meningkat terutama untuk tanaman padi dan jagung. Peningkatan tersebut didukung adanya peningkatan sistem pengairan dan irigasi serta perluasan lahan pertanian.

Di Sulawesi Selatan, jumlah produksi padi tahunan Sulawesi Selatan cenderung stabil di atas 5 Juta ton setiap tahun. Pertumbuhan produksi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,75%. Pertumbuhan ini didorong peningkatan luas panen dari 983.107 hektar pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.044.030 hektar pada tahun 2016.

Luas areal perkebunan di Sulawesi Tengah juga terus mengalami peningkatan yang diikuti peningkatan produksi. Terdapat banyak produksi tanaman perkebunan yang terus berkembang dan menjadi komoditi andalan, salah satunya adalah produksi kakao yang pada tahun 2014 menyumbang 31,95% dari produksi nasional sebesar

651,6 ribu ton.

Peran strategis sektor pertanian di Sulawesi Utara, khususnya perkebunan adalah dari aspek peran di bidang ekspor. Setidaknya Sulawesi Utara memiliki 16 komoditas unggulan dalam rangka ekspor ke berbagai negara. Komoditas paling banyak diminati yakni minyak kelapa kasar atau *crude coconut oil* (CCO), tepung kelapa, biji pala dan bunga pala. Komoditas biji pala merupakan penyumbang terbesar konsumsi dunia yang mencapai 70 persen. Komoditas biji pala Sulawesi Utara sudah sejak lama menembus Pasar Eropa, dan beberapa negara di Amerika dan Asia.

Kinerja pertanian Gorontalo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dengan penyumbang terbesar adalah tanaman pangan, dimana tanaman pangan didominasi oleh komoditas padi dan jagung. Bahkan raihan produksi Jagung di Gorontalo pada tahun 2016 mencapai 1 juta ton sehingga Gorontalo dinobatkan sebagai lumbung pangan nasional. Perkembangan lahan panen padi dari 2010 sd 2016 terlihat fluktuatif, dimana lahan panen tertinggi di tahun 2016 yaitu seluas 66.199 ha, kenaikan lahan panen didukung oleh kenaikan lahan panen padi hampir di seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo.

Kelautan dan Perikanan

Mengingat Sulawesi memiliki luas perairan laut yang cukup besar maka sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi sebagai sektor unggulan dan penggerak utama pembangunan perekonomian daerah. Keunggulan sektor kelautan dan perikanan dibanding sektor lainnya adalah adanya ketersediaan sumberdaya alam yang sangat besar dan mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa sehingga pengembangan pada sektor ini masih sangat terbuka.

Perkembangan sektor perikanan di Sulawesi Selatan didominasi oleh perikanan budidaya komoditas unggulan yaitu budidaya bandeng dan udang. Sementara di Sulawesi, sektor perikanan dibudidayakan di laut, tambak, kolam dan sawah. Potensi perikanan air payau juga cukup besar, dimana daya ketersediaan lahan seluas 13.584,6 Ha tersebar di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Majene, Mamuju Utara dan Mamuju dengan produksi terbesar bandeng dan udang sebanyak 539.837,28 ton.

Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki keunggulan di sektor kelautan dan perikanan. Ditinjau dari konteks pembangunan ekonomi, maka saat ini pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tengah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dari sektor perikanan dan kelautan, luas perairan mencapai 193.923,75 km² dengan potensi sebesar 330.000 ton per tahun. Potensi perairan darat yang terdiri dari tambak seluas 42.095,15 Ha dengan kondisi pemanfaatan sebesar 11,3%, dan potensi budidaya air tawar seluas 134.183,3 Ha dengan pemanfaatan sebesar 5,8%. Potensi-potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Komoditi lain di sektor kelautan dan perikanan yaitu budidaya rumput laut. Di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara memiliki potensi dan pengembangan rumput laut dengan total

produksi diperkirakan kurang lebih 146.856 kg/tahun dengan luas lahan produksi sekitar 12.238 Ha. Luas perairan laut yang dapat dikonversi menjadi lahan budidaya rumput laut sekitar 83.000 Ha. Jika potensi tersebut dimanfaatkan hingga 60% saja atau seluas 49.800 Ha, maka produksi rumput laut Sulaweasi Tenggara mencapai 759.600.000 Kg/tahun. Perluasan lahan sangat memungkinkan mengingat perairan laut sulawesi Tenggara sangat cocok untuk budidaya rumput laut, hal itu terbukti dari tingginya kualitas rumput laut Sulawesi Tenggara dan dapat ditanam sepanjang tahun. Agar dapat memberikan nilah tambah, kedepan produk rumput laut dapat diolah terlebih dahulu sebelunm dipasarkan.

Selain rumput laut, Sulawesi Tenggara juga memiliki budidaya kerang mutiara yang menghasilkan butiran mutiara yang diekspor ke luar negeri. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penghasil mutiara jenis South Sea Pearls yang mempunyai ukuran yang besar dengan kilau khas, berasal dari kerang Pinctada Maxima. Budidaya kerang mutiara tersebut selain menyerap tenaga kerja, juga merupakan usaha menggali kekayaan laut yang belum sepenuhnya dikelola dengan baik.

Tantangan Fiskal Regional

Kondisi geografis, demografis, dan berbagai sektor ekonomi yang menjadi unggulan maupun berpotensi untuk meningkatkan roda perekenomian dan kesejahteraan masyakarat di regional Sulawesi menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing pemerintah daerah untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan terkait belanja maupun penerimaan daerah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Infrastruktur

Permasalahan infrastruktur khususnya konektivitas antar daerah masih menjadi permasalahan di regional Sulawesi. Hal tersebut akan menghambat investasi karena para investor tidak kurang mendapatkan dukungan terhadap kelancaran usaha mereka. Namun demikian, sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif diharapkan pembangunan infrastruktur di Sulawesi baik untuk transportasi maupun industry akan turut berkembang.

Ketimpangan Antar Daerah

Adanya peningkatan Rasio Gini di beberapa daerah mencerminkan adanya gap yang semakin besar antar kelompok masyarakat yang kaya dan miskin atau dengan kata lain terjadi kenaikan kesenjangan pendapatan/ekonomi di masyarakat. Sebagai contoh peningkatan Rasio Gini di Sulawesi Utara semakin melebar yang disebabkan antara lain: (1) terkonsentrasinya investasi dan ketersediaan sarana dan prasarana pada kabupaten/kota tertentu seperti Manado, Bitung, Minahasa dan Minahasa Utara; (2) kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan; (3) kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar kabupaten/kota; khususnya pembangunan daerah perbatasan, dan kepulauan.

Angka kemiskinan perdesaan di Gorontalo mencapai 24,30 persen sementara kemiskinan perkotaan hanya sebesar 5,78 persen. Tingginya angka kemiskinan di pedesaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tingkat produktifitas petani yang rendah, kepemilikan asset yang terbatas, sebagian dari kelompok petani merupakan buruh tani, anomali cuaca kerap terjadi. Kegiatan ekonomi di Gorontalo sendiri secara faktual cenderung terpusat di dua daerah yang bersebelahan, yakni Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

Realisasi Pendapatan yang Kurang Optimal

Pada umumnya, kemampuan Pemda dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan terutama PAD di daerahnya belum optimal sehingga menyebabkan keterbatasan kemampuan APBD dalam membiayai program-program prioritas pemda sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa daerah yang mengandalkan pendapatan dari aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam mengalami realisasi pendapatan yang kurang optimal. Diperlukan terobosan agar sektor-sektor perekonomian dapat lebih tumbuh dan berkembang sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah

Solusi Fiskal Regional

Solusi yang dapat diberikan atas tantangan fiskal regional tersebut diatas dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, APBN, APBD, dan sektor unggulan di regional Sulawesi diantaranya sebagai berikut:

Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat mutlak untuk mendukung bergeraknya perekonomian masyarakat. Proyek-proyek infrastruktur akan mendorong adanya peningkatan investasi di suatu daerah. Peningkatan infrastruktur fisik dan non fisik juga akan memfasilitasi dan meningkatkan kelancaran kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran.

Di Sulawesi Selatan, proyek-proyek strategis terus dilaksanakan antara lain Makassar New Port, merupakan salah satu proyek yang didanai oleh BUMN. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan perdagangan kelas dunia yang terletak di Kota Makassar dan direncanakan menjadi hub perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pelabuhan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 500.000 CBUs. Demikian pula, pembangunan proyek kereta api Makassar Pare-pare yang merupakan bagian dari proyek perkereta apian Trans Sulawesi, ditargetkan akan dibangun sepanjang 2.000 km dari Makassar ke Manado.

Kebijakan fiskal di bidang belanja negara di Sulawesi Barat juga diarahkan kepada belanja yang dapat meningkatkan produktivitas seperti pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan industri sehingga diharapkan dapat pula menyeimbangkan percepatan pertumbuhan ekspor dan impor.

APBN di Sulawesi Utara tahun 2016 difokuskan pada fungsi ekonomi dalam rangka membiayai infrastruktur untuk membuka akses konektivitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulawesi Utara. Kebijakan tersebut juga menjawab tantangan permasalahan mengenai: (1) terkonsentrasinya investasi dan ketersediaan sarana dan prasarana pada kabupaten/kota tertentu seperti Manado, Bitung, Minahasa dan Minahasa Utara; (2) kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan; dan (3) kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar kabupaten/kota; khususnya pembangunan daerah perbatasan, dan kepulauan. Selain itu, Sulawesi Utara bersama dengan pemerintah pusat juga tengah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang diproyeksikan sebagai pintu gerbang perdagangan dan arus barang di bagian Utara dan Timur Indonesia. Selain itu, lokasi KEK Bitung juga akan diintegrasikan dengan rencana pengembangan *International Hub Port* (IHP).

Investasi

Diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah yang mendukung peningkatan investasi serta pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengolah bahan komoditas menjadi barang jadi dan setengah jadi. Demikian juga diperlukan dukungan terhadap pengusaha lokal untuk membangkitkan perekonomian di daerahnya dan pengembangkan potensi pariwisata. Sebagai contoh, investasi untuk pengembangan industri pengolahan berbahan baku laut menjadi kebutuhan mendesak Provinsi Sulawesi Tengah agar penerimaan daerahnya tidak saja berbasis pada sumberdaya alam (*resource based oriented*).

Untuk meningkatkan investasi dan pengembangan industri yang lebih besar, pemerintah daerah harus mendorong upaya pembangunan infrastruktur kelistrikan yang dilakukan PLN maupun Swasta, menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi terkait perijinan, dan pembebasan lahan harus dapat dieliminir dan dimitigasi. Demikian pula, pemerintah daerah harus lebih intensif mengidentifikasi investasi yang sudah terdaftar namun belum juga terealisasi, sehingga dapat diinventarisir kebutuhan dan kendala yang dihadapi investor untuk segera dapat diambil solusi/kebijakan penyelesaiannya.

Regional Bali Nusra

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi regional Bali Nusra anjlok 456 basis poin ke angka 5,89% dari pertumbuhan 10,45% pada tahun sebelumnya. Normalisasi di sektor pertambangan setelah masuknya PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu PT Newmont Nusa Tenggara) di tahun 2015 dan perlambatan di sektor pertanian menjadi faktor penyebab kondisi tersebut. Perkembangan inflasi regional berada di bawah inflasi nasional, kecuali untuk Provinsi Bali. Indikator kesejahteraan regional Bali Nusra pada tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang positif dimana IPM, rasio Gini, TPT, dan Tingkat Kemiskinan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, IPM dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB dan NTT masih memerlukan perhatian khusus mengingat angkanya yang masih jauh kurang baik dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Realisasi pendapatan negara di regional Bali Nusra meningkat 7,17%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan realisasi belanja negara meningkat 2,83%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa optimalisasi penggalian penerimaan dan kualitas belanja dalam menciptakan efek multiplier terhadap ekonomi tahun 2016 cukup efektif. Pagu belanja negara yang dianggarkan untuk regional Bali Nusra pada tahun 2016 sebesar Rp75,20 triliun (meningkat 7,12% dibanding tahun sebelumnya). Namun demikian, realisasinya hanya mampu meningkat 2,83% menjadi Rp68,09 triliun akibat adanya penghematan anggaran di tahun 2016. Kebijakan penguatan desentralisasi fiskal telah menggeser struktur belanja tahun 2016 dimana porsi pagu transfer ke daerah dan dana desa terhadap belanja negara meningkat 932 basis poin dibandingkan tahun 2015 menjadi 66,94%, sedangkan porsi belanja pemerintah pusat turun menjadi 33,06%. Dari sisi APBD tahun 2016, target PAD sebesar Rp13,85 triliun (meningkat 11,32%) dengan realisasi 97,28% dan pagu belanja pemerintah daerah Rp66,81 triliun (meningkat 1,53%) dengan realisasi 95,77%. Komponen belanja modal menunjukkan peningkatan realisasi hingga 31,51% menjadi Rp13,47 triliun dan peningkatan proporsi 199 basis poin menjadi 21,05% yang menunjukkan bahwa Pemda mulai menjalankan pemrioritasan belanja produktif.

Makroekonomi Regional Bali Nusra

Pertumbuhan Ekonomi

Tren positif pada sektor pariwisata belum mampu menyokong pertumbuhan ekonomi regional Bali Nusra yang melambat 456 basis poin menjadi 5,89% di saat perekonomian nasional memasuki fase *recovery*. Tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan NTT sendiri sejalan dengan perkembangan di tingkat nasional sebagaimana tercermin dari percepatan pertumbuhan masing-masing sebesar 21 dan 15 basis poin secara berturut-turut. Namun demikian, terjadi normalisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB akibat masuknya PT

https://upload.wikimedia.org

Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu PT Newmont Nusa Tenggara) pada kegiatan ekonomi tahun 2015 yang tercermin pada anjloknya pertumbuhan sektor pertambangan regional Bali Nusra menjadi 6,34% (2016) dari 88,08% (2015). Fenomena tersebut mendorong tren pertumbuhan regional Bali Nusra ke arah yang berlawanan dari tren nasional. Faktor penyebab perlambatan pertumbuhan lainnya adalah perlambatan 193 basis poin pada sektor utama perekonomian regional Bali Nusra (pertanian, kehutanan, dan perikanan) yang berporsi 19,7% terhadap perekonomian tahun 2016.

Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali Nusra Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

Wilayah	2015	2016
Bali	6,03%	6,24%
NTB	21,77%	5,82%
NTT	5,03%	5,18%
Nasional	4,88%	5,02%

Dari sisi permintaan, perekonomian Bali Nusra didominasi komponen konsumsi rumah tangga (58,0%) dan PMTB (35,6%). Komponen ekspor netto (luar negeri) menyumbang 20,3%, namun terjadi offset dari ekspor netto antar wilayah (-30,8%), sedangkan konsumsi pemerintah sendiri hanya menyumbang 14,8% dari keseluruhan komposisi PDRB regional Bali Nusra tahun 2016.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali Nusra Tahun 2016
Sumber: BPS

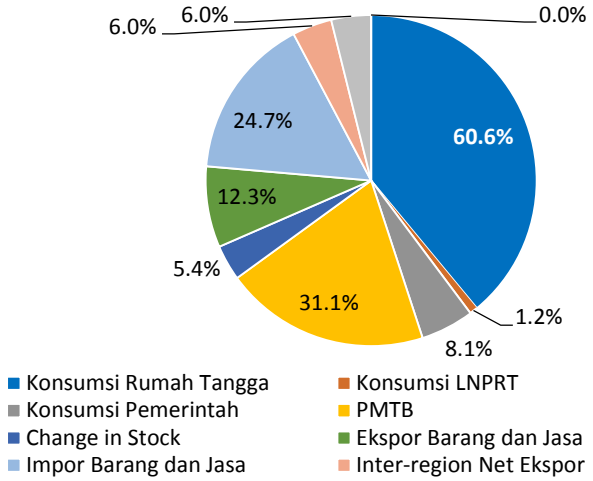

Menduduki komposisi terbesar kedua pada tahun 2016, PMTB mencatatkan laju pertumbuhan ketiga tertinggi (7,6%) dibandingkan komponen lainnya. Laju pertumbuhan tertinggi adalah komponen impor barang/jasa (luar negeri) sebesar 14,56%, disusul oleh komponen ekspor barang/jasa (luar negeri) sebesar 14,40%. Di sisi lain, komponen change in stock dan konsumsi pemerintah mencatatkan laju negatif sebesar-16,14% dan-5,69%.

Tingginya pertumbuhan impor barang/jasa (luar negeri) regional Bali Nusra didorong oleh laju impor di Provinsi Bali (22,49%) yang didominasi oleh impor berupa produk mesin, perlengkapan mekanik, peralatan listrik, perangkat optik, perhiasan, dan barang logam dasar yang berasal dari negara Tiongkok, Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat dan Panama. Pertumbuhan ekspor barang/jasa (luar negeri) regional Bali Nusra juga didorong oleh Provinsi Bali dengan laju ekspor sebesar 14,80% yang didominasi produk pakaian jadi, perhiasan, kayu dan barang dari kayu, perabot, penerangan rumah, kaca dan barang dari kaca, serta jerami/bahan anyaman ke Negara Amerika Serikat, Australia, Jepang, Singapura, dan Tiongkok.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan, Regional Bali Nusra Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	5,67%	5,14%
Konsumsi LNPRT	4,13%	4,22%
Konsumsi Pemerintah	3,11%	-5,69%
PMTB	9,41%	7,60%
Change in Stock	-45,92%	-16,14%
Ekspor Barang dan Jasa	30,20%	14,40%
Impor Barang dan Jasa	-5,78%	14,56%
Inter-region Net Ekspor	10,44%	7,58%

Komposisi PDRB dari sisi penawaran regional Bali Nusra cukup merata dengan leading dari beberapa sektor seperti: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (19,7%), penyediaan akomodasi makan dan minum (12,1%), sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor (10,0%). Dominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan didukung oleh porsinya di Provinsi NTB dan NTT yang masing-masing mencapai 21,3% dan 28,9% sedangkan di Provinsi Bali porsinya hanya mencapai 14,7%. Di sisi lain, dominasi sektor penyediaan akomodasi, makan dan minum didukung oleh porsinya di Provinsi Bali yang mencapai 22,8%, sedangkan di Provinsi NTB dan NTT porsinya hanya mencapai 2,2% dan 0,7%

Komposisi PDRB ADHB dari Sisi Penawaran, Regional Bali Nusra Tahun 2016

Sumber: BPS

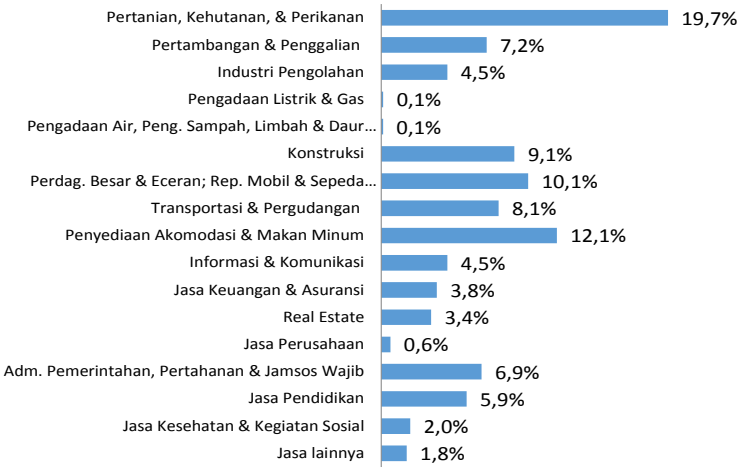

Keberhasilan strategi pemerintah di sektor pariwisata tercermin dalam laju sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di regional Bali Nusra yang meningkat 89 basis poin menjadi 6,98% di tahun 2016. Di Bali, sektor tersebut tumbuh 6,69% dan menjadi kontributor terbesar terhadap (131 basis poin) pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali (6,24%). Promosi pariwisata di Tiongkok meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) Tiongkok ke Bali hingga 43,91% menjadi 990.771 orang. Selain itu, kunjungan wisman dari Australia juga meningkat 23,20% menjadi 1.143.157 orang dan dari India meningkat 57,04% menjadi 187.531 orang sehingga mendorong peningkatan kedatangan wisman agregat (23,14%) menjadi 4.927.937 orang di tahun 2016.

Pertumbuhan sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 7,77%, didukung oleh penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi unggulan pariwisata dan penambahan dua apron di Lombok International Airport (LIA). Pertumbuhan wisman ke NTB terdorong hingga 32,32% menjadi 1.404.328 orang dan pertumbuhan wisatawan nusantara (wisnus) hingga 47,06% menjadi 1.690.109 orang. Serupa dengan NTB, Provinsi NTT juga ditetapkan sebagai destinasi unggulan pariwisata (Labuan Bajo) dan mendapatkan penambahan kapasitas bandara

(Bandar Udara Komodo) sehingga pertumbuhan sektor pariwisata mencapai 14,46%.

Namun demikian, percepatan di sektor pariwisata regional Bali Nusra tersebut belum mampu mengimbangi normalisasi pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan akibat masuknya PT Amman Mineral Nusa Tenggara di tahun 2015 serta perlambatan di sektor pertanian.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Penawaran, Regional Bali Nusra Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,37%	2,43%
Pertambangan dan Penggalian	88,08%	6,34%
Industri Pengolahan	5,86%	3,94%
Pengadaan Listrik dan Gas	2,68%	9,49%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,29%	5,49%
Konstruksi	5,73%	7,95%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,59%	7,03%
Transportasi dan Pergudangan	5,35%	7,20%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09%	6,98%
Informasi dan Komunikasi	8,84%	8,03%
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,10%	9,19%
Real Estate	5,38%	4,82%
Jasa Perusahaan	6,66%	6,47%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,68%	4,90%
Jasa Pendidikan	7,01%	6,57%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,50%	7,48%
Jasa lainnya	6,29%	6,52%

Inflasi

Perkembangan inflasi regional Bali Nusra sejak tahun 2015 menunjukkan tren yang sejalan dengan tren inflasi nasional dimana inflasi yang sempat melonjak akibat kenaikan BBM di tahun 2015, mulai berangsur-angsur turun pada tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2016 sendiri, tingkat inflasi regional Bali Nusra lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional (3,02%) kecuali untuk Provinsi Bali. Inflasi di Provinsi Bali sendiri didorong oleh komponen harga kebutuhan pangan. Tingginya pertumbuhan kunjungan wisatawan di Bali, khususnya di saat perayaan-perayaan festival seperti Tahun Baru diduga menjadi salah satu penyebab tingginya permintaan terhadap kebutuhan pangan.

Tingkat Inflasi Regional Bali Nusra Tahun 2015 s.d. 2016 (dalam %**)**
Sumber: BPS

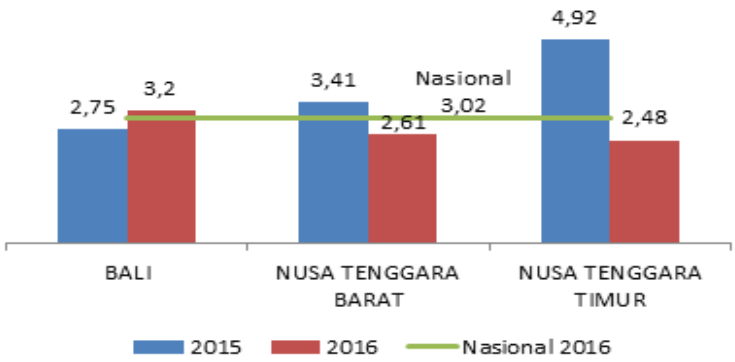

Dikaitkan dengan target inflasi pemerintah, yakni 3-5%, inflasi di Bali berada pada batas bawah target (3,2%), sedangkan inflasi di NTB dan NTT tidak mencapai target (2,61% dan 2,48%). Hal ini menandakan bahwa NTB dan NTT sebaiknya diberikan stimulus fiskal untuk meningkatkan permintaan pasar agar tingkat inflasi terangkat menuju kisaran target dan pertumbuhan ekonomi terdorong lebih tinggi lagi.

Indikator Kesejahteraan

Indeks Pembangunan Manusia

Selama rentang waktu tahun 2010 s.d. 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) regional Bali Nusra cenderung meningkat, sejalan dengan tren di tingkat nasional. Provinsi Bali dengan IPM tahun 2016 yang mencapai 73,65 memiliki IPM terbaik di tingkat regional dan merupakan satu-satunya Provinsi yang dapat mengungguli IPM Nasional. Namun demikian, peningkatan IPM Provinsi NTB dan NTT dalam rentang waktu tersebut (4,65 dan 3,92 poin) mengungguli peningkatan IPM Provinsi Bali dan tingkat nasional (3,65 dan 3,55 poin). Hal tersebut berdampak positif terhadap berkurangnya *gap* IPM di NTB dan NTT. Ke depannya, program pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan diharapkan dapat mendorong kedua provinsi tersebut untuk semakin mengejar ketertinggalannya dari IPM tingkat Nasional.

IPM Regional Bali Nusra Tahun 2010 s.d. 2016
Sumber: BPS

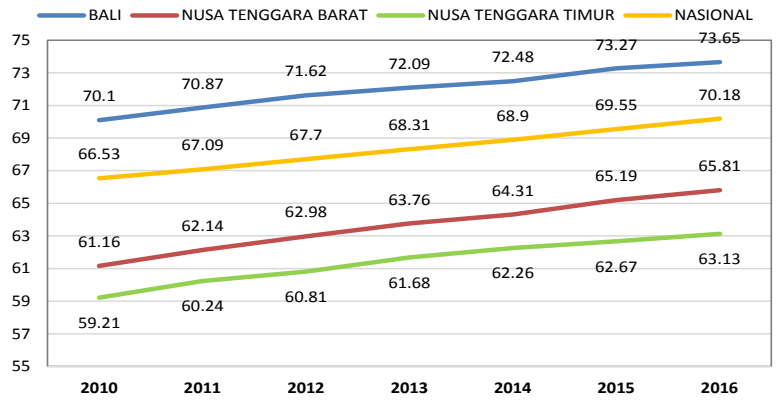

Rasio Gini

Untuk regional Bali Nusra, secara umum ukuran ketimpangan berada pada level tengah yaitu 0,3 < koefisien Gini < 0,5 dimana ketimpangan pendapatan masing-masing provinsi mencatatkan capaian yang lebih baik dibandingkan tingkat nasional. Dilihat dari perkembangan selama periode tahun 2011 s.d. 2016, Provinsi Bali mencatatkan penurunan kesenjangan tertinggi (0,04 poin) di saat penurunan di Provinsi NTT dan tingkat nasional hanya mencapai 0,02 dan 0,01 poin. Di sisi lain, Provinsi NTB mengalami *stagnasi* dalam perkembangan pemerataan pendapatan sebagaimana tecermin dari rasio gini tahun 2016 yang sama dengan rasio Gini tahun 2011.

Rasio Gini Regional Bali Nusra Tahun 2011 s.d. 2016
Sumber: BPS

Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bali	0,41	0,43	0,40	0,42	0,38	0,37
NTB	0,36	0,35	0,36	0,38	0,37	0,36
NTT	0,36	0,36	0,35	0,36	0,34	0,34
Nasional	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40

Ketenagakerjaan

Sejalan dengan struktur ekonominya, penyumbang utama penyerapan tenaga kerja regional Bali Nusra adalah sektor pertanian, disusul oleh sektor perdagangan (implikasi dari tingginya kontribusi pariwisata). Sejalan dengan dominasi sektor pertanian, jenis pekerja berdasarkan pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan rendah (SD).

Di Bali, jumlah angkatan kerja (Agustus 2016) mencapai 2.463.039 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) peringkat pertama terendah di Indonesia (1,89%), didukung oleh program penciptaan lapangan pekerjaan Pemda setempat seperti sistem pertanian terintegrasi (Simantri), beasiswa miskin, dan gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbangsadu). Dua sektor utama penyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan (30,16%) dan sektor pertanian (20,95%).

Jumlah angkatan kerja NTB (Agustus 2016) mencapai 2.464.331 jiwa dengan TPT 3,94%, peringkat 11 terbaik nasional. Sektor utama penyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian (38,90%), disusul oleh sektor perdagangan (19,39%). Pekerja didominasi oleh lulusan SD kebawah yang mencapai 47,34%. Provinsi NTT memiliki angkatan kerja sebanyak 2.353.648 jiwa (Agustus 2016) dengan TPT peringkat 6 terbaik nasional (3,25%). Penyerap tenaga kerja utama di NTT adalah sektor pertanian (53%).

Perkembangan TPT di regional Bali Nusra menunjukkan tren positif di tahun 2016 sebagaimana tercermin dari TPT Provinsi Bali, NTB, dan NTT yang masing-masing menurun 10, 175, dan 58 basis poin. Selain itu, TPT di ketiga provinsi tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan TPT Nasional (5,61%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Regional Bali Nusra Tahun 2015 dan 2016
(dalam %)
Sumber: BPS

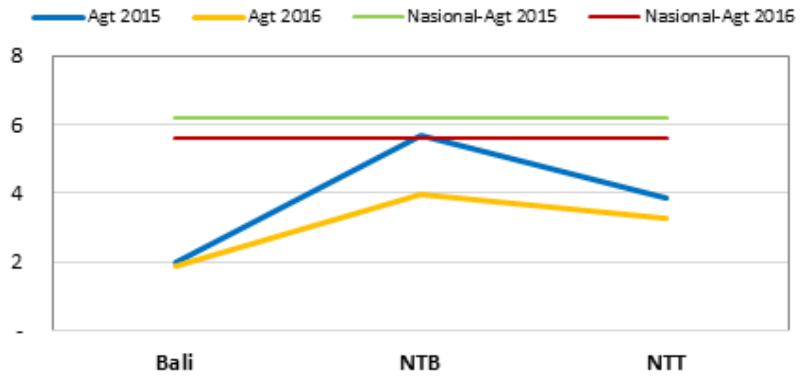

Kemiskinan

Untuk regional Bali Nusra secara umum masih digolongkan dalam kawasan dengan tingkat kemiskinan yang cukup besar dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dengan pengecualian untuk wilayah Bali. Persentase penduduk miskin di Bali (September 2016) adalah 4,15% (terbaik kedua nasional) dengan jumlah penduduk miskin 174,94 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional yang berada pada level 10,7%.

Persentase penduduk miskin di wilayah NTB tahun 2016 adalah 16,02% dengan jumlah penduduk miskin 786,58 ribu jiwa. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah NTB berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara perlahan walaupun masih berada diatas tingkat kemiskinan secara nasional.

Persentase penduduk miskin di NTT tahun 2016 adalah 22,01% (peringkat 32 nasional). Angka tersebut mencerminkan terjadinya kenaikan persentase penduduk miskin sebesar 160 basis poin dibandingkan tahun 2012, sementara dalam periode waktu yang sama persentase penduduk miskin nasional menurun 96 basis poin. Jumlah penduduk miskin tahun 2015 mencapai 1.150,08 ribu jiwa, meningkat 151,63 ribu dibandingkan tahun 2012.

Persentase Penduduk Miskin Regional Bali Nusra Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

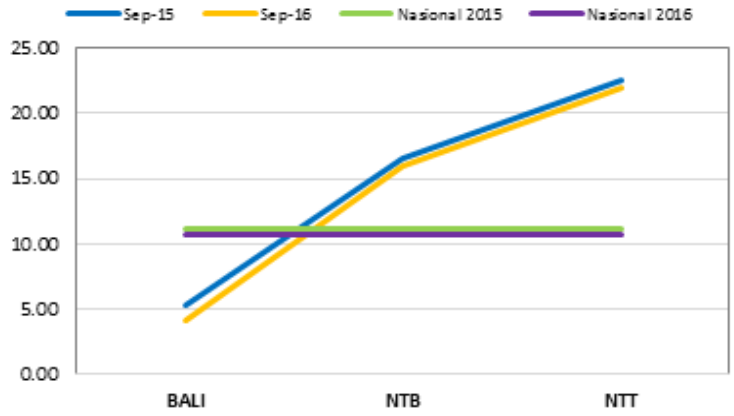

Pelaksanaan APBN

Untuk regional Bali Nusra, realisasi pendapatan dan belanja APBN terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2016, pendapatan negara meningkat sebesar Rp1.154,33 miliar atau 7,17% dibandingkan tahun 2015, sedangkan belanja negara meningkat sebesar Rp1,875,32 miliar atau 2,83% dibandingkan tahun 2015. Peningkatan pendapatan negara yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (5,89%) mengindikasikan optimalisasi penggalian penerimaan tahun 2016 berjalan cukup efektif, sedangkan peningkatan belanja negara yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran cukup efektif dalam menciptakan efek multiplier bagi perekonomian.

Peningkatan realisasi pendapatan negara didorong oleh kenaikan penerimaan perpajakan (Rp789 miliar) yang menyumbang 79,84% terhadap pertumbuhan pendapatan negara tahun 2016. Di sisi lain, kebijakan penguatan desentralisasi fiskal menyebabkan lonjakan dana transfer hingga Rp6.801,34 miliar atau 17,54% dibandingkan tahun 2015. Tingginya lonjakan realisasi dana transfer mampu menutupi penurunan belanja pemerintah pusat sebesar Rp4.926,02 miliar atau-17,95% dibandingkan tahun 2015 sehingga belanja negara di regional Bali Nusra tahun 2016 tetap meningkat.

Realisasi APBN Regional Bali Nusra Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN, data diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	14.918,00	14.208,01	95,24	18.831,61	14.997,01	79,84
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.941,85	1.898,20	97,75	1.585,09	2.263,53	142,80
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara	16.859,85	16.106,21	95,53	20.416,70	17.436,27	85,40
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	29.753,30	27.436,89	92,21	25.520,55	22.510,87	88,21
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	39.148,85	38.783,80	99,07	49.678,67	45.585,14	91,76
Jumlah Belanja Negara	68.902,15	66.220,70	96,11	75.199,22	68.096,01	90,55

Dilihat dari klasifikasi fungsi, belanja APBN tahun 2016 untuk regional Bali Nusra diprioritaskan untuk tiga fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan umum, ekonomi dan pendidikan. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran prioritas utama dari fungsi ekonomi di tahun 2015 menjadi fungsi pelayanan umum di tahun 2016. Pergeseran tersebut tercermin pula dari penurunan realisasi fungsi ekonomi hingga Rp3.987,39 miliar atau (44,90%) dibandingkan tahun sebelumnya. Pergeseran tersebut merupakan implikasi dari kebijakan penguatan desentralisasi fiskal dimana sebagian proyek infrastruktur dialihkan ke Pemda dengan cara meningkatkan porsi dana transfer dan mewajibkan Pemda untuk meningkatkan belanja infrastruktur baik secara spesifik melalui DAK Fisik maupun berupa earmarking dari dana transfer yang bersifat umum.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Regional Bali Nusra 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Kode	Fungsi	2015	2016
01	Pelayanan Umum	6.879,43	6.839,02
02	Pertahanan	1.457,53	1.606,84
03	Ketertiban dan Keamanan	2.031,01	2.217,25
04	Ekonomi	8.880,54	4.893,15
05	Lingkungan Hidup	672,43	552,41
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	1.056,31	714,01
07	Kesehatan	1.195,63	375,80
08	Pariwisata dan Budaya	84,03	120,31
09	Agama	287,85	216,70
10	Pendidikan	4.744,85	4.878,59
11	Perlindungan Sosial	151,39	96,80

Serupa dengan penurunan fungsi ekonomi, belanja modal yang dapat merepresentasikan sebagian belanja infrastruktur juga mengalami penurunan sebesar Rp4.805,09 miliar sebagai implikasi dari penguatan desentralisasi fiskal. Di sisi lain, realisasi belanja modal APBD regional Bali Nusa Tenggara hanya meningkat Rp3.227,20 miliar. Peningkatan belanja modal di APBD yang tidak dapat meng-offset penurunan di APBN mengindikasikan bahwa pengalihan belanja pemerintah pusat menjadi dana transfer ke daerah dan dana desa lebih banyak digunakan untuk belanja konsumtif daripada belanja produktif. Hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah memiliki peran krusial dalam pembangunan sektor pariwisata yang merupakan sektor unggulan regional Bali Nusa Tenggara.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Regional Bali Nusra Tahun 2015 dan 2016 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: DJPBN, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.244,63	8.174,28	99,15	9.064,65	8.759,84	96,64
Belanja Barang	8.649,71	7.449,49	86,12	9.838,98	8.334,01	84,70
Belanja Modal	11.023,24	10.131,62	91,91	6.522,48	5.326,54	81,66
Belanja Bantuan Sosial	1.835,71	1.681,50	91,60	94,43	90,48	95,83
Jumlah	29.753,30	27.436,89	92,21	25.520,55	22.510,87	88,21

Berdasarkan komponennya, kenaikan dana transfer tahun 2016 di regional Bali Nusra didorong oleh penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.219,89 miliar (32,64%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1.781,78 miliar (26,20%) , dan Dana Desa sebesar Rp1.630,40 miliar (23,97%) . Tingginya kenaikan pada DAU yang penggunaanya cenderung bersifat fleksibel menandakan perlunya pengawasan dan arahan kebijakan dari pemerintah pusat untuk menghindari penggunaan DAU tersebut secara berlebihan untuk belanja konsumtif. Selain itu, peningkatan Dana Desa yang

tinggi memberikan kesempatan bagi wilayah NTB dan NTT untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam rangka kemiskinan yang mana kedua provinsi tersebut sampai dengan tahun 2016 menduduk peringkat 27 dan 32 nasional dalam indiaktor tingkat kemiskinan.

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Regional Bali Nusra Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN dan DJPK, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	2.263,40	1.189,98	52,57	2.886,59	2.504,41	86,76
Dana Alokasi Umum	25.789,93	25.789,93	100,00	28.009,82	28.009,82	100,00
Dana Alokasi Khusus Fisik	4.745,26	4.248,23	89,53	7.544,44	6.030,01	79,93
Dana Otsus,Keistimewaan DIY,DID	-	-	-	424,77	424,77	100,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	6.350,26	6.255,57	98,51	7.869,93	5.685,61	72,24
Dana Desa	1.300,10	1.300,10	100,00	2.943,11	2.930,51	99,57
Jumlah	40.448,95	38.783,80	95,88	49.678,67	45.585,14	91,76

Badan Layanan Umum (BLU)

Pada tahun 2016, terdapat penambahan dua BLU di regional Bali Nusra sehingga jumlah BLU menjadi sembilan. Dua BLU yang ditetapkan di tahun 2016 adalah Rumah Sakit Bhayangkara Mataram di Provinsi NTB dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di Provinsi Bali di Bali. Dari sembilan BLU di regional Bali Nusra, empat merupakan BLU Kesehatan dan lima lainnya merupakan BLU Pendidikan. Berdasarkan lokasinya, lima BLU berada di Provinsi Bali, tiga di Provinsi NTB, dan satu di Provinsi NTT. Penerapan pola pengelolaan keuangan (PPK) BLU pada Satker memberikan fleksibilitas keuangan sehingga diharapkan layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Jumlah Satker BLU Menurut Layanan Regional Bali Nusra Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN

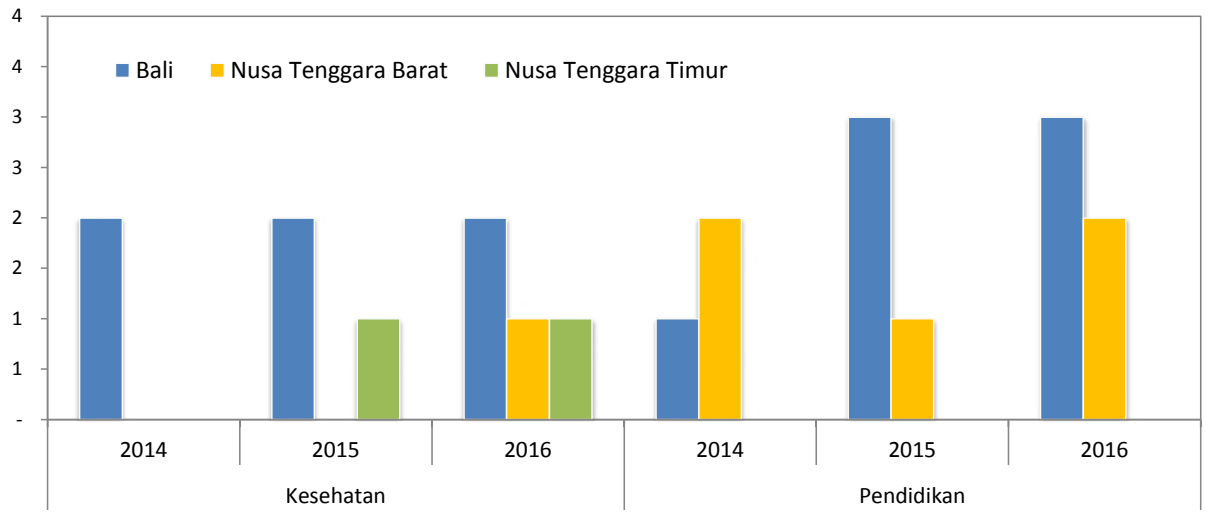

Pelaksanaan APBD

Sejalan dengan kebijakan penguatan desentralisasi fiskal realisasi pendapatan APBD regional Bali Nusra didominasi oleh pendapatan transfer yang berporsi 73,11% terhadap total pendapatan. Porsi tersebut meningkat 1.156 basis poin dibandingkan porsi tahun sebelumnya (61,54%). Provinsi Bali dengan dukungan PAD dari sektor pariwisata yang besar memiliki kemandirian keuangan terbaik di tingkat regional dengan persentase PAD 40,75% terhadap total pendapatan.

Dari sisi pengeluaran, perkembangan struktur belanja tahun 2016 menunjukkan dampak dari kebijakan pemrioritasan belanja produktif sebagaimana tercermin dari realisasi belanja modal yang meningkat 31,51% menjadi Rp13,47 triliun dan porsinya yang meningkat 199 basis poin menjadi 21,05% terhadap total belanja Pemda

Realisasi APBD Regional Bali Nusra Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	12.444,53	12.955,49	104,11%	13.853,21	13.476,42	97,28%
Pendapatan Transfer	36.337,44	33.538,97	92,30%	46.594,50	45.171,46	96,95%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.573,16	8.001,05	143,56%	5.307,95	3.138,61	59,13%
Jumlah Pendapatan	54.355,12	54.495,51	100,26%	65.755,66	61.786,49	93,96%
Belanja						
Belanja Pegawai	24.465,56	22.333,78	91,29%	27,031,80	24.853,59	91,94%
Belanja Modal	10.739,09	10.240,22	95,35%	13.784,15	13.467,42	97,70%
Belanja Lain	30.600,52	21.157,68	69,14%	25.997,90	25.669,90	98,74%
Jumlah Belanja	65.805,17	53.731,68	81,65%	66.813,84	63.990,90	95,77%
Surplus/Defisit	(11.450,05)	763,84	-6,67%	(1.058,18)	(2.204,42)	208,32%

Secara umum, hampir seluruh Pemda di regional Bali Nusra mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat karena kecilnya PAD, kecuali untuk beberapa Pemda saja. Untuk wilayah Bali pengecualian meliputi Pemprov Bali dan Pemkab/kota Badung, Denpasar dan Gianyar dengan rasio kemandirian keuangan daerah (PAD/total pendapatan) masing-masing 54,5%, 69,0%, 36,1%, dan 42,0%. Di wilayah NTB, Pemprov NTB dan Pemkot Mataram memiliki rasio PAD terhadap Dana Transfer tertinggi (62% dan 27%) yang menandakan bahwa ketergantungannya terhadap transfer dari pusat lebih baik. Untuk wilayah NTT, PAD tertinggi dihasilkan Kota Kupang (Rp136 miliar), disusul oleh Kabupaten Manggarai Barat (Rp91 miliar) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) (Rp76 miliar).

Sektor Unggulan Regional

Dilihat dari sudut pandang sektoral, perekonomian regional Bali Nusra memiliki karakteristik wilayah yang relatif homogen dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan.

Pertanian

Pertanian merupakan sektor terbesar pada regional Bali Nusa Tenggara sebagaimana tercermin dari kontribusinya terhadap PDRB (19,7%). Sejalan dengan itu, sektor pertanian menyerap paling banyak tenaga kerja di NTT (61%) dan NTB (39%), serta terbanyak kedua di Bali (22%). Secara umum, padi merupakan komoditas utama/unggulan pertanian pada regional Bali Nusra diikuti dengan komoditas jagung.

Untuk wilayah Bali, komoditas utama sektor pertanian adalah padi. Daerah Tabanan dengan lahan yang luas dan subur menjadikannya sebagai daerah lumbung beras utama diikuti Buleleng dan Denpasar. Sayangnya, bila dilihat dari komposisi petani, sekitar 2/3 rumah tangga usaha pertanian di Bali adalah petani kecil dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar (survei BPS 2013). Namun demikian, produksi padi di bali terus menurun dari tahun 2013 dengan penurunan tertinggi terjadi di tahun 2014 (25.000 ton padi) yang salah satu penyebabnya adalah konversi lahan sawah menjadi tembakau, jagung dan semangka. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanian di Bali mulai terdiversifikasi dan berpotensi untuk menyokong nilai tambah sektor pertanian di Bali dalam jangka panjang.

Sementara itu, wilayah NTB memiliki beberapa keunggulan sektor pertanian yang dapat dibagi ke dalam tiga sub sektor yang meliputi sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, dan sub sektor peternakan. Pada sub sektor tanaman pangan, komoditas unggulan meliputi padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Pemerintah sendiri telah mencanangkan NTB sebagai lumbung pangan jagung (Sumbawa, Bima, dan Dompu), dan sebagai sentra produksi kedelai terbesar ke-3 (setelah jawa timur dan jawa tengah). Untuk komoditas padi, produksi gabah kering giling (GKG) tahun 2016 menurun sebesar 322 ribu ton akibat banjir yang terjadi di beberapa wilayah di NTB. Namun demikian, produksi beras di NTB tetap mengalami surplus sebesar 110 ribu ton. Untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, di tahun 2016, Kementerian Pertanian melaksanakan program perluasan sawah sebesar 11.537 Ha di NTB dengan didukung anggaran sebesar Rp1,91 triliun.

Pada sub sektor perkebunan, NTB memiliki komoditas unggulan berupa tembakau dimana produksinya merupakan yang terbesar kedua di Indonesia dan menyumbang 23,56% terhadap prduksi nasional tahun 2015. Untuk sub sektor peternakan, NTB dicanangkan sebagai pusat pengembangan sentra peternakan rakyat dengan populasi Sapi tahun 2016 sebesar 1.100.743 ekor, tertinggi keempat nasional.

Didukung dengan corak wilayah agraris, NTT mendapatkan kontribusi sebesar 28.89% pada PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur dari sektor pertanian. Kontribusi tersebut dapat ditingkatkan lagi melalui upaya percetakan sawah baru, seluas 4.375 Ha, yang tersebar pada 15 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencetakan sawah terbesar dialokasikan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai dengan luas sawah masing-masing sebesar 500 Ha. Selain pencetakan sawah baru, upaya kedua adalah dengan peningkatan prasarana pertanian. NTT mengupayakan pembangunan bendungan yang tersebar di beberapa wilayah. Diantaranya dilaksanakan di Kabupaten Kupang (Bendungan Raknamo), Kabupaten Belu (Bendungan Rotiklot), dan Kabupaten Sikka (Bendungan Napun Gete). Dengan dibangunnya bendungan-bendungan ini maka diharapkan sektor pertanian akan memberikan kontribusi yang lebih tinggi pada PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur dan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanianl akan lebih baik lagi dari tahun 2016 (2,23%).

Dari sub sektor peternakan, NTT juga didukung dengan adanya peternakan kuda berkapasitas 113.145 ekor (tahun 2015), atau 25,9% dari total populasi kuda nasional. Jumlah ini merupakan yang tertinggi kedua setelah Sulawesi Selatan. Selain itu, NTT juga didukung oleh peternakan sapi dengan jumlah populasi sapi potong mencapai 902.326 ekor per tahun 2015, atau urutan kelima tertinggi secara nasional.

Pariwisata

Regional Bali Nusra memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, terutama dengan keindahan alam dan keragaman budayanya. Pariwisata sudah sangat berkembang di wilayah Bali, dan cukup berkembang di wilayah NTB, namun masih perlu banyak peningkatan di wilayah NTT. Pengembangan sektor pariwisata akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah mengingat potensinya yang besar sekaligus dapat menggerakkan sektor terkait yang menyediakan berbagai kebutuhan bagi wisatawan seperti bahan makanan dan suvenir. Di tahun 2016, pemerintah sendiri telah melaksanakan program yang mendukung pariwisata di regional Bali Nusra seperti promosi wisata ke tiongkok, penetapan Mandalika (NTB) dan Labuan Bajo (NTT) sebagai destinasi unggulan pariwisata, *branding* "pesona Lombok Sumbawa" dan peningkatan kapasitas Lombok International Airport (NTB) dan Bandar Udara Komodo (NTT).

Sebagai daerah tujuan wisata skala internasional, Bali memenangkan berbagai penghargaan di tahun 2016. Sejalan dengan capaian tersebut, sektor pariwisata di Bali juga menyumbang signifikan terhadap PDRB (22,82%) dan terhadap penyerapan lapangan kerja (30,16%) tahun 2016. Kedatangan wisman pada periode tahun 2016 mencapai kedatangan 4.927.937 kunjungan, dengan tingkat pertumbuhan 23,14% dibandingkan tahun 2015. Peningkatan kunjungan wisatawan tiongkok dari 688.469 orang menjadi 990.771 orang menjadi salah satu pendorong peningkatan tersebut.

Keberagaman jenis pariwisata baik berupa wisata alam dengan potensi gunung dan pantainya beserta wisata lain seperti sejarah, budaya, dan kuliner menjadikan NTB sebagai destinasi wisata yang menjanjikan. Sektor pariwisata sendiri menyumbang 2,2% terhadap PDRB NTB tahun 2016. Perkembangan jumlah wisatawan ke NTB, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman), mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, wisnus mengalami peningkatan kunjungan sejumlah 343.036 wisnus, sehingga jumlah kunjungan menjadi 1.404.328 kunjungan.

Sedangkan untuk wisman mengalami peningkatan kunjungan sejumlah 540.875 wisman, sehingga jumlah kunjungan menjadi 1.690.109 kunjungan. Jumlah peningkatan tersebut sekitar 39,99% dari tahun 2015, dan telah melampaui target tiga juta wisatawan di tahun 2016. Perkembangan yang positif tersebut juga tercermin dari pertumbuhan sektor pariwisata yang mencapai 7,7%
NTT mempunyai daerah tujuan wisata yang bertaraf internasional seperti Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu dan Desa Adat Wae Rebo sehingga mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Secara porsi, sektor pariwisata baru menyumbang 0,7% terhadap PDRB NTT. Namun demikian, dukungan infrastruktur dan promosi dari pemerintah telah tercermin dalam pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata yang mencapai 14,61% di tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak potensi NTT yang dapat dikembangkan dengan dukungan yang tepat.

Tantangan Fiskal Regional

Infrastruktur dan Sarana Transportasi

Sebagai wilayah dengan potensi pariwisata yang besar, konektivitas dari pintu kedatangan ke destinasi wisata yang efisien dan nyaman bagi wisatawan merupakan faktor yang krusial untuk mensukseskan pemanfaatan potensi tersebut. Pemerintah sendiri telah mengarahkan kebijakan di regional Bali Nusra untuk mendukung konektivitas seperti dengan peningkatan kapasitas bandara di NTB dan NTT, pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Trans Sarbagita, pembangunan Jalan Di atas Pantai (JDP), dan shortcut ruas jalan. Namun demikian, masing-masing Provinsi memiliki permasalahan yang masih perlu diatasi seperti kemacetan di wilayah Bali Selatan akibat tingginya volume kendaraan pribadi, dan kurangnya konektivitas destinasi wisata di NTB dan NTT.

Infrastruktur Utilities (Listrik dan Air Bersih)

Serupa dengan konektivitas wilayah, infrastruktur listrik dan air bersih juga krusial untuk mengembangkan wilayah pariwisata secara berkelanjutan. Kurangnya infrastruktur listrik di regional Bali Nusra tercermin dari rasio elektrifikasi Bali, NTB, NTT yang baru mencapai 89,19%, 72,77%, dan 58,64% (Kementerian ESDM, 2015), sedangkan kurangnya infrastruktur air bersih tercermin dari akses air bersih NTB dan NTT yang baru mencapai 71,70% dan 62,72% (BPS, 2015). Di Bali, *Location Quotient* sektor Listrik, Gas dan Air Bersih juga baru mencapai 0,45 (jauh di bawah 1) yang mengindikasikan

bahwa pemenuhannya masih jauh dari cukup. Selain itu, 90% aktifitas perhotelan di Bali juga masih menggunakan air bawah tanah sehingga beresiko menyebabkan turunnya permukaan tanah.

Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia yang rendah di NTB dan NTT (peringkat 30 dan 32 nasional) berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (NTB 16,02%, peringkat 27 nasional dan NTT 22,01%, peringkat 32 nasional). Salah satu faktor inheren pada kedua Provinsi tersebut adalah banyaknya pertanian tradisional yang dikerjakan oleh SDM berpendidikan rendah sehingga upah yang diterima pun kecil. Hal ini menciptakan tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah dimana untuk menanggulanginya, pemerintah harus bisa mendorong perekonomian dan pendidikan secara simultan agar masyarakat miskin berpendidikan rendah yang menjadi sasaran utama bisa merasakan pertumbuhan yang inklusif.

Dependensi Dana Transfer

Seiring dengan bergulirnya kebijakan penguatan desentralisasi fiskal, dependensi terhadap dana transfer bagi Pemda menjadi tidak terelakkan. Hal tersebut tercermin dalam peningkatan porsi dana transfer terhadap total penerimaan Pemda regional Bali Nusra sebesar 1.156 basis poin dari 61,54% menjadi 73,11% di tahun 2016. Namun demikian, Regional Bali Nusra memiliki potensi Pariwisata yang dapat menjadi alternatif terbaik dalam meningkatkan PAD karena banyaknya komponen yang menjadi ranah penerimaan daerah seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan. Optimalisasi penerimaan dari sektor tersebut akan mengurangi dependensi terhadap dana transfer sehingga Pemda akan memiliki fleksibilitas lebih dalam mengalokasikan anggaran untuk program prioritas di wilayahnya. Akan tetapi, porsi anggaran pariwisata sendiri terindikasi masih perlu ditingkatkan sebagaimana tercermin dari realisasi fungsi pariwisata dan budaya yang hanya sebesar 0,53% dari total APBN di regional Bali Nusra tahun 2016.

Solusi Fiskal Regional

Solusi yang dapat diberikan atas tantangan fiskal regional tersebut diatas dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, APBN, APBD, dan sektor unggulan di regional Bali Nusra diantaranya sebagai berikut:

Pertama, terkait infrastruktur dan sarana transportasi, Pemerintah Pusat perlu membuat masterplan konektivitas antar Provinsi di Regional Bali Nusra dan Pemerintah Daerah perlu membuat masterplan konektivitas dalam wilayah Provinsinya masing-masing. Masterplan konektivitas tersebut sebaiknya memprioritaskan akses dari pintu kedatangan menuju destinasi wisata yang efisien dan nyaman bagi wisatawan.

Untuk wilayah Bali, sarana transportasi yang dapat mengangkut penumpang secara massal seperti MRT dapat menjadi alternatif.

Dalam jangka menengah, solusi ini dapat mengurai permasalahan kemacetan dan dalam jangka panjang akan membantu menjamin kemudahan ekspansi daya tampung wisatawan.

Untuk wilayah NTB, ekspansi kapasitas Lombok International Airport (LIA) sebagai hub pariwisata regional Bali Nusra dapat menjadi alternatif. Hal ini didukung dengan kondisi *overcapacity* dan keterbatasan lahan yang ada di Bandara Ngurah Rai dan lokasi Pulau Lombok yang berada di tengah-tengah regional Bali Nusra. Wilayah NTT dapat memprioritaskan sarana transportasi laut ke wilayah Lombok dan Bali. Alternatif ini dipertimbangkan dengan mengingat jumlah penerbangan internasional di dua daerah tersebut yang sudah cukup banyak dan biaya yang dapat lebih efisien dibandingkan alternative pembangunan bandara berkapasitas besar di masing-masing wilayah.

Dari segi pembiayaan, penggunaan APBN sebaiknya dibantu dengan APBD wilayah untuk mempercepat pembangunan. Selain itu, pelibatan pihak Swasta dapat menjadi pertimbangan apabila komersialisasi bisa dilakukan dengan tarif yang sesuai bagi calon wisatawan.

Kedua, terkait infrastruktur utilities (listrik dan air bersih), pemerintah juga harus memprioritaskan anggarannya untuk segera memenuhi kebutuhan regional Bali Nusra. Urgensi tersebut timbul dari potensi wisatawan yang akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dunia dan peningkatan daya beli manusianya. Untuk ketenagalistrikan, sumber daya terbarukan seperti tenaga surya, gelombang laut, dan angin dapat menjadi alternatif.

Karakteristik sumber energi tersebut yang dapat dibangun secara off-grid dan karakteristik regional Bali Nusra yang bercirikan kepulauan sehingga membutuhkan biaya transmisi energi yang tidak sedikit dengan sistem pembangkit listrik konvensional (on grid) menjadi salah satu pertimbangannya. Urgensi penggunaan energi terbarukan juga lebih tinggi di regional Bali Nusra mengingat konservasi alam lebih memiliki nilai ekonomi di wilayah pariwisata. Pemerintah juga dapat mencanangkan distrik pembangkit listrik energi terbarukan tersebut menjadi destinasi pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan menarik wisman.

Untuk air bersih, Pemda harus menghindari kebijakan populis yang seringkali menyebabkan penetapan harga air bersih di bawah harga pasar yang berani dibayar masyarakat. Penggunaan harga pasar yang layak akan meningkatkan kesehatan keuangan PDAM masing-masing sehingga PDAM memiliki kapasitas untuk ekpansi dan meningkatkan akses air minum bagi masyarakat. Sebagai langkah awal, Pemda dapat mempertimbangkan untuk menambah penyertaan modal di PDAM atau menanggarkan pembangunan waduk untuk kemudian dihibahkan kepada PDAM.

Ketiga, terkait pembangunan manusia, Pemerintah hendaknya hendaknya mendorong sektor pertanian untuk melakukan industrialisasi agar mengurangi praktek pertanian konvensional

yang tingkat produktifitasnya relatif rendah. Pemerintah dapat menyediakan bantuan atau subsidi untuk peralatan dan mesin pertanian berskala industry. Hal tersebut akan menciptakan pergeseran struktur lapangan kerja yang nantinya perlu diarahkan ke sektor pariwisata. Secara simultan, pemerintah harus segera menyediakan fasilitas pendidikan berupa sekolah tinggi pariwisata dan sekolah tinggi pertanian untuk menyerap pergeseran struktur lapangan kerja tersebut. Dalam jangka panjang, strategi fiskal ini dapat sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan kualitas manusia dan pengentasan kemiskinan.

Keempat, terkait dependensi dana transfer, Pemda perlu lebih fokus dalam mendorong sektor pariwisata yang berpotensi tinggi dalam menghasilkan PAD melalui pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, maupun melalui dampak multiplier tambahannya. Selain alternatif dalam solusi fiskal pertama, kedua, dan ketiga, Pemerintah perlu meningkatkan anggaran pariwisata yang terindikasi masih kecil porsinya. Peningkatan porsi anggaran ini sebaiknya difokuskan untuk mengintegrasikan pariwisata regional Bali Nusra berikut dengan promosinya.

Beberapa program yang layak menjadi alternatif antara lain adalah program Kementerian Pariwisata untuk mendorong agen-agen travel agar membuat paket-paket tur lintas Provinsi dalam regional Bali Nusra. Selain itu, Dinas-dinas Pariwisata di lingkup Bali Nusra dapat mengintegrasikan anggaran promosinya untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan promosi sehingga penggunaan anggarannya akan lebih efektif dan efisien dalam menarik wisatawan. Kementerian Perhubungan juga perlu memprioritaskan anggaranya dalam mengintegrasikan konektifitas regional Bali Nusra sebagaimana dijabarkan dalam solusi fiskal pertama.

Regional Maluku Papua

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi regional Maluku Papua sebesar 7,45% atau meningkat sebesar 1,10% dibanding tahun 2015. Pertumbuhan positif tersebut didorong oleh peningkatan yang signifikan dari sektor pertambangan dan penggalian. Inflasi regional pada tahun 2016 relatif menurun dibanding inflasi tahun 2015 namun masih berada di atas inflasi nasional (3,02%) kecuali inflasi Provinsi Maluku Utara (1,91%). Indikator kesejahteraan masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, seperti indikasi rasio gini pada tahun 2016 relatif tetap. Persentase penduduk miskin regional Maluku Papua masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional (10,70%) kecuali pada provinsi Maluku Utara (6,41%). Sementara itu, IPM regional Maluku Papua tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 namun tetap masih di bawah IPM nasional. Untuk TPT tahun 2016 regional Maluku Papua cenderung menurun dibandingkan tahun 2015, dan nilainya berada di bawah TPT nasional untuk TPT Provinsi Maluku Utara dan Papua, dan berada di atas TPT nasional untuk TPT Provinsi Maluku dan Papua Barat.

Anggaran belanja negara pada regional Maluku Papua pada tahun 2016 sebesar Rp121,36 triliun atau meningkat sebesar 7,19% dibanding tahun sebelumnya. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2016 sebesar Rp33,90 triliun (menurun 16,30%) dengan realisasi sebesar 87,92% dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp81,94 triliun (meningkat 12,68%) dengan realisasi sebesar 93,69%. Pagu belanja modal tahun 2016 sebesar Rp13,67 triliun (turun sebesar 38,87% dibanding tahun sebelumnya) dan teralisasi sebesar 90,56%. Pada APBD Regional Maluku Papua tahun 2016, target PAD turun 15,66% dengan realisasi mencapai 150,42% dan pagu meningkat 23,28% dengan realisasi sebesar 81,08%. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2016 regional Maluku Papua tidak menunjukkan perbaikan signifikan, dengan indikasi bahwa rasio belanja pegawai meningkat dan rasio kemandirian keuangan daerah hanya meningkat tipis dibanding tahun sebelumnya.

Makroekonomi Regional Maluku Papua

Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi regional Maluku Papua cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Papua mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 7,47% pada tahun 2015 menjadi 9,21% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua masih didominasi lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 6,52% di tahun 2016. Pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian terutama terjadi pada Triwulan IV tahun 2016 karena produksi konsentrat tembaga dan emas yang tinggi pada periode tersebut. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi

Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 0,34%, yaitu dari 6,10% pada tahun 2015 menjadi 5,77% pada tahun 2016. Perlambatan ekonomi Provinsi Maluku Utara dipicu oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 1,57% yang disebabkan oleh penurunan hasil tambang komoditas emas akibat runtuhnya terowongan bawah tanah pada salah satu lokasi pertambangan.

Pertumbuhan Ekonomi Regional Maluku Papua Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

Wilayah	2015	2016
Maluku	5,48%	5,76%
Maluku utara	6,10%	5,77%
Papua Barat	4,15%	4,52%
Papua	7,47%	9,21%

Berdasarkan data PDRB dari sisi permintaan Tahun 2016, dapat kita cermati bahwa Konsumsi Rumah Tangga, PMTB, dan Konsumsi Pemerintah merupakan pendukung utama PDRB regional Maluku Papua. Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga disebabkan beberapa faktor seperti dipengaruhi oleh membaiknya penghasilan masyarakat terkait pembayaran gaji 13 dan pembayaran THR para pegawai PNS maupun non PNS serta adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi. Laju konsumsi pemerintah dan PMTB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pelaksanaan proyek-proyek MP3EI, proyek multi years pemerintah, pembangunan dan perbaikan fasilitas bandara

dan pelabuhan, pembangunan sarana irigasi, serta proyek Trans Maluku dan sarana pendukungnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Maluku Papua Tahun 2016
Sumber: BPS

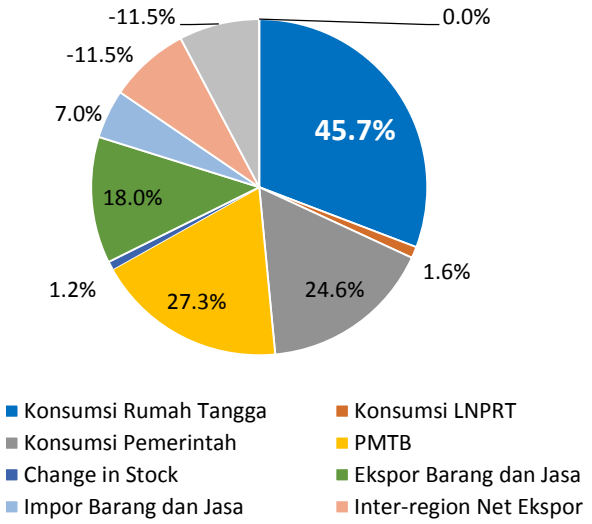

Apabila dibandingkan tahun 2015, laju pertumbuhan PDRB pada regional ini paling tinggi terdapat pada sektor impor barang dan jasa (20,38%) di mana setahun sebelumnya laju pertumbuhan sektor ini mencatatkan angka minus. Sejalan dengan komposisi yang cukup rendah pada PDRB sisi permintaan, inter-region net ekspor barang/jasa mencatatkan laju negatif pada tahun 2016, sebesar-32,60%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Permintaan, Regional Maluku Papua Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Konsumsi Rumah Tangga	6,03%	5,91%
Konsumsi LNPRT	4,59%	6,52%
Konsumsi Pemerintah	6,57%	5,61%
PMTB	12,32%	8,66%
Change in Stock	12,80%	8,91%
Ekspor Barang dan Jasa	22,87%	-5,81%
Impor Barang dan Jasa	-11,92%	20,38%
Inter-region Net Ekspor	89,22%	-32,60%

Dilihat dari sisi penawaran, PDRB Regional Maluku Papua sebagian besar ditopang oleh komponen pertambangan dan penggalian (25,5%) dan komponen pertanian, kehutanan, dan perikanan (14,5%). Sebaliknya, pengadaan listrik dan gas dan komponen pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang kontribusi terhadap PDRB relatif kecil (1,5%) namun memiliki laju pertumbuhan tertinggi untuk tahun 2016.

Komposisi PDRB ADHB dari Sisi Penawaran, Regional Maluku Papua Tahun 2016

Sumber: BPS

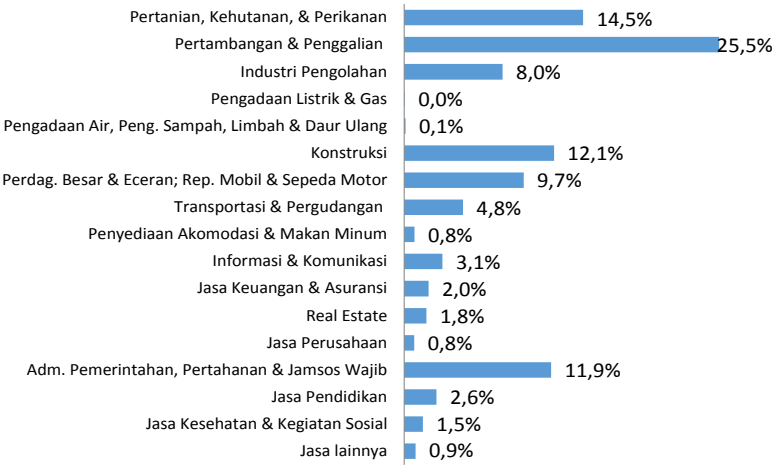

Laju pertumbuhan ekonomi regional Maluku Papua tahun 2016 sebesar 7,45%, sedangkan untuk masing-masing komponen dari sisi penawaran, laju pertumbuhannya merata pada masing-masing komponen. Komponen pengadaan listrik dan gas memilki laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu 11,43%, diikuti komponen Pertambangan dan Penggalian dengan laju 10,53%. Untuk komponen lainnya laju pertumbuhan 2% s.d. 8%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Penawaran, Regional Maluku Papua Tahun 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Uraian	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,83%	2,99%
Pertambangan dan Penggalian	5,71%	10,53%
Industri Pengolahan	2,51%	4,25%
Pengadaan Listrik dan Gas	4,22%	11,43%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,91%	3,84%
Konstruksi	10,02%	8,73%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,81%	7,08%
Transportasi dan Pergudangan	8,51%	7,62%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,24%	5,21%
Informasi dan Komunikasi	6,40%	5,37%
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,93%	7,11%
Real Estate	6,05%	7,12%
Jasa Perusahaan	4,03%	5,26%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,64%	7,89%
Jasa Pendidikan	7,37%	7,25%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,28%	7,23%
Jasa lainnya	6,62%	6,53%

Inflasi

Pada umumnya tingkat inflasi tahun 2016 turun dibandingkan tahun 2015 dan 2014. Pada tahun 2016 hampir seluruh provinsi di Maluku Papua memiliki tingkat inflasi yang lebih tinggi dari tingkat nasional. Hanya Maluku Utara yang tingkat inflasinya di bawah angka inflasi nasional, yaitu di angka 1,91% yang merupakan terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Rendahnya inflasi Maluku Utara salah satunya dipicu oleh perlambatan perekonomian Maluku Utara, dimana Maluku Utara merupakan satu satunya provinsi di Regional Maluku Utara yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2016.

Tingkat Inflasi Regional Maluku Papua Tahun 2014 s.d. 2016 (dalam %)
Sumber: BPS

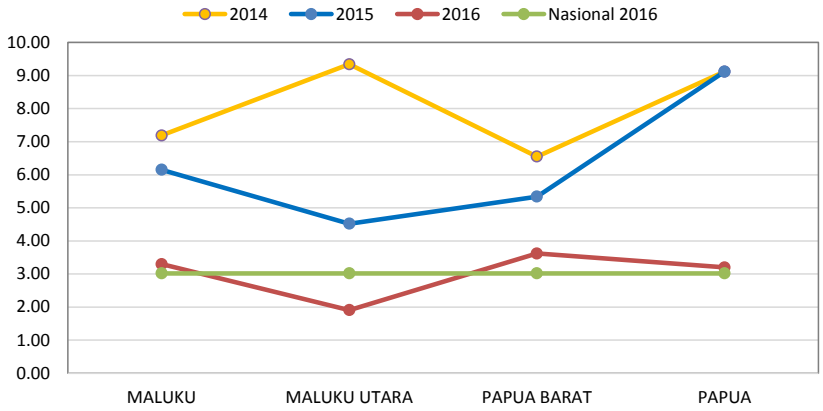

Indikator Kesejahteraan

Indeks Pembangunan Manusia

Dari sisi capaian IPM terlihat tidak terdapat perubahan yang signifikan. Mayoritas provinsi Regional Maluku Papua pada tahun 2016 berada dalam capaian IPM sedang dengan capaian tertinggi adalah Provinsi Maluku sebesar 67,60. Sedangkan IPM terendah adalah Provinsi Papua sebesar 58,05 dan tergolong ke dalam capaian IPM rendah. Secara umum, IPM seluruh provinsi di regional Maluku Papua mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Indikasi ini memberikan informasi semakin meningkatnya kualitas manusia di regional Maluku dan Papua dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Hal yang perlu menjadi perhatian bahwa meskipun angka IPM dari tahun ke tahun naik, namun sejak tahun 2010 sampai tahun 2016 belum pernah ada provinsi di regional Maluku dan Papua yang nilai IPMnya lebih tinggi dari nasional, sehingga butuh upaya yang kuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan Indonesia timur terutama di Provinsi Papua yang masih tergolong dalam IPM rendah.

IPM Regional Maluku Papua dan Nasional Tahun 2010 s.d. 2016
Sumber: BPS

Wilayah	TAHUN						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Maluku	64,27	64,75	65,43	66,09	66,74	67,05	67,60
Malut	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18	65,91	66,63
Papua	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05
Papua Barat	56,60	56,90	60,30	60,91	61,28	61,73	66,21
Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18

Rasio Gini

Indeks rasio Gini tahun 2016 regional Maluku Papua relatif sama dengan indeks rasio gini pada tahun 2015, kecuali Provinsi Papua Barat yang mengalami penurunan ketimpangan yang cukup signifikan. Jika ditinjau per provinsi maka ketimpangan pendapatan terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara, sedangkan Provinsi Papua memiliki rasio Gini tertinggi. Seluruh regional Maluku dan Papua pada tahun 2016 memiliki angka ketimpangan yang lebih rendah daripada angka nasional. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hanya Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang memiliki angka ketimpangan lebih rendah daripada angka nasional yang mencerminkan penduduk golongan bawah mengalami kenaikan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan di seluruh Regional Maluku Papua.

Rasio Gini Regional Maluku Papua Tahun 2011 s.d. 2016
Sumber: BPS

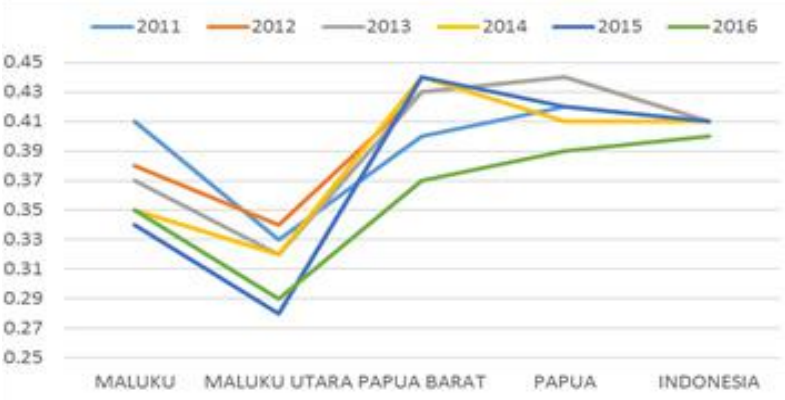

Ketenagakerjaan

Seiring dengan pertambahan penduduk maka peningkatan jumlah angkatan kerja juga terus meningkat pada Regional Maluku Papua, tingkat kebutuhan lapangan kerja juga semakin meningkat. Jumlah angkatan kerja tertinggi berada di Provinsi Papua, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua lebih besar dari gabungan 3 provinsi yang lain. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan paling banyak menyerap tenaga kerja di Regional Maluku Papua. Untuk dapat menyerap jumlah angkatan kerja tersebut perlu mengembangkan sektor-sektor usaha selain pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan tersebt, salah satunya adalah sektor jasa.

Jumlah Angkatan Kerja Regional Maluku Papua Tahun 2014 s.d. 2016
(dalam %)
Sumber: BPS

No	Wilayah	TAHUN		
		2014	2015	2016
1.	Maluku	672.304	727.259	743.149
2.	Maluku Utara	481.504	513.601	524.513
3.	Papua	1.675.113	1.741.945	1.722.162
4.	Papua Barat	398.424	413.635	434.817

Dalam periode dua tahun terakhir pengangguran terbuka pada Provinsi Maluku dan Papua Barat selalu berada di atas level nasional. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) regional Maluku Papua tahun 2016 tertinggi ada di Provinsi Papua Barat sebesar 7,46%. Penurunan TPT terbesar pada tahun 2016 berada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang dipicu oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor listrik, gas dan air. Pembangunan *smelter* yang masih berlangsung dan memasuki tahap pembangunan *power plant* di wilayah Maluku Utara mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja. Mulai bergeliatnya blok Masela dan adanya beberapa pembangkit listrik di Tulehu yang mulai dikerjakan kembali menjadi pendorong meningkatnya serapan tenaga kerja di wilayah Maluku sehingga TPT Provinsi Maluku mengalami penurunan dari tertinggi pada tahun 2015 sebesar 9,93% menjadi 7,05% pada tahun 2016.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Regional Maluku Papua Tahun 2015 dan 2016
(dalam %)
Sumber: BPS

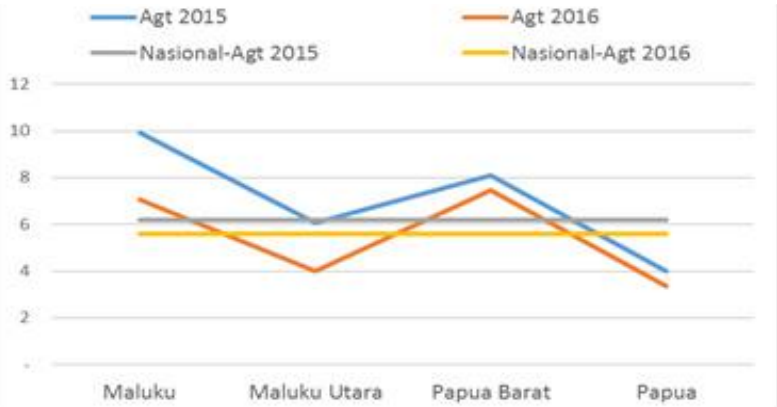

Kemiskinan

Angka persentase jumlah penduduk miskin pada bulan September tahun 2015 dan September 2016 menunjukkan bahwa rata-rata provinsi dalam regional ini mempunyai angka persentase jumlah penduduk miskin yang lebih tinggi dari angka nasional, kecuali Provinsi Maluku Utara yang persentase jumlah penduduk miskinnya cukup rendah yaitu 6,22% pada tahun 2015 dan 6,41% pada tahun 2016. Regional Maluku Papua, persentase jumlah penduduk miskin lebih banyak berada di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Terbatasnya akses penduduk daerah perdesaan ke dunia pendidikan dan pusat-pusat perekonomian menyebabkan penduduk daerah perdesaan lebih sulit untuk keluar dari garis kemiskinan dibandingkan daerah perkotaan. Dana Desa harus

dapat dimanfaatkan secara produktif untuk menciptakan pusat-pusat perekonomian di desa, sehingga dapat mendorong penduduk daerah perdesaan keluar dari garis kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan.

Persentase Penduduk Miskin Regional Maluku Papua Tahun 2015 dan 2016
Sumber: BPS

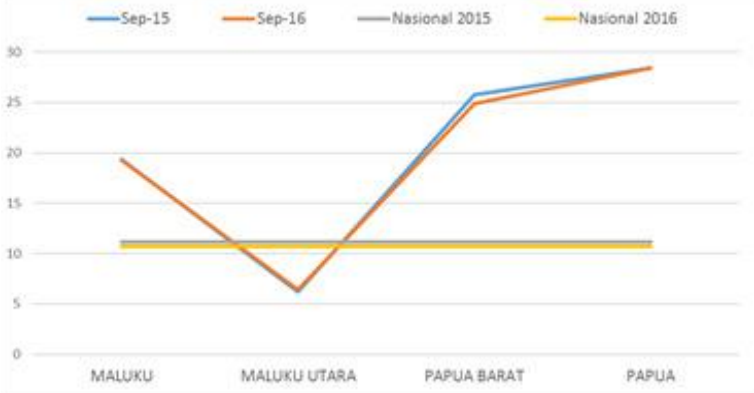

Pelaksanaan APBN

Berdasarkan data bahwa Pendapatan Perpajakan masih menjadi sumber utama Pendapatan Negara di Regional Maluku Papua dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain. Realisasi Pendapatan Perpajakan memberikan kontribusi sekitar 91% dari seluruh realisasi Pendapatan Negara. PNBP hanya menyumbang 9% dari pendapatan regional Maluku Papua dan tidak ada penerimaan hibah pada tahun 2016.

Realisasi APBN Regional Maluku Papua Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN, DJPK data diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	10.024,45	13.581,78	135,49	15.767,39	13.168,31	83,52
Penerimaan Negara Bukan Pajak	363,43	565,55	155,62	1.244,55	1.412,69	113,50
Pendapatan Hibah	472,85	245,02	51,82	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara	10.860,73	14.392,35	132,52	17.011,94	14.580,90	85,71
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	40.495,88	37.443,38	92,46%	33.895,44	29.802,20	87,92%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	72.723,65	71.231,59	97,95%	87.460,33	81.942,20	93,69%
Jumlah Belanja Negara	113.219,53	108.674,96	95,99%	121.355,77	111.744,41	92,08%

Realisasi penerimaan perpajakan secara nasional tahun 2016 hanya tercapai sekitar 81% dan untuk di Regional Maluku Papua, realisasi perpajakan hanya mencapai angka 83,52% dari target yang ditetapkan. Jumlah ini secara persentase mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya meskipun secara nominal mengalami kenaikan.
Kinerja realisasi belanja pemerintah pusat di Regional Maluku Papua

pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya, tapi persentase realisasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional yang sebesar 90%. Penurunan jumlah realisasi anggaran ini merupakan akibat dari kebijakan penghematan anggaran pemerintah pada akhir tahun anggaran 2016.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Regional Maluku Papua 2015 dan 2016

Sumber: BPS

Kode	Fungsi	2015	2016
01	Pelayanan Umum	7.716,62	6.341,65
02	Pertahanan	2.575,41	2.863,66
03	Ketertiban dan Keamanan	1.953,28	2.372,66
04	Ekonomi	18.626,64	12.483,17
05	Lingkungan Hidup	689,20	649,18
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	1.797,62	1.612,83
07	Kesehatan	810,80	502,23
08	Pariwisata dan Budaya	15,83	10,94
09	Agama	225,13	210,98
10	Pendidikan	2.905,27	2.635,11
11	Perlindungan Sosial	128,49	119,51
00	Tidak ada fungsi	(0,92)	0,29
	Jumlah	37.443,38	29.802,20

Jika dilihat dari data Pagu dan Realisasi APBN berdasarkan fungsi, maka fungsi Ekonomi dan Pelayanan Umum mempunyai porsi terbesar di Regional Maluku Papua. Masing-masing mempunyai porsi sebesar 41,9% dan 21,3%. Fungsi yang memiliki porsi paling kecil adalah fungsi Perlindungan Sosial dan fungsi Pariwisata dan Budaya.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah alokasi anggaran untuk Belanja Modal di Regional Maluku Papua. Meskipun demikian, alokasi Belanja Modal masih lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja yang lain. Porsi terbesar selanjutnya adalah belanja barang dan belanja pegawai. Tingkat realisasi untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja bantuan sosial cukup tinggi yaitu di atas 90%.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Regional Maluku Papua Tahun 2015 dan 2016 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: DJPBN, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	7.552,70	7.275,77	96,33%	8.189,86	7.895,36	96,40%
Belanja Barang	9.825,65	8.502,40	86,53%	11.846,05	9.354,39	78,97%
Belanja Modal	22.362,57	21.015,02	93,97%	13.670,45	12.379,67	90,56%
Belanja Bantuan Sosial	656,78	607,44	92,49%	83,81	79,85	95,28%
Belanja Lain-lain	98,17	42,75	43,55%	105,28	92,93	88,26%
Jumlah	40.495,88	37.443,38	92,46%	33.895,44	29.802,20	87,92%

Pagu belanja transfer ke daerah dan dana desa pemerintah pusat ke Regional Maluku Papua tahun 2016 naik sekitar Rp14 triliun dibandingkan periode sebelumnya, salah satu yang menyebabkan naiknya angka itu adalah adanya implementasi kebijakan transfer dana desa. Meskipun demikian, penyerapan dana transfer oleh pemerintah daerah wilayah ini pada tahun 2016 secara keseluruhan turun dari 97,11% pada tahun 2015 menjadi dari 93,69%.

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Regional Maluku Papua Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN dan DJPK, data diolah

Jenis Belanja	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	6.593,80	5.746,01	87,14%	8.054,10	7.221,20	89,66%
Dana Alokasi Umum	40.819,55	40.819,55	100,00%	43.983,93	43.983,93	100,00%
Dana Alokasi Khusus Fisik	10.577,95	9.524,93	90,05%	14.937,97	11.398,38	76,30%
Dana Otsus,Keistimewaan DIY,DID	10.057,76	10.057,76	100,00%	10.913,31	10.913,31	100,00%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2.792,04	2.575,72	92,25%	3.703,13	2.661,27	71,87%
Dana Desa	2.507,63	2.507,63	100,00%	5.867,90	5.764,12	98,23%
Jumlah	73.348,72	71.231,59	97,11%	87.460,33	81.942,20	93,69%

Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah satker BLU di Regional Maluku Papua masih sangat sedikit, total pada tahun 2015 hanya terdapat satu satker BLU layanan kesehatan di Provinsi Papua. Pada tahun 2016, jumlah satker BLU bertambah dua satker sehingga berjumlah tiga satker BLU, terdiri dari satu satker BLU layanan kesehatan dan dua satker BLU layanan pendidikan. Rumah Sakit Bhayangkara Polri sebagai Instansi Pemerintah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan-BLU layanan kesehatan sejak tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KMK.05/2015. Satker BLU layanan pendidikan terdiri dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura yang telah ditetapkan sebagai Instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan-BLU pada tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 739/KMK.05/2016 dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong yang menerapkan pola pengelolaan keuangan-BLU secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 735/KMK.05/2016.

Pelaksanaan APBD

Dominasi APBD Provinsi Papua terhadap provinsi lain di regional Maluku Papua cukup besar. Jumlah total pendapatan pada APBD Regional Maluku Papua pada tahun 2016 sebagian besar merupakan kontribusi dari APBD Provinsi Papua yaitu sebesar 57,20%. Sementara itu, kontribusi belanja APBD Provinsi Papua terhadap APBD regional Maluku Papua mencapai 53,32%.

Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan APBD regional Maluku Papua pada tahun 2016 sebesar Rp90.372,40 miliar, naik 23,94% dari tahun sebelumnya sebesar Rp72.917,94 miliar. Kenaikan realisasi pendapatan terbesar dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan transfer sebesar 38,04% dari tahun sebelumnya yang dipicu oleh kenaikan dana perimbangan. Selain itu kontribusi kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah sangat signifikan mencapai lima kali lipat dari tahun sebelumnya. Dari sisi komponen pendapatan, realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang mencapai 86,44% dari total pendapatan, sedangkan realisasi PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 6,12% lebih rendah dari kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mencapai 7,43%.

Tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan mengindikasikan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Dari sisi kemandirian keuangan daerah dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer belum menunjukkan perbaikan signifikan walaupun telah terjadi peningkatan. Rasio kemandirian keuangan daerah regional Maluku Papua pada tahun 2016 sebesar 7,01% lebih tinggi dari tahun 2015 (5,91%)

Realisasi APBD Regional Maluku Papua Tahun 2015 dan 2016
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: DJPBN diolah

Uraian	2015			2016		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	4.362,82	4.009,42	91,90	3.679,39	5.534,49	150,42
Pendapatan Transfer	70.243,05	67.870,14	96,62	79.585,35	78.119,34	98,16
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.173,27	1.038,38	88,50	21.307,91	6.718,57	31,53
Jumlah Pendapatan	75.779,13	72.917,94	96,22	104.572,64	90.372,40	86,42
Belanja						
Belanja Pegawai	17.995,65	16.053,28	89,21	25.892,52	21.446,82	82,83
Belanja Modal	24.464,07	21.668,84	88,57	28.074,29	24.274,09	86,46
Belanja Lain	38.918,10	36.392,43	93,51	46.356,95	35.626,33	76,85
Jumlah Belanja	81.377,81	74.114,55	91,07	100.323,75	81.347,24	81,08
Surplus/Defisit	(5.998,68)	(1.196,61)	21,37	4.248,89	9.025,15	212,41

Belanja Daerah

Belanja pemerintah daerah regional Maluku Papua terealisasi sejumlah Rp81.347,24 miliar meningkat 9,76% dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp74.114,55 miliar. Meskipun secara realisasi terjadi peningkatan belanja, namun kinerja realisasi belanja daerah menunjukkan penurunan. Kinerja realisasi belanja daerah (APBD) wilayah Maluku Papua tahun 2016 sebesar 81,08% dari total pagu Rp100.323,75 miliar lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 91,07% dari total pagu belanja APBD sebesar 81.377,81 miliar. Penurunan kinerja realisasi belanja daerah dipicu oleh penurunan kinerja realisasi seluruh jenis belanja, terutama belanja lain yang mengalami penurunan dari sisi nominal realisasi. Belanja lain terealisasi sebesar Rp35.626,33 miliar (76,85%) lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp36.392,43 miliar (93,51%).

Rasio realisasi setiap jenis belanja terhadap total belanja pada tahun 2015 dan 2016 tidak banyak berubah, yaitu sekitar 21,66%-26,36% untuk belanja pegawai, 29,24%-29,84% untuk belanja modal, dan 43,80%-49,10% untuk belanja lain. Realisasi APBD regional Maluku Papua tahun 2016 mengalami surplus sebesar Rp9.025,15 miliar. Angka surplus ini mengindikasikan kinerja realisasi belanja yang masih buruk karena target surplus hanya sebesar 4.248,89 miliar. Kondisi ini mengindikasikan terdapat program/kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2016 namun tidak dapat terlaksana pada tahun 2016. Keterlambatan proses pelelangan barang dan jasa masih menjadi faktor dominan yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan anggaran. Pemotongan DAK fisik secara mandiri dan penundaan penyaluran DAU pada beberapa daerah menjadi faktor lain yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan belanja daerah.

Sektor Unggulan Regional

Sektor perekonomian yang memiliki distribusi besar dalam struktur perekonomian menandakan sektor tersebut menjadi motor penggerak perekonomian suatu daerah dan dapat dikategorikan sebagai suatu sektor unggulan. Selain itu, sektor yang menjadi penyerapan tenaga kerja terbesar juga mengindikasikan sektor tersebut menjadi sektor unggulan. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian dan menyerap tenaga kerja terbesar regional Maluku Papua adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Pertambangan dan Penggalian.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Maluku Utara sebesar 24,96% dan PDRB Maluku sebesar 23,80%. Sedangkan Provinsi Papua memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12,11%, dan Papua Barat sebesar 19%, terbesar kedua setelah sektor Industri Pengolahan.
Subsektor tanaman perkebunan rakyat seperti kelapa, cengkeh, pala, dan kakao mendominasi komoditas unggulan regional Maluku

Papua. Walaupun masih dikelola secara tradisional, tanaman perkebunan rakyat merupakan penyumbang pertumbuhan perekonomian terbesar dari sektor pertanian. Tercatat rata-rata sumbangan subsektor tanaman perkebunan rakyat terhadap PDRB Maluku Utara selama tahun 2010 s.d. 2016 sebesar 11,86%. Selain cengkeh, kopra juga menjadi andalan perekonomian Maluku Utara. Kopra menjadi komoditas penyumbang ekspor Maluku Utara. Maluku Utara memiliki jumlah produksi dan produktivitas kelapa tertinggi di regional Maluku dan Papua.

Subsektor perikanan memiliki peranan penting bagi perekonomian Maluku terutama setelah ditetapkannya Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Potensi lestari perikanan di wilayah Laut Banda Maluku sebesar 278.000 ton/tahun dengan kontribusi terhadap potensi lestari sumber daya ikan secara nasional sebesar 4,3%. Namun bila dilihat per kelompok sumber daya ikan, maka Laut Banda menjadi lokasi yang sangat potensial bagi perikanan ikan karang (kontribusi 22,1%) dan Ikan Pelagis Besar (9,1%).

Serupa dengan perairan Banda, perairan Maluku Utara merupakan alur migrasi ikan pelagis besar sehingga potensi perikanan pelagis besar sangat besar dengan potensi per tahun sebesar 385.900 ton. Potensi tersebut baru dimanfaatkan sebesar 114.321,4 ton. Selain ikan palagis besar, Maluku Utara juga kaya akan ikan pelagis kecil dengan potensi per tahun sebesar 896.200 ton dan pemanfaatan mencapai 57.852,6 ton. Ikan demersal estimasi pertahun sebesar 153.000 ton per tahun dan pemanfaatan per tahun baru mencapai 22.147,3 ton.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian menyumbang kontribusi tertinggi yaitu sebesar 42,05% dari total PDRB Provinsi Papua tahun 2016. Kontribusi PDRB sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Maluku Utara sebesar 11,95% sampai 13,57% dalam rentang waktu 2010 sampai dengan 2016. Sedangkan di Provinsi Maluku, Sektor pertambangan belum memberikan andil yang besar terhadap ekonomi, namun sektor ini mempunyai potensi yang cukup besar.

Sejak tahun 2011, sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Papua selalu menunjukkan tren meningkat dimana pada tahun 2016 pertumbuhannya mencapai 13,15%. Hal ini semakin menunjukkan pentingnya sektor pertambangan dan penggalian bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Dominasi sektor pertambangan terhadap perekonomian Papua terlihat dalam struktur *export based* Papua. Papua sangat tergantung terhadap kinerja ekspor komoditi pertambangan. Selain itu, sektor pertambangan di Papua selama ini hanya didominansi oleh satu perusahaan yang bergerak di pertambangan tembaga dan emas yakni PT. Freeport Indonesia yang berlokasi di Timika.

Blok Masela yang terletak di Laut Arafura Provinsi Maluku memiliki potensi migas yang besar. Berdasarkan data Lemigas tahun 2015,

cadangan Blok Masela mencapai 10,73 *trillion cubic feet* (tcf). Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan produksi gas bumi dari blok ini bisa dimulai tahun 2023. Berdasarkan *Plan of Development* (PoD) atau rencana pengembangan yang dibuat oleh Inpex selaku operator Blok Masela, produksi gas dari Lapangan Abadi ini akan mulai mengalir (*onstream*) pada 2024 dengan tingkat produksi sebesar 4.5 juta ton LNG per tahun dan sekitar 13.000 bbl kondensat per hari.

Sedangkan Provinsi Maluku Utara kaya akan nikel yang memiliki potensi 3.610.332.800 ton. Saat ini tercatat 9 perusahaan dalam tahap penyelesaian pembangunan *smelter, multiplier effect* dari beroperasinya smelter tersebut diperkirakan akan semakin berdampak pada perekonomian Maluku Utara pada tahun 2017. Selain kaya akan nikel, Maluku Utara mempunyai potensi kekayaan mineral lainnya seperti emas dengan potensi 1.050 ton, pasir besi dengan potensi 479.083.898 ton, mangan dengan potensi 347.974 ton.

Tantangan Fiskal Regional

Rendahnya IPM Regional Maluku Papua

IPM Regional Maluku Papua lebih rendah dari capaian IPM Nasional. Bahkan pada tahun 2016, dari 34 Provinsi di Indonesia, Papua merupakan satu-satunya provinsi dengan capaian IPM yang masih berstatus rendah (IPM kurang dari 60). Penyumbang rendahnya IPM diantaranya adalah adalah angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah yang lebih rendah dari nasional. Rendahnya angka harapan hidup karena terbatasnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Selain keterbatasan, penyebaran tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan juga tidak merata. Begitu pula dengan pendidikan, regional Maluku Papua masih memiliki keterbatasan guru dan fasilitas pendidikan yang belum memadai.

Permasalahan Pelaksanaan Dana Desa

Persentase jumlah penduduk miskin Regional Maluku dan Papua lebih banyak berada di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Persentase penduduk miskin daerah perdesaan Provinsi Maluku tahun 2016 tercatat sebesar 26,88%, Maluku Utara (7,43%), Papua Barat (37,33%), dan Papua (37,07%). Dana Desa harus dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga dapat mendorong penduduk daerah perdesaan keluar dari garis kemiskinan. Pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya: pencairan dana desa yang terlambat; penggunaan dana desa yang belum mempunyai perencanaan yang berkelanjutan; penggunaan dana desa masih berdasarkan keinginan (wants) belum berdasarkan kebutuhan (needs); pembangunan proyek fisik yang dibiayai dana desa dikerjakan oleh pihak ketiga; kapasitas perangkat desa yang belum memadai; dan pertanggungjawaban dana desa yang terlambat dan kurang akuntabel.

Rendahnya Kemandirian Kemampuan Keuangan Daerah
Dana transfer merupakan sumber utama pendapatan seluruh Pemerintah Daerah di Regional Maluku Papua. Sementara itu peranan Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil. Pemerintah daerah tidak mampu membiayai kebutuhannya melalui sumber pendapatan sendiri. Kemampuan Pemda dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan terutama PAD belum dioptimalkan sehingga menyebabkan keterbatasan kemampuan APBD dalam membiayai program-program yang menjadi prioritas yang dapat menunjang perekonomian dan sesuai kebutuhan masyarakat. PAD yang sangat rendah dapat disebabkan oleh kemampuan memungut pajak yang masih rendah di mana salah satu kontributor utama penyebabnya adalah masih lemahnya regulasi untuk memperkuat *local taxing power.* Selain itu, tingginya ketergantungan pemda regional Maluku Papua pada pendapatan yang berasal dari sumber daya alam rentan terhadap fluktuasi kenaikan harga maupun keterbatasan *resources* itu sendiri.

Pengelolaan APBD yang Belum Optimal

Pengelolaan APBD di regional Maluku Papua belum dilaksanaan secara optimal. Dari sisi perencanaan APBD, secara agregat regional Maluku Utara merencanakan pendapatan lebih besar dari belanja sehingga terdapat surplus belanja. Akan lebih bermanfaat bagi perekonomian, apabila kelebihan pendapatan tersebut digunakan untuk mendanai program yang bersifat prioritas dan pengeluaran yang dapat memberikan *multiplier effect* kepada perekonomian. Dari sisi penyerapan, terjadi ketimpangan pola penyerapan APBD yang jauh lebih besar pada akhir tahun sehingga dapat membawa permasalahan perekonomian regional maupun nasional. Kemampuan pemerintah daerah regional Maluku Papua dalam mengeksekusi belanja juga masih lemah.

Belum optimalnya penyerapan anggaran dan belum baiknya kualitas belanja daerah, pada akhirnya menyebabkan terjadinya surplus belanja yang cukup besar pada akhir tahun. Surplus belanja tersebut akhirnya mendorong terjadinya pengendapan dana di perbankan yang cukup tinggi. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah secara serius karena meskipun atas dana yang mengendap tersebut Pemerintah Daerah mendapatkan hasil berupa pendapatan bunga, tapi akan jauh lebih optimal jika dapat direalisasikan untuk belanja barang dan modal. Dengan demikian akan menambah kuantitas dan kualitas *output* pelayanan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah.

Solusi Fiskal Regional

Solusi yang dapat diberikan atas tantangan fiskal regional dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, APBN, APBD, dan sektor unggulan pada regional Maluku Papua di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Terkait rendahnya capaian IPM regional Maluku Papua, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

APBD yang disusun diharapkan dapat berpihak untuk kepentingan masyarakat luas khususnya bagi masyarakat yang masih menghadapi kendala akses pendidikan dan kesehatan. Program perluasan pengadaan layanan kesehatan dan akses pendidikan harus lebih ditingkatkan. Untuk memperbesar alokasi belanja kesehatan dan belanja pendidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan spending review untuk memastikan setiap belanja daerah efektif dan efisien dan memperbesar ruang fiskal. Di lain pihak, Pemerintah Daerah harus mengevaluasi kembali kebijakan kepegawaian, dengan memprioritaskan penerimaan pegawai untuk tenaga kesehatan dan pendidikan serta menjamin pemerataan penempatan tenaga kesehatan dan pendidikan. Selain itu dana desa dapat dioptimalkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan berupa polindes (Poliklinik Desa). Tersedianya satu polindes setiap desa akan mempermudah akses kesehatan masyarakat desa.

Kedua, Terkait permasalahan pelaksanaan dana desa, beberapa langkah dan kebijakan yang dapat diambil diantaranya: 1) Diperlukan *grand design* dan bimbingan dari pemda supaya penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan (*needs*) bukan keinginan (*wants*) dan diarahkan untuk penciptaan sentra-sentra perekonomian, peningkatan akses kesehatan perdesaan; 2) Pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan secara swakelola dilakukan pada saat tidak musim panen sehingga upah yang diterima dapat menjadi penyanggah penghasilan; 3) Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa dalam pengelolaan dana desa; 4) Perlunya penyederhanaan pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan dan penyampaian laporan dana desa agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan lebih efisien, efektif dan akuntabel.

Ketiga, Terkait optimalisasi pendapatan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali berbagai potensi PAD. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga stabilitas perekonomian dan keamanan dapat terjaga dan investasi dapat masuk yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah melakukan kebijakan intesifikasi dan ekstensifikasi diantaranya melalui: 1) menciptakan kondisi yang kondusif sehingga pajak daerah dapat terealisasi dan mengurangi biaya pemungutan pajak; 2) memperluas basis penerimaan pajak daerah melalui sistem komputerisasi secara terpadu dan mengintensifkan penerimaan pajak.

Keempat, Terkait optimalisasi pengelolaan APBD, pemerintah daerah melakukan perbaikan proses penganggaran, Pemerintah daerah harus melakukan efisiensi pos-pos anggaran yang tidak berdampak pada publik, efisiensi ini dilakukan secara berkelanjutan dan digunakan untuk penambahan anggaran program prioritas dan berdampak luas pada perekonomian. Perbaikan pola penyerapan belanja melalui percepatan proses perencanaan dan pengesahan APBD, pelaksanaan proses lelang sebelum tahun anggaran berjalan, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan tersistem agar permasalahan pelaksanaan anggaran dapat diketahui dan diatasi. Upaya lainnya yang penting dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah.

BAB IV

ANALISIS KESEHATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Penilaian ini dilakukan pada pagu dan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2016 di wilayah provinsi dengan mempergunakan beberapa rasio untuk menilai kesehatan pengelolaan keuangan daerah dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Beberapa rasio yang digunakan menganalisis adalah rasio efektivitas PAD, rasio PAD, rasio Pertumbuhan PAD, rasio belanja modal, rasio belanja pegawai, rasio penyerapan anggaran, dan rasio kemampuan daerah merealisasikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Ketergantungan fiskal pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi pada sebagian besar pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang mencatatkan 25 provinsi berada dirasio hanya s.d. 20%. Pemerintah merealisasikan PAD minimal 80% dari tergetnya, sehingga cukup efektif dalam rasio efektivitas PAD. Namun, dalam hal rasio pertumbuhan PAD masih terdapat 7 provinsi yang PAD tahun 2016 menurun dari tahun 2015, sehingga harapan agar pemerintah daerah makin mandiri masih sulit tercapai berdasarkan data-data PAD tersebut.

Dari sisi belanja daerah, pemerintah daerah belum dapat mendukung program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur, ini terlihat dari rasio belanja modal terhadap total belanja pada seluruh wilayah di Indonesia hanya berkisar 16% s.d. 35%. Sisi yang lain rasio belanja pegawai pada sebagian besar wilayah berada pada kisaran rasio 31% s.d. 50%. Penyerapan belanja daerah rata-rata berada di atas 86% dibanding pagu belanja per wilayah
Berdasarkan rasio indikator yang ada, sebagian besar provinsi masih memiliki kesehatan pengelolaan keuangan yang kurang baik baik itu dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi pemanfaatan dana melalui pengalokasian belanja daerah

htpps://images.detik.com

BAB IV
Analisis Kesehatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendapatan Daerah

Otonomi fiskal yang diberikan kepada daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Otonomi fiskal ini akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima beban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan potensi yang dimilki dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Artinya daerah didorong untuk mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan transfer dana pusat, peluang yang ada, serta menggali sumber-sumber baru yang potensial untuk meningkatkan PAD.

Sumber-sumber pendapatan suatu daerah adalah dari PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Salah satu unsur penilaian kesehatan pengelolaan keuangan daerah dari sisi kemandirian atau pendapatan daerah adalah dengan melihat seberapa besar PAD yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.

Daerah dengan keterbatasan PAD akan menghadapi permasalahan fiskal untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi tinggi, dibandingkan dengan daerah yang memiliki PAD yang memadai.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini menggambarkan berapa besar pendapatan asli daerah yang terealisasi dibandingkan dengan yang direncanakan, semakin tinggi angka realisasi maka semakin efektif kinerja pemerintah dalam pencapaian penerimaan asli daerahnya, semakin rendah angka rasio ini, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan upaya-upaya untuk pencapaian target PAD yang telah ditetapkannya.

Tabel Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 (Realisasi PAD/Target Penerimaan PAD)
Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 (*Unaudited*)

NO	RASIO (%)	JUMLAH PROVINSI
1	> 100	6
2	81- 100	27
3	51- 80	0
4	26- 50	0
5	< 25	0
Jumlah		33

Penetapan target PAD dan upaya pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaannya cukup efektif dengan realisasi PAD pada seluruh wilayah yang berada pada rasio di atas 81%, bahkan beberapa provinsi bisa melampaui targetnya, seperti data di bawah ini:

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi Tahun 2016

Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Papua	127
2	Papua Barat	125
3	Sulawesi Tenggara	109
4	Jawa Timur	107
5	Banten	106

Dengan peningkatan target PAD sekitar Rp507 Miliar, wilayah Papua tercatat sebagai wilayah yang paling tinngi untuk rasio efektivitas PAD

Khusus realisasi PAD di wilayah Papua yang mencatatkan rasio realisasi PAD paling tinggi, penetapan target PAD tahun 2016 di wilayah ini naik sekitar Rp507 Miliar yaitu sebesar Rp2.366,23 Triliun dari target tahun 2015 sebesar Rp1.858,68 Triliun. Berbeda dengan target PAD di wilayah Papua Barat yang naik sekitar 89 Miliar dibanding tahun sebelumnya dan Sulawesi Tenggara yang naik hanya sekitar 24 Miliar dari tahun sebelumnya. Untuk wilayah Jawa Timur dan Wilayah Banten target PAD di tahun 2016 rata-rata naik sekitar 880 Miliar, sehingga sangat signifikan untuk meningkatkan angka PAD daerahnya masing-masing.

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terendah Tahun 2016

Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Sumatera Selatan	81
2	Lampung	82
3	Maluku Utara	82
4	Aceh	85
5	Riau	87

Capaian realisasi PAD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung memang menjadi wilayah dengan capaian yang paling rendah dari sisi rasio, namun sebenarnya target PAD tahun 2016 pada kedua wilayah provinsi tersebut naik di atas Rp500 Miliar. Sehingga pencapaian realisasi PAD dari wilayah Sumatera Selatan dan Lampung cukup tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan target PAD tahun 2016.

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara umum kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah. Kemandirian fiskal suatu daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.

Rasio kemandirian dapat ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan atau rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Untuk rasio yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis yang menunjukkan kemandirian daerah dengan mengambil nilai PAD dibandingkan dengan total pendapatan, semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi terhadap total pendapatan daerah

Tabel Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 (Realisasi PAD/Realisasi Total Pendapatan Daerah)

Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	> 60	1
2	41- 60	2
3	21- 40	5
4	0- 20	25
Jumlah		33

DKI Jakarta menjadi satu-satunya wilayah yang rasio PADnya lebih dominan dibandingkan sumber pendapatan daerah yang lain yaitu 69%, sebagian besar wilayah propinsi masih harus berjuang untuk dapat meningkatkan kemandirian daerahnya dari sektor keuangan. Nampak kalau sampai saat ini dana transfer pemerintah pusat kepada daerah masih menjadi sumber utama pendapatan daerah, satu sisi daerah belum mampu meningkatkan sektor-sektor unggulan daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat 25 wilayah provinsi yang rasio PAD dibanding total pendapatannya kurang dari 21%. Provinsi lain yang ketergantungannya tidak terlalu tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat adalah Banten dengan rasio 42% dan Bali dengan rasio 41%.

Rasio PAD Provinsi Banten tahun 2016 turun sangat rendah sekitar 0,006%, rasio ini turun karena naiknya dana perimbangan yang diterima pemda di wilayah Banten dari sekitar 9,23 Triliun menjadi sekitar 13,53 Triliun, dari sisi lain PAD Provinsi Banten tahun 2016 juga naik sekitar 1 Triliun dibandingkan realisasi PAD tahun sebelumnya. Kenaikan PAD Banten tersebut ditopang oleh naiknya pendapatan pajak daerah.

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi Tahun 2016

Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	DKI Jakarta	69
2	Banten	42
3	Bali	41
4	Jawa Barat	33

Papua dan Papua Barat adalah dua wilayah yang memilki rasio efektivitas PAD yang tinggi yaitu diatas 125%, namun kedua wilayah itu mencatatkan rasio PAD yang masih rendah

Persepsi umum tentang ketertinggalan wilayah timur Indonesia, dapat dijelaskan juga dengan data bahwa wilayah provinsi yang memiliki rasio PAD terendah, semuanya terletak di kawasan timur Indonesia, bahkan pada wilayah-wilayah tersebut hanya memiliki angka rasio PAD yang tidak sampai 2 digit.

Papua dan Papua Barat adalah dua wilayah yang memilki rasio efektivitas PAD yang tinggi yaitu diatas 125%, namun kedua wilayah itu mencatatkan rasio PAD yang masih rendah bersama dengan provinsi-provinsi kawasan timur lainnya seperti Maluku dan Maluku Utara

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terendah Tahun 2016

Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Maluku Utara	5
2	Papua	6
3	Papua Barat	6
4	Maluku	7

Rasio Pertumbuhan PAD

Besarnya tingkat ketergantungan fiskal sebagian besar wilayah di Indonesia harus dapat diatasi melalui percepatan pertumbuhan PAD dari masing-masing daerah. Percepatan pertumbuhan PAD tersebut diukur dengan membandingkan selisih kenaikan/penurunan PAD tahun anggaran yang bersangkutan dari tahun sebelumnya terhadap PAD tahun anggaran sebelumnya. Sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah yaitu dibawah angka 10%, bahkan beberapa wilayah provinsi belum dapat meningkatkan PADnya dari tahun sebelumnya dengan mencatatkan rasio di bawah nol.

Tabel Rasio Pertumbuhan PAD Tahun 2016 (PADt1-PADt0)/PADt0)

Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	> 50	2
2	21- 50	3
3	11- 20	4
4	0- 10	17
5	< 0	7

Pertumbuhan angka PAD yang tinggi pada tahun 2016, terjadi pada provinsi-provinsi yang tersebar pada beberapa pulau. PAD Kepulauan Riau dan Papua dapat tumbuh diatas 50% dari tahun sebelumnya, sedangkan PAD wilayah lainnya belum dapat tumbuh setinggi kedua wilayah provinsi tersebut. Salah satu hal yang mendukung peningkatan pertumbuhan PAD Kepulauan Riau adalah meningkatnya geliat sektor-sektor pendukung seperti sektor perdagangan (9,54%), sektor informasi dan komunikasi (7,40%) serta sektor-sektor lainnya, dan hanya mencatatkan sektor industri pengolahan dengan pertumbuhan paling rendah sebesar (3,36%).

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Pertumbuhan PAD Tertinggi Tahun 2016
Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Kepulauan Riau	56
2	Papua	55
3	Papua Barat	45
4	Gorontalo	33
5	Sumatera Selatan	31

Pertumbuhan PAD beberapa provinsi pada tahun 2016 menurun, sehingga dibutuhkan stimulus kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif di wilayah tersebut

Beberapa provinsi memiliki pertumbuhan PAD pada tahun 2016 yang menurun, sehingga dibutuhkan stimulus berupa kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif di wilayah tersebut. Sektor riil seperti perdagangan dan produksi usaha kecil dan menengah yang selama ini masih belum optimal, harus diberi dukungan kebijakan dari pemerintah terutama kebijakan untuk memanfaatan dana transfer daerah pada sektor-sektor yang produktif.

Maluku Utara menjadi salah satu wilayah yang rasio PAD terhadap total pendapatannya rendah (sekitar 5%), satu sisi pertumbuhan PAD tahun 2016 juga mengalami perlambatan dengan turunnya retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, sedangkan dua sumber PAD yang naik di wilayah Maluku Utara adalah pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tren meningkatnya dana perimbangan dari pemerintah pusat pada seluruh daerah seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menggali sektor-sektor yang dapat meningkatkan PAD, bukan digunakan hanya untuk biaya-biaya operasional dan konsumtif.

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Pertumbuhan PAD Terendah Tahun 2016
Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Bangka Belitung	(7)
2	Maluku Utara	(6)
3	Kalimantan Selatan	(6)
4	Riau	(5)
5	Kalimantan Barat	(5)

Belanja Daerah

Belanja daerah yang berkualitas diharapkan akan dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Penyusunan rencana belanja disusun untuk melaksanakan program/kegiatan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.
Keterbatasan sumber-sumber pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu tantangan fiskal pemerintah. Sumber pendapatan yang terbatas menyebabkan ruang gerak fiskal pemrintah sangat sempit. Prioritas belanja dan perencanaan

yang baik menjadi kunci untuk menyiasati kendala penganggaran, terutama menganggarkan sesuatu yang dapat dipastikan terealisasi dalam tahapan pelaksanaan anggaran. Belanja pemerintah diprioritaskan untuk program yang produktif dan mengurangi program-program yang tidak produktif.

Rasio kesehatan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah dearah dari sisi belanja dapat dinilai dari rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah , dan rasio penyerapan belanja terhadap pagu belanja pemerintah daerah.

Rasio Belanja Modal

Rasio ini untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja modal ditambah belanja barang dan jasa, menjadi belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan perdagangan ke luar. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio belanja modal, akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Persentase rasio seluruh wilayah provinsi masih berkisar antara 16% s.d. 35%, dimana 23 wilayah diantaranya hanya berkisar antara 16% s.d. 25%

Persentase rasio seluruh wilayah provinsi masih berkisar antara 16% s.d. 35%, dimana 23 wilayah diantaranya hanya berkisar antara 16% s.d. 25%. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia masih menganggarkan belanja modal dengan proporsi yang masih kecil. Data ini menggambarkan bahwa dukungan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah ke depannya belum berdampak pada periode yang akan datang yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan nilai investasi yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah

Tabel Rasio Belanja Modal APBD Tahun 2016
(Realisasi Belanja Modal/ Realisasi Total Belanja APBD)
Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	> 50	-
2	36- 50	-
3	26- 35	10
4	16- 25	23
5	< 15	-
Jumlah		33

Pada tahun 2016 rasio belanja modal terhadap total realisasi belanja pemerintah daerah tertinggi di wilayah Sulawesi Tenggara dan Papua yaitu 32%. Program pembangunan pemerintah pusat mengutamakan wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal nampaknya didukung juga oleh pemerintah daerah yang berada di kawasan tngah dan kawasan timur Indonesia. Data memperlihatkan bahwa pembangunan fisik di wilayah luar jawa terutama kawasan timur Indonesia cukup tinggi,

sepuluh besar provinsi yang rasio belanja modalnya paling besar berada di kawasan tersebut, nilai rasio belanja modal berada pada kisaran 26% s.d. 32%.

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Belanja Modal APBD Tertinggi Tahun 2016

Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Sulawesi Tenggara	32
2	Papua	32
3	Sulawesi Barat	30
4	Maluku Utara	29
5	Kalimantan Tengah	28

Beberapa wilayah provinsi di Jawa dan Bali dikenal dengan kemajuan infrastrukturnya, sehingga data APBD per wilayah menunjukkan kalau angka rasio belanja modal terhadap total belanja daerah pada daerah seperti DI. Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa barat, dan Bali rendah, yaitu di bawah 20%. Pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta sebenarnya sangat masif, pembangunan tersebut tidak membebani APBD namun dilakukan dengan pola Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) yang perjanjiannya bersifat jangka panjang antara pemerintah daerah dengan mitra swasta. Hal ini salah satu sebab mengapa DKI Jakarta pembangunannya berjalan terus namun rasio belanja modalnya tetap rendah.

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Belanja Modal APBD Terendah Tahun 2016

Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	DI Yogjakarta	17
2	DKI Jakarta	18
3	Jawa Barat	19
4	Bali	19
5	Kepulauan Riau	19

Rasio Belanja Pegawai

Rasio ini mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Belanja pegawai yang dihitung dalam rasio ini meliputi belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Semakin rendah angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi karena itu berarti sebagian belanja dapat dialihkan untuk belanja lain terutama belanja modal, semakin tinggi angka rasionya maka penilaian kesehatan pengelolaan keuangan akan semakin kurang.

Tabel Rasio Belanja Pegawai APBD Tahun 2016 (Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD)
Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	< 20	-
2	21- 30	3
3	31- 40	24
4	41- 50	6
5	> 50	-
Jumlah		33

Secara agregat seluruh provinsi, kabupaten dan kota, rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah tahun 2016 adalah 36%

Secara agregat seluruh provinsi, kabupaten dan kota, rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah tahun 2016 adalah 36%, berdasarkan agregat rasio belanja pegawai tersebut dapat ditunjukkan bahwa terdapat 14 provinsi yang rasio belanja pegawainya lebih rendah dari rata-rata nasional, sedangkan 19 provinsi yang lain memiliki rasio belanja pegawai yang lebih tinggi di atas rata-rata nasional

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Belanja Pegawai APBD Terendah Tahun 2016
Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Papua Barat	21
2	Papua	25
3	Aceh	30
4	Banten	31
5	Kalimantan Timur & Utara	31

Provinsi yang memiliki rasio belanja pegawai paling kecil adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 21%, sedangkan provinsi yang memiliki angka rasio yang paling besar adalah Prov. Sumatera Utara dengan rasio sebesar 46%. Tahun 2016 ini tidak ada provinsi yang memiliki rasio belanja pegawai lebih dari 50%, hal ini berarti bahwa tidak ada daerah-daerah yang belanjanya didominasi oleh belanja pegawai.

Kondisi ini perlu dipertahankan atau lebih dibenahi lagi, karena secara implisit provinsi-provinsi yang menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk belanja pegawai, maka akan menyebabkan kelapangan program dan kegiatan daerah yang bisa didanai, khususnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti belanja modal dan belanja untuk ekonomi produktif lainnya.

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Belanja Pegawai APBD Tertinggi Tahun 2016
Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Sumatera Utara	46
2	Sumatera Barat	45

No	Provinsi	Rasio (%)
3	DI Yogjakarta	43
4	Nusa Tenggara Barat	41
5	Sulawesi Selatan	41

Rasio belanja pegawai pada lima wilayah provinsi yang memiliki rasio tertinggi tahun 2016, juga mencatatkan angka yang relatif sama pada tahun sebelumnya. Sumatera Utara tahun 2015 memiliki rasio 42% namun tahun 2016 naik menjadi 46%, Sumatera Barat rasionya turun dari tahun 2015 dengan angka 46%. Pada tahun 2015 wilayah yang lain juga memilki rasio belanja pegawai berkisar antara 41% sampai sampai 47%.

Rasio Penyerapan Anggaran

Rasio yang menggambarkan berapa besar belanja daerah yang dapat terealisasi dibandingkan dengan pagu yang direncanakan pemerintah. Rasio realisasi belanja APBD akan bernilai bagus apabila mendekati angka 100% atau realisasi belanja pemerintah sama dengan pagu dan kegiatan yang direncanakan pemerintah.

Tabel Rasio Penyerapan APBD Tahun 2016
(Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD)
Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	96- 100	3
2	86- 95	23
3	76- 85	6
4	60- 75	1
5	< 60	-
Jumlah		33

Rata-rata rasio realisasi penyerapan anggaran seluruh pemerintah daerah di Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 89%, itu berarti 24 wilayah sudah dapat mencapai angka rasio tersebut, sedangkan sisanya belum bisa mencapai angka 89%. Provinsi Bangka Belitung menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran yang paling tinggi disusul Nusa Tenggara Barat dan Bali.

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Penyerapan APBD Tertinggi Tahun 2016
Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Bangka Belitung	99
2	Nusa Tenggara Barat	98
3	Bali	98
4	DI Yogjakarta	93
5	Papua Barat	93

Provinsi-provinsi besar dan memiliki angka APBD besar seperti Papua, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara justru mencatatkan angka rasio penyerapan anggaran di bawah rata-rata nasional, yaitu antara 73% s.d. 83%.

Beberapa provinsi yang memiliki angka APBD yang besar justru mencatatkan angka rasio penyerapan anggaran di bawah rata-rata nasional, yaitu antara 73% s.d. 83%

Tabel Lima Provinsi dengan Rasio Penyerapan APBD Terendah Tahun 2016

Sumber : KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Papua	73
2	DKI Jakarta	82
3	Sulawesi Selatan	82
4	Riau	82
5	Sumatera Utara	83

Rasio Kemampuan Merealisasikan Pendapatan dan Pembiayaan Penerimaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA ini erat hubungannya dengan kemampuan keuangan daerah untuk merealisasikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja dan pengeluaran pembiayaannya.

Seluruh provinsi mencatatkan angka di atas 100% terhadap rasio ini, ini berarti seluruh wilayah memiliki kemampuan untuk mendanai belanjanya melalui peningkatkan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. secara rata-rata nasional angka rasio kemampuan merealisasikan pendapatan dan pembiayaan penerimaan sebesar 109%.

Tabel Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Merealisasikan pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Dalam Mendanai Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016

(Realisasi Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan Pembiayaan) /(Realisasi Belanja Daerah + Realisasi Pengeluaran Pembiayaan)

Sumber: KFR Kanwil DJPB 2016 dan LKPD 2016 *Unaudited*

No	Provinsi	Surplus/Defisit	No	Provinsi	Surplus/Defisit
1	Papua	**134**	18	Nusa Tenggara Timur	109
2	Sumatera Utara	124	19	Jambi	108
3	Sulawesi Selatan	115	20	Jawa Barat	108
4	Banten	113	21	Nusa Tenggara Barat	108
5	Kalimantan Selatan	113	22	Riau	108
6	Jawa Tengah	112	23	Sulawesi Tenggara	**107**
7	Kalimantan Tengah	112	24	Sulawesi Barat	106
8	Bangka Belitung	111	25	Kepulauan Riau	105
9	Kalimantan Timur/Utara	111	26	Maluku Utara	103
10	Sumatera Barat	111	27	Lampung	102
11	DKI Jakarta	111	28	Aceh	102
12	Gorontalo	110	29	Sulawesi Tengah	102
13	Maluku	110	30	Bali	102
14	Bengkulu	110	31	Kalimantan Barat	101
15	Sulawesi Utara	109	32	Sumatera Selatan	101
16	Jawa Timur	109	33	Papua Barat	101
17	DI Yogjakarta	109			

BAB V

RESPON FISKAL PEMERINTAH

Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik dan mampu menyelaraskan program kerjanya dengan program Pemerintah Pusat. Demikian juga halnya Pemerintah Pusat dapat merumuskan kebijakan yang dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang ada di pusat dan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Pusat juga harus memperhatikan kondisi dan karakteristik masing masing daerah termasuk kebutuhannya. Melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakannya diharapkan tujuan negara dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur dapat diwujudkan.

Dari sisi fiskal, keberhasilan pemerintah ditunjukkan oleh indikator-indikator kesejahteraan antara lain menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya rasio Gini atau menurunnya gap antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan kata lain, kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh indikator indikator tersebut ditentukan oleh program yang dijalankan oleh pemerintah (pusat dan daerah) melalui anggaran pendapatan dan belanja nya.

Ketepatan respon fiskal pemerintah terhadap pembangunan di daerah berkaitan erat dengan faktor-faktor seperti kondisi geografis, demografis, kondisi masyarakat, potensi daerah dan kondisi makro ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang memotret respon fiskal yang telah diterapkan pemerintah, hambatan dan tantangannya, serta yang lebih penting lagi dapat memberi masukan atau rekomendasi bagi kebijakan fiskal atau respon fiskal yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

//imgantaranews.com

BAB V
Respon Fiskal Pemerintah

Regional Sumatera

Semua provinsi di Sumatera pada tahun 2016 mengalami defisit *cash flow*, yang berarti bahwa dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat untuk semua provinsi di Sumatera masih lebih besar dibandingkan dengan dana yang berhasil diperoleh setiap provinsi sebagai kontribusi untuk Pemerintah Pusat. Defisit terbesar terjadi di Aceh sedangkan terkecil di Kepulauan Riau, namun kontribusi terbesar diberikan oleh Sumatera Utara dan Riau terutama dari pendapatan perpajakan. Tingginya pendapatan pajak Sumatera Utara dan Riau dikarenakan besarnya kapasitas perekonomian kedua provinsi tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. Walaupun demikian kemandirian fiskal kedua provinsi tersebut dan provinsi lainnya di Sumatera masih rendah.

Kecuali Provinsi Riau dan Aceh, pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir pada sebagian besar provinsi di Sumatera berada di atas pertumbuhan nasional. Namun yang masih perlu diperhatikan adalah bahwa pertumbuhan tersebut belum mampu berbuat banyak dalam rangka mencapai perekonomian yang ideal. Bengkulu misalnya, walaupun capain pertumbuhannya tertinggi pada tahun 2016 diatas capaian pertumbuhan provinsi lain di Sumatera, bahkan mampu menurunkan angka pengangguran terbukanya selama dua tahun terakhir, namun perekonomian Bengkulu masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini memberikan sinyal bahwa perekonomian di Bengkulu masih berada pada kapasitas imperior, dengan kata lain bahwa sektor-sektor penyumbang PDRB di Bengkulu tidak berada pada skala produksi dengan memanfaatkan modal yang maksimal sehingga hasil yang diperoleh juga tidak maksimal. Perekonomian Bengkulu ditopang oleh produksi padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak atau jasa tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kerja kasar/buruh.

Berbeda dengan Provinsi Riau dan Aceh, pertumbuhan negatif di kedua provinsi ini disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia dan gas sebagai penopang utama perekonomiannya. Bahkan di Aceh penurunan harga minyak dan gas diikuti dengan habisnya sumber produksi minyak dan gas utama di PT. Arun Lhokseumawe yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Aceh. Besarnya kontribusi migas di Riau bahkan mengalahkan kontribusi pemerintah daerahnya. Hal ini terlihat dari tingginya nilai PDRB Riau tahun 2016 sementara perolehan PAD-nya sangat kecil pada tahun yang sama.

Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk keluar dari jeratan perekonomian seperti ini adalah dengan memperbesar kapasitas perekonomian di setiap provinsi. Setiap pemerintah daerah harus dapat menciptakan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru dengan cara mencari potensi-potensi pertumbuhan baru baik secara sektoral maupun dengan membuka akses investasi bagi pihak swasta. Terdapat dua hal yang harus disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru tersebut yaitu tersedianya infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang handal sebagai pelaku-pelaku ekonomi. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, menyediakan akses informasi bagi masyarakat, dan menjamin ketersediaan sumber daya penunjang seperti listrik dan air bersih. Yang tidak kalah pentignya adalah alokasi dana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Untuk itu, alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan dalam APBD harus ditingkatkan dan dipastikan efektif memberikan kontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan perekonomian.

Berdasarkan data IPM, sebagian besar IPM provinsi di Sumatera masih berada dibawah IPM nasional kecuali Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Barat yang mempunyai IPM tertinggi di Sumatera. Dengan kendala APBD yang masih tergantung dengan Pemerintah Pusat dan pola pengeluaran semua provinsi

yang masih mengalokasikan belanja pegawai yang besar pada APBD-nya, satu-satunya jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Sumatera adalah melalui APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dengan meningkatkan porsi pengeluaran dikedua bidang tersebut melalui DAK. Disamping itu, gini rasio semua provinsi di Sumatera berada dibawah gini rasio nasional dengan predikat sebagian besar perekonomiannya masih dalam kondisi sedang berkembang. Tingkat kemiskinan regional Sumatera juga masih tinggi terutama di Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya IPM di Sumatera perlu menjadi perhatian pemerintah.

Mengingat sektor pertanian dan perkebunan masih memberikan kontribusi tertinggi bagi sebagian perekonomian di Sumatera, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah perlu memperhatikan sektor usaha yang dapat mendukung sektor pertanian dan perkebunan, seperti sektor industri pengolahan. Pengembangan sektor industri pengolahan, yang salah satunya untuk mengolah hasil pertanian, diperkirakan dapat meningkatkan nilai tambah terhadap perekonomian Sumatera. Misalnya di Bengkulu, walaupun pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Bengkulu, namun nilai tukar petani selalu berada dibawah 100 yang berarti daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi lebih besar daripada biaya produksi. Hilangnya rantai antara sektor pertanian dan sektor pengolahan hasil pertanian menjadi faktor utama penyebab rendahnya nilai jual hasil pertanian karena sebagian besar hasil komoditas dari sektor pertanian adalah berupa barang mentah.

Belanja Pemerintah Pusat di Sumatera tahun 2016 sebagian besar dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan. Melalui kucuran dana tersebut, diharapkan dapat membantu Regional Sumatera dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama bidang perekonomian dan pendidikan yang dapat meningkatkan IPM dan pertumbuhan ekonomi. Namun secara umum, yang perlu ditingkatkan lagi adalah alokasi untuk pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan dan jembatan yang dapat menghubungkan daerah-daerah surplus dengan daerah-daerah minus sehingga dapat mengurangi biaya pertukaran, penyediaan sumber daya penunjang seperti pembangunan instalasi listrik dan penyediaan air bersih serta pembangunan pasar. Disamping peningkatan alokasi dana untuk kegiatan yang vital tersebut, alokasi kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tentunya perlu disesuikan dengan keunggulan masing-masing daerah.

Regional Jawa

Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa capaian ekonomi Regional Jawa memang berada diatas regional lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kapasitas dan perkembangan perekonomiannya jauh berada diatas skala ekonomi regional lainnya. Disamping itu, Regional Jawa juga sangat diuntungkan dengan adanya DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Selain sebagai pusat pemerintahan, DKI Jakarta juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan perekonomian provinsi sekitarnya. Kondisi tersebut menghasilkan surplus untuk tiga provinsi di Jawa pada tahun 2016. Ketiga provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dengan surplus paling besar yaitu Rp490 Triliun, Jawa Timur surplus sebesar Rp47 Triliun, dan Banten surplus sebesar Rp19 Triliun. Diantara ketiga provinsi tersebut, DKI Jakarta memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan Pemerintah Pusat yaitu sebesar Rp799 Triliun dari penghasilan perpajakan dan Rp131 Triliun dari PNBP.

Seiring dengan capaian tersebut, perekonomian Jawa masih tetap dapat mempertahankan pertumbuhannya dengan laju pertumbuhan diatas laju pertumbuhan nasional yang berarti perekonomian di Jawa sudah tumbuh dengan baik dan terkendali.

PDRB Jawa terdistribusi dengan cara yang beragam disetiap provinsinya. Hal ini terlihat dari gini rasio provinsinya yang beragam yaitu Jawa Tengah dan Banten terdistribusi lebih merata karena mempunyai gini rasio lebih kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa sedangkan DI Yogyakarta masih mempunyai gini rasio yang tinggi. Tingginya gini rasio Yogyakarta sementara kapasitas perekonomiannya paling rendah, menunjukkan bahwa penduduk yang miskin di Yogyakarta sangatlah miskin sedangkan penduduk yang kaya masih belum berada dalam kelas kekayaan yang sama bila dibandingkan dengan

penduduk kaya yang berada di provinsi lain di Regional Jawa. Yang lebih buruk lagi bahwa tingkat kemiskinan Yogyakarta juga yang tertinggi di Jawa pada tahun 2016.

Kondisi makro ekonomi di Yogyakarta tersebut, hampir sama dengan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi di Bengkulu. Yang membedakannya adalah bahwa IPM Yogyakarta sangat bagus yaitu mencapai 78,38 berada jauh diatas IPM nasional. Hal ini disinyalir menjadi penyebab tingginya gini rasio Yogyakarta karena secara alamiah tenaga kerja tersegmentasi menjadi beberapa kelas sebagai akibat dari banyaknya preferensi bagi mereka dalam mencari pekerjaan.

Jika dilihat dari kontribusi fiskalnya, Pemerintah Daerah Yogyakarta tidak dapat berbuat banyak karena hampir setengah dari belanja daerahnya sudah dialokasikan untuk belanja pegawai (Yogyakarta adalah tiga besar provinsi dengan Rasio Belanja Pegawai APBD Tertinggi di Indonesia Tahun 2016 yakni 43%). Sementara dana yang dibelanjakan untuk modal sangat kecil yaitu sebesar 17% dari total belanja pada tahun yang sama (Yogyakarta adalah provinsi dengan Rasio Belanja Modal APBD terendah di Indonesia Tahun 2016).

Namun demikian, jika diteliti lebih dalam terhadap APBD Yogyakarta, realisasi PAD-nya pada dua tahun terakhir selalu melebihi target. Pada tahun 2015 dan tahun 2016, tercatat kelebihan target PAD masing-masing sebesar 8,98% dan 3,74% yang berarti bahwa perencanaan APBD yang dilakukan sudah efektif. Walaupun demikian, Pemerintah Daerah Yogyakarta seharusnya lebih optimis lagi melihat kondisi ini dengan menempuh berbagai jalan antara lain dengan menggali sektor-sektor unggulan seperti pariwisata dan industri kreatif. Pemerintah Daerah Yogyakarta perlu membenahi manajemen pariwisata budaya dan alam yang selama ini dikelola secara konvensional menuju manajemen modern berbasis teknologi, globalisasi, dan kreativitas sehingga dapat menjangkau target wisatawan baru baik asing maupun domestik. Dengan demikian akan terbuka lapangan usaha baru yang dapat menjadi target penerimaan daerah yang baru. Disamping itu, pemerintah daerah juga dapat menciptakan iklim usaha yang dapat menarik investor baru seperti adanya jaminan keamanan, penyediaan tenaga kerja yang terlatih, dan adanya keringanan pajak dan kemudahan perizinan.

Fasilitas lain yang dapat menunjang industri pariwisata adalah terbukanya akses kepada objek-objek wisata tersebut seperti bandar udara. Saat ini, bandar udara yang dimiliki Yogyakarta kapasistasnya sangat terbatas dan hampir tidak mampu melayani penerbangan baik skala domestik maupun internasional. Pembangunan bandar udara baru di daerah Kulon Progo, yang saat ini dalam tahap proses pembangunan dan dananya dialokasikan pada DIPA Kementerian Perhubungan, diharapkan kedepan dapat lebih menggerakkan perekonomian di Yogyakrata seperti turis baik internasional maupun domestik yang mengunjungi Yogyakarta diprediksi akan meningkat secara signifikan, produk-produk kerajinan atau industri kreatif yang dapat diekspor atau dikirim antar pulau diprediksi juga akan meningkat.

Regional Kalimantan

Daerah regional Kalimantan secara umum merupakan daerah dengan kontribusi pendapatan kepada pemerintah pusat lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi pemerintah pusat kepada regional Kalimantan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum sektor-sektor yang memberikan pendapatan kepada pemerintah pusat di regional Kalimantan masih belum cukup besar memberikan kontribusi untuk pendapatan khususnya perpajakan. Selain itu, dengan beberapa provinsi di Kalimantan yang sangat tergantung pada komoditas baru mulai bangkit seiring dengan mulai membaiknya harga komoditas. Hal tersebut juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dibanding tahun 2015. APBD pada masing-masing provinsi di regional Kalimantan juga masih sangat tergantung kepada transfer dari pemerintah pusat. Penerimaan daerah pada provinsi di regional Kalimantan yang sangat tergantung kepada sektor pertambangan juga mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut secara langsung berdampak pada kemampuan daerah tersebut untuk melakukan alokasi APBD kepada sektor produktif seperti belanja infrastruktur dan peningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Pada umumnya IPM regional Kalimantan berada sedikit dibawah IPM Nasional kecuali Kalimantan Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Kalimantan masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan semakin kurang khususnya untuk daerah yang jauh dari pusat bisnis dan pemerintahan atau kota besar. Peran pemerintah melalui APBD dan transfer ke daerah yang dikhususkan untuk peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan masih diperlukan. Pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana lebih besar untuk DAK pendidikan dan kesehatan.

Rasio Gini untuk regional Kalimantan pada umumnya berada dibawah gini rasio nasional. Meskipun demikian, pemerintah dapat terus menggunakan instrumen fiskal melalui pajak daerah untuk melakukan distribusi pendapatan. Selain itu upaya untuk meningkatkan IPM melalui pendidikan, pelatihan dan layanan kesehatan juga diharapkan dapat membantu memperbaiki rasio Gini. Alokasi anggaran untuk wilayah terpencil, perbatasan, serta desa yang meningkat tajam juga membantu memperbaiki rasio Gini. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi yang ditujukan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah perbatasan juga perlu ditingkatkan.

Tingkat kemandirian fiskal pada regional Kalimantan cukup bervariasi sehingga membedakan kemampuan dalam mengalokasikan APBD kepada belanja yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Secara umum dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya kapasitas fiskal daerah juga semakin baik, tetapi fokus belanja masing-masing provinsi masih cukup berbeda. Pada Provinsi Kalimantan Barat belanja modal yang bersumber dari APBD sudah mendominasi dalam pembangunan infrastruktur dalam rangka untuk mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi regional. Disisi lain, Kalimantan Barat masih perlu meningkatkan belanja untuk kesehatan dan mengurangi belanja pegawai untuk dapat memperbaiki IPM. Pada provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah harus lebih fokus lagi dalam mengalokasikan APBD untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan serta perbaikan sarana kesehatan. Fokus dalam alokasi anggaran tersebut tercermin dari rasio belanja modal dan alokasi belanja untuk kesehatan dan pendidikan pada daerah Kalimantan Selatan yang masih rendah.

Pemerintah pada regional Kalimantan yang selama ini sangat bergantung pada sektor pertambangan perlu melakukan diversifikasi dengan mengalokasikan belanja APBD untuk mendorong sektor lainnya seperti pertanian, industri, jasa dan pariwisata. Untuk regional Kalimantan peran pertanian, kehutanan, perikanan masih dapat ditingkatkan. Kegiatan pada sektor tersebut dapat membantu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki gini rasio. Disisi lain pemerintah juga akan diuntungkan dari sumber pendapatan lain bagi APBD. Alokasi fiskal daerah perlu ditingkatkan untuk mengembangkan sektor tersebut ditambah dengan penyediaan infrastruktur. Pemerintah pusat dapat membantu melalui DAK yang ditujukan untuk pembangunan insfrastruktur dan sarana pendidikan dan kesehatan.

Regional Sulawesi

Semua provinsi pada regional Sulawesi mendapatkan dana dari pemerintah pusat lebih besar dari pada pendapatan yang disetorkan kepada pemerintah pusat. Besaran aliran kas negatif tersebut bervariatif dan tergantung pada kemajuan perekonomian daerah. Kontribusi paling besar diberikan oleh provinsi Sulawesi Selatan yang relatif lebih maju perekonomiannya dibandingkan dengan provinsi lainnya. Seluruh provinsi di Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak serta merta membuat daerah tersebut menjadi mandiri secara finansial, hal ini ditunjukkan dari analisis cash flow dimana semua provinsi di Sulawesi masih negatif. Untuk itu pengembangan sektor-sektor yang dapat berkontribusi terhadap penerimaan daerah dan nasional perlu terus dikembangkan.
Kecuali Sulawesi Utara, laju pertumbuhan ekonomi yang jauh diatas pertumbuhan nasional tidak diikuti dengan peningkatan IPM. Hal tersebut tampak dari nilai IPM seluruh wilayah di Sulawesi yang lebih rendah dari IPM nasional. Hasil pertumbuhan ekonomi belum dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara umum. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata

sudah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin di regional Sulawesi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, gini rasio juga mengalami peningkatan. Tampaknya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor yang membutuhkan tenaga kerja terdidik sehingga tidak berhasil memberikan pemerataan pendapatan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan gini rasio, regional Sulawesi perlu mengalokasikan dana APBD untuk mendorong pengembangan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang kurang terdidik seperti pertanian, jasa dan industri dasar.

Pada regional Sulawesi terdapat beberapa provinsi yang terkenal dengan pariwisata seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Sektor pariwisata tersebut perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu untuk mengalokasikan APBD dalam rangka pengembangan kawasan wisata tersebut. Pada provinsi tertentu yang memiliki sumber daya alam, perlu untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Pemerintah daerah dapat menciptakan berbagai event untuk mendorong sektor pariwisata.

Alokasi anggaran pada APBD regional Sulawesi pada umumnya masih lebih besar pada komponen belanja pegawai dan barang. Komponen belanja modal masih dalam porsi yang lebih kecil. Selain itu ketergantungan kepada pemerintah pusat juga masih tinggi. Pemerintah provinsi regional Sulawesi untuk semakin mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan. Rasio belanja untuk kesehatan pada beberapa provinsi masih rendah hal ini perlu ditindaklanjuti dengan alokasi belanja yang memadai untuk program kesehatan maupun pendidikan. Untuk menambah lapangan kerja dan peningkatan penerimaan pemerintah, sektor pertanian perlu mendapatkan peningkatan alokasi dari APBD disamping mengembangkan sektor perikanan darat dan laut. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan menuju kepelabuhan, sedangkan Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan berupa pembangunan pelabuhan.

Regional Bali Nusra

Kontribusi pendapatan regional Bali Nusra terhadap Pemerintah Pusat sangat minim karena pendapatan ketiga provinsi di kawasan ini lebih kecil dibandingkan dengan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat. Defisit terbesar terjadi di NTT sedangkan defisit terkecil terjadi di Bali. Minimnya kontribusi NTT sejalan dengan rendahnya PAD yang diterimanya dibandingkan dengan dua provinsi lain di Bali Nusra. Kondisi ini seharusnya menjadi pemikiran tersendiri bagi pihak-pihak terkait terutama pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Walaupun pada tahun 2016 PAD NTT mengalami kenaikan sebesar 14%, namun masih perlu digali sumber-sumber pendapatan daerah yang lain sehingga PAD dapat ditingkatkan. Disamping itu, perlu dilakukan peran aktif Pemerintah Daerah NTT dalam perekonomian seperti mengalokasikan belanja yang lebih banyak untuk mendukung sektor-sektor potensial yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap kenaikan PAD NTT.

Dari sisi capaian perekonomian, pertumbuhan ekonomi Bali Nusra telah tumbuh diatas pertumbuhan nasional yang berarti bahwa kegiatan perekonomiannya telah berada pada kondisi yang diharapkan oleh pemerintah daerahnya terutama pada sektor-sektor penyumbang PDRB terbesar seperti sektor pertanian termasuk kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun perlu mendapat perhatian khusus untuk sektor pengadaan listrik dan gas serta sektor jasa keuangan dan asuransi karena pada tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang paling besar untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan yang positif di Bali Nusra.

Capaian Bali dalam perekonomian berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya yakni tingkat kemiskinan Bali jauh lebih rendah dibanding NTB dan NTT. Begitu juga dengan capaian IPM bahwa IPM Bali sudah berada diatas IPM nasional sedangkan IPM NTB dan NTT masih berada dibawah IPM nasional. Ketertinggalan NTT dan NTB dalam hal kemiskinan juga sebanding dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang dilihat dari angka tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 lebih rendah di Bali pada tahun yang sama. Keterserapan tenaga kerja ini erat hubungannya dengan ketersediaan lapangan kerja di

masing-masing provinsi.
Bali sudah banyak menyediakan lapangan kerja di sektor pariwisata seperti perhotelan dan perdagangan. Keberhasilan Bali sebenarnya dapat dijadikan model bagi NTB dan NTT. Potensi pariwisata NTB dan NTT dapat dijadikan sebagai produk unggulan baru di kedua provinsi tersebut. Keindahan alam dan pantai yang banyak dikedua provinsi tersebut dapat menghasilkan pendapatan baru apabila dikelola dengan baik dan menerapkan manajemen pariwisata yang modern. Pemerintah perlu membenahi daerah-daerah potensial sebagai tujuan wisata dan menyediakan segala sarana dan prasarana yang mendukung pariwisata tersebut. Kemudian yang lebih penting saat ini adalah perlunya akses informasi dan promosi seluas-luasnya kepada wisatawan potensial secara global.

Walaupun kesejahteraan di Bali lebih baik dibandingkan NTB dan NTT, namun rasio Gini di daerah tersebut tertinggi di regional Bali Nusra pada tahun 2016, meskipun masih berada dibawah angka nasional. Hal ini memberikan sinyal bahwa distribusi pendapatan di regional Bali Nusra relatif lebih merata dibandingkan regional lain di Indonesia. Walaupun demikian, Pemerintah Daerah Bali masih perlu melakukan pengendalian terhadap pendapatan melalui program perpajakan.

Menyadari kendala fiskal yang dimiliki oleh NTB dan NTT, Pemerintah Pusat telah menyediakan dana transfer yang lebih besar kepada kedua provinsi ini. Hal ini menunjukkan adanya kemauan Pemerintah Pusat dalam membangun daerah-daerah tertinggal dan terpencil sesuai dengan Program Nawacita. Respon fiskal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat di Bali Nusra sebaiknya dapat diikuti oleh pemerintah daerah setempat yaitu dengan mendukung program Pemerintah Pusat dimaksud. Disamping itu, perlu dilakukan reviu terhadap pos-pos APBD untuk kedepannya agar terjadi perubahan yang lebih baik.

Regional Maluku Papua

Defisit *cash flow* terbesar tahun 2016 terdapat di regional Maluku Papua yaitu di Provinsi Papua sebesar Rp47 Triliun. Tingginya defisit pada regional ini tidak terlepas dari rendahnya PAD sehingga respon fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sangat besar untuk mengejar ketertinggalan yang dihadapi oleh regional Maluku Papua khususnya Provinsi Papua. Besarnya nominal respon fiskal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia bagian timur. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai program Pemerintah Pusat dan juga program-program pemerintah daerah di masing-masing provinsi pada regional Maluku Papua.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sangat beralasan karena rata-rata tingkat kemiskinan masyarakat Maluku Papua merupakan yang terbesar dibandingkan dengan regional lain di Indonesia, bahkan IPM terendah juga berada di regional ini dan masih jauh dibawah IPM nasional. Gini rasio di Maluku Papua dibawah Gini rasio nasional, berarti kemiskinan pada regional ini relatif merata dibandingkan dengan regional lain di Indonesia.

Pemerintah Pusat telah mengadakan pembenahan di Maluku Papua secara fisik dengan pembangunan infrastruktur terutama memperbaiki konektivitas antardaerah serta membangun sarana dan prasarana umum. Disamping itu, pembangunan secara mental kemasyarakatan juga dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini tergabung dalam program Nawacita yang menjadi program kerja Pemerintah Pusat.

Pembangunan pada regional Maluku Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat perlu memperoleh dukungan dari pemerintah setempat. Dukungan yang efektif akan terjadi apabila Pemerintah Pusat dapat menciptakan kerangka kerja yang baik dan rencana kerja yang saling bersinergi antara pusat dan daerah. Faktor –faktor kekhasan yang dimiliki oleh Maluku Papua dari segi geografis dan budaya perlu diperhatikan dengan baik dan dapat dijadikan sebagai pendorong terciptanya pembangunan dimaksud. Dengan demikian, potensi-potensi yang dimiliki Maluku Papua yang mengutamakan kearifan lokal dapat dijadikan modal dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomiannya.

BAB V

PENUTUP

https://eventsimg.blob.core.windows.net

BAB VI
Penutup

KESIMPULAN

1. Perekonomian Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang diindikasikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% yang semula 4,88% pada tahun 2015. Seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia pada tahun 2016, sebagian besar indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan dan hal tersebut merupakan cermin dari efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah, sebagai berikut:
   a. Persentase penduduk miskin yang turun per September 2016 dari 11,13% pada tahun 2015 menjadi 10,7% pada tahun 2016;
   b. TPT per Agustus 2016 cenderung turun dari 6,18% pada tahun 2015 menjadi 5,61% pada tahun 2016;
   c. IPM menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik dalam level kategori tinggi pada tahun 2016 sebesar 70,18 dari 69,55 pada tahun 2015; dan
   d. Rasio Gini menunjukkan penurunan pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,40 dari 0,41 pada tahun 2015.
2. Dari capaian indikator kesejahteraan tahun 2016 yang semakin membaik, data menunjukkan sebagai berikut:
   a. Persentase penduduk miskin sebagian besar berada di pedesaan dibanding dengan perkotaan dengan proporsi hampir 2 (dua) kali lipat.
   b. Level rasio Gini pada tahun 2016 masih tergolong tinggi walaupun dibanding tahun 2015 menunjukkan penurunan.
3. Penerimaan perpajakan yang besar menyebabkan provinsi-provinsi, yang memiliki kegiatan perdagangan dan industri jasa, dan kegiatan ekspor impor dengan skala masif seperti DKI Jakarta, Jawa Timur dan Banten, menjadi provinsi yang surplus dan memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara.

4. Alokasi pengeluaran negara sebagian besar masih dialokasikan untuk kawasan Jawa, Bali, dan Sumatera. Kondisi tersebut menunjukkan provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata, memiliki magnet untuk menarik alokasi anggaran belanja dalam jumlah besar dari Pemerintah Pusat. Namun dari sisi hubungan jumlah penduduk terhadap belanja pemerintah masih menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kawasan Indonesia timur yang tinggi meskipun jumlah penduduknya sedikit dan jarang.
5. Provinsi yang berada di regional Maluku Papua memiliki indikator kesejahteraan yang relatif rendah dibandingkan dengan regional lain dan indikator kesejahteraan secara nasional.
6. Ketergantungan fiskal pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi pada sebagian besar pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang mencatatkan 25 provinsi berada di rasio hanya s.d. 20%. Pemerintah merealisasikan PAD minimal 80% dari terget sehingga cukup efektif dalam rasio efektivitas PAD. Namun, dalam hal rasio pertumbuhan PAD masih terdapat 7 provinsi yang PAD tahun 2016 menurun dari tahun 2015.
7. Regional Jawa memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan regional lainnya dalam rentang waktu 2015-2016 di kisaran 35%. Hal ini mengindikasikan regional Jawa lebih memiliki kemampuan mengalokasikan belanja infrastruktur dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi regional. Demikian pula, dengan regional Bali Nusra yang didukung dengan sektor pariwisata yang terdapat pada Provinsi Bali dan sektor pertambangan yang terdapat pada Provinsi Nsua Tenggaran Barat, memiliki kemandirian keuangan daerah yang relatif tinggi dengan rasio berkisar 23%.
8. Dukungan percepatan pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari rasio belanja modal terhadap total belanja pada seluruh wilayah di Indonesia hanya berkisar 16% s.d. 35%. Di sisi yang lain, rasio belanja pegawai pada sebagian besar wilayah berada pada kisaran rasio 31% s.d. 50%. Penyerapan belanja daerah rata-rata berada di atas 86% dibanding pagu belanja per wilayah.

SARAN

1. Pengentasan kemiskinan perlu difokuskan di pedesaan. Penggunaan Dana Desa harus dapat menjamin pengurangan jumlah penduduk miskin di pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem monev yang handal untuk menjamin bahwa dana desa telah digunakan sesuai dengan tujuan, diantaranya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
2. Rasio Gini perlu terus ditekan turun di level sedang, yaitu di bawah 0,36. Tingginya rasio Gini berpotensi terjadinya kerawanan sosial. Salah satu upaya dalam menurunkan rasio Gini adalah melalui program pengentasan kemiskinan. Pemerintah perlu lebih memberdayagunakan masyarakat miskin dengan berbagai program yang dapat meningkatkan status masyarakat tersebut menjadi masyarakat sejahtera.
3. Memperhatikan indikator kesejahteraan dengan kondisi tingkat kemiskinan dan TPT yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi pada regional yang lain dan secara nasional, perlu kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada provinsi di regional Maluku Papua. Pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan guna memudahkan akses dalam bidang kesehatan dan pendidikan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di regional Maluku Papua.
4. Pengembangan potensi pariwisata pada provinsi di regional Maluku Papua perlu ditingkatkan dengan pertimbangan bahwa masih tersimpan keindahan alam yang besar pada provinsi di regional tersebut. Oleh karena itu, perlu dukungan promosi yang lebih gencar dan diikuti dengan kemudahan akses menuju destinasi wisata melalui peningkatan infrastruktur serta kesiapan SDM.
5. Sinkronisasi kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan khususnya bagi daerah yang memiliki indikator kesejahteraan yang rendah atau dibawah di level nasional. Langkah konkret atas sinkronisasi dapat dilakukan melalui pembahasan secara berkala mengenai kendala yang dihadapi daerah dalam memajukan daerah baik dari aspek pembangunan manusia maupun dari aspek ekonomi. Khusus untuk aspek ekonomi, Pemerintah Pusat perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan perdagangan, jasa, dan industri yang memberikan nilai tambah sehingga dapat mendorong perekonomian dan akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan perpajakan.
6. Pengelolaan APBD didorong untuk dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat perlu memberikan asistensi yang efektif dalam rangka perbaikan pengelolaan APBD. Selanjutnya, Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan daerah yang memiliki rasio belanja pegawai lebih dari 50% melalui pemberian reward dan punishment. Dengan demikian, daerah akan lebih terpacu dalam mengelola APBD yang lebih mandiri.
7. Daerah yang kaya dengan SDA perlu mencari sumber pendapatan baru selain SDA yang dapat menjadi sumber penerimaan baru. Daerah yang kaya dengan SDA seharusnya dapat menggunakan surplus dari penerimaan SDA pada masa lalu untuk mengembangkan sektor non SDA sebagai upaya memitigasi gejolak harga SDA dunia seperti minyak, gas alam, dan batu bara.
8. Pergeseran pengalokasian anggaran secara proporsional terhadap kawasan yang berpotensi untuk berkontribusi kepada penerimaan negara dalam jangka panjang perlu menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat.

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai II
Jl. Lapangan Banteng No.2-4 Jakarta 10710
www.djpbn.kemenkeu.go.id